

**PENGEMBANGAN KERJASAMA SUB-REGIONAL
BIMP-EAGA DI BIDANG EKOWISATA 1997-2007:
PERSPEKTIF INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Hubungan Internasional**

**DEVY PUTRI KUSSANTI
0706187893**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
KEKHUSUSAN EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL**

**JAKARTA
JUNI 2009**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar sesuai ketentuan penulisan ilmiah.

Nama : Devy Putri Kussanti

NPM : 0706187893

Tanda Tangan : 

Tanggal : 08 Juni 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Devy Putri Kussanti
NPM : 0706187893
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Konsentrasi : Ekonomi Politik Internasional
Judul Tesis : Pengembangan Kerjasama Sub-Regional
BIMP-EAGA di Bidang Ekowisata 1997-2007:
Perspektif Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Penguji Ahli : Dr. CPF Luhulima ()
Pembimbing : Dr. Adriana Elisabeth ()
Ketua Sidang : Dr. Makmur Keliat ()
Sekretaris Sidang : Dra. Dwi Ardhanariswari, M.Phil ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Juni 2009

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Anugerah-Nya yang begitu besar, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik pada program Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia.

Penyusunan tesis ini disesuaikan dengan hasil penelitian, baik melalui data primer maupun sekunder yang telah ditempuh penulis. Dalam menyusun tesis ini, penulis banyak sekali memperoleh bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan sumbangsinya agar tesis ini terselesaikan.

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu.

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati untuk tetap bersemangat.
2. Kedua orangtua, Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian begitu besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Adik tersayang, Kurnia Prayogi yang selalu memberi semangat dan menemani hingga larut serta Isti Ajeng, yang nakal.
3. Dr. Adriana Elisabeth, selaku dosen pembimbing. Terima kasih banyak atas bimbingan, dukungan dan masukannya.
4. Dr. CPF Luhulima, selaku penguji ahli.
5. Dr. Makmur Keliat, selaku Ketua Jurusan Pasca Hubungan Internasional Universitas Indonesia.
6. Dr. Dwi Ardhanariswari, M.Phil, selaku sekretaris sidang.
7. Tiur Rumondang, selaku Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.
8. Drs. Agus Priyono MM, selaku Kasubdit Keterpaduan Antar Wilayah, Direktorat Produk Pariwisata, Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

9. Teman-teman Departemen Luar Negeri Republik Indonesia serta teman-teman Departemen Komunikasi dan Informasi.
10. Keluarga besar S2 HI UI. Seluruh dosen dan staf TU yang telah membantu dan memberikan informasi penting.
11. Elsi Yulia, sahabat seperjuangan yang selalu memberi semangat.
12. Ibu Nila Qomariastuti dan Ibu Euis Sulistiawati, yang telah memberi masukan agar tetap konsisten dan optimis.
13. Dewi Biasane, Mbak Wiga, Taufik, Idil, Titan, Dewi Tri, Lucy, Mas Bismo, Dasta, Mas Din, dan semua rekan-rekan seperjuangan S2 HI UI.
14. Teman-teman S1 yang selalu mendukung dan memberi perhatian tanpa batas. Nining, Dee', Hendris, Adjie, Komar (atas novel-novelnya), Nyun, Lucky, Lana, dan semuanya.
15. Teman-teman angkatan 15 dan 16. Sarah, Rama, Lukman, Maisa, Boy, Bu Mona, dkk.
16. Para kolega, Aji Teguh, Arifatni, dan Dian. Untuk Bapak Bekti dan Mumun, serta seluruh teman-teman maupun keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun dalam hal perbaikan laporan ini sangat penulis harapkan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca lain pada umumnya.

Jakarta, 08 Juni 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devy Putri Kussanti
NPM : 0706187893
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ekonomi Politik Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pengembangan Kerjasama Sub-Regional BIMP-EAGA
di Bidang Ekowisata 1997-2007: Perspektif Indonesia**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Juni 2009

Yang menyatakan



(Devy Putri Kussanti)

ABSTRAK

Nama : Devy Putri Kussanti
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Pengembangan Kerjasama Sub-Regional BIMP-EAGA di Bidang Ekowisata 1997-2007: Perspektif Indonesia

Kerjasama BIMP-EAGA merupakan sebuah realisasi dari regionalisme dalam bentuk institusi regional/sub-regional untuk mencapai kepentingan ekonomi, khususnya perdagangan, investasi dan pariwisata. Salah satu keunggulan kerjasama sub-regional adalah faktor kedekatan geografis antar wilayah negara-negara anggotanya. Dalam konteks pengembangan ekowisata di dalam kerjasama BIMP-EAGA para pemangku kepentingan pun memanfaatkan faktor geografis ini, selain juga keunggulan yang lain berupa kekayaan sumber daya alam dan keindahan alam, keragaman budaya daerah, termasuk budaya tradisional masyarakat yang dimiliki oleh hampir semua negara anggota BIMP-EAGA.

Kerjasama sub-regional BIMP-EAGA di bidang pariwisata ingin mengembangkan konsep ekowisata atau *community based ecotourism* sebagai konsep yang memadukan sektor pariwisata, lingkungan hidup dan sektor ekonomi atau pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Keikutsertaan masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), maupun sebagai pemasok hasil-hasil pertanian serta kerajinan tradisional untuk keperluan para wisatawan, dan sebagainya. Sebagai fasilitator, pemerintah Indonesia berperan besar untuk menyediakan fasilitas utama maupun pendukung yang berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur fisik serta regulasi dan kebijakan di bidang pariwisata, khususnya ekowisata. Meskipun peran dan kontribusi pemerintah masih relatif terbatas, bahkan kebijakan ekowisata pun belum diformulasikan secara jelas.

Peran pihak swasta dalam mengelola ekowisata baik di Indonesia maupun di dalam kerjasama EAGA tidak atau belum dilakukan secara maksimal, selain karena kebijakan pemerintah yang tidak jelas, juga karena belum tersedianya infrastruktur yang memadai di kawasan ekowisata. Padahal ketersediaan infrastruktur yang baik menjadi daya tarik bagi pengusaha dan investor. Pengembangan kawasan ekowisata di Indonesia juga mendapat perhatian internasional berupa bantuan dari organisasi atau lembaga internasional maupun negara donor di daerah-daerah wisata, terutama berkaitan dengan tujuan dan program pelestarian alam. Selain keuntungan ekonomi, bagi Indonesia pengembangan ekowisata dapat membentuk citra politik Indonesia dalam upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup secara global terutama dalam meneegah atau menanggulangi dampak lebih buruk dari *global warming* dan *climate change*.

ABSTRACT

Name : Devy Putri Kussanti
Studies : International Relations
Title : The Development of Sub-Regional BIMP-EAGA Cooperation in the Ecotourism Field 1997-2007: Indonesian Perspective

BIMP-EAGA cooperation is a realization of regionalisme institutions in the form of regional / sub-regional to reach the interest of economy, particularly trade, investment and tourism. One of the benefits of sub-regional cooperation, including the BIMP-EAGA is among the factors of geographical proximity of countries members. In the context of the ecotourism development the stakeholders in this BIMP-EAGA cooperation can take the advantage of this geographical factors, in addition, they also can take the benefits in other forms such as wealth in natural resources, natural beauty, the diverse of culturals, including traditional community property which are owned by almost all of the members.

The sub-regional BIMP-EAGA cooperation in the tourism field wants to develop the ecotourism concept or community-based ecotourism as a blend between the tourism sector, the environment (friendly environment) and the economic sector, namely, the empowerment of the local communities as active actors of ecotourism. Participation of the local communities in the ecotourism management can increase their income and welfare through the development of small and medium enterprises (SMEs), as well as the results of traditional agriculture and handicrafts for the tourists, and so forth. As a facilitator, Indonesian government has a big role to provide the primary and supporting facilities associated with the availability of adequate physical infrastructure and regulatory and the policy in the tourism field, especially ecotourism. Although the role and contribution of the government is still relatively limited, even ecotourism policy is not formulated clearly yet.

The private party has a role in managing the ecotourism both in Indonesia and in the EAGA cooperation. However, the role can not be done properly because of government policies are not clear, also because the availability of adequate infrastructures in the ecotourism area are not provided. Infrastructure restrictiveness become obstacles in the development of ecotourism because the businessmen and investors are not interested. The development in the ecotourism field in Indonesia has big potential in the future because of the international attention which organized as assistance from international organizations or agencies and donor countries in the tourism areas, especially whom related to the nature preservation. The benefits of ecotourism of developmental in Indonesia is to create good image of Indonesian politic in terms of nature conservation property and the environment, especially in preventing or tackling the worse impact of global warming and climate change.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Sampul	
Halaman Pernyataan Orisinalitas	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	v
Abstrak.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Penelitian	1
1.2	Perumusan Masalah.....	10
1.3	Tujuan Penelitian	11
1.4	Manfaat Penelitian.....	12
1.5	Tinjauan Pustaka	12
1.6	Kerangka Teori.....	15
1.7	Asumsi.....	21
1.8	Model Analisis	22
1.9	Metodologi Penelitian	
	1.9.1 Metode Penelitian.....	24
	1.9.2 Sumber Data.....	24
	1.9.3 Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.10	Sistematika Penulisan	
	1.10.1 Pendahuluan	26
	1.10.2 BIMP-EAGA dan Konsep Ekowisata.....	26
	1.10.3 Implementasi Ekowisata EAGA di Indonesia.....	26
	1.10.4 Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Ekowisata di BIMP-EAGA.....	26
	1.10.5 Penutup	27

BAB II BIMP-EAGA DAN KONSEP EKOWISATA

2.1	Latar Belakang Pembentukan Kerjasama BIMP-EAGA	29
2.2	Perkembangan BIMP-EAGA.....	34
2.3	Konsep Ekowisata di BIMP-EAGA.....	40
	2.3.1 Wisata Alam dengan Ekowisata.....	45
	2.3.2 Ekowisata di BIMP-EAGA.....	48
2.4	Mekanisme Pengembangan Ekowisata di BIMP-EAGA	
	2.4.1 Pengembangan Pariwisata	58
	2.4.2 Pengembangan Manajemen Lingkungan.....	60

2.4.3 Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.....	60
2.4.4 Pengembangan Transportasi, Infrastruktur, dan ICT (<i>Information, Communication and Technology</i>)..	61

BAB III IMPLEMENTASI EKOWISATA EAGA DI INDONESIA

3.1 Pariwisata Indonesia.....	66
3.2 Ekowisata di Indonesia.....	73
3.2.1 Provinsi Kalimantan	78
3.2.2 Provinsi Sulawesi.....	83
3.3 Kesiapan Indonesia dalam Realisasi Ekowisata.....	84
3.4 Pelaku Ekowisata di Indonesia	
3.4.1 Pemerintah	86
3.4.2 Pihak Swasta.....	89
3.4.3 Masyarakat Lokal	92
3.4.4 Partner Donasi dan Investor di Indonesia	96
3.5 Hambatan dalam Realisasi Ekowisata di Indonesia.....	97

BAB IV KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KERJASAMA EKOWISATA DI BIMP-EAGA

4.1 Kepentingan Ekonomi.....	103
4.2 Kepentingan Politik.....	114
4.3 Kepentingan Lain dan Manfaat Ekowisata Bagi Indonesia	
4.3.1 Konservasi Alam.....	115
4.3.2 Pendidikan dan Penelitian.....	116
4.4 Peluang Investasi.....	118

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	124
5.2 Saran.....	127

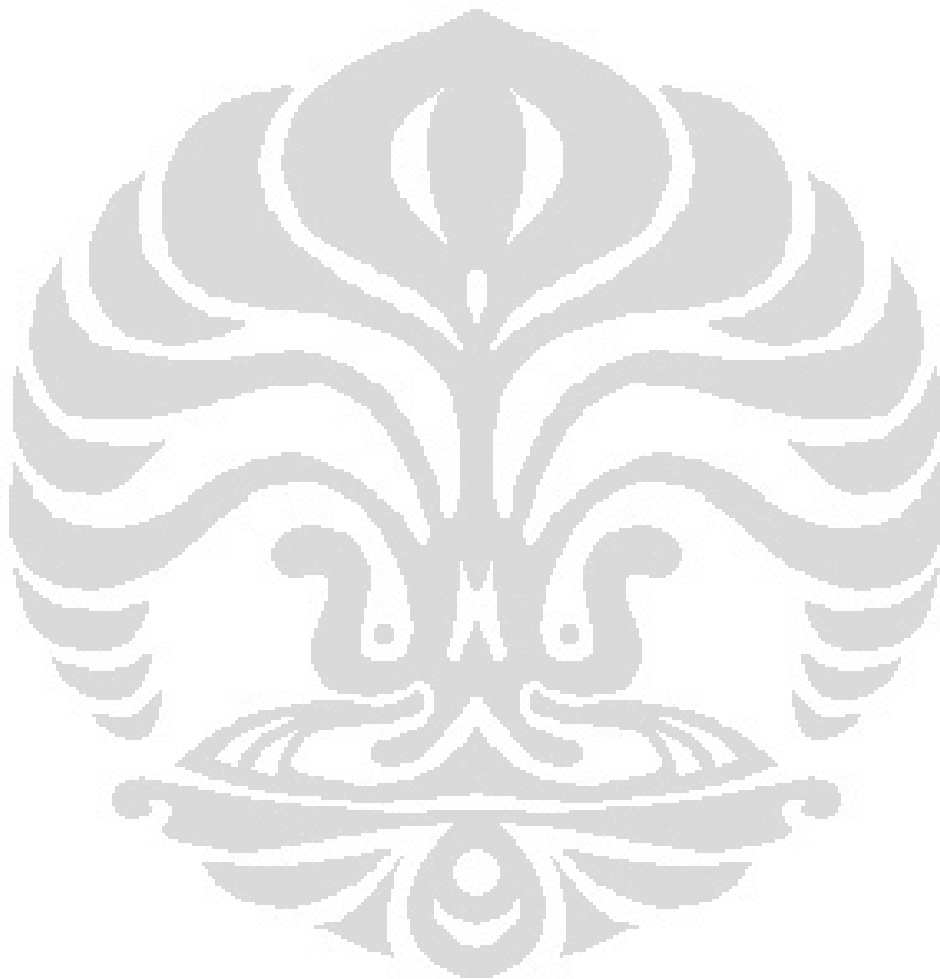
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Karakteristik Pasar di Kawasan Kerjasama BIMP-EAGA	58
Tabel 2.	Penerimaan Devisa Pariwisata Indonesia Dibandingkan dengan Ekspor Lainnya 2004-2007	67
Tabel 3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Rata-Rata Pengeluaran, Lama Tinggal dan Penerimaan Devisa 2000-2007	69
Tabel 4.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Menurut Rata-Rata Pengeluaran, Lama Tinggal dan Penerimaan Devisa 2003-2006	70
Tabel 5.	Peringkat <i>Travel and Tourism Competitiveness Index</i> (TTCI) dan Pusat Promosi Pariwisata	100
Tabel 6.	Tingkat Hunian Kamar Hotel di Beberapa Provinsi Kawasan Timur Indonesia 2001-2007	105
Tabel 7.	Kunjungan Wisatawan ke Indonesia berdasarkan Pintu Masuk Bandara 1997-2007	106
Tabel 8.	Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (miliar rupiah) 2005-2007	110
Tabel 9.	Persentase Populasi Masyarakat yang Berada di bawah Garis Kemiskinan Berdasarkan Provinsi (2005-2007)	112

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Proporsi Wilayah Kawasan Sulu Sulawesi Marine
Eco-System (SSME)..... 50
- Gambar 2. *Trends in International Arrivals* 1995-2006 (in Millions)..... 55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kawasan *Coral Triangle* dalam Kerjasama BIMP-EAGA
- Lampiran 2. Sektor-sektor Kerjasama Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
- Lampiran 3. Wilayah Kerjasama BIMP-EAGA
- Lampiran 4. Bagan Institusi Kerjasama Sub-Regional BIMP-EAGA
- Lampiran 5. Heart of Borneo Initiative Paper (HoB)
- Lampiran 6. *Visitor Arrivals by Mode Transport 2007*
- Lampiran 7. BIMP-EAGA Roadmap to Development 2006-2010
- Lampiran 8. BIMP-EAGA Action Plan 2006-2010
- Lampiran 9. Hasil Wawancara Langsung dengan Tiur Rumondang, Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA, pada 10 Maret 2009, pukul 13.00.
- Lampiran 10. Hasil Wawancara by email dengan Drs. Agus Priyono MM, Kasubdit Keterpaduan Antar Wilayah, Direktorat Produk Pariwisata, Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Depbudpar, pada 30 April 2009, pukul 14.00.
- Lampiran 11. Hasil Wawancara by email dengan Tiur Rumondang, Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub Regional, pada 27 Mei 2009, pukul 17.15.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi adalah kerjasama sub-regional atau disebut juga kerjasama ekonomi segitiga pertumbuhan (*growth triangle*). Kerjasama didasarkan pada komplementaritas antara kedekatan geografis dan sumber daya alam serta tenaga kerja yang dimiliki guna menghasilkan suatu sinergi yang berorientasi keluar (*export oriented* atau *outward looking*). Dalam pelaksanaan dan guna mencapai efektifitas kerjasama, diperlukan sinergi antara sektor swasta dan pemerintah sebagai penyedia infrastruktur dan sarana pendukung lainnya. Sebagaimana kerjasama regional pada umumnya, kerjasama ekonomi segitiga pertumbuhan juga menjalankan proses integrasi ekonomi.¹

Dapat dikatakan pula bahwa pembentukan kerjasama ekonomi sub-regional merupakan pembentukan kerjasama yang mempunyai nilai dan manfaat yang baik. Jika tidak, maka pengalaman dari pembentukan kerjasama yang pertama akan dibatasi untuk perkembangan selanjutnya. Keuntungan dari pembentukan kerjasama sub-regional dapat disebarkan ke bagian-bagian lain dari satu atau lebih negara peserta, seperti dari pengalaman di China Selatan dalam pembangunannya yang dimulai di empat zona ekonomi khusus dan kemudian meluas ke wilayah delta Sungai Mutiara (*Pearl River*), termasuk provinsi Guandong dan Fujian. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara terlihat dari adanya pengembangan sub-regional ekonomi SIJORI (Singapura-Johor-Riau), yang kemudian menjadi kerjasama IMS-GT (*Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle*), selanjutnya juga dibentuk kerjasama IMT-GT (*Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle*) dan BIMP-EAGA (*Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area*).²

¹Min Tang dan Myo Thant, *Growing Triangles: Conceptual and Operational Considerations* dalam artikelnya *Growth Triangle in Asia: A New Approach to Regional Economic Cooperation*, Oxford University Press, Hongkong, 1994, hlm. 2-3.

²Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri, *Sub-Wilayah Ekonomi ASEAN dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)*, Jakarta 1995-1996, hlm. 181.

Penelitian ini hanya akan membahas mengenai salah satu kerjasama sub-regional di kawasan ASEAN, yakni kerjasama BIMP-EAGA beserta salah satu pengembangan yang difokuskan dalam agenda kerjasama EAGA, yakni pariwisata dengan konsep *community-based ecotourism*. Kerjasama BIMP-EAGA merupakan inisiatif untuk mendukung kerjasama regional ASEAN, yaitu dengan mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi sub-regional yang diatur dalam salah satu pasal dari "*Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*", yang dihasilkan pada 1992 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IV ASEAN di Singapura. Pasal tersebut mengatur kerjasama ekonomi sub-regional di antara negara-negara anggota ASEAN maupun antara negara-negara anggota ASEAN dengan negara-negara non-ASEAN yang dipandang sebagai pelengkap atau pendukung keseluruhan kerjasama ekonomi ASEAN.³

Terbentuknya kerjasama EAGA (*East ASEAN Growth Area*) maupun kerjasama ekonomi sub-regional yang lain sangat erat kaitannya dengan berbagai kepentingan ekonomi masing-masing negara anggota, dimana kepentingan-kepentingan tersebut harus bersifat komplementaritas atau saling melengkapi, sehingga dimungkinkan percepatan arus masuk investasi, dengan mesin utamanya adalah sektor swasta.

Hal tersebut penting untuk meningkatkan sektor perdagangan (ekspor-impor). Meskipun prinsip komplementaritas pada dasarnya bermakna saling melengkapi dalam rangka memenuhi kebutuhan tiap atau antar negara, dalam kenyataannya, kerjasama atau relasi antar negara juga bersifat kompetitif. Dengan pengaruh globalisasi ekonomi, bahkan, persaingan antar negara cenderung terlalu bebas atau tidak terkendali. Akibatnya, relasi antar negara, termasuk prinsip saling melengkapi secara ekonomi tidak selalu berjalan simetris (atau asimetris), dimana tidak semua negara anggota suatu kerjasama ekonomi mendapatkan manfaat yang proporsional.

Sebagai pedoman untuk menjalankan moda kerjasama, para pencetus EAGA membentuk *BIMP-EAGA Roadmap to Development 2006-2010* disertai *BIMP-EAGA Action Plan 2006-2010*. Di dalam *Roadmap*, tujuan utama

³Tim Peneliti FISIP-Pusat Kajian Pasifik Universitas Hasanuddin, *Pemantapan Pertumbuhan BIMP East ASEAN Growth Area dalam Rangka Pembangunan Indonesia Bagian Timur*, Mappa Nasrud, 1995/1996, hlm. 33.

pembentukan kerjasama ialah untuk meningkatkan perdagangan, investasi dan pariwisata (*trade, investments and tourism*) di dalam dan keluar EAGA. Sedangkan targetnya ialah meningkatkan *intra-* dan *extra-* perdagangan antara EAGA mencapai 10% pada 2010, meningkatkan investasi dalam EAGA mencapai 10% pada 2010, dan yang terakhir meningkatkan laju pariwisata ke EAGA menjadi 10% pada 2010.⁴ Dalam *Roadmap to Development* juga dijelaskan mengenai tujuan strategis kerjasama EAGA, yakni:

1. Mempromosikan perdagangan, investasi dan pariwisata *intra-* dan *extra-* EAGA;
2. Mengkoordinasikan perencanaan dan implementasi dukungan infrastruktur;
3. Mengkoordinasikan manajemen sumber daya alam;
4. Memperkuat struktur institusi dan mekanisme BIMP-EAGA.⁵

Sedangkan dalam *Action Plan*, terpapar secara rinci mengenai langkah selanjutnya dari *Roadmap*. Maka dapat dikatakan juga bahwa *Action Plan* merupakan penjabaran dari konsep global *Roadmap*. *Action Plan* mengklasifikasikan pengembangan kerjasama ke dalam lima program, proyek maupun aktivitas yang diprioritaskan, yakni:

1. *Small and Medium Enterprise Development* (Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah);
2. *Sustainable Development and Environmental Management* (Pengembangan Perlindungan dan Manajemen Sumber Daya Alam);
3. *Tourism Development* (Pengembangan Pariwisata);
4. *Transport, Infrastructure and ICT (Information, Communication and Technology) Development* (Pengembangan Transportasi, Infrastruktur dan ICT-Informasi, Komunikasi dan Teknologi);
5. *Institutional Strengthening* (Memperkuat Institusi di dalam kerjasama);
6. *Implementation of Flagship Programs and Project* (Implementasi dari *Flagship* dan Proyek).⁶

⁴Based on BIMP-EAGA Roadmap to Development 2006-2010.

⁵Ibid.

Di dalam kerjasama EAGA, pemerintah berlaku sebagai fasilitator,⁷ kemudian secara bertahap pihak swasta dapat menjadi penggerak dan berperan secara lebih besar. Namun demikian, sampai saat ini, dapat dikatakan bahwa pihak swasta belum berperan secara optimal dalam kerjasama EAGA. Di antara ke-empat negara anggota kerjasama EAGA, peran pihak swasta di Filipina cenderung lebih besar di dalam kerjasama EAGA dibandingkan pihak swasta di negara-negara anggota yang lain. Tampaknya, Filipina dapat memanfaatkan kerjasama EAGA karena pembentukan kerjasama EAGA sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional Filipina, yakni untuk mendorong dan mempromosikan pembangunan wilayah Filipina Selatan menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan kerjasama BIMP-EAGA, para perencana (*planners*) EAGA sepakat untuk mengembangkan sektor-sektor yang potensial, seperti jasa transportasi dan perkapalan, pengembangan pariwisata bersama, perikanan, pertanian dan holtikultura, pengembangan dan eksplorasi energi, manajemen dan proteksi institusi hubungan jaringan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam, pelayanan jasa, investasi dan perdagangan.⁸

Pada saat ini, terdapat empat kelompok kerja (*working groups*) yang diprioritaskan untuk lebih dikembangkan dalam kerjasama BIMP-EAGA, yakni:⁹

- (1) Transportasi, Infrastruktur, Informasi, dan Teknologi Komunikasi;
- (2) Sumber Daya Alam;
- (3) Pariwisata;
- (4) Usaha Kecil dan Menengah.

⁶Based on BIMP-EAGA Action Plan 2006-2010.

⁷Pengembangan Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA, <http://penataanruang.pu.go.id/ta/Lapdul04/P5/PetaTematik/Bab2.pdf> (diunduh 09 Februari 2009).

⁸Adriana Elisabeth, dkk, *Segitiga Pertumbuhan di Kawasan Timur ASEAN*, PPW-LIPI, Jakarta, 2005, hlm. 52.

⁹Based on BIMP-EAGA Working Draft 3-*working draft of the comprehensive midterm review report for Roadmap to Development*, hlm. 1.

Pembentukan kelompok kerja tersebut disesuaikan dengan visi dan misi dari kerjasama BIMP-EAGA yang tercantum dalam *BIMP-EAGA Roadmap to Development 2006-2010*.¹⁰

Dalam perkembangannya, kerjasama EAGA mendorong sektor pariwisata yang sangat potensial, selain karena hampir semua negara anggota kerjasama EAGA memiliki keindahan alam yang sangat beragam, kekayaan budaya tradisional di tiap-tiap negara berpotensi untuk dikembangkan secara komersial. Oleh karena itu, kerjasama BIMP-EAGA bertujuan mengembangkan ekowisata (*eco-tourism*) khususnya *Community-Based Eco-Tourism* (CBET). Ide untuk mengembangkan ekowisata di lingkungan EAGA masih relatif baru dan keberhasilannya sangat bergantung pada keterlibatan dan peran berbagai pihak, yaitu pemerintah, pelaku bisnis hingga masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kerjasama ekowisata di EAGA berlandaskan pada konsep pariwisata yang berbasiskan alam dan masyarakat. Kalau pengembangan sektor ekowisata sungguh dapat diimplementasikan dengan memperhatikan aspek lingkungan, maka kontribusi sektor ekowisata sangat penting bagi upaya pelestarian alam sekaligus dapat mendatangkan keuntungan finansial bagi negara. Salah satu potensi besar dalam bidang ekowisata di EAGA adalah kawasan "*coral triangle*" yang berada di laut dan perairan Indonesia (bagian timur) dan Filipina (bagian selatan). Kawasan ini merupakan nilai tambah dan sangat menguntungkan bagi kerjasama EAGA, khususnya untuk mengembangkan ekowisata karena keindahan dan kekayaan biota lautnya. (Lampiran 1)

Konsep ekowisata dalam kerjasama BIMP-EAGA secara khusus diadopsi menjadi *flagship project* (proyek bersama antar negara anggota) sejak 2007, terutama sejak adanya beberapa konsep pengembangan pelestarian lingkungan yang disebut *Coral Triangle Initiative* (CTI) dan *Heart of Borneo* (HoB) yang mencakup kerjasama BIMP-EAGA. Inisiatif ini dicetuskan oleh BEBC (*BIMP-EAGA Business Council*) yang dimulai dengan penyelenggaraan *BIMP-EAGA*

¹⁰Tsur Rumondang, Paper Sekretariat Nasional dipresentasikan di Manila, 11 Juli 2007.

Community Based Eco-Tourism Conference, pada 30 Oktober - 1 November 2008 di Manado, Sulawesi Utara.¹¹

Dalam implementasinya, *Community-Based Eco-Tourism* (CBET) mengutamakan dan memadukan aspek lingkungan hidup, kekayaan alam serta pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan dan pengelolaan kekayaan alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Demikian pula menurut Janianton Damanik dan Helmut F. Weber, konsep ekowisata mengutamakan kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara melakukan konservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, maka muncullah konsep ekowisata.¹²

Wilayah laut Indonesia yang terluas di lingkungan EAGA sangat potensial dikembangkan menjadi wisata laut sesuai dengan konsep ekowisata. Begitu pula dengan beragam flora dan fauna yang ada di hutan tropis Indonesia, serta keragaman hasil kerajinan budaya masyarakat lokal. Seluruh potensi tersebut ditambah dengan keanekaragaman budaya dari berbagai daerah di Indonesia, merupakan daya tarik utama sekaligus menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menarik minat para wisatawan domestik maupun mancanegara. Integrasi ekonomi di tingkat sub-regional seperti BIMP-EAGA merupakan salah satu cara yang dipilih Indonesia untuk mengembangkan dan meningkatkan keuntungan dari bidang pariwisata, khususnya ekowisata.

Pembentukan kerjasama BIMP-EAGA bagi Indonesia merupakan suatu dorongan yang besar dalam meningkatkan sektor-sektor kerjasama yang berpotensi di kawasan timur Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia membentuk kerjasama intra Indonesia yakni KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu). Pembentukan KAPET melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 89 Tahun 1996 ialah untuk mendukung kerjasama ekonomi sub-regional BIMP-EAGA pada khususnya dan kawasan timur Indonesia pada umumnya. Tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan yang merata serta mengurangi kesenjangan

¹¹Hasil wawancara Devi Putri Kussanti dengan Tiur Rumondang, Sekretaris Nasional Kerjasama Ekonomi Sub Regional, Gedung BKPM Lt 5, 10 Maret 2009, pukul 13.00.

¹²Janianton Damanik dan Helmut F. Weber, *Perencanaan Ekowisata: dari teori ke aplikasi*, C.V Andi Offset, 2006, hlm 37.

pembangunan antara kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia.¹³ Pengembangan KAPET dilakukan berdasarkan potensi sumber daya alam masing-masing daerah, seperti hasil hutan dan perkebunan, pertambangan, perikanan, jasa dan industri pengolahan serta pariwisata. Namun pengembangan KAPET terkendala karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia serta infrastruktur yang jauh dari memadai.

Pembentukan KAPET, selain dimaksudkan untuk mendorong pengembangan potensi wilayah, juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Melalui pengembangan KAPET, Indonesia dapat memacu sektor-sektor kerjasama yang juga dikembangkan dalam EAGA. Dalam KAPET, terdapat beberapa pengembangan di sektor kerjasama seperti pertanian, perikanan, industri, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pariwisata, peternakan, agro industri dan infrastruktur. Dalam pengembangan pariwisata, potensi kawasan Indonesia timur yang kaya akan keindahan laut dan aneka jenis terumbu karang beserta flora dan faunanya menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang ditetapkan dalam KAPET.

(Lampiran 2)

Permasalahannya, akankah kerjasama BIMP-EAGA, khususnya pengembangan ekowisata bermanfaat bagi Indonesia? Bagaimana Indonesia dapat berperan dalam mengimplementasikan konsep ekowisata dalam kerjasama di lingkungan EAGA? Sejauhmana Indonesia dapat memenuhi kepentingan nasionalnya melalui kerjasama ekowisata di EAGA ini? Secara nasional, sudah seberapa jauh Indonesia menerapkan konsep ekowisata? Beberapa permasalahan tersebut menjadi faktor pendorong sekaligus alasan dalam pemilihan topik penelitian ini. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan konsep ekowisata, penulis ingin mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang sudah, sedang dan akan dilakukan Indonesia dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata, khususnya ekowisata. Di antara negara-negara EAGA, Indonesia satu-satunya negara yang memiliki wilayah terluas. Dengan demikian, pengembangan dan realisasi dalam

¹³Laporan Pendahuluan Pengembangan Bisnis Inti KAPET (Program Pengembangan Bisnis Inti dan Rencana Tindak), <http://penataanruang.pu.go.id/ta/Lapdul04/P5/BisnisIntiKAPET/Bab2.pdf> (diunduh 09 Februari 2009).

implementasi terhadap konsep ekowisata dapat memenuhi kepentingan ekonomi Indonesia, karena selama ini pariwisata menjadi sektor utama (non-migas) yang mampu mendatangkan keuntungan atau devisa terbesar bagi negara setelah sektor migas (minyak dan gas). (Libat tabel 2)

Kendala yang dihadapi Indonesia dalam upaya merealisasikan kerjasama pariwisata atau ekowisata adalah keterbatasan dan kurang memadainya transportasi, sehingga sulit mencapai daerah atau objek wisata alam yang biasanya berada jauh dari pusat kota. Selain itu, keberhasilan suatu daerah wisata ditentukan pula oleh panduan wisata yang memudahkan bagi pengunjung, khususnya dari luar negeri yang ingin berwisata di Indonesia. Namun karena promosi yang belum efektif, maka pariwisata di Indonesia kurang berkembang atau hanya berhasil mempromosikan daerah-daerah tertentu saja, seperti Bali, Lombok, Sulawesi (Toraja) dan Kalimantan. Kendala lain adalah sumber daya manusia Indonesia yang kurang terlatih, kurang terampil dan tidak profesional. Akibatnya, perdagangan jasa di sektor pariwisata tidak berkembang secara maksimal.

Khusus di bidang transportasi (darat, laut dan udara), terutama di wilayah Indonesia bagian timur (yang juga tercakup dalam kerjasama BIMP-EAGA), pengembangannya dapat dikatakan belum memadai. Hal senada dinyatakan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Koes Saporjadi bahwa “upaya menjual taman nasional, taman suaka alam, taman buru dan suaka margasatwa (yang seluruhnya dikelola oleh Departemen Perhutanan) terkendala fasilitas, sehubungan sulitnya kawasan-kawasan tersebut dijangkau dan masalah koordinasi dengan departemen yang lain”.¹⁴ Masih adanya kendala yang dihadapi oleh Indonesia, seperti minimnya informasi yang dibutuhkan dan masih kurang siapnya daerah dalam menjaring investor dengan banyaknya masalah di bidang peraturan dan infrastruktur, sehingga membuat wilayah kerjasama sulit dalam merealisasikan ekowisata. Tetapi di sisi lain, upaya yang telah dilakukan oleh para pemimpin negara anggota BIMP-EAGA dalam pertemuan pertamanya, pada 6 Oktober 2007 di sela-sela KTT ASEAN ialah membahas mengenai tugas dan

¹⁴TEMPO Interaktif Bisnis, 25 Agustus 2003, dalam artikel: Ekowisata Indonesia Terkendala Infrastruktur, <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/08/25/brk.20030825-19.id.html> (diunduh 02 April 2009).

tanggung jawab para menteri di bidang transportasi untuk segera mengadakan pertemuan. Pertemuan bertujuan untuk membahas masalah transportasi yang dihadapi oleh BIMP-EAGA. Meskipun perkembangan kerjasama EAGA dinilai cukup baik, hingga saat ini bidang transportasi belum terealisasi secara maksimal, padahal ketersediaan transportasi yang memadai merupakan faktor yang sangat krusial saat ini, terutama untuk mendukung pengembangan ekowisata.

Secara konseptual, pembangunan infrastruktur, implementasi ekowisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam dan kegiatan lainnya sebagai faktor pendukung untuk bidang pariwisata dalam kerjasama BIMP-EAGA tercantum dalam *BIMP-EAGA Action Plan 2006-2010*, yang merupakan langkah selanjutnya setelah *BIMP-EAGA Roadmap to Development 2006-2010*. Rujukan dari visi dan misi tertuang dalam *Roadmap to Development* dan rujukan dari *Roadmap* tertuang di *Action Plan*, sehingga dapat dikatakan bahwa *Action Plan* merupakan menjawab atas pertanyaan atau persoalan dalam implementasi *Roadmap*.¹⁵

Keterkaitan antara promosi perjalanan, transportasi dan infrastruktur, teknologi komunikasi serta kelestarian sumber daya alam merupakan satu paket perjalanan dalam ekowisata. Target dalam perkembangan dan penunjang sektor pariwisata ialah dengan melanjutkan operasionalisasi di bidang jasa udara, laut dan darat. Dengan proyek atau program yang dapat dioperasionalkan, maka biaya perjalanan (paket wisata) yang efisien dan tarif masuk yang rendah akan terpenuhi. Dengan kata lain, Indonesia memiliki kekurangan dalam bidang transportasi dan infrastruktur, sehingga bidang-bidang ini tidak mampu menunjang pengembangan ekowisata. Sedangkan dalam konteks sumber daya manusianya (sesuai dengan perkembangan kerjasama BIMP-EAGA), dengan adanya program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keahlian dan pengetahuan secara berkesinambungan berdasarkan standar kompetensi BIMP-EAGA maka pengembangan masyarakat terhadap kerjasama dan konsep ekowisata akan semakin maju. Kekurangan yang dimiliki oleh masyarakat lokal adalah terbatasnya pengetahuan dan pemahaman mengenai apa sebenarnya ekowisata dan bagaimana mengelola potensi yang ada untuk

¹⁵Hasil wawancara Devi Putri Kussanti dengan dengan Tnur Rumondang, *loc.cit*.

mengembangkan ekowisata. Untuk itu, pada tahap awal, masyarakat perlu diberdayakan dengan cara menambah pengetahuan dan pemahaman konsep ekowisata, sehingga mereka dapat merealisasikannya secara tepat.

Pada saat ini, meskipun pemahaman dan penilaian masyarakat setempat mengenai ekowisata masih relatif terbatas, masyarakat cukup paham mengenai aspek perlindungan terhadap kelestarian alam. Masyarakat setempat sudah seharusnya diberikan pemahaman yang cukup mendalam mengenai konsep ekowisata yang melibatkan mereka sebagai pelaku utama dan beberapa prosedur dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh para pelaku ekowisata lainnya. Hal tersebut diharapkan agar masyarakat dapat beradaptasi dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam memajukan sektor pariwisata Indonesia melalui implementasi ekowisata.¹⁶

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka dapat dikatakan bahwa keikutsertaan Indonesia sebagai negara yang menyetujui konsep ekowisata dan menjadi anggota kerjasama EAGA tidak berhasil dalam menyediakan penunjang ekowisata. Indonesia belum dapat menyediakan komponen utama dalam ekowisata yakni penyediaan infrastruktur, transportasi serta kebijakan guna di implementasikan dalam pengembangan pariwisatanya. Belum terpenuhinya komponen tersebut dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut; pertama, Indonesia belum secara optimal membangun faktor pendukung utama wilayah timur dengan meningkatkan infrastruktur dan transportasi. Kedua, meskipun pariwisata merupakan sumber penting bagi pemasukan devisa negara, Indonesia belum memiliki konsep ekowisata yang fokus, ataukah akan mengikuti konsep yang berkembang di dalam kerjasama EAGA. Ketiga, kurangnya kerjasama atau koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah dalam mendukung realisasi ekowisata. Ke-empat, sosialisasi terhadap masyarakat lokal, promosi dan program masih kurang efektif.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kerjasama BIMP-EAGA dapat merealisasikan konsep

¹⁶Ibid.

community-based ecotourism atau ekowisata sebagai konsep unggulan dalam pariwisata di kawasan timur ASEAN? Bagaimana Indonesia dapat ikut berperan serta dalam pengembangan sektor pariwisata yang mengimplementasikan konsep ekowisata? Apakah Indonesia dapat memenuhi mekanisme BIMP-EAGA dalam pengembangan ekowisata?

Dari perspektif global, kerjasama BIMP-EAGA yang berada dalam regional ASEAN merupakan upaya dalam mewujudkan konsep regionalisme kawasan. Pengembangan ekowisata merupakan wujud dari penanganan isu global, yakni isu lingkungan, apalagi dengan terjadinya pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim global (*global climate change*), maka negara-negara anggota EAGA ikut terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah, yaitu melalui pengembangan kerjasama ekowisata.

Fokus penelitian ini mengacu kepada kepentingan Indonesia terhadap realisasi konsep pariwisata menuju ekowisata dalam kerjasama BIMP-EAGA. Sesuai dengan tujuan pembentukan kerjasama EAGA, maka kepentingan nasional Indonesia yang utama adalah bagaimana Indonesia dapat meningkatkan perdagangan, investasi dan pariwisata melalui kerjasama ekonomi sub-regional ini. Meskipun dalam perjalanannya, tujuan kerjasama EAGA dihadapkan pada perkembangan politik dan keamanan di beberapa wilayah negara, seperti konflik bersenjata di Mindanao (Filipina Selatan) ataupun konflik komunal di beberapa daerah di Indonesia bagian timur, seperti Ambon, Poso dan Papua. Perkembangan di tingkat domestik ini jelas mengganggu pencapaian tujuan EAGA.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan secara umum untuk mengetahui keuntungan apa yang di dapatkan oleh Indonesia dari kerjasama BIMP-EAGA, khususnya dalam pengembangan di sektor pariwisata yang mengimplementasikan konsep *community-based ecotourism*. Selain itu, penelitian juga melihat kepentingan, kesiapan dan hambatan Indonesia dalam merealisasikan konsep tersebut ke dalam sektor pariwisatanya. Hal ini dikaitkan dengan upaya Indonesia dalam

mengembangkan potensi ekowisata dengan potensi alam yang dimiliki provinsi-provinsi di Indonesia yang tergabung dalam kerjasama BIMP-EAGA.

1.4 Manfaat Penelitian

Signifikansi atau manfaat utama dari penelitian ini bersifat akademis. Dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi civitas Ilmu Sosial dan Politik, khususnya dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional. Selanjutnya, hasil penelitian, baik berupa data, informasi dan kajian teoritis dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin menerapkan ataupun mengembangkan teori-teori Ilmu Sosial dan Politik pada umumnya dalam bentuk kajian ilmiah maupun studi kebijakan, khususnya untuk mengetahui perkembangan kerjasama BIMP-EAGA serta pengembangan *community-based ecotourism* atau ekowisata di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam "Segitiga Pertumbuhan di Kawasan Timur ASEAN" yang merupakan hasil penelitian dari PPW-LIPI, Jakarta 1996 dengan beranggotakan; Drs. Alfitra Salam (sebagai koordinator), Dra. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc, Dra. Hargyaning Tyas dan Drs. Afadlal, MA, pembahasan mengenai kerjasama sub-regional BIMP-EAGA diawali dengan profil dan potensi wilayah negara yang bekerjasama. Disertai dengan faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan kerjasama. Sebagai kerjasama sub-regional yang berada dalam kawasan timur ASEAN, BIMP-EAGA yang meliputi wilayah negara Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines yang memiliki konsep kerjasama dengan memanfaatkan kelebihan dan kekurangan dari negara masing-masing. Terbentuknya BIMP-EAGA hingga pada perspektif tiap negara anggota serta potensi daerah dalam kerjasama merupakan suatu pemahaman awal yang dapat dijadikan sebagai gambaran bahwa BIMP-EAGA merupakan suatu kerjasama sub-regional yang serius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif kerjasama tiap negara anggota dilandaskan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Keberadaan kerjasama merupakan suatu wadah dalam implementasi perkembangan perekonomian, politik, investasi, pariwisata dan

beberapa pengembangan yang kemudian muncul seiring sejalan dengan kemajuan kerjasama. Hal lain yang dijelaskan dalam hasil penelitian (yang diimplementasikan menjadi buku tersebut) ialah latar belakang mengenai pembentukan kerjasama yang didasarkan pada kedekatan geografis antara negara anggota.¹⁷

Tujuan pembentukan BIMP-EAGA ialah untuk meningkatkan perdagangan, pariwisata dan investasi *intra-* dan *extra-* EAGA melalui tiga upaya yakni: (1) Perpindahan manusia, barang dan jasa, (2) Meningkatkan koordinasi di bidang infrastruktur dan sumber daya alam, (3) Meningkatkan komplementasi ekonomi. Dalam menjalankan roda kerjasamanya, pihak swasta memberikan kontribusi yang cukup besar melalui BEBC (*BIMP-EAGA Business Council*). Dalam mengembangkan kerjasama, tiap negara anggota memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi di sektor yang berbeda, oleh karena itu dibutuhkan wadah untuk mengkoordinasikan potensi tersebut. Melalui *working group*, BIMP-EAGA terstruktur dalam garis koordinasi yang rapi dan sesuai.¹⁸

Sedangkan dalam "ASEAN Menuju Postur Baru", yang ditulis oleh C.P.F. Luhulima, pembahasan mengenai BIMP-EAGA yang merupakan salah satu dari kerjasama sub-regional dalam ASEAN diawali dengan pembentukan kerjasama sub-regional atau segitiga pertumbuhan, hambatan yang dihadapi, pembentukan kerjasama sub-regional pertama (SIJORI) yang merupakan pendorong dari terbentuknya kerjasama sub-regional lainnya.

¹⁷Lihat juga "*Integrative Report of Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)*" yang dipublikasikan oleh *Asian Development Bank (ADB)* pada Desember 1996, studi dan pembahasan mengenai kerjasama BIMP-EAGA diawali dengan latar belakang pembentukan kerjasama dan profil dari potensi kerjasama BIMP-EAGA. Kemudian disampaikan mengenai peluang investasi dalam kawasan kerjasama EAGA dan strategi pembangunan bidang-bidang kerjasama yang merupakan tujuan dari terbentuknya EAGA. Dalam laporan integratif tersebut, ADB juga membahas mengenai implementasi dari strategi pembangunan EAGA, yang terbagi ke dalam tiga periode perencanaan (*term of plan*), dimana dalam tiap periode terdapat proporsi yang sudah ditetapkan untuk ditindaklanjuti perkembangannya sesuai dengan bidang kerjasama dalam BIMP-EAGA, yakni perdagangan, investasi dan pariwisata. Sebagai kerjasama sub-regional yang berada dalam kawasan timur ASEAN, BIMP-EAGA yang meliputi wilayah negara Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina, memiliki konsep kerjasama dengan memanfaatkan kelebihan dan kekurangan dari negara masing-masing. Terbentuknya BIMP-EAGA hingga pada perspektif tiap negara anggota serta potensi daerah dalam kerjasama merupakan suatu pemahaman awal yang dapat dijadikan sebagai gambaran bahwa BIMP-EAGA merupakan suatu kerjasama sub-regional yang serius.

¹⁸<http://www.bimpbc.org/eagaimplement.asp#implement> (diunduh, 06 Juli 2009).

Sebagai salah satu sektor kerjasama yang diprioritaskan, pariwisata BIMP-EAGA dengan mengangkat konsep *community-based ecotourism* memberikan kontribusi besar dalam upaya pelestarian lingkungan disertai meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Janianton Damanik dan Helmut F. Weber, dalam "Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi" menjelaskan mengenai suatu perencanaan dalam menyusun konsep ekowisata yang berdasarkan analisa SWOT (*Strong, Weakness, Opportunity, and Threat*). Pada awal isi buku, dijelaskan secara global mengenai pariwisata, diawali dengan hubungan antara permintaan dan penawaran wisata, pasar dan kelembagaan wisata serta pelaku wisata. Janianton dan Helmut juga memaparkan mengenai, keragaman potensi ekowisata di berbagai daerah dan karakteristik ekowisata yang merupakan hal penting dalam merencanakan konsep ekowisata. Buku ini menyimpulkan bahwa konsep ekowisata dapat diaplikasikan dan dikembangkan sebagai pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam upaya untuk melestarikan kekayaan flora dan fauna beserta lingkungan hidup. Melalui metode perencanaan ekowisata yang tepat maka implementasi ekowisata sebagai landasan dalam mengembangkan kerjasama lainnya (perekonomian, sosial, dan budaya) dapat berjalan secara sistematis.

Melalui pengembangan pariwisata menuju *community-based ecotourism*, Indonesia sebagai salah satu negara anggota, memiliki kepentingan yang mendasari akan adanya peningkatan ekonomi dan investasi yang datang ke Indonesia. Dalam implementasinya, Indonesia melakukan serangkaian peningkatan dan promosi di bidang pariwisata dengan bekerjasama di bidang infrastruktur, transportasi dan telekomunikasi (untuk meningkatkan kualitas jaringan pariwisata, akses ke tempat wisata dan komunikasi) agar kedepannya kerjasama di bidang lain dapat terjalin dengan mudah. Selain kepentingan nasional, dalam meningkatkan perekonomian, investasi dan perlindungan terhadap kekayaan alam hayatinya, Indonesia memiliki kepentingan global seperti bertujuan untuk memaksimalkan keseimbangan ekologis serta memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

1.6 Kerangka Teori

Regionalisme kawasan Asia Tenggara tumbuh seiring dengan kemajuan perekonomian dunia. Hal tersebut membawa ke suatu titik dimana kemunculan institusi sebagai wadah kerjasama sangat dibutuhkan. Kerjasama antar institusi internasional maupun peran negara secara regional harus bersifat pro-aktif dalam rangka pemberdayaan kawasannya.¹⁹

Paham liberal-institusionalis berpendapat bahwa permasalahan dalam sistem internasional dapat diatasi melalui pembentukan institusi bagi kerjasama internasional. Kerjasama dimungkinkan melalui peran mediator dalam institusi internasional dan saling ketergantungan secara ekonomi.²⁰ Kerjasama regional ASEAN merupakan wujud dari mekanisme konsep liberal-institusionalis, yang memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan perekonomian antar negara dalam satu kawasan. Institusi kerjasama terbentuk karena memiliki kesamaan dalam hal kepentingan.

Hal tersebut erat kaitannya dengan empat asumsi dasar dari pandangan liberal-institusionalis menurut Keohane, yakni:

1. Liberal-institusionalis mengakui keberadaan aktor negara dan non-negara. Negara merupakan perwakilan resmi yang memiliki legitimasi dari masyarakat. Meskipun menekankan pentingnya aktor non-negara, namun aktor non-negara berada di bawah aktor negara;
2. Bagi liberal-institusionalis, struktur sistem internasional berada dalam kondisi yang anarkis. Kondisi sistem internasional yang anarkis dapat diatasi dengan pembentukan institusi internasional yang berperan sebagai mediator;
3. Pada prosesnya, interaksi pada tingkat regional dan global semakin meningkat sehingga akan berkembang kearah integrasi;

¹⁹Pro-aktif dimaksudkan kesediaan dan keaktifan negara dalam melakukan kerjasama dengan negara lain melalui sebuah institusi, baik secara internasional, regional ataupun sub-regional. Keohane dalam *International Institutions: Two Approaches* (1998) mengatakan bahwa institusi internasional mempunyai potensi untuk memfasilitasi kerjasama dan tanpa institusi akan sedikit sekali terjalin kerjasama. Tanpa mengetahui bagaimana institusi harus berjalan maka sulit untuk menjalankan kerjasama, oleh karena itulah butuh pro-aktif dari negara sebagai aktor dalam bekerjasama.

²⁰David N. Balaam dan Michael Vesseth, *Introduction to International Political Economy*, New Jersey: Prentice Hall, 1996, hlm. 241.

4. Liberal-institusionalis berpendapat bahwa dunia saat ini bukan lagi *zero sum game*, yakni dengan satu aktor menang dan aktor yang lainnya kalah. Namun berupa *variable sum game*, yakni melalui kerjasama maka semua aktor akan mendapatkan keuntungan bersama.²¹

Dalam konteks ASEAN, sesuai dengan *Agenda for Greater Economic Integration*, pembentukan kerjasama ekonomi sub-regional didasarkan pada prinsip keterbukaan dalam pembangunan wilayah (*open regionalism*) dan bukan pada pembentukan blok kawasan yang tertutup (*building block*). Pelaksanaan dan tujuan dari pembentukan dilakukan untuk mengambil manfaat dan saling melengkapi dalam mempercepat pembangunan ekonomi melalui peningkatan arus investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam dan manusia, serta pengembangan industri. Sedangkan tujuan utama pembentukan sub-wilayah pertumbuhan ialah untuk memadukan kekuatan dan potensi tiap-tiap wilayah yang berbatasan sehingga menjadi wilayah pertumbuhan yang dinamis.²²

Konsep kerjasama sub-regional (segitiga pertumbuhan) dikawasan Asia Tenggara mulai dikenal sejak PM Singapura Goh Chok Tong melontarkan gagasan kerjasama SIJORI (sekarang IMS-GT) pada 1989. Pembentukan kerjasama ini diharapkan dapat menjadi alternatif ataupun terobosan dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN yang sering disebut dengan regionalisme ekonomi.²³ Sebagai alternatif kelanjutan dari konsep regionalisme ASEAN yang menginginkan keharmonisan dalam menjalin hubungan perekonomian, maka pembentukan integrasi sub-kawasan sebagai pengembangan kerjasama ekonomi merupakan gagasan yang tepat.

Pandangan lainnya menyatakan bahwa konsep kerjasama sub-regional selain terbentuk karena kedekatan geografis negara-negara anggotanya, juga karena keunggulan komparatif yang berbeda, yang menjadi keuntungan untuk membentuk suatu pusat pertumbuhan ekonomi sub-wilayah dengan pasar sebagai

²¹Robert. O. Keohane, *International Relations and State Power*, Westview Press, 1989, hlm. 9.

²²Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta, 2007, hlm. 77.

²³Adriana Elisabeth, dkk, *op.cit*, hlm. 36.

penggerak, dan pemerintah sebagai pendorong serta fasilitator.²⁴ Implementasi konsep kerjasama sub-regional di kawasan ASEAN ialah untuk mempercepat proses integrasi guna memperoleh pembangunan dan kemajuan yang merata di daerah yang tertinggal secara ekonomi dalam proses kerjasama, baik secara internasional maupun regional. Namun cakupan wilayah kerjasama yang relatif luas membuat wilayah atau daerah yang tertinggal tetap tidak terlihat maju, meskipun memiliki potensi besar. Dengan konsep kerjasama sub-regional diharapkan wilayah atau daerah yang berpotensi secara ekonomi dapat mengembangkan kreatifitas dan kemampuannya melalui kerjasama di berbagai bidang.

Untuk mewujudkan kerjasama sub-regional dibutuhkan faktor-faktor kunci yang dapat dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Eksistensi komplementaritas ekonomi. Perbedaan dalam karunia faktor seperti sumber daya alam dan manusia mendorong terbentuknya kerjasama sub-regional. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan dan dijadikan katalisator sebagai kekuatan untuk mendorong integrasi kawasan;
2. Komitmen politik. Pemerintah sebagai motivator dan fasilitator untuk menjamin serta melindungi pihak swasta diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam kerjasama sub-regional. Adapun hal yang dilakukan oleh pemerintah ialah:
 - a. Menjamin dan melindungi investor dari risiko politik;
 - b. Kerjasama untuk memudahkan arus barang, manusia dan modal lintas-batas;
 - c. Kerjasama dalam pengembangan infrastruktur, terutama dalam pengembangan transportasi dan telekomunikasi;
 - d. Mengelola ketidakpuasan politik yang muncul dari pertumbuhan yang cepat dan kemungkinan inflasi di daerah dukungan;
 - e. Promosi investasi di kerjasama sub-regional.

²⁴C.P.F. Luhulima, *ASEAN Menuju Pastur Baru*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1997, hlm. 152.

3. Integrasi investasi. Dalam hal ini, pihak swasta mendorong integrasi ekonomi melalui investasi di dalam kerjasama sub-regional.²⁵

Sebagai salah satu kerjasama sub-regional di kawasan ASEAN, BIMP-EAGA terdiri dari beberapa wilayah timur ASEAN dan merupakan kerjasama yang bersifat terbuka dan fleksibel. Keterlibatan pihak swasta sebagai pelaku utama dalam seluruh pengembangan sektor kerjasama diharapkan dapat berjalan seiring dengan pemerintah yang memiliki tugas serta tanggung jawab dalam memfasilitasi infrastruktur dan kebijakan untuk mendukung dan menanggapi kebutuhan dari pembangunan di kawasan kerjasama.²⁶

Selain itu, pembentukan BIMP-EAGA didasari oleh keterbelakangan kawasan kerjasama (kecuali Brunei Darussalam). Sabah dan Sarawak merupakan negara bagian di Malaysia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah dan memiliki pendapatan per kapita paling rendah. Provinsi-provinsi di Mindanao merupakan daerah yang secara ekonomi dan politik dikucilkan oleh pemerintah pusat serta kawasan ini selalu ditandai dengan gejolak politik, seperti pemberontakan daerah. Keterbelakangan Indonesia sebagian bersumber dari struktur perekonomian yang masih amat tergantung pada sektor pertanian. Brunei Darussalam, kendatipun termasuk negara kaya, tetapi miskin dalam sumber daya manusia.²⁷

BIMP-EAGA yang memiliki *Roadmap to Development* dan *Action Plan* 2006-2010 sebagai acuan dalam menjalankan kerjasama, memfokuskan pengembangan perdagangan, investasi dan pariwisata sebagai sektor unggulan. Dalam *Roadmap* BIMP-EAGA, salah satu sektor kerjasama yang dikembangkan adalah sektor pariwisata dengan konsep *community-based ecotourism* atau ekowisata. Hal ini dikarenakan potensi wilayah kerjasama EAGA memiliki potensi besar untuk dikembangkan dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam.

²⁵ Ibid, hlm. 114.

²⁶ East Asia Analytical Unit, Department of Foreign Affairs and Trade Parkes Act 2600, *Growth Triangle of South East Asia*, Commonwealth of Australia, 1995, hlm. 68-69.

²⁷ Adriana Elisabeth, dkk, *op.cit*, hlm. 12.

Secara global, konsep ekowisata dalam kerjasama BIMP-EAGA merupakan suatu upaya guna menuju integrasi kawasan melalui pengembangan sektor pariwisata. Sebagai salah satu dari anggota kerjasama sub-regional BIMP-EAGA, Indonesia sudah tentu memiliki beberapa kepentingan yang didasarkan pada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, konsep atau kegiatan pariwisata berbasis alam atau ekowisata didasarkan pada wisata alam dan ruang terbuka. Dengan kata lain, ekowisata adalah perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke wilayah-wilayah alami dengan melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal.²⁸ Konsep dan batasan ekowisata dapat dipahami sebagai identitas khusus para wisatawan yang menganut norma-norma atau aturan untuk menghargai dan memelihara alam.

Pengertian lainnya mengenai ekowisata yakni, ekowisata merupakan gabungan dari ekologi dengan pariwisata, yang kemudian diterjemahkan menjadi wisata ekologi yang mempunyai pengertian bertanggung jawab atas perjalanan wisata ke area alam yang mampu memelihara lingkungan serta makhluk hidup di sekitarnya untuk tetap hidup aman dan nyaman dalam lingkungannya.²⁹

Menurut WWF, *community-based ecotourism* merupakan suatu konsep wisata alam yang bertanggung jawab dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pariwisata selain *suppliers* dan *consumers*. Masyarakat lokal diharapkan dapat memegang peranan dan terlibat, serta mengembangkan dan mengelola dalam proses ekowisata, yang kemudian sebagian dari keuntungannya akan masuk ke dalam komunitas mereka (*social dimension*). Melalui penerapan *community-based ecotourism* diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Konsep ekowisata diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari *nature tourism*, dimana konteks wisata alam didefinisikan sebagai kegiatan berwisata sekaligus merealisasikan tanggung jawab pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat, bukan hanya mengeksploitasi alam sebagai daerah tujuan dan kegiatan berwisata.

²⁸Kerg Linberg and Donald E. Hawking, *Ekoturisme: Petunjuk Untuk Pengelolaannya*, Yayasan Alami, Jakarta, 1995, hlm. 8.

²⁹Gina Sugiana dalam *Konservasi Alam Melalui Elaborasi Ekowisata*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0203/15/080> (diunduh 25 Maret 2009).

Sedangkan *United Nations Environment Programme (UNEP)* dan *World Tourism Organisation* mengidentifikasi karakteristik ekowisata sebagai berikut:

- (1) Selain melibatkan alam, konsep ekowisata juga melibatkan kebudayaan asli atau budaya masyarakat pribumi sekitar kawasan ekowisata. Hal ini ditujukan untuk menambah nilai pengalaman pengunjung;
- (2) Dalam menawarkan paket wisata yang berbasis ekowisata, diharuskan adanya unsur pendidikan dan interpretasi terhadap unsur-unsur ekowisata;
- (3) Secara umum, diharapkan organisasi kecil yang berasal dari masyarakat sekitar lebih dikembangkan dalam hal melakukan usaha secara spesialisasi dan bersifat lokal (agar masyarakat lokal dapat mengoperasikan ekowisata);
- (4) Meminimalisasi dampak negatif terhadap alam dan lingkungan sosial-budaya;
- (5) Mendukung konsep perlindungan kawasan alam melalui keuntungan dari pendapatan yang diperoleh dari kawasan alam;
- (6) Menghasilkan pendapatan alternatif dan membuka lahan kerja bagi masyarakat lokal;
- (7) Meningkatkan kepedulian negara dan pengunjung terhadap konservasi.³⁰

Ekowisata bukanlah hanya sebagai satu corak kegiatan pariwisata khusus, melainkan suatu konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian alam. Untuk itu, pengembangan ekowisata harus dapat meningkatkan kualitas hubungan antara manusia dengan alam, meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, dan menjaga kualitas lingkungan. Oleh karena itu, di dalam pengembangan ekowisata selanjutnya, terutama di kawasan-kawasan yang dilindungi, pengelolaan kawasan

³⁰Based on WWF International article, July 2001, *Guidelines for Community-Based Ecotourism Development*, <http://assets.panda.org/downloads/guidelinesen.pdf> hlm. 3, (diunduh 27 April 2009).

wisata alam harus benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.³¹

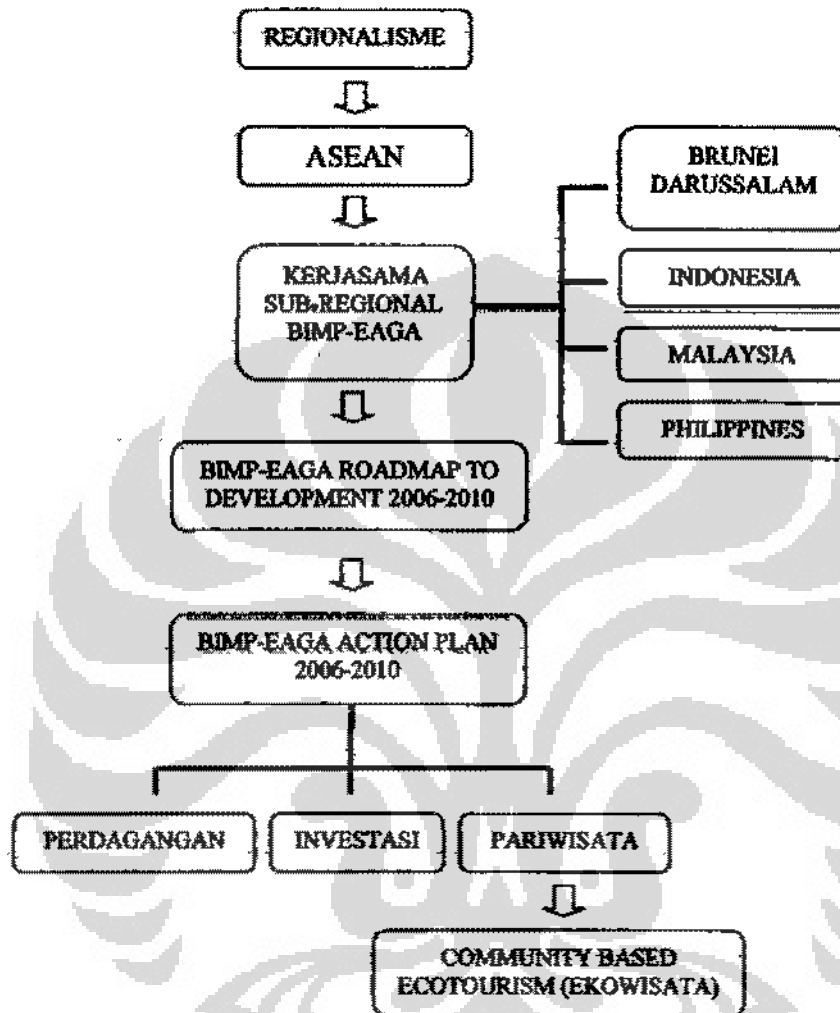
1.7 Asumsi

Berdasarkan sumber-sumber dan kajian yang ada, maka penelitian ini mengasumsikan bahwa:

- a. Kerjasama sub-regional BIMP-EAGA dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui konsep *community-based ecotourism* merupakan suatu gagasan untuk meningkatkan perekonomian negara beserta masyarakat lokal yang berada di sekitar wilayah kawasan ekowisata.
- b. Tindakan pemerintah Indonesia dalam kerjasama ekowisata di BIMP-EAGA merupakan suatu bentuk kepentingan nasional Indonesia, yakni untuk mengembangkan dan mendapatkan manfaat yang maksimal dari sektor pariwisata dengan meningkatkan investasi. Apabila Indonesia dapat mengembangkan ekowisata secara tepat, maka Indonesia akan mendominasi sektor pariwisata kawasan BIMP-EAGA.

³¹Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia; Jakarta, 2008, hlm. 387.
Universitas Indonesia

1.8 Model Analisis



Rasa kebersamaan dan saling ketergantungan dalam satu kawasan, serta terdapatnya keragaman dalam mencapai kepentingan nasional masing-masing negara telah mendorong munculnya integrasi ekonomi secara regional, yaitu dengan terbentuknya kerjasama ASEAN (*Association of South East Asia Nation*) pada 1967. Pembentukan ASEAN merupakan perwujudan dari regionalisme kawasan Asia Tenggara yang menginginkan pemulihan hubungan-hubungan

intra-regional dan menyusunnya dalam struktur suatu tata Asia Tenggara berdasarkan prinsip saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai.³²

Kerjasama ASEAN yang lebih bersifat politik dan keamanan serta negara sebagai anggota kerjasama, membuat ASEAN kurang mengalami kemajuan menuju kawasan yang terintegrasi secara ekonomi. Dengan pengalaman bahwa kerjasama di tingkat regional ASEAN yang kurang atau tidak berkembang efektif secara ekonomi, maka kerjasama dalam lingkup wilayah yang lebih kecil atau di tingkat sub-regional muncul menjadi alternatif kerjasama ekonomi. Salah satu kerjasama sub regional yang berada dalam kawasan ASEAN ialah BIMP-EAGA, selain dua bentuk kerjasama sub-regional yang sudah lebih dulu terbentuk atau yang dikenal dengan kerjasama segitiga pertumbuhan (*growth triangle*), yakni kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Singapura atau IMS-GT, dan kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Thailand atau IMT-GT).

Melalui BIMP-EAGA, pengembangan kerjasama terwadahi dalam *BIMP-EAGA Roadmap to Development 2006-2010*, dengan menetapkan *development goal* dan *strategic objectives* dalam kerjasama. Untuk memfokuskan perkembangan dalam setiap sektor kerjasama, BIMP-EAGA merancang *Action Plan 2006-2010* yang membahas mengenai program, proyek atau aktivitas yang diprioritaskan, target output, indikator kemajuan, badan-badan pelaksana dan periode waktu aktivitas.

Dalam *action plan* pengembangan sektor kerjasama terfokus ke dalam tiga sektor, yakni; perdagangan, investasi dan pariwisata. Melalui pengembangan sektor pariwisata, kawasan kerjasama EAGA melirik potensi kekayaan dan keanekaragaman sumber daya hayati, kesadaran akan kelestarian alam serta pemberdayaan masyarakat setempat untuk menuju kesejahteraan melalui pengembangan konsep *community-based ecotourism* atau ekowisata. Sebagai salah satu dari anggota kerjasama, Indonesia turut berperan serta dalam merealisasikan ekowisata di BIMP-EAGA dan mengaplikasikan konsep tersebut ke dalam sektor pariwisata Indonesia. Hal ini didukung pula oleh potensi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Indonesia.

³²C.P.F. Luhulima, *op.cit*, hlm. 5.

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Metode Penelitian

Tesis yang berjudul "Pengembangan Kerjasama Sub-Regional BIMP-EAGA di Bidang Ekowisata 1997-2007: Perspektif Indonesia", menggunakan metode penelitian analisa-deskriptif. Penelitian ini menganalisa berdasarkan sumber-sumber bacaan dan hasil wawancara dengan para narasumber yang kompeten di bidang mereka masing-masing. Kemudian penelitian atau tesis ini memaparkan secara rinci dan jelas mengenai keadaan yang sebenarnya berkaitan dengan sektor pariwisata atau ekowisata di Indonesia, dan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pariwisata di Indonesia secara khusus dan di tingkat EAGA secara umum.

1.9.2 Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menunjang analisa dan hasil penelitian, maka sumber data diperoleh dari beberapa narasumber sebagai sumber yang kompeten untuk diwawancarai serta menjadikan studi dokumen sebagai sumber utama yang dapat memberikan berbagai informasi terkait dengan topik penelitian atau tesis ini.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Kemudian data diolah, dianalisis dan dirumuskan menjadi rekomendasi. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui:

- a. Studi dokumen: diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti *Roadmap to Development, Action Plan, report meeting*, dokumen kerjasama, dokumen perkembangan proyek dan sebagainya baik yang berasal dari instansi pemerintahan, sekretariat nasional, pihak swasta maupun penelusuran di internet yang akan menjadi bukti

dalam menilai kemajuan maupun hambatan dari pengembangan ekowisata dalam kerjasama BIMP-EAGA dan Indonesia sebagai salah satu negara anggota dalam kerjasama.

Selanjutnya untuk melengkapi dan membuat penelitian menjadi lebih mendalam digunakan juga teknik pengumpulan data sekunder, data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut, sehingga menjadi tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya. Selanjutnya, berbagai bentuk data yang telah diolah menjadi lebih informatif bagi pihak lain. Adapun pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara atau berasal dari:

- a. Studi pustaka: diperoleh dari buku-buku, tinjauan dokumen terhadap literatur dan beberapa jurnal internal yang ada di perpustakaan Jurusan Hubungan Internasional, perpustakaan Miriam Budiarjo, perpustakaan pusat Universitas Indonesia, Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub-Regional, Direktorat Kerjasama Inter-Regional Departemen Luar Negeri, Departemen Budaya dan Pariwisata Indonesia, Pusat Dokumentasi dan Informasi Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI), perpustakaan *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) Jakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta, Sekretariat ASEAN, serta berbagai penelusuran di internet.
- b. Wawancara: dilakukan dengan narasumber yang memahami dan mengenal kerjasama sub-regional secara mendalam, khususnya dalam kajian BIMP-EAGA, kepariwisataan, ekowisata dan perkembangan ekowisata di Indonesia. Wawancara dilakukan dengan berkomunikasi langsung maupun melalui email.

1.10 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan menjelaskan atau terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, asumsi, model analisis, metode penelitian, teknik pengumpulan data serta sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II BIMP-EAGA dan Konsep Ekowisata

Bab II mendeskripsikan mengenai gambaran umum kawasan kerjasama sub-regional BIMP-EAGA, dengan pemaparan mengenai latar belakang pembentukan kerjasama BIMP-EAGA hingga pada perkembangan kerjasamanya. Pemaparan selanjutnya mengarah pada sektor pariwisata BIMP-EAGA yang menuju konsep ekowisata, penjelasan mengenai latar belakang implementasi ekowisata di BIMP-EAGA dan kawasan proyek ekowisata.

BAB III Implementasi Ekowisata EAGA di Indonesia

Bab III membahas mengenai perkembangan ekowisata di Indonesia yang mengangkat konsep ekowisata dalam kerjasama BIMP-EAGA beserta potensi ekowisata yang ada di Indonesia. Melihat tanggapan, kesiapan, peluang dan hambatan Indonesia dalam sektor ekowisata melalui aspek-aspek penunjang maupun keberadaan wilayah Indonesia bagian timur (dalam kerjasama BIMP-EAGA).

BAB IV Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Ekowisata di BIMP-EAGA

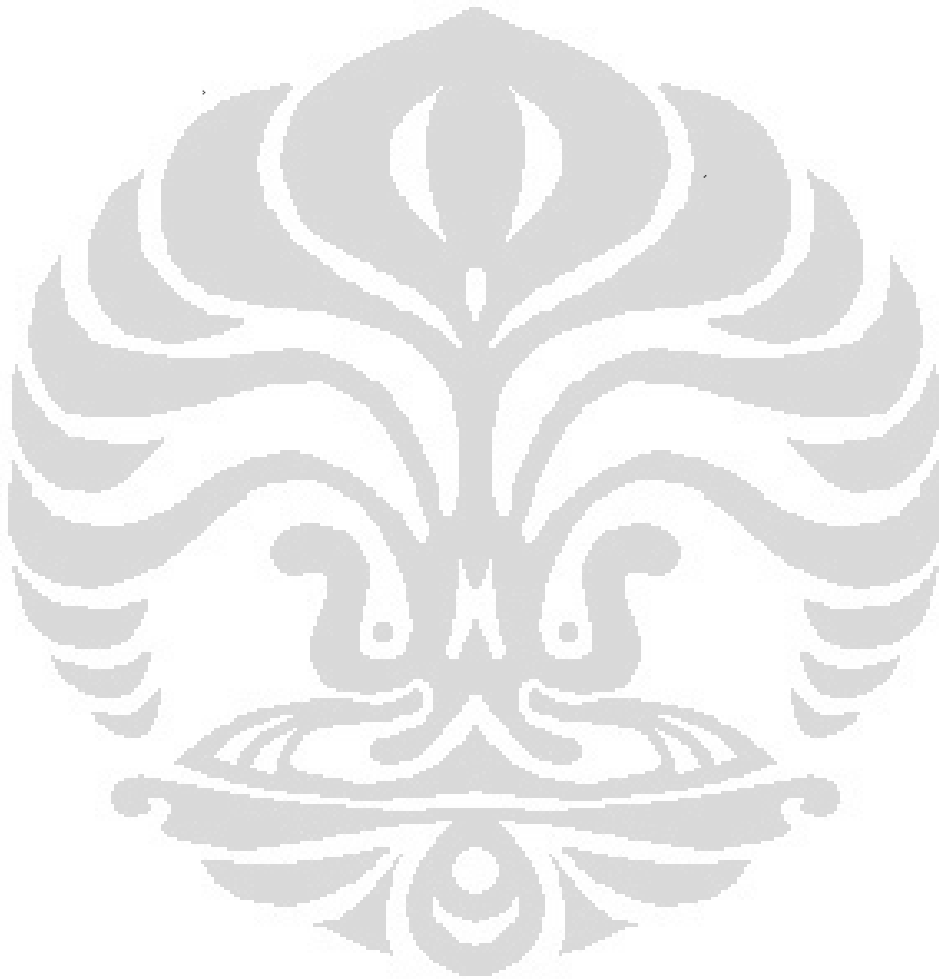
Dalam Bab IV ini berisi mengenai deskripsi analisa dari bab-bab sebelumnya, konteksnya terfokus pada kepentingan Indonesia dalam realisasi sektor ekowisata. Melihat sejauhmana pelaksanaan ekowisata di Indonesia dengan dikaitkan pada beberapa faktor peluang dan hambatan yang ada serta melalui kebijakan pengembangan Indonesia timur melalui KAPET (yang merupakan pendorong kerjasama BIMP-EAGA bagi Indonesia) Setelah itu aspek kepentingan Indonesia juga dilihat dari peran

Universitas Indonesia

institusi pusat kerjasama di bidang pariwisata yang bertindak banyak dalam realisasi ekowisata di Indonesia.

BAB V Penutup

Bab V merupakan bagian akhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisa pada bab-bab sebelumnya yang disertai dengan rekomendasi atau saran yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan.



Universitas Indonesia

BAB II

BIMP-EAGA DAN KONSEP EKOWISATA

Regionalisme merupakan proses transformasi dari hubungan komunitas internasional ke arah supra nasional yang potensial, dimana kondisi integrasi yang tercipta berasal dari hubungan antar aktor negara yang memiliki keragaman dalam kepentingan nasional, keadaan yang saling bergantung maupun aktor non-negara (*non-state actor*).³³ Dengan begitu, realisasi atau bentuk dari regionalisme merupakan sebuah tantangan bagi kerjasama kawasan, terutama untuk meningkatkan kemampuan (ekonomi) negara-negara yang berada di dalam kerjasama kawasan tertentu.

Sebagai kerjasama yang didasari oleh beberapa faktor pendorong, seperti letak geografis yang berdekatan, memiliki kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan, adanya rasa kerjasama dalam satu kawasan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, investasi, kepariwisataan dan sebagainya, maka dapat dikatakan pembentukan BIMP-EAGA merupakan sebuah wadah kerjasama sub-regional yang menginginkan terciptanya keseimbangan dalam pembangunan kawasan-kawasan yang berpotensi. Hal ini dicerminkan dengan keberhasilan pada kerjasama sub-regional di bagian barat ASEAN, seperti dengan adanya kerjasama antar negara ASEAN yang melibatkan kawasan-kawasan potensial sebagai wilayah sumber pengembangan dalam beberapa sektor kerjasamanya maka secara perlahan langkah Asia Tenggara semakin terbuka sebagai kawasan kerjasama menuju integrasi.

Selain mengembangkan sektor perekonomian, BIMP-EAGA juga mengembangkan sektor pariwisata. Hal tersebut muncul dari adanya situasi kawasan yang memiliki keanekaragaman budaya, keindahan alam dan sumber daya manusia yang potensial untuk diberdayakan. Melalui konsep *community-based ecotourism* atau ekowisata diharapkan beberapa tujuan seperti

³³Park Sa-Myung and Supachai Yavaprabhas, *Regional Cooperation and Identity Building in East Asia*, Korean Association of Southeast Asian Studies (KASEAS) and ASEAN University Network (AUN), 2003, hlm. 56. (supranasional: sifat kegiatan atau organisasi dengan sasaran yang melebihi jangkauan kepentingan yang dibatasi oleh batas politik dan geografis).

pembangunan, perekonomian, pelestarian alam, investasi dan pemasukan devisa negara di bidang pariwisata akan memberikan kontribusi yang baik bagi negara anggota.

2.1 Latar Belakang Pembentukan Kerjasama BIMP-EAGA

Dari ketiga kerjasama sub-regional yang ada, BIMP-EAGA merupakan kerjasama yang melibatkan empat negara dikawasan ASEAN dan aspek wilayah geografis yang bertetangga dengan kepentingan bersama, hubungan sejarah, etnis dan budaya tradisional merupakan sesuatu hal yang membuat BIMP-EAGA menjadi lebih menarik untuk lebih diperhatikan. Selain itu pembentukan kerjasama BIMP-EAGA juga tidak lepas dari adanya tujuan dan harapan yang melandasi munculnya konsep pembentukan kerjasama, adapun tujuan utama pembentukan kerjasama ialah untuk memulai suatu proses sinergi kawasan yang melakukan kerjasama sedangkan harapannya ialah menjadikan kawasan kerjasama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi secara dinamis dan kemudian melebur dalam arus pembangunan ekonomi regional.³⁴

Secara konkrit kerjasama BIMP-EAGA telah diresmikan di Davao City pada 26 Maret 1994.³⁵ BIMP-EAGA merupakan model kerjasama Segitiga Pertumbuhan (STP) di lingkungan ASEAN. Tetapi perbedaan antara BIMP-EAGA dengan segitiga pertumbuhan yang lain (seperti; SIJORI, IMT-GT, dan *Greater Mekong Sub-region/GMS*) ialah dimana keanggotaan negara bukanlah tiga negara melainkan empat negara, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philippines. Oleh karena itulah, BIMP-EAGA yang disebut pula *growth quadrangle*, diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur ASEAN.³⁶ Adapun anggota kerjasama BIMP-EAGA meliputi seluruh kesultanan Brunei Darussalam, Indonesia (14 provinsi-Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat), dua negara bagian Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak) dan Wilayah Federal Labuan serta Filipina

³⁴C.P.F. Luhulima, *op. cit*, hlm. 111.

³⁵Based on Working Draft 3, *op. cit*, hlm. 1.

³⁶Adriana Elisabeth, *dkk, op. cit*, hlm. 27.

(Mindanao dan Palawan). Kecuali Brunei Darussalam, kerjasama ini tidak mencakup keseluruhan wilayah negara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Hal tersebut juga yang membedakan BIMP-EAGA dari kerjasama sub-regional yang lain di ASEAN yang mencakup keseluruhan wilayah negara.³⁷ (Lampiran 3)

Sejak pembentukan hingga saat ini, kerjasama EAGA merupakan bukti nyata bahwa kerjasama sub-regional masih relevan dan patut untuk lebih diperhatikan dan dikembangkan. Hal-hal yang masih perlu dikembangkan kerjasama sub-regional di ASEAN, khususnya BIMP-EAGA antara lain sebagai berikut :

1. Menghapuskan kendala dan penyederhanaan prosedur dalam perdagangan dan investasi;
2. Mengembangkan dan menyebarkan informasi tentang kawasan;
3. Membangun infrastruktur;
4. Melibatkan sektor swasta;
5. Meningkatkan kualitas tenaga kerja;
6. Memusatkan investasi sektor swasta sebagai katalisator proyek;
7. Membangun dan menyiapkan kawasan khusus untuk menarik persaingan di sektor swasta dan berbagai industri berorientasi ekspor;
8. Meningkatkan daya saing di bidang pertanian, perikanan, kehutanan dan industri barang tambang;
9. Mengembangkan dan meningkatkan industri pariwisata;
10. Mempromosikan investasi dan sektor keuangan.³⁸

Sebagai salah satu dari kerjasama sub-regional yang berada dalam kawasan ASEAN, BIMP-EAGA merupakan sebuah implementasi dari pembentukan integrasi kawasan melalui sub-kawasan. Wilayah yang menjalin kerjasama dikategorikan sebagai wilayah yang saling melengkapi, saling berdekatan dan mempunyai potensi kemajuan jika dikembangkan dengan serius. Meskipun spesifikasi wilayah atau daerah yang termasuk dalam kerjasama EAGA adalah wilayah atau daerah yang relatif masih tertinggal secara ekonomi (kecuali Brunei),

³⁷Hasil wawancara Devi Putri Kussanti dengan Tiur Rumondang, *loc.cit*.

³⁸Pengembangan Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA, *op.cit*, (dimunduh 09 Februari 2009).

namun negara-negara anggota EAGA mempunyai kedekatan wilayah, bahkan berbatasan (laut dan darat) serta jauh dari Ibu kota negara.³⁹ Kondisi geografis ini dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan kerjasama EAGA, terutama di sektor transportasi yang sangat berpotensi meningkatkan perdagangan di daerah perbatasan, misalnya antara Sulawesi Utara (Indonesia) dengan Mindanao Selatan (Filipina).

Seperti halnya kerjasama sub-regional di kawasan barat Indonesia, pembentukan kerjasama BIMP-EAGA diprakarsai oleh pemimpin negara anggota kerjasama. Mantan Presiden Filipina, Fidel Ramos melontarkan ide mengenai kerjasama BIMP-EAGA, yaitu dalam pertemuan para pimpinan tertinggi negara-negara EAGA di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam pada Oktober 1992. Setelah itu, mulailah proses pendekatan secara bilateral terus dilakukan untuk menuju realisasi kerjasama. Hal tersebut diawali dengan kunjungan Presiden Ramos ke Malaysia dan bertemu dengan Perdana Menteri (P.M.) Mahatir Mohamad pada awal 1993, kemudian berkunjung ke Indonesia pada pertengahan 1993 dan bertemu dengan Presiden Soeharto untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai realisasi kerjasama kawasan Timur ASEAN. Selanjutnya, pada November 1993, Brunei Darussalam menyambut gagasan Filipina atas pembentukan kerjasama EAGA.⁴⁰

Penandatanganan kerjasama BIMP-EAGA pada 1994 dilakukan berdasarkan *Agreed Minutes* pada pertemuan tingkat menteri. Sedangkan sektor kerjasama yang diprioritaskan adalah transportasi udara dan laut, perikanan, pariwisata, energi, kehutanan, pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas tenaga kerja.⁴¹ Implementasi dari kerjasama dilihat dari komponen yang terdapat dalam kawasan dalam menjalin hubungan kerjasama. Melalui sumber daya alam dan manusianya yang memiliki potensi untuk dikembangkan, maka kerjasama akan terwujud secara komplementaritas.

Selain peran pemimpin negara sebagai fasilitator dalam kerjasama EAGA, realisasi kerjasama BIMP-EAGA dan perkembangannya juga harus didukung oleh

³⁹Ibid.

⁴⁰Adriana Elisabeth, dkk, *op. cit*, hlm. 51.

⁴¹Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *op. cit*, hlm. 78.

para pengusaha, bahkan pengusaha diharapkan dapat menjadi motor penggerak kerjasama EAGA ke depan, meskipun saat ini peran pengusaha atau sektor swasta dalam mengembangkan potensi kerjasama yang ada dalam BIMP-EAGA masih relatif kecil. Dengan demikian, dominasi peran pengusaha dalam perkembangan kerjasama EAGA masih perlu ditingkatkan secara lebih optimal dalam menghadapi percepatan arus globalisasi dan memenuhi dorongan integrasi kawasan.

Upaya mendorong peran dan fungsi para pengusaha dalam kerjasama BIMP-EAGA dilakukan pula oleh Presiden Ramos ketika bertemu dengan P.M. Malaysia dan Presiden Indonesia pada Mei 1993. Dalam kunjungannya itu, Presiden Ramos berusaha menggerakkan pemerintah dan pihak swasta untuk secara sama-sama mewujudkan kerjasama EAGA. Sebagai contoh, pengusaha Mindanao melakukan kunjungan ke Manado dan sebulan kemudian melakukan kunjungan ke Sarawak. Melalui pertemuan tersebut kemudian terbentuklah Dewan Bisnis Kawasan Timur ASEAN yang selanjutnya pada Mei 1993 mengadakan pertemuan bisnis di Davao City, Mindanao. Dalam kurun waktu sebulan setelah pertemuan bisnis tersebut, dibukalah jalur penerbangan antara Zamboanga-Labuan (Malaysia).⁴² Keterlibatan pihak swasta secara aktif terlihat dari dibentuknya forum khusus *East ASEAN Business Council* (EABC) di Davao City pada 15-19 November 1994.⁴³ Kini untuk mempermudah kerjasama pihak swasta dalam EAGA dan untuk memperjelas arah kerjasama tersebut, EABC berganti menjadi *BIMP-EAGA Business Council* (BEBC).⁴⁴

Pemikiran yang mendasari pembentukan kerjasama BIMP-EAGA dapat dilihat dari maksud dan tujuan para pendiri kerjasama tersebut. Bagi negara anggota kerjasama, BIMP-EAGA dibentuk untuk mempercepat pembangunan ekonomi empat negara anggota BIMP-EAGA. Meskipun secara geografis jauh dari ibukota, tetapi wilayah-wilayah kerjasama merupakan daerah kaya akan sumber daya alam. Tujuan pembentukannya pun jelas untuk meningkatkan

⁴² Adriana Elisabeth, dkk, *op. cit*, hlm. 52.

⁴³ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *op. cit*.

⁴⁴ Hasil Wawancara Devy Putri Kussanti dengan Tiur Rumondang, *loc. cit*.

kerjasama perdagangan, pariwisata dan investasi intra kawasan maupun antar kawasan (di luar sub-region EAGA).⁴⁵

Dalam konteks bidang-bidang kerjasamanya, BIMP-EAGA merupakan wadah kerjasama yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan yang berpotensi tetapi masih kurang maju secara ekonomi. Sebagai contoh, kerjasama sub-regional BIMP-EAGA yang dimaksudkan untuk memacu atau mempercepat pembangunan ekonomi melalui peningkatan aktivitas perdagangan kawasan, diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta meningkatkan peran Indonesia sebagai jalur utama perdagangan wilayah Asia Timur ke arah Australia, New Zealand dan Pasifik maupun sebaliknya dari Australia, New Zealand dan Pasifik ke Asia Timur.⁴⁶

Ciri dan bentuk dari kerjasama sub-regional kawasan timur ASEAN atau BIMP-EAGA terjadi karena kedekatan wilayah geografis dan adanya kepentingan bersama untuk mengembangkan potensi wilayah negara anggota. BIMP-EAGA yang merupakan kerjasama untuk meningkatkan interaksi ekonomi antara Brunei dan dua sub-wilayah di kawasan timur Indonesia dan Malaysia serta provinsi-provinsi tenggara Filipina.⁴⁷ Sedangkan tujuan dari adanya kerjasama sub-regional BIMP-EAGA ialah untuk memperkuat jalur ekonomi dan mengoptimalkan komplementaritas antar wilayah yang berdekatan.

Dalam rangka mendukung peran dan realisasi kerjasama BIMP-EAGA, dibuatlah *BIMP-EAGA Action Plan 2006-2010* dengan perhatian utama terhadap sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan, pengembangan pariwisata serta pembangunan infrastruktur dan transportasi.⁴⁸ Setiap bidang kerjasama dalam wilayah sub-regional, tidak terkecuali kerjasama BIMP-EAGA, memang sudah seharusnya memiliki kontribusi terhadap pembangunan wilayah kerjasama, perhatian terhadap masyarakat, pelestarian sumber daya alam beserta pengembangannya. Melalui pemberdayaan Usaha Kecil

⁴⁵Based on *BIMP-EAGA Roadmap to Development*.

⁴⁶Tim Peneliti FISIP-Pusat Kajian Pasifik Universitas Hasanuddin, *op.cit*, hlm. 1.

⁴⁷C.P.F. Luhulima, *op. cit*, hlm. 153.

⁴⁸Ratna Shofi Inayati, dkk, *Menuju Komunitas ASEAN 2015: dari State Oriented ke People Oriented*, Jakarta, LIPi Press, 2007, hlm. 135.

dan Menengah diharapkan dapat tercipta keseimbangan dalam pembangunan antar kelompok masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah pun meningkat.

2.2 Perkembangan BIMP-EAGA

Seperti yang telah diketahui bahwa BIMP-EAGA merupakan kegiatan kerjasama yang mengutamakan kedekatan geografis sebagai salah satu konsep dasar pembentukannya. Dengan adanya kedekatan wilayah antar negara anggota, maka akan lebih mudah untuk mobilisasi tenaga kerja, modal dan barang dalam kerjasama EAGA. Perkembangan dalam kerjasama BIMP-EAGA menarik untuk diperhatikan sejak awal pembentukannya pada 1994 sampai sekarang. Sekitar sepuluh tahun pertama sejak pembentukannya, kerjasama EAGA dapat dikatakan tidak mengalami kemajuan yang berarti. Namun sejak 2001, kegiatan ekonomi dalam kerjasama EAGA kembali bergulir, kemudian menunjukkan kemajuan terutama sejak ditetapkannya *Roadmap* (peta jalan) BIMP-EAGA untuk periode 2006-2010.

Pada tiga tahun pertama kerjasama EAGA, negara-negara anggota EAGA memperlihatkan harapan dan optimisme mengenai masa depan kerjasama ini, khususnya sejak kebijakan transportasi laut dan udara yang kian dipermudah, sehingga mendorong peningkatan pariwisata, investasi, dan perdagangan. Selain itu, juga ditingkatkan kerjasama keamanan di daerah perbatasan serta kerjasama perlindungan lingkungan. Namun dengan adanya Krisis Asia pada 1997 dan permasalahan politik serta keamanan di beberapa wilayah EAGA, serta munculnya masalah El Nino,⁴⁹ yang memukul sektor pertanian, kerjasama BIMP-EAGA mengalami kemunduran selama periode 1998-2000. Hal ini disebabkan karena negara-negara anggota melakukan konsentrasi untuk mengatasi permasalahan di dalam negeri mereka masing-masing.⁵⁰

⁴⁹El Nino adalah kondisi abnormal iklim dimana suhu permukaan Samudera Pasifik lebih tinggi dari rata-rata normalnya. Istilah ini pada mulanya digunakan untuk menamakan arus laut hangat yang terkadang mengalir dari Utara ke Selatan dan dapat mempengaruhi iklim dunia selama lebih dari satu tahun.

⁵⁰Brunei-Indonesia-Malaysia-Philiphine East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dalam *Kerjasama Ekonomi Sub-Regional Kawasan Pertumbuhan Asia Timur*, http://www.deplu.go.id/?category_id=14&org_id=99 hlm. 1, (diunduh 9 Maret 2009).

Berbagai permasalahan pada saat itu merupakan pengalaman bagi para anggota EAGA, yang membuktikan bahwa mereka belum siap atau tidak memperhitungkan kemungkinan munculnya pergolakan politik dan ekonomi, baik yang terjadi di dalam maupun berasal dari luar negeri. Meskipun mengalami kendala di tengah perjalanan kerjasamanya, apalagi dengan kondisi wilayah yang pada umumnya kurang atau rendah secara ekonomi, kerjasama BIMP-EAGA tetap bertahan, bahkan sampai sekarang.

Inisiatif kerjasama BIMP-EAGA bangkit kembali pada 2001, seiring dengan pemulihan ekonomi dan diawali dengan *round-table seminar on ASEAN sub-regional groupings* pada September 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Pada November 2001 ditempat yang sama, para pemimpin ASEAN menegaskan kembali arti penting dari pertumbuhan kerjasama sub-regional dan revitalisasi kerjasama pertumbuhan di BIMP-EAGA. Revitalisasi pada dasarnya dilakukan melalui dua tahap, yaitu *Confidence Building Stage* (2001-2002) dan *Consolidation Stage* (2003-2004). Secara perlahan BIMP-EAGA juga melakukan restrukturisasi dari 11 *working groups*, kemudian menjadi tujuh kelompok kerja dan saat ini diringkas ke dalam empat *cluster* utama yang bertugas menyusun program dan proyek serta mendorong sektor swasta dibawah naungan *BIMP-EAGA Business Council* (BEBC) yang telah mendapat status *full member* menjadi *engine of growth* dalam kerjasama tersebut.⁵¹

Sebagai permulaan kerjasama dan atas rekomendasi kelayakan *Asian Development Bank* (ADB), ditetapkan 11 *working groups*, yaitu:

- 1) Jasa transport dan perkapalan;
- 2) Pengembangan pariwisata bersama;
- 3) Perikanan, pertanian dan hortikultura;
- 4) Pengembangan dan eksplorasi energi (bahan bakar, geothermal, batu bara, minyak);
- 5) Manajemen dan proteksi lingkungan;
- 6) Produk hutan dan kayu;
- 7) Sumber daya manusia;
- 8) Industri;

⁵¹Ibid.

- 9) Perencanaan institusi;
- 10) Hubungan jaringan infrastruktur;
- 11) Pengembangan sumber daya alam, pelayanan jasa, investasi dan perdagangan.⁵²

Kemudian kesebelas *working groups* tersebut diminimalisasi menjadi tujuh *working groups*, yakni:

- (1) Pertanian, perikanan dan kelutanan;
- (2) Keuangan, investasi dan perdagangan;
- (3) Pariwisata;
- (4) Perhubungan dan komunikasi;
- (5) Pertambangan dan energi;
- (6) Pengembangan sumber daya manusia;
- (7) Pengembangan industri.⁵³

Perkembangan selanjutnya, dalam *the BIMP-EAGA Roadmap to Development (2006-2010)*, semenjak 2004, *working groups* tersebut ditetapkan menjadi empat *cluster*. Hal tersebut dimaksudkan agar mudah untuk mengontrol efektifitas masing-masing bidang-bidang kerjasama, apakah tiap kelompok kerja telah melakukan tugas serta kewajiban mereka masing-masing. Ke-empat *cluster* tersebut adalah

- (1) Transportasi, Infrastruktur, Informasi dan Teknologi;
- (2) Sumber Daya Alam;
- (3) Pariwisata;
- (4) Usaha Kecil dan Menengah.⁵⁴

Setelah mengadakan pertemuan antar negara anggota pada 2001, maka pada 6 Oktober 2001 diadakan Summit BIMP-EAGA pertama di Bali (di sela-sela

⁵²Adriana Elisabeth, dkk, *op. cit.*, hlm. 52.

⁵³Suprayoga Hadi, Bappenas dalam Pengembangan Kerjasama Ekonomi Regional dan Peningkatan Kinerja Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, http://www.bappenas.go.id/index.php/module=FileManager&func=download&pathext=ContentExpress&view=171_PengembanganKESRdiKTI.pdf (diunduh 09 Februari 2009).

⁵⁴Hasil wawancara Devi Putri Kussanti dengan Tiur Rumondang, *loc. cit.*

pertemuan KTT ASEAN). Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menindaklanjuti kerjasama dan melakukan pembahasan mengenai sektor kerjasama di masa depan. Sebagai suatu wujud kesungguhan para negara anggota, pertemuan pada saat itu menghasilkan dan menyepakati langkah-langkah sebagai berikut:

1. Para pemimpin menegaskan kembali pentingnya BIMP-EAGA sebagai area pertumbuhan sub-regional kawasan dalam konteks untuk menjembatani kesenjangan pembangunan di ASEAN, dan pentingnya mempercepat pembangunan ekonomi untuk memperbaiki kualitas hidup penduduknya, menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan kemakmuran, serta menjaga stabilitas di sub-kawasan.
2. Untuk lebih menjawab kebutuhan sektor swasta, mereka berkomitmen untuk lebih memajukan inisiatif BIMP-EAGA dengan memperkuat institusi kerjasama sub-kawasan BIMP-EAGA, antara lain dengan memperkuat mekanisme koordinasi kerjasama BIMP-EAGA melalui pendirian *BIMP-EAGA Facilitation Centre* di Kota Kinabalu dan dengan memberdayakan institusi penghubung nasional (*national vocal point institutions*).
3. Para pemimpin setuju untuk melakukan pendekatan yang pragmatis dalam memupuk kerjasama di sub-kawasan dengan inisiatif membuat proyek-proyek percontohan BIMP-EAGA yang akan memberikan dampak lebih besar bagi pembangunan.
4. Para pemimpin menghargai dukungan dari *Asian Development Bank* (ADB), sebagai penasehat pembangunan sub-regional BIMP-EAGA dan *ASEAN Secretariat* serta meminta dukungan dalam memformulasikan dan mengimplementasikan program-program pembangunan BIMP-EAGA sejalan dengan *Initiative for ASEAN Integration* (IAI).
5. Para Pemimpin menyambut baik dukungan dari Negara-Negara *Plus Three* (China, Jepang, Korea) dalam pembangunan BIMP-EAGA.⁵⁵

⁵⁵Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippine East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dalam Kerjasama Ekonomi Sub-Regional Kawasan Pertumbuhan Asia Timur, *op. cit.*, hlm. 3.

Formulasi *Roadmap* pembangunan BIMP-EAGA disetujui di Balikpapan pada 25-26 November 2004, melalui *12th Senior Official Meeting* dan *9th Ministerial Meeting* dengan bantuan dari *ASEAN Secretariat*. Kemudian pada 21-22 Maret 2005 di Kuala Lumpur diadakan *1st Meeting* atau *Workshop on the Formulation of the EAGA Roadmap*. Konsolidasi dan finalisasi *draft* terakhir *Roadmap* melalui *Informal Senior Officials Meeting* pada 14-15 April 2005 di Kuala Lumpur. Pengusulan dari pertemuan tingkat menteri BIMP-EAGA di Brunei Darussalam pada 2005 dan *2nd BIMP-EAGA Summit* di Kuala Lumpur 11 Desember 2005, para pemimpin negara anggota kerjasama BIMP-EAGA menyetujui perumusan *BIMP-EAGA Roadmap to Development 2006-2010*. Para pemimpin negara meminta menteri dan *senior official* untuk mengikuti, memonitor dan mereview implementasi dari keseluruhan program dan proyek serta memastikan hasil yang dicapai dalam tujuan dan target dari *Roadmap* untuk pembangunan. *Roadmap* direview secara tetap untuk memastikan relevansi dan kemampuan aktivitas kerjasama sub-regional dibawah perubahan kondisi. sosio-ekonomi.⁵⁶ Review dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kelengkapan data berdasarkan kenyataan di lapangan, ketika pertemuan menghasilkan suatu argumen yang lebih pantas untuk diaplikasikan, maka bukan tidak mungkin apabila *Roadmap* akan bertambah dan berkurang dalam konteks ke empat *cluster* yang ada.

Tujuan dari *Roadmap* BIMP-EAGA ialah untuk meningkatkan perdagangan, investasi dan pariwisata di dalam dan keluar EAGA, mengkoordinasikan perencanaan dan implementasi dukungan infrastruktur, mengkoordinasikan manajemen sumber daya alam dan memperkuat struktur institusi dan mekanisme BIMP-EAGA. Targetnya adalah meningkatkan intra dan ekstra perdagangan antara EAGA sebanyak 10% pada 2010, meningkatkan investasi di wilayah EAGA sebanyak 10% pada 2010, dan meningkatkan laju pariwisata wilayah EAGA sebanyak 20% pada 2010.

Dalam *Roadmap* pembangunan tersebut, fokus dan sektor utama dalam kerjasama di BIMP-EAGA dikelompokkan pada peningkatan perdagangan, investasi dan pariwisata. Pada pertemuan ke-empat BIMP-EAGA, November

⁵⁶Based on Working Draft 3, *op.cit*, hlm. 2.

2007 di Singapura, para pemimpin mengemukakan perkembangan terdekat dari implementasi *Roadmap*. Mereka menyetujui pembicaraan para menteri yang mengusulkan ide mengenai *Mid Term Review* pada 2008. Kemudian pada 2008, *Roadmap* pembangunan EAGA direview ulang melalui *Mid Term Review* yang menghasilkan revisi rencana aksi (*Action Plan*) di berbagai sektor fokus kerjasama. Melalui rencana aksi inilah, maka perjalanan kerjasama di BIMP-EAGA semakin terarah dan memiliki kemajuan dalam hal konseptualisasi.

Dalam pengembangan kerjasamanya, BIMP-EAGA mendapat bantuan dana dari ADB sebagai *regional development adviser*, karena ADB mempunyai program pengembangan di Asia, maka mereka memiliki departemen yang dinamakan *South East Asia Departemen*, dan mereka mempunyai program-program pengembangan dan fokus memberikan bantuan pada kerjasama BIMP-EAGA. Selain itu, BIMP-EAGA juga menjalin kerjasama dengan Lembaga Kerjasama Jerman atau GTZ (*German Technical Cooperation*) dalam memberikan bantuan teknis dalam rangka *capacity building*. *Partner organizations* lainnya ialah ASEAN, dan *ASEAN Japan Centre*.⁵⁷

Melalui Konferensi Tingkat Tinggi ke-14 ASEAN pada 28 Februari 2009 di Cha-am, Thailand, dinyatakan bahwa kerjasama BIMP-EAGA di negara Indonesia difokuskan pada sejumlah provinsi di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. BIMP-EAGA dijalankan untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi, terutama di kawasan perbatasan, meningkatkan perdagangan, pariwisata dan investasi melalui fasilitas pergerakan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut pembagian tugas antara pihak swasta dan pemerintah juga dipertegas kembali, hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan kerja dan upaya untuk mengingatkan kembali bahwa kerjasama subregional merupakan landasan integrasi bagi kerjasama kawasan. Pemerintah dan pelaku bisnis di daerah harus dapat mengidentifikasi proyek-proyek yang dapat menjadi fokus kerjasama subregional, sementara pemerintah pusat mencoba mengatasi kendala infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan subregional tersebut.⁵⁸

⁵⁷Hasil wawancara Devy Putri Kussanti dengan Tiur Rumondang, *loc. cit.*

⁵⁸Kompas, 01 Maret 2009, dalam artikel Swasta Diejak Majukan Kawasan Pertumbuhan.

Sedangkan dalam mekanisme komunikasi antara negara anggota, diatur sebagai berikut:

1. Setiap negara anggota membentuk *high level council* di bawah menteri yang bertanggung jawab terhadap BIMP-EAGA;
2. Mekanisme konsultasi diantara negara anggota adalah melalui Pertemuan Para Menteri dan Pertemuan Pejabat Tinggi Negara;
3. Pertemuan Kelompok Bisnis dilakukan sejalan dengan Pertemuan Para Menteri dan Pejabat Tinggi Negara;
4. Dibentuk institusi sebagai pusat informasi di masing-masing negara.⁵⁹

Untuk lebih rinci lihat juga bagan institusi kerjasama sub-regional BIMP-EAGA. (Lampiran 4)

2.3 Konsep Ekowisata di BIMP-EAGA

Ekowisata dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.⁶⁰ Selain itu, pendefinisian atau pengertian ekowisata pertama diperkenalkan oleh organisasi *the Ecotourism Society* pada 1990. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Ekowisata dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan daerah tujuan wisata tetap utuh dan lestari, serta budaya dan kesejahteraan masyarakatnya juga tetap terjaga.⁶¹ Perkembangan sektor pariwisata dalam kerjasama BIMP-EAGA telah mengalami kemajuan pesat dalam implementasi konsep pelestarian alam dan upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal melalui aktivitas wisata. Hal ini tentunya diiringi dengan peran serta dari berbagai pelaku ekowisata dalam kerjasama.

⁵⁹ Adriana Elisabeth, dkk, *op.cit*, hlm. 55.

⁶⁰ Janianton Damanik, *op.cit*, hlm. 379.

⁶¹ Mukhlison Chafid Fandeli, dalam artikel *Ekowisata*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Ekowisata> (diunduh 23 Maret 2009).

Melalui kerjasama BIMP-EAGA dalam perwujudan ekowisata, maka bidang pariwisata telah mengalami transformasi tidak hanya dalam sebuah perjalanan wisata, melainkan dalam hal pendidikan dan pelestarian alam. Peran BIMP-EAGA sebagai wadah dan penggerak dalam realisasi ekowisata menjadi sangat penting ketika pengelolaan kekayaan atau sumber dikaitkan dengan peningkatan sektor pariwisata sekaligus dapat memberdayakan peran masyarakat lokal sebagai salah satu aktor penting dalam pengembangan ekowisata.

Dalam konsep ekowisata di BIMP-EAGA terdapat perpaduan antara konsep perjalanan wisata dengan aspek pelestarian lingkungan. Pentingnya menciptakan kelangsungan hidup sumber daya alam hayati dan memahami tentang sisi ekowisata dalam pariwisata menuju pengembangan sumber daya masyarakat lokal merupakan tujuan kerjasama BIMP-EAGA dalam dunia pariwisata.

Hal tersebut sejalan dengan konsep ekowisata yang dikemukakan oleh WWF (*World Wild Fund*). Dalam "*Guidelines for Community-based Ecotourism Development*", WWF membahas mengenai karakteristik ekowisata yang tidak hanya melibatkan kekayaan sumber daya hayati dan para pelaku wisata (baik jasa travel, pihak swasta, pemerintah dan wisatawan), tetapi juga harus menyertakan dimensi sosial atau masyarakat setempat dalam pelaksanaannya. WWF memberikan empat pedoman dalam penerapan konsep *community-based ecotourism*, yakni:

(1) *Considering whether ecotourism is an appropriate option*. Pedoman pertama ini fokus pada kondisi wilayah dan hubungan dalam kerjasama sebelum memulai untuk memprakarsai ekowisata berbasis masyarakat.

(2) *Planning ecotourism with communities and other stakeholders*. Dalam pedoman yang kedua, WWF membahas mengenai struktur dan proses yang harus diterapkan sehingga ekowisata dapat berjalan dengan baik, hal tersebut diwujudkan untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat lokal dan lingkungan. Hal terpenting ialah saling bekerjasama dan saling mengingatkan satu sama lain.

(3) *Developing viable community-based ecotourism projects*. Hal ini bertujuan untuk menyoroti beberapa wilayah yang berpotensi di daerah terpencil.

(4) *Strengthening benefits to the community and the environment*. Dalam pedoman ini, diharapkan melalui ekowisata dapat terwujud keuntungan bagi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.⁶²

Pandangan lainnya mengenai ekowisata berasal dari IUCN (*World Conservation Union*) pada 1996, yang mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan dan kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan serta tidak mengganggu keadaan alam. Perjalanan dan kegiatan wisata bertujuan untuk menikmati dan menghargai alam melalui konservasi (termasuk pelestarian kebudayaan lokal). Dengan demikian, kegiatan wisata semacam ini dapat mengarangi dampak negatif dari kegiatan para pengunjung atau wisatawan yang cenderung merusak alam, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi penduduk lokal.⁶³

Dengan adanya pemahaman yang tepat mengenai ekowisata, maka suatu aktivitas atau perjalanan wisata akan mempunyai suatu arti penting. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersenang-senang dan menikmati apa yang telah disediakan oleh alam, tetapi lebih kepada membantu melestarikan dan menjaga sumber daya alam serta keindahannya. Sebagai salah satu konsep dalam pengembangan pariwisata, ekowisata sebenarnya telah muncul kepermukaan sudah sejak lama. Hal tersebut terlihat di negara-negara Afrika Timur seperti Kenya dan Tanzania yang memiliki Taman Nasional Emboseli dengan seekor singa sebagai penarik perhatian pengunjung.⁶⁴ Dalam perkembangannya, konsep ekowisata mulai merambah di negara-negara Amerika, Eropa dan Asia, dengan perkembangan konsep dan realisasi yang berbeda antara satu kawasan dengan yang lainnya.

⁶²Based on WWF-Indonesia Articles, *Natural Treasures for Better Futures, Community-based Ecotourism in the BIMF-EAGA*, Published October 2008, hlm. 2.

⁶³Ibid.

⁶⁴Jama Supriatna, *op.cit*, hlm. 379.

Dalam penerapannya, konsep *community-based ecotourism* memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat lokal dan tidak menutup kemungkinan dapat membantu pengurangan kemiskinan (kemiskinan pendapatan) di kawasan ekowisata. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kerjasama yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- (1) Keterlibatan, penyediaan saran/nasihat dan dukungan dari para ahli di bidangnya terhadap kemunculan pengusaha kecil dan menengah dalam ekowisata pada tiap tahunnya di pasar global;
- (2) Kerjasama diharapkan dapat memfasilitasi akses pasar dalam menghidupkan dan menghasilkan pelayanan baru dalam ekowisata, dimana ekowisata mempresentasikan peluang dalam gerakan memajukan proses pembangunan sosio-ekonomi;
- (3) Kerjasama memiliki peran yang besar dalam pemahaman mengenai ketetapan tipe dari operasionalisasi yang berkualitas sebagai ekowisata dan apakah *branding* atau label perlu untuk menyatakan operasional tersebut;
- (4) Kerjasama diharapkan dapat menyokong komunitas lokal, terutama para pelaku ekowisata yang miskin, sebagai pelaku utama dalam membangun peluang, dalam memasarkan produk, dalam mengelola operasional sehari-hari dan pembagian keuntungan ekonomi.⁶⁵

Di kawasan Amerika dan Eropa, pariwisata mulai berkembang ke arah perlindungan terhadap alam dan lingkungannya, hal tersebut tersirat melalui pembentukan lembaga internasional yang menjunjung tinggi kelestarian dan pemberdayaan alam dengan ramah terhadap alam. Pembentukan *Green Globe 21*, yang didirikan pada tahun 1994 sebagai suatu lembaga yang mempunyai kapasitas dalam pembangunan bagi manajemen lingkungan dan kepedulian terhadap industri *travel* dan pariwisata. Terbentuknya *Green Globe 21* berawal dari desakan masyarakat dunia, baik yang berkenaan dengan masalah sosial maupun yang menyangkut isu kebudayaan dan juga atas pertimbangan serta inisiatif dari para pelaku industri. *Standard Green Globe 21* dirancang untuk suatu institusi

⁶⁵Based on message from the World Tourism Organization in the framework of the BIMP-EAGA Community-based Ecotourism Conference, Manado, North Sulawesi, 30 October-1 November 2008.

yang banyak berhubungan secara langsung dengan perhotelan, maskapai penerbangan dan kapal pesiar. Prinsip-prinsip yang ada dalam *Green Globe 21* adalah untuk memfasilitasi agar kegiatan ekowisata dapat berkelanjutan. Standarisasi yang disediakan adalah sebagai dasar dapat diterimanya suatu pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan produk-produk ekowisata. Ada delapan prinsip yang harus dipenuhi oleh produk-produk ekowisata, yaitu:

1. Memberikan kesempatan kepada para turis secara personal dan secara langsung agar dapat menikmati perjalanan wisata alam (*Focus Area*);
2. Perjalanan wisata alam dibarengi dengan pemahaman dan pengertian serta penghargaan terhadap alam itu sendiri (*Interpretation*);
3. Dapat digunakan sebagai petunjuk bagaimana mengimplementasikan cara-cara yang benar terhadap lingkungan pariwisata yang berkelanjutan (*Environmental Practice*);
4. Memberikan kontribusi langsung kepada konservasi bagi kawasan alam (*Contribution to Conservation*);
5. Tersedianya kontribusi secara terus-menerus bagi masyarakat lokal (*Beneficial Local Communities*);
6. Menjadi lebih peka agar dapat mengartikan dan ikut terlibat memelihara kebudayaan di kawasan setempat agar tetap eksis (*Cultural Respect*);
7. Konsisten dalam memenuhi harapan dan kepuasan para wisatawan (*Customer Satisfaction*);
8. Dalam memasarkan dan mempromosikan produk-produknya, secara jujur dan tepat, dengan demikian harapan-harapan yang ada dapat terealisasi (*Responsible Marketing*).

Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai kriteria standar, dengan spesifikasi kedelapan prinsip di atas. Untuk kriteria pendukungnya berdasarkan pada proses yang berlangsung dan pada saat dijalankannya standar tersebut.⁶⁶

Kesepakatan antara *the United Nations Conference on Environment* dan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi pada tahun 1992, mengenai *sustainable tourism*

⁶⁶Source: Savitri Puspitayu dalam tesisnya yang berjudul "Pelaksanaan Ecotourism dalam Industri Pariwisata Internasional di Thailand" pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Hubungan Internasional-Desember 2004.

yang mencakup di dalamnya tentang pariwisata alternatif-ekowisata. Ekowisata adalah jenis pariwisata yang berinisiatif, bekerjasama dengan menjaga konservasi alam dan mengikutsertakan masyarakat setempat.⁶⁷

Menurut Eplerwood, ekowisata mulai berkembang ketika banyak digemari oleh wisatawan yang ingin berkunjung ke wilayah wisata yang masih alami dan dapat menciptakan kegiatan bisnis. Sehingga ekowisata kemudian didefinisikan sebagai bentuk baru dari perjalanan bertanggung jawab ke area alam dan berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata.⁶⁸ Secara umum, pemahaman dan realisasi ekowisata memang belum familiar di kalangan masyarakat. Sejak dahulu, masyarakat hanya mengetahui pariwisata alam, yang pengertiannya melakukan perjalanan wisata di daerah pegunungan atau lautan dengan menikmati keindahan alam serta melakukan olahraga ataupun kegiatan alam seperti berkemah, *hiking*, arung jeram, dan sebagainya. Tetapi lambat laun, munculnya kesadaran terhadap lingkungan dan kepedulian terhadap kelangsungan alam dan manusia menjadi pendorong lahirnya konsep ekowisata yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelestarian alam.

Dalam kerjasama BIMP-EAGA untuk mengembangkan ekowisata maka dilakukanlah tindakan promosi pariwisata berbasis alam dan masyarakat melalui agenda ke 10 *BIMP-EAGA Working Group Meeting on Joint Tourism Development* yang membicarakan mengenai logo dan kreasi *website* untuk pariwisata EAGA. *Website* digunakan untuk mempromosikan pariwisata EAGA sebagai tujuan utama ekowisata dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi pariwisata. Pertemuan tersebut dilaksanakan selama 2 hari di Berakas.⁶⁹

2.3.1 Wisata Alam dengan Ekowisata

Dalam melakukan perjalanan wisata khususnya *oudoor activities*, yang menjadi objek wisata tidak jauh dari konteks lautan, hutan, pegunungan dan taman nasional. Kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai wisata alam, dalam pengertiannya menurut Duffus dan Dearden, kegiatan wisata alam

⁶⁷Ibid.

⁶⁸Eplerwood (1999) dalam Fandeli, *Ekowisata, loc. cit.*

⁶⁹<http://www.rtb.gov.bn/NewsUpdate/2003/July03/020703/main6.htm> (diunduh 21 November 2008).

(*nature tourism*) adalah menikmati alam secara non-konsumtif melalui kegiatan seperti berjalan kaki, menyelam, fotografi, mengamati ikan paus, burung dan lainnya.⁷⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep wisata alam merupakan suatu kegiatan atau perjalanan wisata yang bernuansa pendidikan, yaitu berhubungan dengan pengenalan dan pemahaman mengenai seluruh potensi yang dimiliki alam.

Pengertian wisata alam meliputi antara lain wisata kehidupan liar (*wildlife tourism*), ekowisata (*ecotourism*) dan *adventure tourism*. Secara harfiah, wisata alam mempunyai pengertian yang lebih mendalam, yakni perjalanan ke suatu tempat yang masih asli untuk menikmati keindahan bentang alam termasuk di dalamnya *hiking, biking, sailing* dan *camping*. Sedangkan wisata kehidupan liar adalah wisata yang dilakukan untuk melihat kehidupan liar baik perilaku, habitat, maupun populasinya. Wisata petualangan (*adventure tourism*) adalah wisata alam ditambah dengan kegiatan olahraga, seperti lari maraton alam, *kayaking, rock climbing, deep sea living, bicyling*, dan sebagainya. Jika wisata alam, wisata kehidupan liar dan wisata petualang lebih menitikberatkan pada aktivitas rekreasi dari wisatawan, sebaliknya, ekowisata menitikberatkan pada keuntungan konservasi alam dan masyarakat setempat.⁷¹

Melalui pengelompokkan wisata alam tersebut, maka akan lebih mudah untuk membuat kategori dan mendefinisikan ekowisata. Hingga saat ini wisata alam yang dikategorikan ke dalam ekowisata cenderung dikaitkan dengan nuansa keindahan tempat tujuan yang dipadu dengan tindakan perjalanan berlibur yang dekat dengan alam sekaligus melestarikan kelangsungan sumber daya alam hayati.

Secara konseptual, ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga

⁷⁰Duffus dan Dearden (1990), dalam Jatna Supriatna, *op.cit*, hlm. 378.

⁷¹Jatna Supriatna, *op. cit*, hlm. 378.

memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.⁷² Dengan kata lain, konsep ekowisata mendapat dukungan besar dari alam, pemerintah sebagai fasilitator, pihak swasta serta masyarakat lokal sebagai penggerak dan penjaga lingkungan sekitar objek ekowisata.

Oleh sebab itu, terdapat beberapa karakteristik ekowisata yang membedakannya dengan wisata massal atau wisata alam, yakni:

1. Aktivitas wisata terutama berkaitan dengan konservasi lingkungan, namun dalam kegiatan-kegiatan tersebut melekat keinginan untuk ikut serta melestarikan lingkungan;
2. Penyedia jasa wisata tidak hanya menyiapkan sekedar atraksi untuk menarik tamu, tetapi juga menawarkan peluang bagi mereka untuk lebih menghargai lingkungan. Sehingga keunikan objek dan daya tarik wisata tetap terpelihara, dan masyarakat lokal serta wisatawan berikutnya dapat menikmati keunikan tersebut;
3. Kegiatan wisata berbasis alam, objek wisata yang menjadi basis kegiatan wisata adalah alam dan lingkungan yang hijau (kawasan pegunungan, hutan raya, perkebunan dan taman nasional), dan biru (laut yang bening dan bersih). Bagi wisatawan atraksi alam yang masih asli memiliki nilai tertinggi dalam kepuasan berwisata;
4. Organisasi perjalanan menunjukkan tanggung jawab finansial dalam pelestarian lingkungan hijau yang dikunjungi atau dinikmati oleh wisatawan dan wisatawan juga melakukan kegiatan yang terkait dengan konservasi;
5. Kegiatan wisata dilakukan tidak hanya dengan tujuan untuk menikmati keindahan dan kekayaan alam itu sendiri, tetapi juga secara spesifik untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan bagi pelestarian objek dan daya tarik wisata;
6. Perjalanan wisata menggunakan alat transportasi dan akomodasi lokal;
7. Pendapatan dari pariwisata digunakan tidak hanya untuk mendukung kegiatan konservasi lokal tetapi juga membantu pengembangan

⁷²Ibid, hlm. 378-379.

masyarakat setempat secara berkelanjutan, misalnya dengan membentuk program-program pendidikan lingkungan;

8. Perjalanan wisata menggunakan teknologi sederhana yang tersedia di daerah tujuan wisata, terutama yang menghemat energi, menggunakan sumber daya lokal, termasuk melibatkan masyarakat lokal dalam pembuatannya;
9. Kegiatan wisata berskala kecil, baik dalam arti jumlah wisatawan maupun usaha jasa yang dikelola, meskipun dengan cara ini keuntungan yang diperoleh cenderung kecil. Misalnya penyediaan akomodasi dengan kapasitas 20 kamar.⁷³

2.3.2 Ekowisata di BIMP-EAGA

Dalam konteks sumber kepariwisataan, kawasan BIMP-EAGA merupakan suatu kawasan yang kaya dan mempunyai bermacam keindahan alam serta warisan budaya yang sangat potensial dalam menarik perhatian turis.⁷⁴ Hal ini dikarenakan kawasan sub-regional BIMP-EAGA merupakan salah satu kawasan di dunia yang mempunyai keberagaman dalam hal kebudayaan atau adat istiadat masyarakat pribumi.⁷⁵ Dengan adanya potensi alami tersebut maka nilai keaslian dan keindahan merupakan daya tarik kawasan BIMP-EAGA dalam memasarkan daerahnya sebagai objek wisata.

Negara kawasan BIMP-EAGA sepakat untuk mengembangkan ekowisata dikarenakan ekowisata merupakan suatu konsep dan peluang baru pariwisata yang sangat potensial karena melibatkan masyarakat untuk tetap peduli terhadap pelestarian alam dan lingkungan hidup. Kekayaan sumber alam Indonesia dapat membangkitkan sektor ekowisata dalam

⁷³Janianton Damanik dan Helmut F. Weber, *op.cit*, hlm 40-42.

⁷⁴Warisan alam EAGA meliputi: 1) terbesar kedua di dunia dan hutan hujannya paling borsejarah/kuno yang berada di Kalimantan dan Papua, 2) terbesar kedua dalam kekayaan akan biodiversity laut yang merupakan daerah kawasan Tri-Coral, perpaduan antara Sulu dan Laut Sulawesi, 3) garis khatulistiwa sungai dan gua yang kedalamanya hingga 4.900 m-Piramida Carstensz di Papua, dan 4) UNESCO mengenai warisan alam diadakan di Mt. Kinabalu-Sabah dan gua Mulu di Sarawak-Malaysia; Tubataha Reefs dan Sungai dibawah tanah St. Paul di Palawan, Philippines.

⁷⁵Suku Dayak di Sarawak dan Sabah di Malaysia dan di Kalimantan Indonesia; Suku Lumads Mindanao di Philippines; dan Suku Toraja serta Bugis di Sulawesi Selatan dan di Marind-anim, Suku Yah'ray dan Asmat di Papua Indonesia.

mengembangkan wisata alam dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Konsep ekowisata harus memenuhi lima prinsip, yakni: konservasi, melibatkan masyarakat setempat, ekonomi masyarakat, pendidikan dan kepariwisataan.⁷⁶ Melalui pengembangan prinsip ekowisata tersebut diharapkan kawasan BIMP-EAGA akan menjadi wilayah tujuan ekowisata yang memiliki keunggulan tersendiri.

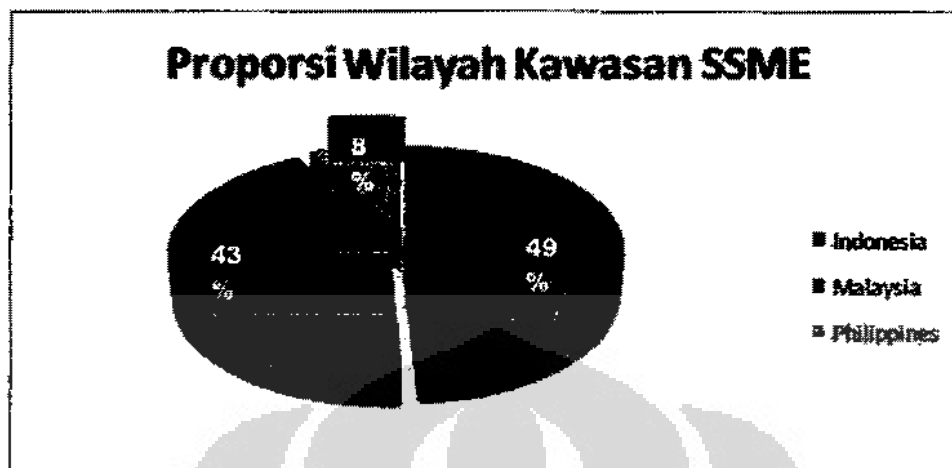
BIMP-EAGA merupakan kawasan yang potensial untuk ekowisata, salah satunya adalah wilayah Sulawesi Utara, Indonesia. Wilayah laut dan perairan Sulawesi Utara menjadi satu dari sejumlah wilayah yang menjadi lokasi *coral triangle* atau segitiga terumbu karang terluas di dunia dan sudah masuk dalam *Sulu-Sulawesi Marine Eco-System* (SSME) sekaligus merupakan daerah *marine diversity* terkaya di dunia.⁷⁷ *The coral triangle* yang terletak diantara tiga negara yakni: Indonesia, Malaysia dan Filipina merupakan eko-region laut yang paling produktif dan memiliki keanekaragaman hayati karang tertinggi di dunia. Berdasarkan proporsi kekayaan sumber daya lautnya, Indonesia memiliki potensi yang besar terhadap kawasan perairan yang masuk ke dalam zona SSME, yakni: Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Kalimantan Timur (Kepulauan Derawan) serta beberapa pulau perekat kesatuan eko-region laut di Sulu-Sulawesi.⁷⁸

⁷⁶News Online ANTARA, Negara BIMP-EAGA Sepakat Kembangkan Ekowisata, <http://www.antara.co.id/arc/2008/11/11/negara-bimp-eaga-sepakat-kembangkan-ekowisata/> (diunduh 13 Januari 2009).

⁷⁷http://mdopost.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=7939&Itemid=52 (diunduh 21 November 2008).

⁷⁸Kawasan SSME memiliki 1200 jenis ikan, 500 jenis terumbu karang, 400 spesies alga atau ganggang, 22 jenis mamalia laut (paus dan lumba-lumba), 33 spesies bakau, 16 spesies lamun dan 6 dari 7 spesies penyu di dunia. Kawasan ini juga menjadi tempat tinggal jenis ikan purbakala *Coelacanth* yang ditemukan di kawasan TN Bunaken dan populasi peteluran penyu hijau terbesar di Asia Tenggara, yaitu di kepulauan Derawan.

Gambar 1



Pada 13 Februari 2004 di Kuala Lumpur, tercapai kesepakatan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk menetapkan dan mengelola SSME untuk menjaga kelestarian kawasan keanekaragaman hayati laut di masing-masing wilayah teritorial secara bersama.⁷⁹ Melalui penerapan kebijakan yang dilakukan oleh ketiga pemerintahan negara tersebut, maka secara perlahan pengembangan konsep ekowisata menuju pelestarian dan pemberdayaan biota laut semakin terealisasi. Secara teoritis, potensi yang dimiliki oleh negara yang berada dalam kawasan SSME dapat mengarah pada peningkatan kunjungan wisatawan ke wilayah kerjasama BIMP-EAGA. Dan bukan tidak mungkin jika konsep ekowisata telah dipahami secara benar oleh seluruh kalangan pariwisata, maka peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat lokal akan terjadi.

Salah satu potensi sektor pariwisata dapat diukur dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan EAGA. Sebagai contoh, total wisatawan internasional yang mengunjungi kawasan sub-regional BIMP-EAGA terhitung sekitar 3,922,620 pada 2005. Perkembangannya meningkat sampai dengan 6,7% pada periode 2005-2006, sedangkan wisatawan domestik meningkat 11,9%. Konsentrasi perkembangan kepariwisataan sub-regional lebih kepada kota utama, seperti Kota Kinabalu

⁷⁹Antara Laut Sulu dan Laut Sulawesi, Sahabat Alam Online vol. II /2008, http://rafflesia.wwf.or.id/enews/page.php?cat=1&id_menu=8 (diunduh 30 Maret 2009).

dan Kuching di Malaysia, Manado di Indonesia, Davao dan Cagayan de Oro di Mindanau dan Puerto Princesa di Palawan, Filipina. Banyaknya perencanaan yang dilakukan dan investasi dalam infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan lebih difokuskan pada hotel yang berada di pusat kota, seperti pembangunan fasilitas ruang pertemuan atau rapat dan *resort* yang letaknya dengan pusat kota⁴⁰. Dengan adanya keindahan alam dan *resort*, maka perjalanan pariwisata akan menawarkan pengalaman kekayaan dan keberagaman indahnnya daerah sekitar.

Gambar 2

Trends in International Arrivals 1995-2006 (in Millions)



Source: Presentation of Ecotourism in BIMP-EAGA: Outlook and Opportunities by Bernardino Moningka Vega, BIMP-EAGA Business Council.

Pentingnya peran BIMP-EAGA dalam mewujudkan ekowisata dilandasi oleh keadaan dari geografis kawasan yang mayoritas berada pada kepulauan dan negara anggota dikelilingi oleh sumber daya alam kelautan yang potensial. Dalam konteks realisasi lainnya, peran BIMP-EAGA melakukan sebuah pertemuan untuk mengemas secara menarik produk dari kepariwisataan ekowisata untuk dipromosikan kepada dunia luar. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya *BIMP-EAGA Meeting Focuses on Ecotourism* dalam agenda 10th *BIMP-EAGA Working Group Meeting on Joint Tourism Development* at Hotel Berakas, yang mengidentifikasi

⁴⁰Kuching City-Santubong Peninsula untuk pariwisata pantai dan budaya (Malaysia); Kinabalu City-berdekatan dengan daerah resort pantai (Malaysia); Manado City-berdekatan dengan resort pantai dan Pulau Bunaken-untuk menyelam dan snorkeling (Sulawesi Utara, Indonesia); Davao City- Resort Pulau Samal (Mindanao, Filipina).

untuk segera membuat logo dan *website* untuk mempromosikan BIMP-EAGA sebagai tujuan utama ekowisata serta untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi investor pariwisata.⁸¹

Dalam BIMP-EAGA terdapat Pusat Fasilitas-BIMP dan organisasi pariwisata lokal dalam kerjasama regional melalui pemasaran dan peningkatan hubungan transportasi. Hal ini untuk memperlancar sektor perjalanan kepariwisataan ke BIMP-EAGA dalam tujuan wisata dari Jepang. Dalam kaitan yang lebih jauh, Pusat Jepang dan ASEAN memberi dukungan penuh terhadap promosi pariwisata BIMP-EAGA yang terbagi kedalam dua tema, yakni: (1) Promosi pariwisata BIMP-EAGA melalui perkembangan sumber daya alam dan pariwisata budaya, (2) Promosi BIMP-EAGA sebagai sub-regional atau tujuan multi-kota dengan tiga tujuan sebagai berikut: mendukung kerjasama dalam bidang HRD (*Human and Resources Destination*-perjalanan alam dan manusia) guna mendukung kegiatan masyarakat lokal, melakukan kerjasama dalam mendukung inisiatif untuk meningkatkan kepedulian EAGA sebagai tujuan wisata dalam sektor perjalanan antar Jepang, dan yang terakhir untuk mendukung lebih lanjut jaringan antara organisasi yang terkait.⁸²

Kerjasama pariwisata dalam BIMP-EAGA yang berbasiskan pada kegiatan ekowisata kini telah mengalami pertumbuhan yang semakin membaik. Selain karena banyaknya kunjungan wisatawan ke daerah kawasan BIMP-EAGA (yang mencapai sekitar 17% dari pasar ASEAN),⁸³ adanya keinginan para wisatawan domestik maupun luar negeri untuk memenuhi kebutuhan wisata mereka. Dengan demikian, tempat dan tujuan wisata cenderung semakin diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan untuk berlibur.

Objek ekowisata di BIMP-EAGA berupa hutan hujan (*rain forest*) di Kalimantan dan Papua, terumbu karang, serta beragam etnik dan budaya.

⁸¹<http://www.rtb.gov.bn/NewsUpdate/2003/july03/020703/main6.htm> (diunduh 22 November 2008).

⁸²<http://www.bimp-eaga.org/projects.php?p=0> (diunduh 23 November 2008).

⁸³http://mdopost.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=7939&Itemid=52 (diunduh 22 November 2008).

Kegiatan yang dilakukan meliputi kunjungan wisatawan ke objek budaya, *diving*, *snorkeling*, *tracking*, naik gunung, permainan memancing dan olahraga petualangan lainnya. Situs warisan dalam kawasan wilayah kerjasama BIMP-EAGA diantaranya, Gunung Kinabalu di Sabah, Tubbataha Reef di Palawan dan Taman Nasional Gua Mulu di Sarawak.

Sebagai kawasan yang memiliki kekayaan alam dan *biodiversity* yang beraneka, konsep ekowisata dimanfaatkan sebagai wisata jelajah ke pedalaman atau wilayah wisata yang berada jauh dari pusat kota. Seperti contohnya:

- a. Caramoan Peninsula di Filipina, wilayah yang terletak 318 km dari Manila ini memiliki bukit batu dengan bentuk yang indah dan airnya yang bersih. Keindahan alam bawah lautnya dapat dijadikan kegiatan *diving* dan *snorkelling*. Biaya yang harus dikeluarkan sekitar 700-750 peso per orang atau 23 USD per orang untuk penginapan selama sehari, untuk mencapai kesana wisatawan harus mengeluarkan 590.50 USD per orang (biaya transportasi dari Manila, transfer ke penerbangan domestik, menyewa bus khusus dan *boat*).
- b. Palawan, Filipina, Puerto Princessa City sebagai kota besar di pulau ini merupakan objek wisata yang indah, tetapi keindahan pulau Palawan Utara El Nido adalah yang paling populer. Biaya yang harus dikeluarkan sekitar 967 USD per orang.
- c. Taman Nasional Ulu Temburong di Brunei Darussalam, di kawasan ekowisata ini, wisatawan dapat menikmati keindahan pedalaman hutan hujan tropis beserta air terjun dengan menaiki perahu panjang. Untuk menghabiskan waktu menikmati perjalanan ekowisata kesini, biaya yang harus dikeluarkan sekitar 989 USD per orang.⁸⁴

⁸⁴The Straits Times, 26 Mei 2009, life travel: Survivor shot here three times, Park and ride.

2.4 Mekanisme BIMP-EAGA dalam Pengembangan Ekowisata

Sebagai jembatan dalam implementasi pariwisata yang berkonsep ekowisata, maka setiap unsur dari kerjasama harus saling mendukung dan melengkapi. Konsep ekowisata yang ada di BIMP-EAGA merupakan penyatuan dari beberapa ukuran pencapaian antara pihak pemerintah, sektor swasta dan masyarakat lokal. Mekanisme yang diterapkan dalam mengembangkan ekowisata di kawasan BIMP-EAGA mengacu pada BIMP-EAGA *Roadmap to Development 2006-2010* serta BIMP-EAGA *Action Plan 2006-2010*.

BIMP-EAGA *Roadmap to Development 2006-2010* mengemukakan bahwa pengembangan seluruh sektor kerjasama harus bersinergi. Dalam sektor pariwisata yang mengusung konsep *community-based ecotourism* atau ekowisata, pengembangan sektor lainnya dalam menunjang keberlangsungan ekowisata seperti transportasi, telekomunikasi, teknologi, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, infrastruktur dan sebagainya merupakan modal utama sebagai langkah menuju keberhasilan implementasi konsep ekowisata di BIMP-EAGA. Dalam BIMP-EAGA *Roadmap to Development 2006-2010* pengembangan kerjasama difokuskan pada:

1. Mempromosikan perdagangan, investasi dan pariwisata *intra-* dan *extra-*EAGA sebagai sektor utama melalui:
 - a. Mempromosikan dan memfasilitasi perdagangan dan investasi *intra-* dan *extra-* EAGA dalam sektor utama, khususnya yang memiliki dampak tinggi terhadap pengembangan Usaha Kecil dan Menengah atau *Small and Medium Enterprises (SME)*. Hal yang dilakukan ialah:
 - Membangun citra dan persepsi yang lebih baik mengenai EAGA sebagai destinasi investasi dan pariwisata di pandangan *stakeholders*, pengunjung dan publik internasional melalui penyebaran informasi yang efektif, hubungan masyarakat, promosi dan program keamanan;
 - Menciptakan kebijakan yang baik dalam pengembangan bisnis, khususnya SMEs di subregion;

- Mendorong secara insentif investor EAGA dalam kerangka kerja yang berada dalam regulasi investasi nasional dan lokal;
 - Menjalankan dengan efektif *joint* EAGA dalam fasilitas dan promosi untuk mempromosikan investasi langsung luar negeri di subregion;
 - Memperkuat jaringan dan hubungan bisnis antara organisasi bisnis dan pariwisata EAGA dengan partner bisnis luar EAGA;
 - Meningkatkan kompetisi dalam EAGA SMEs dalam ruang lingkup global;
 - Meningkatkan *Business Development Services* (BDS) kepada para pengusaha EAGA, terutama sektor SMEs;
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia EAGA.
- b. Memfasilitasi perdagangan barang dan jasa lintas batas, dari dan luar EAGA. Hal yang dilakukan ialah:
- Memperkuat inisiatif *customs, immigration, quarantine and security* (CIQS) atau bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan;
 - Membangun rencana dalam memfasilitasi arus barang dan manusia dan mengurangi biaya transportasi;
 - Membangun transportasi yang dibutuhkan, fasilitas infrastruktur dan *logistical services*;
 - Memformulasikan dan mengimplementasikan promosi destinasi EAGA melalui program paket pariwisata EAGA baik yang tradisional maupun non-tradisional.
- c. Menciptakan informasi arus barang, investasi dan pariwisata di dalam dan luar EAGA.
- Menciptakan sistem pengumpulan, konsolidasi, pembaruan, penyebaran dan pertukaran informasi bisnis antara EAGA *stakeholders* dan *partner* dagangan EAGA;
 - Mempersiapkan dan menyebarkan informasi bisnis dan investasi di EAGA beserta mendorong partisipasi pihak swasta dalam perdagangan, investasi dan pariwisata;

- Menguatkan sistem monitoring dan penyebaran informasi lintas batas EAGA.

2. Pengembangan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan melalui:

a. Menciptakan koordinasi subregional dalam mengembangkan sumber daya alam dan *biodiversity* di EAGA. Hal yang dilakukan ialah:

- Mengembangkan kerangka kerja kerjasama subregion dan mengkoordinasikan perlindungan serta mengelola sumber daya alam dan *biodiversity*.

b. Mempromosikan pelatihan pembangunan berkelanjutan dalam manajemen proyek pembangunan ekonomi. Hal yang dilakukan ialah:

- Meningkatkan peran serta publik dan *private sector partnership* dalam mengembangkan kerjasama dalam proyek pertanian, kehutanan, perikanan, mineral dan energi;
- Mendukung inisiatif untuk mempromosikan pembangunan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan di sektor produktif.

3. Perencanaan dan implementasi dalam mendukung infrastruktur guna menuju integrasi ekonomi melalui:

a. Meningkatkan jalur udara, laut dan darat EAGA. Hal yang dilakukan ialah:

- Mendorong inisiatif publik, pihak swasta dan *public-private sector partnership* dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan transportasi udara, laut dan darat di subregion;
- Menciptakan kebijakan lingkungan dan mendukung inisiatif liberalisasi jalur udara di EAGA melalui *3rd, 4th dan 5th freedom traffic rights* antara destinasi EAGA.

b. Meningkatkan fasilitas infrastruktur dasar EAGA. Hal yang dilakukan ialah:

- Mempromosikan dan memudahkan inisiatif kerjasama publik dan pihak swasta dalam menyediakan fasilitas infrastruktur dasar.
- c. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan informasi dan teknologi komunikasi (ICT) EAGA. Hal yang dilakukan ialah:
- Mendukung dan menjalankan implementasi program pengembangan telekomunikasi yang akan meningkatkan akses pelayanan komunikasi, data dan internet di subregion.
4. Penguatan institusi melalui:
- a. Penguatan koordinasi institusi intra-EAGA. Hal yang dilakukan ialah: Pertama, penguatan mekanisme, prosedur, dan protokol koordinasi institusi dalam EAGA untuk mencapai implementasi yang efektif dari program yang sedang dijalankan (*flagship programs*), proyek dan aktivitas yang teridentifikasi dalam *Roadmap* dan *Action Plan*. Kedua, mendukung program yang akan meningkatkan kapabilitas organisasi EAGA untuk memperbaiki koordinasi dan kerjasama;
- b. Penguatan koordinasi hubungan extra-EAGA. Hal yang dilakukan ialah: Pertama, menguatkan mekanisme untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama EAGA dengan *partner* eksternal, seperti ASEAN, dan kerjasama multilateral lainnya, *partner* pengembangan, ODA *agencies*, dan badan eksternal lainnya. Kedua, meningkatkan dan mengelola hubungan atau dukungan yang baik dalam *technical and financial* dari EAGA *partners* untuk mencapai implementasi yang efektif dari program atau proyek utama.⁸⁵

Dalam BIMP-EAGA *Action Plan* (2006-2010), pemerintah dan swasta bekerjasama dalam seluruh bidang pengembangan. Keterkaitan pengembangan dalam konsep ekowisata dapat dikatakan sebagai penunjang kerjasama lainnya, seperti perdagangan dan investasi. Aktivitas atau program yang dikembangkan dalam BIMP-EAGA *Action Plan* 2006-2010 ialah:

⁸⁵ Based on BIMP-EAGA Roadmap to Development 2006-2010.

2.4.1 Pengembangan Pariwisata

Jika dilihat dari kedatangan wisatawan, baik yang berasal dari dalam (*intra*) maupun luar (*ekstra*) ASEAN, ke-empat negara EAGA memiliki karakteristik pasar yang berbeda (lihat gambar 3).

Tabel 1
Karakteristik Pasar Pariwisata
Negara Anggota Kerjasama BIMF-EAGA
(berdasarkan persentase kedatangan intra- dan ekstra- ASEAN)

Negara	2005	Total	Ekstra ASEAN		Pangsa 2001-2005	
			Intra ASEAN 2001-2005	ASEAN	Intra	Ekstra
Brunei	127	2.921	2.571	350	88.0 %	12.0%
Indonesia	5.002	24.681	10.722	13.959	43.4%	56.6%
Malaysia	16.431	68.778	52.397	16.381	76.2%	23.8%
Philippines	2.623	10.551	709	9.842	6.7%	93.3%

Source: Sekretariat ASEAN, 2007

Indonesia dan Filipina banyak menerima wisatawan dari luar kawasan ASEAN, berbeda dengan Brunei dan Malaysia, kedua negara tersebut lebih banyak menerima kunjungan wisatawan dari intra ASEAN.⁸⁶

Adapun keseluruhan dari persiapan realisasi ekowisata tercantum dalam mekanisme yang terdapat dalam *Joint Tourism Promotion and Marketing (JTPM)* dan pendukung dalam meningkatkan perhubungan udara, air dan darat di EAGA. Dalam mekanisme JTPM, aktivitas yang dilakukan ialah merumuskan dan melaksanakan promosi pariwisata dan program pemasaran di bawah konsep atau prinsip satu tujuan serta meningkatkan citra dan kesan EAGA diantara pengunjung dalam penyebaran informasi yang efektif, promosi dan peningkatan mutu pelayanan pariwisata.

⁸⁶Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, *Memperkuat Sinergi ASEAN di tengah Kompetisi Global*, R. Winantyo dkk, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 135.

Sedangkan dalam mekanisme pendukung perhubungan, aktivitas meningkatkan inisiatif untuk mengurangi biaya perjalanan dalam EAGA melalui: penggunaan jasa transportasi yang paling murah, penurunan biaya perjalanan dan biaya lainnya serta peningkatan kemudahan transportasi. Selanjutnya upaya yang dilakukan juga dengan mendorong program promosi pariwisata yang agresif dan fokus sehingga akan membantu kelanjutan pelayanan udara, air dan darat.

Dalam *Joint Tourism Development Cluster*, ditingkatkan implementasi promosi pariwisata EAGA yang terintegrasi dan program pemasaran yang difokuskan pada pariwisata *Culture, Adventure and Nature (CAN)* ditambah dengan *selam dan golf* serta mempromosikan logo "*Visit EAGA-Your Dream Destin Asian*". Di dalam mendukung program tersebut, hal yang dilakukan diantaranya:

1. EAGA berpartisipasi dalam *event-event* atau pameran pariwisata internasional, seperti *ASEAN Tourism Forum and Conferences, World Tourism Organization, PATA (Pacific Asia Travel Association), China-ASEAN Expo* dan *Japan Investment and Tourism Seminar*;
2. Secara bersama-sama mengatur dan mempromosikan *event* dengan nama EAGA (*signature events*), seperti; *EAGA Friendship Games, EAGA Travex and Travel Mart, Borneo Cup (Sailing Competition), Traditional Regatta*;
3. Menyusun paket dan promosi pariwisata, seperti *Dive Tours, Golf Tours, World Heritage Site Tours, Adventure Tours*, terdiri dari *mountain climbing, trekking, spelunking, Cultural Tours, "Twin City" Tour* (tur kota kembar) antar tujuan EAGA;
4. Mengorganisir "tur familirisasi" EAGA atau pertukaran dari pasar-pasar utama, seperti China, Japan, Korea, Australia, dan Eropa;

5. Mengadakan misi pemanding untuk pengembangan pariwisata di BIMP-EAGA (dengan kerjasama GTZ).⁸⁷

Pengembangan ekowisata di BIMP-EAGA dipadu dari pengembangan pariwisata dan manajemen lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan kelestarian alam sekaligus mendapatkan devisa negara. Diharapkan para pengunjung dapat menikmati keindahan alam dengan melakukan beberapa hal pelestarian ataupun pendidikan dan hiburan di alam terbuka.

2.4.2 Pengembangan Manajemen Lingkungan

Melalui badan pengembangan manajemen lingkungan, pengembangan kerangka ekowisata (paduan antara wisata alam dengan aspek lingkungan) untuk kerjasama inter-EAGA, meliputi pula gabungan antara perlindungan alam dengan manajemen sumber daya alam dan *biodiversity*, dimana semua ini akan menciptakan suatu program yang mendorong lahirnya ekowisata. Melalui *cluster Natural Resources Departement (NRD Cluster)*, BIMP-EAGA memformulasikan dan mengimplementasikan kerjasama yang berupa kegiatan dalam melindungi dan menjaga sumber daya alam terutama yang masih asli dan berada di daerah. Program yang sedang berjalan di antaranya *Heart of Borneo* dan *Sulu-Sulawesi Marine Eco-Region Project*.⁸⁸

2.4.3 Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Melalui pengembangan usaha kecil dan menengah dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia, program yang dicanangkan ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keahlian dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan berdasarkan atas standar kompetensi EAGA, misalnya pariwisata dan keahlian lainnya. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan standar kompetensi BIMP-EAGA

⁸⁷Based on BIMP-EAGA Action Plan Paper (2006-2010).

⁸⁸Ibid, hlm. 7.

pada 2009.⁸⁹ Dalam pengembangan ekowisata, unsur usaha kecil dan menengah memiliki andil yang besar dalam meningkatkan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat setempat.

Hal pertama yang dilakukan bagi masyarakat setempat ialah diberikannya pengarahan dan pemahaman mengenai kerjasama BIMP-EAGA beserta unsur-unsur di dalamnya. Peran dari pemerintah daerah dan pengusaha merupakan jalan pembuka bagi masyarakat untuk berperan dalam EAGA.

Dalam sektor ekowisata, pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia diupayakan melalui kesempatan atau perluasan pasar dalam kerjasama EAGA, penambahan unsur teknologi yang dianggap perlu, pelatihan dan pengembangan kewirausahaan serta penguatan jaringan wirausaha antar daerah dengan melakukan pertemuan secara rutin dengan pihak pemerintah pusat, daerah, lembaga-lembaga yang terkait dan pihak swasta.⁹⁰

2.4.4 Pengembangan Transportasi, Infrastruktur, dan ICT (*Information, Communication and Technology*)

Transportasi yang berperan penting dalam mendukung pariwisata dilakukan dengan menginisiasi kesepakatan bilateral dalam pengaturan pembebasan transportasi di BIMP-EAGA dengan kerangka kesepakatan ASEAN, seperti 3rd or 4th *freedom traffic rights* sepenuhnya antara BIMP-EAGA dan IMT-GT, 5th *freedom traffic rights* sepenuhnya dalam BIMP-EAGA tanpa pembatasan kapasitas, frekuensi dan tipe pesawat untuk pelayanan penumpang dan kargo, implementasi kesepakatan kesamaan tarif pelabuhan.⁹¹ Dalam kerjasama BIMP-EAGA yang wilayahnya berbatasan dengan lautan, sarana transportasi yang banyak digunakan adalah melalui laut, kemudian juga udara. Jalur udara sebagai salah satu dari moda transportasi yang dapat menghubungkan negara satu dengan negara lainnya dalam waktu yang relatif cepat ketimbang

⁸⁹Based on BIMP-EAGA Action Plan Paper (2006-2010), hlm 4.

⁹⁰Ibid, hlm. 5.

⁹¹Ibid.

menggunakan sarana transportasi lainnya, rute perjalanan dari atau ke negara tujuan kawasan BIMP-EAGA dapat ditempuh lebih cepat.

Kemudian dalam pertemuan antara para menteri pada 31 Juli 2008 di Marriot Hotel, Putrajaya, Malaysia, melalui *the 3rd BIMP-EAGA Ministers Meeting* telah disetujui pencapaian kerjasama dalam sektor transportasi yang meliputi tiga bidang, yakni: (1) Pencapaian MoU dalam pengembangan hubungan udara, (2) Pergerakan bus dan kereta lintas batas, dan (3) Pencapaian efisiensi dan promosi dalam perhubungan laut.⁹² Dalam mendukung ekowisata di BIMP-EAGA melalui pengembangan transportasi, pemerintahan negara-negara EAGA membuat kebijakan yang mempermudah masyarakat melakukan perjalanan antar negara maupun antar tempat tujuan wisata. *Code Share* dan *On Stop Over* merupakan kebijakan yang cenderung untuk mendukung pariwisata. *Code Share* bersifat profit dan dari pemerintah ke pemerintah. Sedangkan *On Stop Over*, jadwal tidak setiap hari, tetapi beberapa hari sekali dan ketika stop kita dapat menggunakan armada penerbangan yang sama, jadi biaya transportasi dapat lebih murah.

Pada dasarnya kesepakatan kerjasama di BIMP-EAGA merujuk pada kesepakatan ASEAN, hanya saja kesepakatan ASEAN lebih banyak didominasi oleh aspek politik dan keamanan, sehingga realisasi kerjasama ekonomi ASEAN sulit diwujudkan. Dalam kerjasama di sektor transportasi, kesepakatan ASEAN dilakukan melalui *Open Sky Policy*, dimana operator penerbangan di negara ASEAN bebas untuk melakukan penerbangan antar negara ASEAN merupakan pencetus bagi BIMP-EAGA (dan kemungkinan besar juga untuk kerjasama sub-regional lainnya) untuk merealisasikan hal tersebut. Berbeda dengan ASEAN yang mengalami hambatan karena masing-masing negara harus menentukan poin-poin *open sky*-nya, BIMP-EAGA justru telah bersepakat dengan pertama-tama membuka jalur penerbangan dari Pontianak ke Kuching, dan ke Bandar Sri

⁹²Based on Report of the 3rd BIMP-EAGA Transport Ministers Meeting.

Begawan. Walaupun dalam implementasi atau realisasinya tidak secepat yang diharapkan.⁹³

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekowisata di kawasan BIMP-EAGA mengacu pada konsep *community-based ecotourism* yang mengusung pandangan bahwa peningkatan di sektor pariwisata yang ramah terhadap alam harus seimbang dengan meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Jika dilihat dari latar belakang terbentuknya, kerjasama EAGA, dimana pariwisata menjadi salah satu sektor utama, maka pengembangan ekowisata di kawasan EAGA akan mengalami kemajuan secara perlahan. Hal ini dikaitkan dengan ketersediaan atau potensi kekayaan flora dan fauna yang beraneka dan keindahan alam bawah lautnya yang memikat, namun masih terdapat beberapa hambatan kebijakan, dimana belum terdapat kesepakatan diantara negara anggota EAGA, perbedaan persepsi terhadap teritorial penunjang ekowisata, sarana dan prasarana yang kurang memadai, investasi yang belum mencapai kesempurnaan dan sebagainya. Sejauh ini memang pihak terkait antar negara anggota melakukan berbagai pertemuan, baik yang bersifat pertemuan kecil maupun besar, tetapi realisasinya masih terlihat lambat. Ketidakkonsistenan dan kurangnya koordinasi di dalam negeri menjadi persoalannya.

⁹³Salah satu negara ASEAN yang sudah mengaplikasikan hak penerbangan kelima hanya Singapura. Dimana *free freedom flight rights* telah mulai diterapkan, contohnya; Penerbangan dari Indonesia mendarat di Kuching dan mengambil penumpang domestik Malaysia kemudian dibawa ke negara ketiga-Brunei. Di ASEAN kesepakatan tercetus pada 2003-2004 tetapi mekanisme implementasi baru disetujui 2008. Dalam hal ini *Open Sky Policy* tetap melarang adanya penumpang domestik yang menaiki operator penerbangan negara lain dengan tujuan domestik pula, tetapi jika tujuannya penerbangan negara lain (masih dalam kawasan ASEAN) itu boleh.

BAB III

IMPLEMENTASI EKOWISATA EAGA DI INDONESIA

Indonesia sebagai salah satu negara anggota kerjasama sub-regional BIMP-EAGA dan sebagai negara kepulauan, memiliki posisi strategis yang memungkinkan untuk memanfaatkan keberadaannya geografisnya yang sangat potensial. Dalam bidang pariwisata, Indonesia dapat dikatakan kaya akan sumber daya alam hayati dan kebudayaan yang beranekaragam dari Sabang sampai Merauke. Melalui ekowisata, potensi yang dimiliki akan menjadi kekuatan yang cukup baik dalam memperkenalkan Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia yang memiliki tujuan pariwisata berbasis alam dan masyarakat.

Dalam implementasinya, ekowisata di Indonesia lebih mengacu pada perjalanan wisata alam, wisata bahari ataupun kegiatan berolahraga alam disertai dengan tindakan melindungi dan menghargai alam dengan melakukan hal-hal yang bersifat positif, seperti melakukan penanaman pohon, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan bahan-bahan alami dalam melakukan kegiatan wisata (tidak menggunakan deterjen dan sabun secara berlebihan), tidak menangkap atau menyakiti fauna dan memetik flora di sekitar kawasan wisata, dan mempunyai rasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan alam beserta pemanfaatan hasil masyarakat lokal.⁹⁴ Beberapa hal mencerminkan pariwisata Indonesia yang kian berkembang ke arah pelestarian alam, ramah lingkungan,

⁹⁴Mary Lou Driciger, dalam artikelnya *Golfing in Borneo-A Sensory Experience*, http://www.thingsasian.com/stories-photos/35239/15129907/5/brt0_art (diunduh 20 Maret 2009). Dalam artikelnya tersebut ia mengatakan bahwa ketika sedang bermain golf di Borneo Island, ia ditemani oleh banyak pemandangan dan bunyian yang indah. Suara alami air terjun yang turun dari pegunungan, kicauan burung, pemandangan alami pepohonan pepaya dan mangga, kupu-kupu indah yang terbang kesana-kemari, terdapat tempat pemeliharaan kurang lebih 1300 macam bunga anggrek dan yang lebih menakjubkan adalah ketika ia melihat sebuah tempat pemeliharaan komodo yang berada dalam kawasan kursus golf tersebut. Hewan itu bersikap bahwa mereka berada dalam alam terbuka atau tempat dimana mereka berada, dan para wisatawan juga tidak mengusik ataupun mengganggu kegiatan komodo yang sedang melakukan aktifitas mereka. Dengan menikmati pemandangan dan memperhatikan secara alami keseluruhan kejadian tersebut, maka tanggungjawab serta kegiatan ekowisata sudah dapat dikatakan berjalan sesuai prosedur dan memenuhi kriteria pelestarian alam serta lingkungan sekitar.

pemberdayaan masyarakat setempat, potensi menuju pembangunan nasional dan pengelolaan kawasan wisata yang bertanggung jawab.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada butir c yang menyatakan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integrasi dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.⁹⁵ Melalui Undang-Undang tersebut bidang pariwisata di Indonesia dapat dikatakan bersifat fleksibel dalam menanggapi pembaharuan dan kemajuan dari tingkat global, kenyataannya ialah penggantian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dunia pariwisata saat ini (yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009).

Bidang pariwisata di Indonesia berperan banyak dalam mengenalkan potensi wilayah yang dimiliki, kekayaan alam dan keanekaragaman budaya yang ada. Berdasarkan kerjasama sub-regional di kawasan timur ASEAN (BIMP-EAGA), Indonesia yang mencakup wilayah timurnya, memiliki keunggulan sebagai wilayah wisata yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata. Hal tersebut dikarenakan kekayaan alam hayati baik berupa hutan dan keindahan alam bawah lautnya beserta seluruh unsur di dalamnya dapat dimanfaatkan sekaligus dilestarikan. Pemberdayaan yang dilakukan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan serta menciptakan perlindungan baru bagi masyarakat lokal di bidang perekonomian.

Selain keunggulan yang dimiliki sektor pariwisata Indonesia, terdapat juga beberapa kekurangan, seperti kurang memadainya sarana dan infrastruktur menuju kawasan wisata yang berada jauh di pedalaman wilayah Indonesia (yang masih alami), kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih sepenuhnya akibat krisis Asia pada 1997, situasi politik Indonesia yang tidak stabil (ketika berlangsungnya pemilu), gejolak politik dan sosial di beberapa wilayah Indonesia,

⁹⁵http://www.budpar.go.id/filedata/4636_1364-UUTentangKepariwisataanet1.pdf (diunduh 30 Maret 2009).

bencana alam, isu penyakit menular dan sebagainya. Namun sejauh ini, Indonesia menghadapi seluruh keunggulan dan kekurangannya yang masih belum dapat dikatakan berkembang, yang ada hanya perencanaan dan sistematika saja sedangkan realisasinya masih belum dapat diwujudkan. Hal tersebutlah yang menjadi hambatan bagi perkembangan pariwisata di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan potensi ekowisata yang memadai sudah seharusnya Indonesia merealisasikan pembangunan dan kelengkapan sarana dan infrastruktur hingga mencapai kawasan wisata pedalaman dengan menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung.

3.1 Pariwisata Indonesia

Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, yakni: (1)meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata, (2)mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup, (3)meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar, dan (4)menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggung jawabkan (*accountable*).⁹⁶

Pengembangan pariwisata di Indonesia di dorong oleh kerjasama kawasan, yakni ASEAN dan kerjasama sub-kawasan atau sub-regional yang ada di dalam kawasan regional. ASEAN merumuskan strategi promosi pariwisata "*single tourism destination*" untuk menciptakan iklim kondusif bagi industri pariwisata ASEAN dan meningkatkan arus wisatawan di antara negara-negara anggota.⁹⁷ Melalui strategi pengembangan pariwisata ASEAN, kerjasama sub-regional di

⁹⁶Karya Ilmiah Mentia Hatta Swasono, *Strategi Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Menjelang AFTA 2003*.

⁹⁷Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 60.

sektor pariwisata diaktifkan kembali melalui *Cruise Working Group* untuk memperkuat kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN.

Sebagai salah satu bidang kerjasama, sektor pariwisata memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemasukan atau devisa negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perbandingan antara penerimaan devisa pariwisata dengan jenis komoditi lainnya. Meskipun sempat mengalami penurunan tetapi sektor pariwisata Indonesia pada akhirnya mengalami peningkatan pada nilai pendapatannya, bahkan melebihi pendapatan ketika berada pada posisi kedua (Lihat tabel 2 pada tahun 2004 dan 2007).

Tabel 2
Penerimaan Devisa Pariwisata Indonesia
Dibandingkan Dengan Ekspor Lainnya 2004-2007

No	2004		2005		2006		2007	
	Jenis Komoditi	Nilai (Juta US \$)	Jenis Komoditi	Nilai (Juta US \$)	Jenis Komoditi	Nilai (Juta US \$)	Jenis Komoditi	Nilai (Juta US \$)
1	Minyak & Gas Bumi	15.587,50	Minyak & Gas Bumi	19.231,59	Minyak & Gas Bumi	21.209,50	Minyak & Gas Bumi	17.464,52
2	Pariwisata	4.797,88	Pakaian Jadi	4.966,91	Pakaian Jadi	5.608,16	Minyak Kelapa Sawit	5.997,75
3	Pakaian Jadi	4.271,65	Pariwisata	4.521,90	Karet Olahan	5.465,14	Pariwisata	5.345,98
4	Alat Listrik	3.406,91	Alat Listrik	4.364,11	Minyak Kelapa Sawit	4.817,64	Karet Olahan	5.008,69
5	Tekstil	3.301,55	Minyak Kelapa Sawit	3.756,28	Alat Listrik	4.448,74	Pakaian Jadi	4.739,74
6	Minyak Kelapa Sawit	3.233,22	Tekstil	3.703,90	Pariwisata	4.447,97	Alat Listrik	3.947,72
7	Kayu Olahan	3.136,69	Karet Olahan	3.545,68	Tekstil	3.908,76	Tekstil	3.474,75
8	Karet Olahan	2.853,52	Kayu Olahan	3.086,16	Kayu Olahan	3.324,97	Bahan Kimia	3.031,23
9	Kertas & Brg dr Kertas	2.227,83	Kertas & Brg dr Kertas	2.324,77	Kertas & Brg dr Kertas	2.859,22	Kertas & Brg dr Kertas	2.742,11
10	Bahan Kimia	1.799,56	Bahan Kimia	2.079,91	Bahan Kimia	2.697,38	Makanan Olahan	1.818,41
11	Makanan Olahan	1.407,17	Makanan Olahan	1.806,31	Makanan Olahan	1.965,56	Kayu Olahan	1.157,20

Sumber : BPS
*) Data Jan-Okt 2007

Fluktuasi yang dialami oleh Indonesia dalam sektor pariwisata terlihat dari perbandingan dengan jenis komoditi lainnya. Pada 2004, pariwisata Indonesia menduduki peringkat kedua dalam memberikan kontribusinya terhadap pendapatan devisa negara (sebesar 4.797,88 USD). Tahun 2005, penurunan terjadi dengan menduduki peringkat ketiga dan drastis pada tahun 2006 yang menduduki peringkat ke-enam (dengan mengalami penurunan sebesar 73,93 USD). Kemudian pada 2007, pariwisata Indonesia kembali bangkit dengan pengembangan melalui beberapa kawasan pariwisatanya. Jika dibandingkan dengan komoditi lainnya seperti pakaian jadi dan karet olahan, industri pariwisata dapat dikatakan tidak mengalami penurunan yang drastis dalam hal penerimaan devisa.

Jika dilihat dari kontribusi pariwisata Indonesia yang telah menjadi salah satu sumber pendapatan negara, maka pengembangan serta peningkatan mutu pariwisata harus ditingkatkan. Hal tersebut untuk menarik minat atau perhatian wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik agar mau berkunjung ke Indonesia. Pada saat ini, minat wisatawan mancanegara lebih besar daripada wisatawan domestik.

Frekuensi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan domestik serta jumlah pengeluaran mereka selama berada di Indonesia, dan lama tinggal dapat dilihat pada tabel dibawah. (Lihat tabel 4 dan tabel 5). Dengan melihat perkembangan dalam setiap tahunnya, maka dapat dinilai bahwa kecenderungan situasi pariwisata saat ini akan semakin membaik dan berpotensi untuk lebih memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara. Selain itu, meskipun mengalami penurunan dalam beberapa tahunnya, potensi penerimaan devisa negara melalui sektor pariwisata tetap mengalami peningkatan meskipun sedikit demi sedikit. Karakteristik berdasarkan latar belakang pekerjaan, gender dan keperluan wisatawan yang datang ke Indonesia juga mempengaruhi persentase peningkatan maupun penurunan kunjungan.

Tabel 3

**Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Menurut Rata-Rata Pengeluaran, Lama Tinggal dan Penerimaan Devisa
2000-2007**

TAHUN	JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA	RATA-RATA PENGLUARAN PER ORANG (USD)		RATA- RATA LAMA TINGGAL (HARI)	PENERIMAAN DEVISA (JUTA USD)
		PER KUNJUNGAN	PER HARI		
2000	5.064.217	1.135,18	92,59	12,26	5.748,80
2001	5.153.620	1.053,36	100,42	10,49	5.396,26
2002	5.033.400	893,26	91,29	9,79	4.305,56
2003	4.467.021	903,74	93,27	9,69	4.037,02
2004	5.321.165	901,66	95,17	9,47	4.797,88
2005	5.002.101	904,00	99,86	9,05	4.521,89
2006	4.871.351	913,09	100,48	9,09	4.447,98
2007	5.505.759	970,98	107,70	9,02	5.345,98

Statistical Report on Visitor Arrivals to Indonesia 2000-2007.

Source: http://www.budpar.go.id/filedata/2474_1149-bukussaku2007indonesia.pdf

Tahun 2000 merupakan tahun keberhasilan bagi Indonesia dalam sektor pariwisata (jika dibandingkan pada tahun sesudahnya), kemudian pada tiga tahun kemudian (2001-2003) sektor pariwisata mengalami penurunan pendapatan devisa, hal ini disinyalir karena situasi dan kondisi Indonesia pada saat itu kurang kondusif dalam hal keamanan karena terjadi pemberontakan maupun konflik komunal di beberapa daerah Indonesia, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), konflik komunal di Poso dan Ambon. Kondisi lain yang mempengaruhi sektor pariwisata Indonesia adalah terjadinya musibah dan bencana alam, seperti tsunami, tanah longsor, banjir, dan sebagainya). Tingginya kriminalitas di beberapa daerah di Indonesia turut mempengaruhi pengembangan pariwisata di Indonesia, karena hal ini mengurangi

faktor kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat tertentu.

Pada tahun berikutnya, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan meningkat sebanyak 760,86 USD, kemudian mengalami penurunan kembali pada periode 2005-2006. Hal ini dikarenakan kondisi keamanan Indonesia kurang stabil, situasi pemilihan umum dan merebaknya kasus flu burung. Kemudian pada 2007 pariwisata Indonesia mulai mengalami peningkatan kembali, mencapai sebesar 898 USD. Dengan grafik penurunan yang hampir lebih banyak terjadi daripada grafik kenaikan, pengembangan sektor pariwisata Indonesia harus dilakukan secara lebih serius agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi devisa negara.

Tabel 4

**Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik
Menurut Rata-Rata Pengeluaran, Lama Tinggal Dan Penerimaan Devisa
2003-2006**

TAHUN	JUMLAH WISATAWA N NASIONAL	RATA-RATA PENGELUARAN PER ORANG (USD)		RATA-RATA LAMA TINGGAL (HARI)	PENERIMAAN DEVISA (JUTA USD)
		PER KUNJUNGA N	PER HARI		
2003	3,769,000	915.55	82.33	11.12	3.450,49
2004	4,270,000	859.81	77.88	11.04	3.671,50
2005	4,806,000	683.78	83.90	83.90	3.286,40
2006	5,040,499	777.71	100.87	7.71	3.920,05

Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Tahun 2006
http://www.budpar.go.id/filedata/2474_1149-bukusaku2007indonesia.pdf

Turun naiknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara jelas berdampak pada turun naiknya pendapatan atau devisa dari sektor pariwisata. Tetapi perbandingan antara kenaikan dan penurunan tidak terlalu tajam, penerimaan devisa secara perlahan mengalami kenaikan. Pada 2004 terlihat

Universitas Indonesia

peningkatan pendapatan devisa negara yang berasal dari jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata. Bertambahnya jumlah pengunjung menjadi sebanyak 501,000 orang, berkolerasi positif dengan jumlah penerimaan devisa yang juga meningkat sebesar 221,01 USD. Tetapi pada 2005, Indonesia mengalami penurunan, kemudian pada 2006 mengalami peningkatan kembali, baik dari jumlah wisatawan maupun dari penerimaan devisa negara.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa minat wisatawan domestik masih rendah untuk mengunjungi kawasan wisata yang ada di Indonesia. Hal ini berbeda dengan wisatawan mancanegara yang memiliki minat untuk mengunjungi kawasan wisata di Indonesia. Dapat dilihat dari pemasukan devisa pada 2003 sampai dengan 2006 (karena untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 dan tahun 2007, tidak tersedia data penerimaan devisa untuk kunjungan wisatawan domestik), pada 2003 jumlah pemasukan devisa yang berasal dari wisatawan mancanegara mencapai 4.037,02 USD sedangkan dari wisatawan domestik hanya sebesar 3.450,49. USD Pada 2006, keduanya (baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik) mengalami penurunan pemberian kontribusi dalam pemasukan devisa, sebesar 4.447,98 USD diberikan oleh wisatawan mancanegara dan 3.920,40 USD diberikan oleh wisatawan domestik. Faktor keamanan, musibah bencana alam dan isu-isu non-konvensional tampaknya menjadi penyebab utama penurunan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara sekaligus penurunan penerimaan devisa.

Bagi para wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, segi keamanan dan kondisi alam menjadi faktor yang sangat penting sebelum mereka akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Berdasarkan daerah tujuan wisata, jumlah pemesanan dan penggunaan tempat penginapan di setiap provinsi di Indonesia dapat dilihat lebih jelas dalam Tabel 6. Dalam penilaian penggunaan tempat penginapan, dalam angka rata-ratanya terlihat Kalimantan Tengah dan Maluku Utara yang memiliki tingkat kenaikan perlahan tetapi pada akhirnya mengalami kenaikan yang baik pada tahun 2007 (meskipun mengalami angka

penurunan secara tajam pada tahun 2004).⁹⁸ Sedangkan kemajuan yang terjadi jika dilihat dari angka penggunaan tempat penginapan, daerah Gorontalo, Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat, ketiga wilayah tersebut dapat mengejar dengan angka rata-rata yang cukup baik jika dinilai sebagai wilayah atau kawasan yang baru terbentuk.⁹⁹

Jika dilihat dari tujuan kedatangan pengunjung ke Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia membagi kategori pengunjung ke dalam tiga kelompok, yakni; (1) persentase dalam kategori berlibur atau melakukan perjalanan wisata mencapai 56,53 % pada 2006 dan menurun pada 2007 dengan 56,04 %; (2) kategori pengunjung yang melakukan perjalanan ke Indonesia untuk keperluan bisnis sebanyak 38,35 % pada 2006 dan menurun pada 2007 dengan proporsi 35,89 %; (3) yang terakhir pengunjung dengan kategori *others* atau memiliki tujuan selain pada poin 1 dan 2 di atas, pada 2006 mencapai 5,21 % dan mengalami peningkatan pada 2007 dengan 6,07 %.¹⁰⁰ Dengan kata lain, potensi Indonesia dalam pariwisata menjadi suatu ketertarikan bagi para pengunjung luar negeri untuk melakukan kegiatan atau perjalanan wisata ke beberapa daerah yang ada.

Selain itu, sebagai langkah untuk memajukan pariwisata Indonesia, para pelaku pariwisata, seperti pemerintah Indonesia (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), pihak swasta dan masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemitraan yang strategis dan saling berkoordinasi demi kepentingan nasional. Upaya yang dilakukan dalam pencapaiannya ialah melalui pembagian tugas yang jelas antara para pelaku pariwisata. Pemerintah pusat dan daerah melakukan promosi dan upaya-upaya konkret seperti perbaikan infrastruktur dan keamanan untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia. Selanjutnya pemerintah daerah melakukan upaya-upaya konkret dalam

⁹⁸Kalimantan Tengah dan Maluku pada tahun 2004 masing-masing memiliki angka persentase 42.70 dan 23.50. pada tahun sebelumnya keduanya memiliki persentase sebesar 63.94 dan 33.27, kemudian pada tahun 2007 persentase sebesar 72.50 dan 60.20.

⁹⁹Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat tidak memberikan kontribusi, hal ini dikarenakan ketiga wilayah tersebut belum menjadi propinsi sendiri. Kemudian baru pada tahun 2006 dan 2007 mereka memberikan kontribusi angka persentase sebesar 41.94 berasal dari Gorontalo, 36.52 dari Sulawesi Barat dan 34.97 dari Irian Jaya Barat. Pada 2007 ketiganya memberikan 58.40, 38.30 dan 37.20.

¹⁰⁰Based on The Center of Data Management and Network System, Ministry of Culture and Tourism, The Republic of Indonesia.

pembenahan infrastruktur daerah, seperti sarana kebersihan dan promosi tujuan wisata daerahnya sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing. Sektor swasta melakukan investasi dan promosi produk-produk spesifik wisata yang lebih berorientasi pada tujuan komersial. Di samping itu, dukungan masyarakat daerah berupa pemahaman mengenai konsep dan pengembangan ekowisata dibutuhkan dalam memelihara dan meningkatkan potensi budaya lokal dan nasional, peninggalan sejarah dan pelestarian lingkungan.¹⁰¹

3.2 Ekowisata di Indonesia

Konsep ekowisata yang dikembangkan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan konsep ekowisata yang di definisikan oleh WWF (yang diadopsi dalam pengembangan ekowisata di BIMP-EAGA) dan lembaga ekowisata internasional (dapat dikatakan pula mengikuti konsep ekowisata WWF dan *International Ecotourism Society/IES*). Dalam pemahamannya, pemerintah berupaya mengembangkan ekowisata sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami yang mendukung upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (IES). Secara konseptual ekowisata dapat didefinisikan sebagai "konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah setempat".¹⁰²

Sebagai tujuan pariwisata baru di Indonesia, konsep ekowisata dapat mewakili pengelolaan dan pemeliharaan terhadap kekayaan alam yang sudah seharusnya dilindungi serta dilestarikan keberadaannya, selain itu makna dari ekowisata juga mengacu pada keikutsertaan masyarakat setempatnya dalam berperan memajukan dunia pariwisata nusantara sekaligus mendapatkan penghasilan. Hal tersebut mengacu pada pengembangan pariwisata ke arah *community-based ecotourism* yang diangkat dalam kerjasama sub-regional BIMP-

¹⁰¹R. Winantyo, Rahmat Dwi Saputra, dkk, *op.cit*, hlm. 142.

¹⁰²Hasil wawancara Devy Putri Kussanti dengan Drs. Agus Priyono MM, Kasubdit Keterpaduan Antar Wilayah, Direktorat Produk Pariwisata, Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Depbudpar, wawancara by email, 30 April 2009 pukul 14.00.

EAGA. Terdapat tiga hal penting dan menjadi ciri dari ekowisata di EAGA, yakni:

1. Wisata yang bertanggung jawab, artinya wisatawan melakukan perjalanan wisata ke daerah alamiah sambil menjaga lingkungan tersebut;
2. Pelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari wisata itu sendiri;
3. Wisata juga bertujuan untuk meningkatkan orang-orang lokal di sekitar wilayah wisata, terutama tingkat kehidupan melalui pendapatan dari kedatangan wisatawan.¹⁰³

Hal diatas sesuai dengan konsep pengembangan pariwisata di ASEAN, yakni melalui upaya pengembangan kualitas pariwisata dan sumber daya manusia di bidang pariwisata, dengan kriteria dan persyaratan *ecotourism*, *home stay*, jasa makanan dan minuman.¹⁰⁴

Selain itu, sebagai salah satu negara anggota kerjasama sub-regional BIMP-EAGA, mekanisme konsep ekowisata di Indonesia sejalan dengan BIMP-EAGA *Action Plan* 2006-2010, yang mengembangkan beberapa aspek seperti:

1. Pengembangan usaha kecil dan menengah (*Small and Medium Enterprises-SME*), melalui:
 - a. Menyediakan insentif dan dukungan bagi investor sektor swasta dalam perkembangan sektor pariwisata;
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keahlian dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan berdasarkan atas standar kompetensi EAGA;
 - c. Mengatur sektor swasta dalam tugas penjualan dan pembelian/pertemuan bisnis yang sesuai;
 - d. Meningkatkan dan memperkuat jaringan/hubungan bisnis diantara organisasi bisnis EAGA dan partner eksternal.

¹⁰³Based on workshop *ecotourism* dan rapat koordinasi persiapan 5th BIMP-EAGA JTD Cluster Meeting, hlm. 2.

¹⁰⁴Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 61.

2. Manajemen lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, melalui:
 - a. Pengembangan kerangka untuk kerjasama inter-EAGA dalam menggabungkan perlindungan dan manajemen sumber daya alam dan *biodiversity* dalam subregion;
 - b. Mendorong dan mendukung pihak swasta yang baik untuk berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya alam yang sesuai dengan program perlindungan lingkungan.
3. Pengembangan pariwisata, melalui:
 - a. Meningkatkan *intra-* dan *extra-* perdagangan di bidang pariwisata dan uang masuk dari bidang pariwisata dengan merumuskan promosi pariwisata dan program pemasaran dengan satu tujuan;
 - b. Mendorong peningkatan investasi di sektor *public* dan *private* dan meningkatkan serta memberikan kemudahan bagi sektor pariwisata yang baru untuk menarik para pengunjung;
 - c. Meningkatkan citra yang lebih menyenangkan bagi pengunjung dalam penyebaran informasi yang efektif, promosi dan peningkatan mutu pelayanan;
 - d. Meningkatkan inisiatif untuk mengurangi biaya perjalanan melalui, menggunakan jasa transportasi yang paling murah, penurunan biaya perjalanan dan biaya lainnya, serta peningkatan kemudahan transportasi;
 - e. Mendorong kelanjutan pelayanan dan melanjutkan operasional di bidang jasa udara, laut dan darat.
4. Pengembangan transportasi, infrastruktur dan ICT-informasi komunikasi dan teknologi, melalui:
 - a. Mengembangkan pelayanan udara, laut dan darat di wilayah subregional yang akan mendukung program pengembangan dengan kemungkinan bantuan dari *partner* pengembangan;
 - b. Menyediakan insentif dan dukungan untuk meningkatkan *private sector* termasuk *partner public-private* dalam pengembangan sarana transportasi dan penyediaan jasa rute transportasi yang sudah seharusnya diberikan;

- c. Mendukung kesepakatan bilateral, pengaturan dibebaskannya transportasi antar negara EAGA dengan kerangka kesepakatan ASEAN, seperti:
- 3rd/4th *freedom traffic rights* sepenuhnya antara BIMP-EAGA dan IMT-GT;
 - 5th *freedom traffic rights* sepenuhnya dalam BIMP-EAGA tanpa pembatasan kapasitas frekuensi dan tipe pesawat untuk pelayanan penumpang dan kargo;
 - Implementasi kesepakatan penyamaan tarif pelabuhan.
5. Penguatan institusional, melalui:
- a. Meningkatkan dan mendukung teknis dan sumber keuangan *partner development* EAGA untuk melaksanakan proyek;
6. Implementasi program *flagship* dan proyek, melalui:
- a. Meningkatkan dan melanjutkan implementasi jumlah dan nilai proyek bisnis SME;
 - b. Merumuskan dan mengimplementasikan manajemen sumber daya alam melalui aktivitas kerjasama dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam. Hal ini mendukung implementasi dari inisiatif HoB dan SSME;
 - c. Meningkatkan lalu lintas turis atau pengunjung dan penerimaan pariwisata untuk *intra-* dan *extra-* EAGA;
 - d. Pengembangan produk dan layanan pariwisata yang telah ada dan yang baru untuk mendukung produk dan layanan pariwisata;
 - e. Pengembangan bahan-bahan promosi;
 - f. Penyediaan insentif dan kebijakan yang mendukung investor di sektor pariwisata;
 - g. Penyelesaian proyek infrastruktur jalan;
 - h. Peningkatan jumlah rute udara, laut dan darat.¹⁰⁵

Tingkat kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap ekowisata hingga saat ini masih sangat minim. Ketidaktahuan dan salah persepsi mengenai hakekat

¹⁰⁵Based on BIMP-EAGA Action Plan 2006-2010.

ekowisata disebabkan oleh kurang perhatiannya masyarakat Indonesia terhadap keberlangsungan sumber daya alam hayati. Sebagai contoh; penggundulan hutan dan kasus *illegal logging*, pengiriman ilegal kuda laut dan beberapa jenis burung yang berasal dari kawasan timur Indonesia ke luar negeri, pencurian beberapa jenis ikan hias laut dan terumbu karang untuk dijual ke luar negeri, penggunaan bom dalam mendapatkan ikan dan sebagainya.

Hal tersebutlah yang membuat Indonesia semakin berusaha untuk melakukan upaya-upaya implementasi konsep ekowisata EAGA sebagai acuan pengembangan ekowisata di Indonesia (khususnya Indonesia kawasan timur). Upaya inovasi dan kreasi dalam pembangunan kepariwisataan dalam konteks ekowisata yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dicontohkan dengan, kebijakan lintas sektoral mengenai visa (pemberlakuan *visa on arrival* tertanggal 1 Februari 2004), pengembangan sarana dan investasi, pengembangan *community base* melalui *village tourism*, penetapan standarisasi produk dan kompetensi, diversifikasi produk termasuk program kapal pesiar (*cruise-lines*), kampanye Ayo Jelajah Nusantara dan peluncuran branding Indonesia *The Ultimate in Diversity* serta upaya peluncuran program *HIP-HOP Pass for Intra Asean Travel 2004* bersama dunia usaha pariwisata, *road show*, konsistensi mengikuti *travel mart* dan *event* internasional di luar negeri.¹⁰⁶

Ketika perkembangan pariwisata mulai merambah pada tingkat penerapan konsep ekowisata, Indonesia dengan beberapa implementasinya telah melibatkan diri dalam pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dan peduli akan lingkungan. Dengan realisasi pembangunan *ecoterminal* maka dinyatakan perjalanan ekowisata dalam konteks global didorong oleh berbagai sarana dan prasarana. Melalui promosi di berbagai media massa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta membuka Terminal 3, pengoperasiannya dimulai pada 15 April 2009 dan pembangunan terminal tersebut menggunakan konsep ramah lingkungan serta modern. Dengan luas 30.000 meter persegi, terminal dapat menampung 4 juta penumpang pertahun, konsep eko-terminal yang diterapkan ialah dengan menggunakan bahan semacam plastik atau kaca sebagai bagian dari atap terminal,

¹⁰⁶Frans Teguh, dalam Pariwisata RI: dari Pemulihan Menuju ke Kebangkitan, <http://cybertravel.cbn.net.id/cbprt1/common/ptofriend.aspx?x=Travel+News&y=cybertravel%7C0%7C0%7C4%7C935> (diunduh 08 Mei 2009).

dinding bangunan terbuat dari kaca (hal ini membuat bangunan terasa lega dan terang, sehingga dapat mengefisiensi tenaga listrik pada siang hari).¹⁰⁷ Sedangkan dalam tataran wilayah atau objek wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata, Indonesia memiliki kawasan taman nasional, kawasan cagar budaya seperti Taman Nasional Ujung Kulon (Jawa Barat), Taman Nasional Gunung Rinjani (Nusa Tenggara Barat/NTB), Taman Nasional Tanjung Puting (Kalimantan Timur), Taman Nasional Lorenz (Papua) dan Taman Nasional Bunaken (Sulawesi Utara), Trowulan (Jawa Timur), Sangiran (Jawa Tengah), Toraja (Sulawesi Selatan), Muaro Jambi (Jambi) dan Sawah Lunto (Sumatera Barat).¹⁰⁸

Dalam pengembangan ekowisata di kawasan kerjasama BIMP-EAGA, Indonesia yang memiliki 14 provinsi sebagai anggota kerjasama telah menerapkan dan mengupayakan secara bertahap konsep ekowisata yang relatif dapat dicapai dengan situasi dan kondisi Indonesia sekarang ini. Sebagai salah satu contoh dari wilayah Indonesia yang memiliki potensi dan bergerak cepat dalam pengembangan ekowisata ialah Kalimantan dan Sulawesi. Melalui pemanfaatan Taman Nasional dan Wisata Bahari yang kaya akan sumber daya hayati dan *biodiversity*, wilayah Kalimantan dan Sulawesi dapat dikatakan memadai dalam hal pengembangan ekowisata di Indonesia. Implementasi dari kesungguhan anggota kerjasama BIMP-EAGA khususnya Indonesia terhadap ekowisata ialah dengan dimunculkannya inisiatif *Heart of Borneo (HoB)* dan *Sulu-Sulawesi Marine Eco-System (SSME)*. Kedua inisiatif tersebut merupakan awal dari perjuangan Indonesia dalam mengembangkan kawasan pariwisata yang menuju konsep ekowisata.

3.2.1 Provinsi Kalimantan

Melalui *Declaration on the Heart of Borneo Initiative (HoB)* dalam “Tiga Negara, Satu Visi Konservasi”, Brunei Darussalam, Indonesia dan

¹⁰⁷Kompas, 15 April 2009, dalam artikel *Infrastruktur, Hari Ini Terminal 3 Soekarno-Hatta Beroperasi*. Untuk saat ini pemberangkatan dan penerimaan kedatangan penumpang berasal dari maskapai penerbangan Mandala dan Air Asia, kedepannya terminal 3 akan melayani penumpang dari 97 penerbangan dan kedatangan. Terminal 3 dibangun sejak 2006 dengan biaya 285 miliar rupiah.

¹⁰⁸Hasil wawancara Devy Putri Kussanti dengan Drs. Agus Priyono MM, *loc. cit.*

Malaysia menyatakan diri untuk bekerjasama dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati dan kawasan yang berupa dataran tinggi yang berada di sepanjang jantung Borneo. Inisiatif yang disepakati merupakan kerjasama yang berdasarkan saling menghormati kedaulatan dan perbatasan wilayah dari tiga negara yang berada dalam satu pulau yakni Borneo. Pada dasarnya, HoB Inisiatif merupakan kerjasama sukarela antar batas negara (negara yang berada dalam satu pulau dan memiliki kepentingan bersama), pemerintah bersama dengan *stakeholders* menyetujui perjanjian HoB dengan kebijaksanaan lokal, pengakuan, dan patuh pada aturan. Kepentingan dari tiap negara dalam inisiatif HoB selain melestarikan dan menjadikan konservasi sebagai kawasan aktif ialah sebagai pengembangan kerjasama dalam pembangunan yang lebih baik di kawasan ketiga negara anggota.¹⁰⁹ (Lampiran 5)

Melalui pengembangan ekowisata yang terjembatani oleh HoB, maka peran dari konservasi hutan Kalimantan sebagai potensi perlindungan alam dan pariwisata diharapkan berjalan secara seimbang serta selaras. Sebagai negara yang memiliki lahan terbesar dalam perjanjian HoB, Indonesia saat ini melakukan tindakan nyata untuk melakukan konservasi sumber daya alam yang sudah seharusnya menjadi bagian integral dalam setiap langkah pembangunan. Hal ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan, antara lain adalah :

a. Menurunnya potensi sumber daya alam.

Indonesia memiliki berbagai jenis sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan, minyak dan gas bumi. Namun demikian karena pemanfaatan yang terus menerus dan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pembangunan, maka dirasakan sekarang bahwa potensi sumber daya alam telah mengalami penurunan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Apabila tren dari pemanfaatan tersebut berjalan terus seperti sekarang, maka

¹⁰⁹Based on Declaration on the Heart of Borneo Initiative Paper.

dikhawatirkan bahwa dalam waktu yang tidak begitu lama persediaan dan penyediaan sumber daya alam tersebut akan menjadi langka.

b. Pertambahan penduduk.

Dengan jumlah penduduk yang telah mencapai sekitar 210 juta orang dan dengan pertumbuhan penduduk 1,5 % per tahun, maka upaya pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan perumahan seringkali berbenturan dengan upaya konservasi sumber daya alam itu sendiri. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan pangan, seringkali upaya perluasan lahan untuk kegiatan budidaya dilakukan dengan mengorbankan sumber daya alam lainnya yang penting yaitu hutan. Berkurangnya hutan tersebut akan mengakibatkan berkurangnya potensi air, yang merupakan kebutuhan pokok pula bagi manusia.

c. Pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup besar ternyata telah mendorong berkembangnya industri yang menggunakan bahan baku sumber daya alam dengan pesat pula. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam semakin meningkat pula yang sering tidak seimbang dengan upaya memperbaharui sumber daya alam itu sendiri.

d. Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi pada saat ini telah memperkenalkan efisiensi dalam eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Akibatnya, pengurusan sumber daya alam menjadi lebih cepat lagi, dan kerusakan yang ditimbulkannya juga semakin parah. Termasuk dalam hubungan ini penggunaan alat-alat besar dan berat dalam eksploitasi hutan dan lain-lain, yang ternyata telah menurunkan kualitas dan kuantitas hutan untuk masa yang akan datang.¹¹⁰

¹¹⁰<http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/051207-borneo.pdf> (diunduh pada 09 Februari 2009).

Dengan adanya HoB dan beberapa pertimbangan tersebut diharapkan terciptanya suatu pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang panjang. Melalui konsep ekowisata itulah implementasi pelestarian dan pemberdayaan sumber daya alam secara baik dan benar dapat diterapkan. Hanya saja konsep perjalanan dan menikmati alamnya cenderung mendominasi (hal tersebut terlihat dari berbagai promosi yang ada), tetapi di satu sisi unsur memelihara alam, menjaga kelestarian lingkungan dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat setempat merupakan syarat penting dalam melakukan ekowisata.

Luas Pulau Kalimantan merupakan 28% dari keseluruhan wilayah Indonesia, dengan memiliki potensi kekayaan alam hayati, fauna dan keindahan.¹¹¹ Sebagai negara yang memiliki Kalimantan sebagai hutan hujan tropis terbesar, Indonesia diharuskan memiliki kesadaran tinggi terhadap kelestarian dan kelangsungan hidup hutan Kalimantan sebagai kawasan konservasi. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi global hutan sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbondioksida bagi masyarakat Indonesia tetapi juga bagi seluruh kelangsungan hidup manusia. Untuk melindungi aset tersebut, maka Indonesia bersama dengan Malaysia dan Brunei harus dapat bekerjasama dalam program HoB.¹¹²

Potensi ekowisata di wilayah Kalimantan, Indonesia diantaranya ialah:

- a. Kalimantan Timur memiliki Derawan dan Sangalaki, yang dapat dicapai dalam tiga jam dengan perahu panjang dari Tanjung Redeb. Terdapat bermacam fauna seperti kura-kura hijau, kura-kura merah tua, kura-kura *star fruit* dan sapi atau lembu laut. Pulau Derawan dan Sangalaki mempunyai lingkungan laut yang memukau, termasuk batu karang menakjubkan, *canary crabs*, penyu hijau dan mutiara. Kawasan Tanah Merah Indah-Lempake merupakan sebuah taman

¹¹¹<http://www.bimpbc.org/indo.asp> (diunduh 02 April 2009).

¹¹²Based on Dr. Susilo Bambang Yudhoyono statement, President of Indonesia, Paper of APEC Summit in Australia, September 2007.

rekreasi dengan air terjun yang indah, lokasi berada 16 kilometer dari kota Samarinda serta dapat dicapai dengan mobil atau transportasi umum. Sedangkan dalam kategori olahraga, Karang Joang Balikpapan Resort Golf and Country Club berada dilokasi bagian pinggiran kota Balikpapan, dapat dicapai dalam waktu 20 menit dari Bandara Internasional Sepinggan-Balikpapan atau 15 menit dari Kota Pusat Balikpapan dan Gran Senyur Hotel.¹¹³

- b. Kalimantan Barat memiliki pantai Pasir Panjang yang berada 17 km dari Singkawang-Sambas. Di daerah tersebut terdapat *resort* serta *cottage* yang nyaman, cocok untuk berenang dan bermain tenis. Kawasan hamparan Singkawang terdapat gunung Poteng Hill Resort yang merupakan tempat yang indah bagi pecinta alam. Taman Nasional Palung berada di kabupaten Ketapang yang berjarak 90.000 km. Di taman nasional (TN) tersebut terdapat beraneka flora dan fauna. Musim semi panas, danau dan gua merupakan pemandangan khusus yang terdapat di kawasan Taman Nasional Palung. Daerah taman nasional dapat dijangkau dengan pesawat udara ataupun *express boat* dari Pontianak ke Ketapang atau dari Telok Melano dengan menaiki bus dalam waktu 2 jam atau dengan kandong (perahu tradisional) dalam waktu 6 jam. Pantai Selimpah, merupakan kawasan perkemahan berada di sekitar pantai. Di daerah ini banyak sekali kura-kura meninggalkan telur mereka (hal tersebut biasa terjadi antara bulan Februari sampai Mei). Jarak Pantai Selimpah kira-kira 305 km dari kota Pontianak atau 80 km dari Sambas.¹¹⁴

¹¹³<http://www.my-indonesia.info/page.php?ic=1122&prov=23> (diunduh 02 April 2009).

¹¹⁴<http://www.my-indonesia.info/page.php?ic=1122&prov=20> (diunduh 30 Maret 2009).

3.2.2 Provinsi Sulawesi

Sulawesi Utara memiliki obyek wisata taman laut Bunaken, keindahan taman laut dan satwanya telah dikenal dunia sejak tahun 1971. Dua puluh tahun kemudian, yakni pada 24 Desember 1991, Presiden Soeharto meresmikan perairan Bunaken bersama perairan Pulau Manado Tua dan Siladen sebagai Taman Nasional Bunaken. Di Pulau Manado Tua terdapat Gunung Manado Tua yang memiliki potensi ekowisata dan sebagai objek pesona gunung api bawah laut. Di kawasan ini para wisatawan dapat menikmati program ekowisata dengan menyelam maupun *snorkelling*, bagi mereka yang tidak mau atau tidak dapat berenang, tersedia *glass bottom boat* yakni sebuah perahu yang berkaca dibagian dasarnya.¹¹⁵ Peraturan yang mewajibkan para wisatawan untuk tidak mengambil, merusak dan membuang sampah di taman nasional Bunaken merupakan pelaksanaan dari konsep ekowisata.

Selain Taman Nasional Bunaken, di Kota Bitung terdapat Taman Wisata Alam Tangkoko yang memiliki keunikan dibandingkan tempat lainnya. Pasalnya, di tempat itulah hidup salah satu hewan khas Sulawesi, Tarsius.¹¹⁶ Sulawesi Tenggara mempesona melalui taman lautnya, Wakatobi, yang memiliki kekayaan *biodiversity* terbesar di dunia.

Di Sulawesi Selatan terdapat Taman Nasional Dumoga Bone, yang berlokasi kurang lebih 260 km dari Manado dan Taman Nasional ini berada diantara Dumoga di Bolaang Mongondow dan Bone di Gorontalo. Pegunungan dan bukitnya dikelilingi oleh hutan yang lebat, membuat lokasi menjadi tempat yang nyaman bagi kehidupan fauna langka seperti burung maleo, anoa, burung enggang dan *Tarsius' spectrums* (primata terkecil di dunia). Tangkoko Batu Angus, merupakan lahan rumput alami yang berada di lereng gunung Dua Saudara. Kera hitam, burung maleo,

¹¹⁵Kompas, 16 Desember 2008, dalam artikel Pikat Taman Laut Bunaken.

¹¹⁶Kompas, 23 Desember 2008, dalam artikel Sepenggal Pesona di Sulawesi Utara. Oleh masyarakat setempat, Tarsius disebut Tangkasi yang merupakan keluarga kera atau primata berukuran kecil. Hewan endemik Sulut ini memiliki tubuh berwarna abu-abu kecoklatan, bermata besar, dengan telinga besar menghadap ke depan. Ukuran tubuhnya rata-rata hanya sekepalan tangan orang dewasa dengan berat sekitar 100 gram. Tarsius adalah binatang malam atau nokturnal karena aktif pada malam hari.

ular, babi liar, burung enggang dan rusa hidup disekitar 3,196 hektar lahan yang ada di taman tersebut. Selain itu terdapat pula *cottage* dan restoran kecil di dekat objek wisata. Dapat dicapai dengan jeep dari desa Girian dan tentunya dengan jalan yang kasar. Danau Tondano-Remboken, terletak 36 km barat daya Manado dan melewati pedesaan yang damai dan terhampar tanaman cengkeh. Pada sisi kanan danau terdapat wisata Remboken, yang sangat cocok untuk bermain ski, memancing dan berperahu secara tradisional, bungalow, kolam renang dengan air yang hangat secara alami dan restoran.

3.3 Keselapan Indonesia dalam Realisasi Ekowisata

Memang secara teknis realisasi ekowisata di Indonesia mengalami beberapa kendala seperti kurangnya sarana penghubung untuk menuju ke lokasi wisata, mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat menikmati ekowisata, infrastruktur yang belum memadai, cuaca yang sulit diprediksi, peralatan pendukung lainnya yang masih terbatas, dan kemungkinan negatif lainnya yang bisa saja ditemui.

Selain sebagai suatu konsep pariwisata yang berbasiskan alam dan masyarakat, penerapan ekowisata di Indonesia juga bertujuan untuk membantu memperbaiki citra Indonesia yang dikenal sebagai negara penghasil asap nomor satu di dunia.¹¹⁷ Melalui pengembangan konsep ekowisata, Indonesia sudah harus dapat bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang berpotensi sebagai objek wisata. Indonesia mencanangkan konsep ekowisata yang didasarkan pada filosofi untuk meningkatkan kondisi alam yang sudah ada, bukan untuk merusak tatanan rantai ekosistem. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi kawasan Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya.

Dalam realisasi kerjasama sub-regional yang memiliki rasionalisasi seperti komplementaritas untuk mengeksploitasi dan mengembangkan secara efisien sumber daya alam dan komoditi produksi lainnya, maka dukungan pihak swasta

¹¹⁷Media Indonesia, dalam artikel: Ekowisata Pulihkan Citra Pengekspor Asap, <http://www.indonesiatourisminfo.com/page.php?ic=511&id=2030> diunduh 08 April 2009).

sebagai penggerak utama dan pemerintah sebagai fasilitator yang dapat menghapuskan hambatan politik dalam perpindahan barang, jasa dan faktor produksi, menyediakan infrastruktur dan memberi penawaran dan insentif dalam investasi dapat dikatakan sangat penting keberadaannya.¹¹⁸

Melalui pengembangan ekowisatanya, Indonesia telah mengembangkan beberapa aspek penunjang dan pendorong dalam keberhasilan implementasi konsep ekowisata tersebut. Salah satunya ialah dengan adanya kebijakan penerbangan dan penyediaan transportasi udara yang melintasi kawasan kerjasama guna mempermudah arus perpindahan manusia. Pemerintah Indonesia telah melakukan *merger* dengan beberapa penerbangan dari luar negeri seperti dari Malaysia, Filipina, Singapura, China, Taiwan dan Korea. Selain itu, pihak swasta yang diharapkan terlibat dalam pengembangan kemajuan ekowisata juga melakukan beberapa upaya melalui penerbangan swasta.

Dengan Malaysia, Indonesia telah melakukan *code share* dengan *Malaysia Airlines*, *Silk Air* dengan Singapura, *Phillipines Airlines* dengan Filipina, *China Southern* dengan China, *China Airlines Cargo* dengan Taiwan, serta *Korean Airlines* dan *Korean Cargo* dengan Korea.¹¹⁹ Melalui kerjasama dalam bidang transportasi tersebut maka perpindahan manusia lintas negara menjadi lebih mudah dan murah. Oleh sebab itulah, transportasi udara lebih diminati para pengunjung yang akan ke Indonesia, sebanyak 57,94 % pada 2006 dan meningkat pada 2007 dengan angka 60,00 %. Jalur alternatif atau transportasi laut juga dapat dikatakan sebagai moda transportasi yang lumayan diminati para pengunjung luar negeri, sebanyak 41,44 % pada 2006 dan 39,30 % pada 2007, sedangkan melalui jalur darat kurang diminati oleh para pengunjung, pada 2006 persentase hanya sebesar 0,62 % dan 0,70 % pada 2007. (Lampiran 6)

Salah satu komitmen dari keseriusan Indonesia dalam mengimplementasikan ekowisata ialah dengan perwujudan dibukanya akses transportasi udara antara Gorontalo dengan daerah luar (Manado) pada 10 April 2009. MoU antara Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad dengan Pimpinan P.T. Travel Express Air Aviation Services Tommy Limbunan menggunakan sistem

¹¹⁸ Adriana Elisabeth, dkk, *op.cit*, hlm. 38.

¹¹⁹ Based on The Center of Data Management and Network System, Ministry of Culture and Tourism, The Republic of Indonesia.

block seat, dimana pemerintah provinsi Gorontalo siap untuk memberikan subsidi operasional apabila jumlah penumpang tidak mencapai standar yang ditentukan.¹²⁰ Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk meningkatkan roda transportasi wilayah Gorontalo agar pengunjung yang ingin menuju Gorontalo tidak terhambat oleh persoalan transportasi. Keberanian dan kepercayaan dari pihak pemerintah daerah sebagai pelaksana kerjasama merupakan langkah awal dari kerjasama selanjutnya.

3.4 Pelaku Ekowisata di Indonesia

3.4.1 Pemerintah

Pembangunan dalam setiap sektor kerjasama tentunya akan sangat membutuhkan campur tangan pemerintah. Hal tersebut didasari oleh kebijakan yang diterapkan untuk menjalankan kerjasama dan fungsi dari pemerintah sebagai fasilitator yang menghubungkan setiap negara anggota. Sebagai fasilitator dalam realisasi kerjasama, pemerintah memiliki konsep tersendiri dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia. Melalui konsep ekowisata, pemerintah ingin memunculkan sudut kepedulian terhadap lingkungan alam dan masyarakat setempat.

Pemerintah berusaha untuk menjawab tuntutan dari masyarakat lokal dengan mengadakan penyuluhan secara berkala dan bimbingan kreatifitas untuk menghadapi perkembangan dari realisasi ekowisata. Penyuluhan dalam konteks memilih wisatawan juga telah mulai dicanangkan oleh pemerintah, masyarakat harus mengetahui standarisasi latar belakang dari pengunjung yang dapat mengapresiasi tanggung jawab mereka ketika berada dalam perjalanan ekowisata.¹²¹ Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan seluruh komponen yang berkaitan dengan pelaksanaan ekowisata dapat bekerjasama dalam menjalankan konsep sesuai dan dengan semestinya.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah mengacu pada prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, yakni dengan memelihara kelestarian

¹²⁰ http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=75 5 dalam artikel 10 Penerbangan Gorontalo-Manado Dibuka, (dimunduh 02 April 2009).

¹²¹ Hasil wawancara Devi Putri Kussanti dengan Tiur Rumondang, *loc. cit.*

alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat dan memperkuat ketuhanan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).¹²² Keterkaitan tersebut diawali dari keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki keberagaman kekayaan alam beserta budaya, yang membuat kompleks unsur-unsur dalam pariwisata Indonesia seperti; keberagaman adat-istiadat, kebudayaan tiap daerah, potensi kekayaan alamnya, keanekaragaman flora dan fauna, keindahan alam, dan sebagainya, menjadi pendorong utama dalam sektor pariwisata. Dengan memiliki keragaman, disertai dengan keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, sudah sewajarnya sektor pariwisata Indonesia selain sebagai penyumbang dalam pemasukan devisa negara juga sebagai perekat dalam menjalin ketuban negara dengan berlandaskan pada pariwisata, jangan sampai keanekaragaman yang ada membuat Indonesia menjadi terpecah dan terpisah. Dengan pola yang terarah tersebut, maka pemerintah sebagai fasilitator bagi pelaku ekowisata lainnya, memiliki tugas dan kewajiban yang besar serta tidak mudah, karena hal ini menyangkut dengan kepentingan dan keberlangsungan dunia pariwisata Indonesia.

Upaya-upaya yang telah dan akan dilaksanakan dalam pengembangan ekowisata Indonesia antara lain adalah:

- 1) Melaksanakan berbagai pertemuan dengan pelaku pariwisata baik dalam tatanan lokal, nasional, sub-regional (*BIMP-EAGA-Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina East ASEAN Growth Area*) maupun ASEAN untuk menyepakati pemahaman dan prinsip-prinsip pengembangan ekowisata termasuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang dikembangkan di kawasan Timur Indonesia;
- 2) Mendorong pengembangan dan penjualan paket ekowisata oleh pelaku pariwisata khususnya biro perjalanan wisata;
- 3) Menyusun standarisasi pemandu ekowisata Indonesia yang mengacu pada standar pemandu ekowisata ASEAN;

¹²²http://www.budpar.go.id/filedata/4636_1364-UUTentangKepariwisataannet1.pdf pada BAB III mengenai Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataaan, Pasal 5 bulir d, e dan h, (diunduh 30 Maret 2009).

- 4) Melaksanakan sejumlah kajian dan studi mengenai pengembangan ekowisata di berbagai destinasi Indonesia;
- 5) Menyusun pedoman kriteria dan indikator ekowisata (KIEI) dalam rangka mendorong pengembangan ekowisata Indonesia;
- 6) Menyusun Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Permenbudpar) mengenai KIEI sebagai acuan sekaligus mendorong pelaku pariwisata mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dan memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya-upaya konservasi alam dan budaya Indonesia, baik yang *tangible* (nilai budaya) maupun *in-tangible* (sejarah dan purbakala);
- 7) Sesuai dengan UU 10 tahun 2009 mengenai kepariwisataan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) akan memberikan penghargaan pada pelaku ekowisata termasuk masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan budaya, dan pelibatan masyarakat khususnya masyarakat di sekitar kawasan daya tarik wisata;
- 8) Menyiapkan panduan pengelolaan ekowisata Indonesia sebagai acuan standar dalam manajemen destinasi ekowisata.¹²³

Peran pemerintah dalam pengembangan ekowisata antara lain berkerjasama dengan Departemen Kehutanan untuk mengembangkan lima Taman Nasional yaitu Taman Nasional Bitung Kerihun, Taman Nasional Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Taman Nasional Baltimurung (Sulawesi Selatan), Taman Nasional Rinjani (Nusa Tenggara Barat) dan Taman Nasional Bunaken (Sulawesi Utara) sebagai daerah tujuan atau destinasi ekowisata. Selain itu, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) c.q Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (PDP) bekerjasama dengan WWF Indonesia untuk mengembangkan kawasan *Hearth of Borneo* (HoB) sebagai destinasi ekowisata yang berdaya saing global.

¹²³Hasil wawancara Devi Putri Kussanti dengan Drs. Agus Priyono MM, *loc. cit.*

Depbudpar bersama pelaku pariwisata Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprop) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang memiliki potensi ekowisata melaksanakan promosi ke berbagai bursa pariwisata mancanegara seperti WTM London, IB Berlin, JATA (*Japan Travel Agent*) *Travel Fair*, *ASEAN Tourism Forum*. Depbudpar melalui Direktorat Jenderal PDP dan Direktorat Jenderal Pemasaran dan Ditjen juga memfasilitasi penyiapan dan penjualan paket wisata ekowisata Indonesia.¹²⁴

Dalam implementasinya, pemerintah mendirikan *training centre* dan mendatangkan para ahli kerajinan yang akan memberikan kursus keterampilan bagi masyarakat lokal. Sebagai contoh: di Jalan Raya, Desa Pulutan, Kecamatan Rembokan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Pemerintah Minahasa di bawah pimpinan Bupati Drs. S. Vreeke Runtu bekerjasama dengan *technical skills support* dari *the Canadian International Development Agency through The Private Enterprise Participation (PEP) Projects* mengembangkan kerajinan masyarakat lokal melalui *The Keramik Pulutan Training Centre*.¹²⁵ Hal tersebut dilakukan untuk mengimplementasikan konsep ekowisata yang berbasis masyarakat.

Dalam mengimplementasikan konsep ekowisata yang diusung dalam kerjasama BIMP-EAGA, Indonesia bagian timur ikut berperan serta melalui pembentukan KAPET. Kawasan ini secara keseluruhan kaya akan sumber daya alam namun memiliki kesenjangan infrastruktur dan sosial dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia.¹²⁶

3.4.2 Pihak Swasta

Sebagai *partner* pemerintah dalam mengembangkan sektor ekowisata maka peran pihak swasta dalam mengembangkan dan menciptakan suasana wisata yang nyaman serta memuaskan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Peran pihak swasta diharapkan dapat aktif dan

¹²⁴Ibid.

¹²⁵Based on brochures.

¹²⁶Konsepsi Penyiapan Peta Tematik Kawasan KESR BIMP-EAGA, *op.cit*, hlm. 4.

bahkan menjadi motor utama dalam kerjasama BIMP-EAGA pada sektor ekowisata.

Selain sebagai moda transportasi udara, Garuda Indonesia berperan aktif dalam mempromosikan pariwisata di Indonesia dan mensukseskan program pemerintah *Visit Indonesia Year*. Garuda Indonesia melakukan beberapa program dalam mendukung konsep ekowisata, yakni mendukung pelestarian hutan dengan melaksanakan program *One Tree One Passenger*, yaitu program penanaman hutan kembali sebanyak 100.000 pohon di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah serta turut berperan serta juga dalam memperbaiki infrastruktur bagi pengembangbiakan penyus dan habitatnya di Nusa Tenggara Timur. Dalam mendukung pengembangan masyarakat setempat pihak Garuda Indonesia melaksanakan program pengembangan desa mandiri untuk mendukung perekonomian kecil dan menengah dengan memberikan bantuan dana dan tenaga pengajar untuk pendidikan serta tenaga ahli untuk mendorong ekowisata Indonesia.¹²⁷

Pemerintah dan swasta selalu melaksanakan kemitraan dalam pengembangan pariwisata termasuk pengembangan ekowisata Indonesia, antara lain:

1. Pemerintah mempromosikan citra produk dan destinasi, sedangkan pihak swasta mempromosikan paket wisata ekowisata;
2. Pemerintah melalui Depbudpar bersama instansi terkait di tingkat pusat dan daerah menyiapkan daya tarik yang didukung fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat sebagai destinasi wisata yang atraktif, aman dan nyaman untuk dikunjungi, sedangkan swasta bekerjasama dengan masyarakat khususnya masyarakat di sekitar kawasan daya tarik menyiapkan kunjungan ekowisata di berbagai destinasi ekowisata karena kalau masyarakat tidak dilibatkan dalam

¹²⁷Kompas, 20 April 2009, melalui iklan Layanan Masyarakat.

kegiatan ekowisata tidak akan berkunjung ke destinasi tersebut lagi.¹²⁸

Mekanisme khusus dalam menjalankan ekowisata Indonesia adalah berdasarkan KIEI (Kriteria dan Indikator Ekowisata Indonesia) yang meliputi antara lain:

1. Memiliki kepedulian tinggi terhadap konservasi sumber daya alam dan budaya;
2. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengembangan pariwisata, menempatkan masyarakat khususnya masyarakat di kawasan daya tarik sebagai subyek (bukan obyek) mengingat sesungguhnya adat istiadat (*living culture*) masyarakat terutama terkait dengan upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan budaya juga merupakan daya tarik wisata;
3. Memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar dan pemerintah daerah;
4. Memberikan pengalaman rekreatif dan sekaligus pengalaman edukatif wisatawan;
5. Mengendalikan 4 (empat) unsur di atas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan terpadu.¹²⁹

Dalam implementasinya, pihak swasta melalui pelaku usaha jasa *tour and travel* memberikan sumbangsinya berupa pelayanan paket perjalanan dan *tourist guide* melalui *website* dan buku petunjuk pedoman wisata yang dikeluarkan oleh Dinas Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi masing-masing, misalnya:

1. *Travel Agencies Directory of North Sulawesi Province*, merupakan buku panduan yang memuat daftar nama-nama *travel agent* yang berada di Sulawesi Utara. Kurang lebih terdapat 51 agen perjalanan yang memiliki nomor lisensi dan

¹²⁸ Hasil wawancara Devy Putri Kussanti dengan Drs. Agus Priyono MM, *loc. cit.*

¹²⁹ *Ibid.*

nomor anggota ASITA Sulawesi Utara (*Association of the Indonesian Tours&Travel Agencies*) beserta nomor telepon, fax, email, website dan alamat kantor. Untuk mempermudah akses perbankan, terdapat kurang lebih 19 jenis bank dengan beberapa diantaranya memiliki 1 s/d 5 cabang di seluruh wilayah Sulawesi Utara (baik yang swasta maupun pemerintah). Selain itu, terdapat kurang lebih 8 Rumah Sakit besar yang terbesar di Sulawesi Utara.

2. *North Sulawesi Tourish Guide*, merupakan pedoman informasi kepariwisataan Sulawesi Utara. Di dalamnya terdapat informasi mengenai keragaman potensi wisata seperti wisata alam, bahari, religi dan budaya, hingga pada wisata sejarah. Pada awal penyajian, terdapat sekilas sejarah mengenai keberadaan, situasi dan kondisi geografis Sulawesi Utara, selanjutnya terdapat tulisan berupa sejarah kelompok etnis, kepercayaan lokal dan sejarah para petualang penemu Sulawesi dan para peneliti bawah laut. Pada *chapter* berikutnya, seluruh kekayaan, keindahan dan keberagaman alam serta budaya Sulawesi Utara dipaparkan dengan apik melalui narasi dan dokumentasi. Bagi para pengunjung yang ingin menyaksikan ritual-ritual adat dan budaya tertentu dapat melihat *calender of events* yang telah disediakan. Kelengkapan informasi dan dokumentasi yang disajikan membuat buku panduan wisata terlihat menarik.

3.4.3 Masyarakat Lokal

Partisipasi masyarakat lokal (masyarakat yang berada atau bertempat tinggal di daerah kawasan wisata) terhadap ekowisata merupakan suatu keberlanjutan dalam hal pengembangan sumber daya alam. Hal yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu kontribusi yang menunjang kerjasama pariwisata dalam konsep ekowisata. Dalam pengertiannya, partisipasi masyarakat lebih dari sekedar kontribusi terhadap keputusan

bersama, namun partisipasi masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi masyarakat yang mampu memecahkan persoalan, membuat keputusan, bekerja berdasarkan kesepakatan, mendefinisikan proyek dan kebijakan serta mampu mengontrolnya.¹³⁰

Selain sebagai pelaku dalam menjalankan ekowisata, masyarakat juga diharuskan untuk mengetahui dan memahami hakekat dari ekowisata. Pendidikan dan pengetahuan yang maksimal mengenai konsep ekowisata merupakan suatu faktor dalam mempercepat realisasi ekowisata. Dalam konteks pendidikan masyarakat terdapat asumsi bahwa: pendidikan berperan sebagai pencerdasan kepada masyarakat. Melalui pendidikan, akan timbul kecerdasan dari masyarakat. Jika masyarakat sudah cerdas, maka mereka akan peduli terhadap lingkungan. Ketika mereka sudah peduli, mereka akan menghasilkan sebuah proses untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan.¹³¹

Sebagai suatu komunitas yang saling bekerjasama dalam pengembangan ekowisata di Indonesia, peran masyarakat lokal yang bersifat langsung dan akan menjadi faktor pendorong bagi pemerintah beserta pihak swasta dalam merumuskan konsep ekowisata yang dapat diterima atau cocok di kawasan alam mereka. Wilayah atau kawasan ekowisata di Indonesia tertuju pada keindahan alam bawah laut, hutan atau taman nasional, flora dan fauna yang beraneka, dan lain sebagainya. Sebagai contoh kawasan ekowisata hutan atau taman nasional, sudah tentu terdapat beberapa peraturan yang diperbolehkan ataupun tidak dalam melakukan perjalanan wisata. Hal ini berkaitan erat dengan situasi dan kondisi yang berlaku di daerah sekitar objek wisata. Tetapi secara global, konsep ekowisata yang ada adalah dimana para wisatawan harus bersikap dan bertingkah laku secara positif serta bersahabat dengan lingkungan

¹³⁰FISIPOL UMY, dalam artikel Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Daerah, Edisi 1 Th. X/Februari 2001, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta., hlm. 30.

¹³¹Kompas, 14 April 2009, menurut Yayat Supriatna, dosen jurusan Teknik Planologi Universitas Trisakti, dalam artikel yang berjudul: Lingkungan, Potensi yang Belum Dilirik.

sekitar, dengan menjunjung tinggi keberadaan masyarakat dan alam yang menyediakan keramahan serta seluruh keindahan alam yang ada.

Dalam tugas dan kewajiban terhadap pengembangan ekowisata, masyarakat telah melakukan beberapa tindakan seperti; pelestarian alam, pembelajaran untuk mengelola kawasan ekowisata dalam hal pembuatan kerajinan (dengan mengandalkan kreatifitas atau keahlian sehingga menciptakan karya asli daerah)¹³², menciptakan lahan perekonomian bagi mereka, menciptakan kebanggaan terhadap Indonesia serta memperbaiki citra Indonesia ketika terjadi kasus asap hutan di Kalimantan. Hal tersebut merupakan senjata utama bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan di bidang pariwisata.

Salah satu contoh dari peran masyarakat lokal dikawasan ekowisata yakni di wilayah Pulutan, Kecamatan Rembokan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Masyarakat di bawah pengawasan dari pemerintah Minahasa dan *The Canadian International Development Agency* sebagai *technical skill support*, membuat sebuah karya berupa *souvenirs*, peralatan rumah tangga, peralatan makan, *object* pariwisata lokal dan sebagainya. Kerajinan yang dihasilkan berasal dari bahan ramah lingkungan dan menggunakan metode tradisional.¹³³

Selain dapat memperbaiki citra Indonesia dan menjaga lingkungan, konsep ekowisata dalam mempromosikan pariwisata di Indonesia dinilai dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut merupakan faktor dari kesuksesan kawasan objek wisata yang ditentukan oleh kesiapan masyarakat untuk terlibat langsung dari segi operasional dan preservasi.¹³⁴

Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata dicapai dengan pendapatan atau pemasukan

¹³²Dalam memberdayakan alam dengan konsep ekowisata, kerajinan dan kreatifitas masyarakat lokal dapat disalurkan dengan pembuatan kerajinan serat alami (seperti yang dilakukan oleh masyarakat disekitar kawasan Sidorejo Lor, Salatiga, Jawa Tengah). Bahan pembuat terdiri dari serat alami berbahan tepung terigu, tepung singkong, tepung jagung, lem kayu dan pengawet. Bahan serat lebih bersih dan dapat menggantikan tanah liat.

¹³³Based on brochures.

¹³⁴<http://www.indonesiatourisminfo.com/page.php?ic=511&id=2030> (diunduh 08 April 2009).

melalui wisatawan, kemudian dengan kesadaran yang tinggi terhadap pembangunan dan kemajuan, pendapatan tersebut juga digunakan untuk mendukung dalam memenuhi kebutuhan lokal yang digunakan untuk; memperbaiki fasilitas komunikasi dan jalan-jalan, pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan.¹³⁵

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan partisipasi masyarakat dianggap penting dan perlu dikembangkan, yakni (1) dengan partisipasi masyarakat akan lebih banyak yang akan dicapai, (2) pelayanan yang akan disediakan dapat lebih murah, (3) partisipasi memiliki nilai intrinsik bagi kelompok masyarakat, (4) dapat dijadikan katalis bagi upaya pembangunan yang lebih jauh, (5) menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap proyek yang dilakukan, (6) menjamin bahwa yang bersangkutan merasa dilibatkan, (7) meyakinkan bahwa sesuatu dilaksanakan dengan benar, (8) menggunakan kearifan dan pengetahuan tradisional, (9) membebaskan masyarakat dari ketergantungan pada para profesional, (10) merupakan titik awal bagi tumbuhnya kesadaran masyarakat.¹³⁶

Peran masyarakat dalam pengembangan ekowisata adalah sentral, selain sebagai faktor penentu terlaksananya pengembangan berkelanjutan (preservasi alam dan budaya) sekaligus masyarakat tersebut (*living culture*) merupakan daya tarik wisata. Mekanisme khusus pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari KIEI, hanya saja dapat pemberdayaan masyarakat bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah namun dilaksanakan seluruh pelaku ekowisata khususnya yang terlibat langsung dalam kegiatan ekowisata yaitu antara Biro Perjalanan, Pemandu Wisata dan LSM yang peduli dengan konservasi baik lokal maupun internasional.¹³⁷

¹³⁵<http://architecturetourism.wordpress.com/2007/08/06/manfaat-ekowisata-di-taman-nasional-sebangau/> IUCN (1995), (diunduh 02 April 2009).

¹³⁶FISIPOL UMY, *op. cit.*, hlm. 30.

¹³⁷Hasil wawancara Devi Putri Kussanti dengan Drs. Agus Priyono MM, *loc. cit.*

3.4.4 *Partner* Donasi dan Investor di Indonesia

Dalam pengembangan kerjasamanya, BIMP-EAGA juga bekerjasama secara erat dengan ADB dan GTZ dalam memberikan bantuan teknis dalam rangka *capacity building*. Pada 2005, secara resmi BIMP-EAGA menerima negara bagian *Northern Territory*, Australia sebagai *partner* pembangunan.

Melalui pengembangan ekowisata, investasi berupa konstruksi, transportasi dan komunikasi serta *other services* merupakan modal awal bagi pembangunan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan kawasan timurnya sebagai destinasi wisata, perdagangan dan perekonomian yang menjanjikan. Berdasarkan laporan per 1 Januari 2000-31 Desember 2007, dalam bidang transportasi dan komunikasi, Singapura menaruh investasinya di wilayah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan dengan masing-masing sebanyak 66.000 USD dan 6.100 USD, sedangkan Korea Selatan dan Perancis berinvestasi di Kalimantan Timur dengan masing-masing 16.436 USD dan 841 USD. Total investasi di bidang transportasi dan komunikasi ialah 89.377,51 USD.¹³⁸

Dalam bidang konstruksi, Indonesia mendapatkan investasi secara total sebanyak 84.287,33 USD per 1 Januari 2000-31 Desember 2007. Dengan perincian sebagai berikut: di Kalimantan Barat, Singapura dan Malaysia berinvestasi masing-masing 267 USD dan 1.900 USD. Di Kalimantan Timur, Singapura berinvestasi sebanyak 38.000 USD, Mauritius 43.178 USD, Perancis 220 USD dan Spanyol 722 USD.¹³⁹

Investasi di bidang jasa meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya Barat dan Papua. Malaysia berinvestasi di Kalimantan Selatan sebanyak 108 USD. Sedangkan Singapura berinvestasi di Kalimantan Timur sebesar 10.600, Mauritius 18.656 USD, Australia 1.097 USD, Inggris 540 USD, Belanda 430 USD, Jerman Rep. Federasi 542 USD, Swiss 1.000 USD dan Gabungan Negara 3.763 USD. Di Irian Jaya Barat, Malaysia berinvestasi sebesar 550 USD dan Belanda 421 USD. Di Papua,

¹³⁸Laporan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Lokasi di Wilayah Timur Indonesia, Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA.

¹³⁹Ibid.

Amerika Serikat berinvestasi sebesar 7.052 USD. Di Sulawesi Selatan, gabungan negara berinvestasi sebesar 100 USD.¹⁴⁰

3.5 Hambatan dalam Realisasi Ekowisata di Indonesia

Pariwisata Indonesia yang menuju pada implementasi ekowisata, pada umumnya memiliki beberapa permasalahan atau hambatan yang berasal dari berbagai bidang seperti:

1. Prasarana. Sebagai akses menuju daerah wisata, jalan menuju beberapa kawasan ekowisata di wilayah timur Indonesia mengalami kerusakan. Dalam hal ini, pemerintah belum menetapkan secara jelas mengenai periode waktu kesiapan jalur darat menuju lokasi wisata diperbaiki atau jika memungkinkan, membangun jalan baru menuju kawasan ekowisata. Dalam *BIMP-EAGA Action Plan*, rute transportasi yang menghubungkan Indonesia dengan negara anggota lainnya banyak sekali yang ditangguhkan pembangunannya, serta pembangunan rute baru yang masih berjalan lambat. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Rute yang ada (sejak September 2005):

Rute Udara

- Davao-Manado (Merpati);
- Kuching-Pontianak (MAS/Batavia);
- KK-Brunei (RBA/MAS);
- Tarakan-Tawau (MAS).

Rute Laut

- Zamboanga-Sandakan;
- Nunukan-Tawau.

Rute Darat

- Sabah-Brunei-Sarawak;
- Kalimantan Barat-Sarawak-Bandar Sri Begawan.

¹⁴⁰Ibid.

b. **Rute layanan transportasi yang sebelumnya ditangguhkan:**

Rute Udara

- Zamboanga-Sandakan (South Phoenix);
- Zamboanga-KK (South Phoenix);
- Puerto Princesa-KK (Layang-layang);
- Davao-Manado (Bouraq);
- Kuching-Bandar Sri Begawan;
- Kota Kinabalu-Balikpapan (MAS);
- Bandar Sri Begawan-Balikpapan;
- Kota Kinabalu-Manado (MAS);
- Kuching-Balikpapan (MAS).

Rute Laut

- General Santos-Bitung.

c. **Rute baru yang diajukan:**

Rute Udara

- Davao-Melanguane (Sulawesi Utara);
- Davao-Kota Kinabalu-Bandar Sri Begawan;
- Davao City-Bandar Sri Bagawan;
- Zamboanga-Labuan;
- Tawau-Balikpapan-Manado;
- Tawau-Zamboanga-Makassar;
- Pontianak-Kuching-Bandar Sri Begawan;
- Makassar-Balikpapan-Bandar Sri Begawan.

Rute Laut

- Tarakan-Tawau (RORO-*Roll On/Roll Off*);
- Labuan-Muara, Brunei Darussalam (RORO *Passenger Ferry*);
- Labuan-Menumbok, Sabah (RORO *Passenger Ferry*);
- Muara, Brunei Darussalam-Menumbok, Sabah (RORO *Passenger Ferry*);
- Bandar Sri Begawan-Labuan-Kota Kinabalu;
- Mindanao-Labuan-Brunei-Sabah;

- Pontianak-Kuching-Bandar Sri Begawan-Labuan-KK;
- Bongao-Tawi Tawi-Lahad Batu, Sabah, Malaysia (SRN *Fast Seacraft*);
- Zamboanga-Tarakan;
- Brookes Point, Palawan-Kudat, Sabah;
- Bitung (Sulawesi)-KK-Bitung;
- Makassar (Sulawesi)-KK-Makassar.

Rute Darat

- Simanggaris (Kalimantan Timur)-Serudong (Sabah);
 - Tawau-Tarakan (pelabuhan terletak di sebelah Tarakan).¹⁴¹
2. Transportasi. Transportasi yang menghubungkan wisatawan menuju daerah ekowisata mengalami keterbatasan. Hal tersebut juga mengenai proporsi jadwal keberangkatan, kendaraan yang minim menuju lokasi wisata dan mahalny biaya pengangkutan.
 3. Telekomunikasi. Kondisi geografis kawasan timur Indonesia serta keadaan alamnya menyebabkan frekuensi jaringan telekomunikasi terkadang tidak stabil.
 4. Kebijakan pemerintah. Peraturan ataupun langkah-langkah dan kerjasama antara pemerintah satu dengan lainnya (yang saling berhubungan dalam pengembangan sektor pariwisata Indonesia menuju ekowisata) berjalan tidak seiring (terjadi perbedaan pendapat). Hal ini berkaitan dengan pernyataan Kasubdit Keterpaduan Antar Wilayah, Direktorat Produk Pariwisata, Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Depbudpar, Drs. Agus Priyono MM, "Belum adanya pedoman pengembangan ekowisata Indonesia dan masih terdapat perbedaan tajam antara ahli mengenai konsep dan prinsip ekowisata. Perbedaan para ahli tersebut terjadi sebagai akibat kubu ahli yang satu mengatakan bahwa basis ekowisata adalah alam, sedangkan yang satunya lagi basis ekowisata adalah alam dan budaya. Selain itu, perbedaan juga terjadi antara ahli dan pelaku ekowisata, yaitu yang satu

¹⁴¹Based on BIMP-EAGA Action Plan 2006-2010.

mengatakan ekowisata adalah konsep, sedangkan yang lain mengatakan bahwa ekowisata adalah produk.¹⁴²

5. Promosi pariwisata. Salah satu permasalahan atau hambatan dalam pariwisata Indonesia adalah kurang optimalnya pengelolaan aspek pemasaran, yang terlihat dari anggaran biaya promosi dan jumlah pasar promosi wisata.

Tabel 5
Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) dan Pusat Promosi Pariwisata

Negara	(TTCI)	Biaya Promosi (Juta \$)	Pusat Promosi
Singapura	8	60	22
Malaysia	31	50	30
Thailand	43	70	18
Indonesia	60	15	3
Filipina	86	Na	12

Sumber: Depbudpar 2007

Travel and Tourism Competitiveness Index yang dibuat oleh *World Economic Forum* mengukur daya saing pariwisata berdasarkan indikator-indikator yang terdiri dari peraturan terkait pariwisata, lingkungan bisnis, infrastruktur, sumber daya manusia dan ragam kebudayaan masing-masing negara. Berdasarkan indeks tersebut (Lihat tabel di atas), Singapura merupakan negara yang memiliki daya saing tinggi.¹⁴³ Hal ini terlihat dari keseriusan Singapura dalam pengalokasian biaya promosi dan pengadaan pusat promosi pariwisata. Sedangkan Indonesia memiliki keterbatasan dalam hal keduanya (biaya promosi yang rendah dan pusat promosi yang terbatas). Selain itu, jika dilihat dari faktor penunjang ekowisata, beberapa kawasan Indonesia bagian timur belum dapat dikatakan siap dalam hal infrastruktur.

Sebagai contoh kasus: sebagai pusat wisata, Pulau Derawan menjanjikan banyak kekayaan alam bawah lautnya yang indah, tetapi akses menuju tempat

¹⁴²Hasil wawancara Devy Putri Kussanti dengan Drs. Agus Priyono MM, *loc. cit.*

¹⁴³R. Winantyo, Rahmat Dwi Saputra, *dkk, op. cit.*, hlm. 136.

wisata masih menjadi persoalan. Jalan darat dari Samarinda menuju Berau rusak parah, terutama disekitar Muara Wahau yang jalannya berlumpur (di posisi wilayah ini, seringkali kendaraan terjebak lumpur hingga sehari-hari). Bagi mereka yang memiliki dana lebih, biasanya memilih transportasi udara dari Bandara Sepinggang, Balikpapan, menuju Bandara Kalimarau, Tanjung Redeb, yang bertarif Rp 500.000 - Rp 700.000 untuk satu kali jalan. Sedangkan bagi wisatawan yang berasal dari Jakarta, harus terlebih dahulu terbang ke Bandara Balikpapan. Dari Tanjung Redeb tidak ada satu pun angkutan reguler ke Tanjungbatu, dermaga ke Derawan. Untuk sampai ke Tanjungbatu, wisatawan harus membayar Rp 300.000 untuk menyewa mobil atau Rp 50.000 per orang sekali jalan. Untuk menuju Derawan juga tidak ada perahu reguler, melainkan harus menyewa perahu cepat berkapasitas 12 orang dengan harga Rp 600.000 – Rp 800.000 satu kali jalan. Dengan biaya transportasi yang sebesar itu dan infrastruktur jalan darat menuju Tanjung Redeb yang masih hancur, potensi Derawan akan menjadi sia-sia.¹⁴⁴

Tanpa disadari oleh para pelaku ekowisata, segala aktivitas sosial, ekonomi dan budaya serta pertumbuhan penduduk dapat memicu terjadinya perubahan lingkungan yang berdampak pula pada kondisi lingkungan di kawasan ekoregion. Aktivitas yang mengakibatkan pemanfaatan berlebihan menghasilkan dampak negatif terhadap kelangsungan biodiversitas. Kecenderungan umum dalam perubahan konservasi keanekaragaman tersebut dapat dilihat dari enam aspek yang berdampak pada kelestariannya (ke-enam aspek yang menjadi penyebab polusi perairan), yakni:

1. Pembangunan yang berbasis daratan;
2. Kualitas air;
3. Eksploitasi sumber daya berlebihan;
4. Pengembangan pariwisata;
5. Perubahan iklim;
6. Transportasi laut¹⁴⁵

¹⁴⁴Kompas, 08 Februari 2009, dalam artikel Nusantara: Jelajah Kalimantan, Derawan-Oase di Perjalanan.

¹⁴⁵http://www.thechampa.com/news/news_detail.php?id=64&cat=22&lang=in dalam: Tiga Negara Bangun Kawasan Konservasi Laut (diunduh 30 Maret 2009).

Penanggulangan sementara terhadap kesamaan persepsi dalam permasalahan yang dihadapi diantara pemerintahan negara anggota EAGA ialah dengan mengambil langkah untuk penanganan masalah-masalah tersebut. Solusinya ialah dengan memperbaiki kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, menghentikan kegiatan ilegal, mencegah pencemaran laut, menegakkan hukum bersama, serta mengkampanyekan perlindungan terhadap alam secara bersama.

Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya, pengembangan konsep ekowisata di Indonesia masih kurang dapat dipahami baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta maupun dari masyarakat lokal. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya upaya pemerintah dalam menggalang kerjasama atau saling berkontribusi dengan baik dengan para pelaku ekowisata lainnya. Pemerintah pusat dalam Departemen Kebudayaan dan Pariwisata contohnya, belum dapat memberikan konsep yang tepat dalam mengidentifikasi ekowisata di Indonesia, apakah cenderung pada pariwisatanya ataukah lebih kepada pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakatnya, hal tersebut tertutupi oleh berbagai promosi pariwisata yang lebih mengacu pada konsep olahraga seperti *golf*, *diving*, *snorkelling*, serta berbagai macam kegiatan *outbound* lainnya.

BAB IV
KEPENTINGAN INDONESIA
DALAM KERJASAMA EKOWISATA DI BIMP-EAGA

Berdasarkan faktor pendorong seperti; untuk meningkatkan pemasukan devisa dalam sektor pariwisata, meningkatkan perekonomian dan perdagangan, mendorong masuknya arus investasi, menciptakan perkembangan politik yang baik, meningkatkan konservasi dan taraf hidup masyarakat, maka Indonesia melalui pengembangan sektor pariwisata mencanangkan *Visit Indonesia Year 2008* dan mengembangkan konsep pariwisata yang berbasis masyarakat atau *community-based ecotourism*. Sebagai salah satu tujuan pariwisata yang mengembangkan konsep ekowisata, Indonesia menghadapi kelebihan dan kekurangan sebagai media persaingan yang alami dengan negara anggota BIMP-EAGA lainnya. Meski demikian langkah Indonesia dalam mengambil keputusan untuk menuju implementasi ekowisata seharusnya dapat lebih dipertanggungjawabkan dengan realisasi yang ada.

Dalam hal persaingan terhadap kekayaan alamnya, Indonesia memiliki kekuatan dan potensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara tetangga. Kekayaan dan keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi salah satu alternatif untuk menembus peringkat pariwisata kelas dunia. Potensi pariwisata merupakan salah satu aset dalam membangun kembali citra Indonesia dari keterpurukan. Selain sebagai sumber pemasukan devisa, pengembangan ekowisata juga diharapkan dapat mengembalikan citra Indonesia yang kurang baik dimata masyarakat internasional. Hal inilah yang nantinya dapat mempengaruhi kebijakan negara lain dalam berhubungan dengan Indonesia, baik dari sektor pariwisata, perekonomian, perdagangan, investasi, pendidikan dan sebagainya.

4.1 Kepentingan Ekonomi

Dalam kerangka kerjasama BIMP-EAGA, perlindungan sumber daya hayati kehutanan yang tercantum dalam inisiatif HoB mendorong beberapa kebijakan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam sektor kehutanan besarnya pajak ekspor

terhadap kayu gelondong dan rotan akan mendorong menurunnya proses industri kayu dalam negeri. Kebijakan yang ketat dalam penanaman hutan kembali, manajemen kehutanan yang lebih baik, metode tebang pilih dan hutan tanaman industri (HTI) yang telah melakukan *eco-labeling* sebagai upaya untuk mendorong produksi pengolahan kayu dan manajemen kehutanan menuju pada sistem ramah lingkungan (*environment friendly systems*).¹⁴⁶

Selain melalui SSME dan HoB, pengembangan pariwisata di kawasan timur Indonesia juga mengalami beberapa kemajuan, hal itu terlibat dari peningkatan kunjungan wisatawan menuju ke-14 wilayah Indonesia yang tergabung dalam kerjasama BIMP-EAGA. (Lihat tabel di bawah ini mengenai jumlah hunian kamar hotel atau *room occupancy rates* di beberapa wilayah timur Indonesia).

¹⁴⁶Konsepsi Penyiapan Peta Tematik Kawasan KESR BIMP-EAGA, *op.cit*, hlm. 2.

Tabel 6
Tingkat Hunian Kamar Hotel
di Beberapa Provinsi Kawasan Timur Indonesia* 2001-2007



Sumber: *The Center of Data Management and Network System, Ministry of Culture and Tourism, The Republic of Indonesia.*

3) Termasuk Mahiku

e) Preliminary Figures

* Spesialisasi daerah kerjasama BIMP-EAGA di Indonesia

Indikator lainnya dapat dilihat dari arus kedatangan wisatawan dari berbagai rute perjalanan. Seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 7
Kunjungan Wisatawan ke Indonesia Bagian Timur
Berdasarkan Pintu Masuk Bandara 1997-2007

VISITOR ARRIVALS TO INDONESIA BY PORT OF ENTRY 1997-2007											
PORT OF ENTRY	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Sam Ratulangi, Manado	10,732	9,72	8,632	9,989	12,679	10,999	12,069	16,93	15,839	17,745	19,274
Entikong, West Kalimantan	20,954	35,093	20,526	33,172	29,534	25,378	19,863	16,914	21,301	14,54	18,22
Makassar, Ujung Pandang	10,389	8,505	4,354	4,525	4,156	4,207	410	323	2,059	1,202	3,502
Supadio, Pontianak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,892
Sepinggan, Balikpapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,329
Patimura, Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frankasiefo, Biak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentani, Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Timika, Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merauka, Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,668
Jayapura, Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535

Sources: *The Center of Data Management and Network System, Ministry of Culture and Tourism, The Republic of Indonesia.*

Frekuensi kedatangan banyak sekali di wilayah bandar udara Sam Ratulangi di Manado dan Entikong di Kalimantan Barat. Sedangkan di beberapa bandara baru di Papua dan Maluku, pada sepuluh tahun terakhir mulai terlihat keefektifan frekuensi kedatangan wisatawan melalui bandara tersebut.

Sebagai salah satu kontribusi pemasukan devisa negara, pariwisata Indonesia juga melihat peluang dalam mengimplementasikan konsep ekowisata sebagai usaha untuk menciptakan dan pemeratakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan tidak menghilangkan unsur kelestarian dan perlindungan terhadap alam maka implementasi ekowisata dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber tumpuan pendapatan ekonomi dalam dunia pariwisata. Sebelum memaparkan mengenai kepentingan Indonesia dalam pengembangan ekowisata dalam kerjasama BIMP-EAGA maka lebih dahulu melihat perkembangan sektor pariwisata Indonesia secara umum.

Jika dilihat dari jumlah wisatawan asing dan domestik beserta faktor pendorong kedatangan para wisatawan, dapat dikatakan bahwa kestabilan kondisi politik dan keamanan Indonesia juga sangat mempengaruhi statistik pengunjung. Tetapi dari jumlah yang ada berdasarkan periode waktu, potensi wilayah Indonesia dalam sektor pariwisata cukup memberikan kontribusi yang baik terhadap pemasukan devisa negara.

Tetapi dalam pengembangan promosi sektor pariwisata, Indonesia dapat dikatakan belum melakukan kinerjanya secara maksimal. Hal ini tidak selaras dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan kata lain, potensi atau kekayaan alam hayati beserta keindahan dan keanekaragaman budaya belum diketahui secara luas oleh masyarakat internasional, pengelolaan sektor pariwisata di lebih dari 30 provinsi di Indonesia belum dilakukan secara profesional dan terpadu. Sebagai contoh, sampai sekarang para wisatawan lebih mengenal Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata ketimbang daerah-daerah lain di Indonesia. Lebih dari itu, masih ada juga masyarakat internasional yang tidak mengetahui bahwa Pulau Bali berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, peran serta seluruh pelaku pariwisata baik yang berada di pusat maupun daerah menjadi sangat penting untuk secara bersama memajukan dan menghadapi tantangan pengembangan dunia pariwisata Indonesia.

Dalam konteks pariwisata Indonesia menuju ekowisata, pada umumnya terdapat beberapa faktor pendorong dan penyebab konsep ekowisata mulai dikembangkan di Indonesia. Implementasi ekowisata di Indonesia bagian timur mengacu pada wadah kerjasama BIMP-EAGA. Konseptualisasi dari keberadaan BIMP-EAGA ialah sebagai pandangan atau acuan bagi negara anggota dalam menjalankan sektor-sektor kerjasama, yang terfokus ke dalam tiga sektor utama, yakni perdagangan, investasi dan pariwisata. Dalam sektor pariwisata, pengembangan ekowisata di Indonesia secara umum di dorong oleh keberadaan kawasan yang kaya akan sumber daya alam hayati (baik yang berupa hutan beserta hasilnya maupun biota laut), keberadaan wilayah hutan yang masih alami dan memiliki potensi sebagai paru-paru dunia, menghadapi ancaman globalisasi seperti perubahan iklim dan pemanasan global, pemanfaatan kekayaan alam dengan ramah lingkungan serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan

Universitas Indonesia

pendapatan masyarakat sekitar dengan konsep ekowisata yang berbasis masyarakat.

Selain memiliki kepentingan dalam hal kelestarian alam dan lingkungan, implementasi ekowisata di Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan pemasukan devisa negara dalam sektor pariwisata, menambah kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan kelautan maupun kehutanan, dan menambah kawasan konservasi yang ada di Indonesia.

Ketika suatu negara memiliki kepentingan untuk memperoleh taraf perekonomian yang lebih baik, maka kerjasama dengan negara lain merupakan suatu solusi yang cenderung digunakan. Setiap negara pastinya memiliki kekurangan dan keunggulan potensi wilayahnya masing-masing, oleh karena itulah sifat komplementaritas muncul. Dalam kondisi kerjasama BIMP-EAGA yang terfokus pada peningkatan kerjasama dalam perdagangan, investasi dan pariwisata, dalam agenda awal pertemuan, secara khusus Indonesia melihat potensi yang akan dibangun dengan negara lain harus merujuk pada program pengembangan nasionalnya. Sebagai contoh,

Ketika Indonesia ingin bekerjasama dalam hal pembelian bibit kelapa sawit dengan Malaysia. Pihak Malaysia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah mereka tidak memperbolehkan penjualan bibit maka solusi yang diberikan adalah Malaysia berinvestasi di lahan Indonesia dengan memakai bibit Malaysia. Kemudian Indonesia mengatakan bahwa kebijakan Indonesia memiliki keterbatasan terhadap penanaman modal asing di sektor tersebut, kemungkinan dapat dilakukan dengan berbagi saham dengan perusahaan Indonesia lokal (antara 50 % ke bawah). Ketika negosiasi dan pertukaran informasi terus berlanjut, Indonesia menawarkan untuk bekerjasama atas nama BIMP-EAGA agar dapat melonggarkan kebijakan yang ada dan kemudian sesuai dengan kebijakan masing-masing negara maka kerjasama dapat dikatakan terealisasi atau tidak tergantung dari departemen kedua negara yang memiliki *full authority*.¹⁴⁷

Pada awalnya, kerjasama BIMP-EAGA lebih memfokuskan pada sektor perdagangan guna peningkatan perekonomian kawasan kerjasama yang secara nyata merupakan wilayah yang kurang berkembang dan memiliki tingkat pendapat rendah. Ketika kerjasama mulai dijalankan, perdagangan dilalui melalui jalur darat (yang disinyalir untuk mempermudah pengeluaran biaya distribusi dan menghindari beberapa faktor seperti, jika menggunakan jalur laut akan memakan

¹⁴⁷Hasil wawancara Devi Putri Kussanti dengan Tiur Rumondang, *loc.cit.*

waktu lebih lama dan jalur udara lebih mahal). Tetapi pada saat itu, kebijakan pemerintah masing-masing negara masih terasa menyulitkan untuk melakukan kerjasama, transportasi darat yang membawa barang-barang untuk diperdagangkan harus melalui beberapa gerbang perbatasan yang kemudian diturunkan dan diangkut kembali menggunakan transportasi dari negara tujuan dan kemudian didistribusikan kembali ke gerbang negara selanjutnya, diturunkan kembali dan diangkut lagi menggunakan transportasi negara tujuan akhir. Kasus ini terjadi ketika Indonesia melakukan kerjasama perdagangan dengan Brunei Darussalam, yang harus melalui jalur darat dan gerbang Malaysia kemudian menuju Brunei.

Karena mengalami kesulitan dan hambatan dalam melakukan kerjasama perdagangan, para pemerintah negara anggota kemudian melakukan negosiasi dan mencetuskan untuk melakukan kelonggaran kebijakan dalam hal perpindahan manusia. Untuk keberlanjutannya akan dilihat keefektifan dan sarana serta infrastruktur yang akan diperbaiki baik fisik maupun non-fisiknya. Melalui kebijakan perpindahan manusia inilah maka sektor pariwisata mulai dikembangkan dalam transisi untuk mempermudah kerjasama dalam sektor lainnya.

Jika dilihat dari implementasi *community-based ecotourism*, kepentingan Indonesia sebenarnya lebih tertuju pada pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dalam hal pendapatan. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia bagian timur yang *notabene* berada dalam kerjasama BIMP-EAGA, memiliki kekurangan dalam hal penghasilan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Jika dibandingkan dengan kerjasama sub-regional di kawasan barat Indonesia, kawasan timur Indonesia masih belum dapat dikatakan memiliki kekuatan bersaing. Hal ini dikarenakan tidak adanya salah satu negara anggota yang berfungsi sebagai motor penggerak layaknya Singapura (dalam kerjasama sub-regional IMS-GT) dan wilayah Indonesia bagian timur cenderung tertinggal dalam hal teknologi, informasi serta potensi ketidakstabilan keamanan.

Pada tabel di bawah (Tabel 9) terlihat perbandingan Produk Domestik Bruto (PDB) antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.

Universitas Indonesia

Kawasan barat Indonesia memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan kemajuan dalam setiap tahunnya dibandingkan dengan kawasan timur Indonesia (meskipun kawasan timur Indonesia juga mengalami peningkatan, tetapi fluktuasi pertambahan tiap tahunnya baik dalam tiap provinsi maupun secara keseluruhan tiap tahun, wilayah barat Indonesia tetap unggul). Indikator inilah yang menggugah Indonesia (khususnya wilayah timur) terdorong untuk melakukan kerjasama dengan negara lain dengan batasan kedekatan geografis, maka terbentuklah BIMP-EAGA sebagai wadah kerjasama dengan tujuan meningkatkan perekonomian wilayah kerjasama dan mempercepat integrasi kawasan. Melalui implementasi konsep ekowisata yang berbasis masyarakat, diharapkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah timur Indonesia dapat memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 8
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Provinsi (miliar rupiah) 2005-2007

Provinsi	2005	2006*)	2007**)
1	2	3	4
Kawasan Indonesia Barat			
NAD	56,951.61	70,786.84	73,196.27
Sumatera Utara	139,618.31	160,376.80	181,819.74
Sumatera Barat	44,674.57	53,029.59	59,799.05
Riau	139,019.00	167,068.19	210,002.56
Jambi	22,487.01	26,061.77	32,076.68
Sumatera Selatan	81,531.51	95,928.76	109,895.71
Bengkulu	10,134.45	11,397.00	12,820.32
Lampung	40,906.79	49,118.99	60,921.97
Kepulauan Bangka Belitung	14,189.08	15,920.53	17,895.02
Kepulauan Riau	40,984.74	46,216.08	51,826.27
TOTAL	590,497.07	695,904.55	821,253.59

Kawasan Indonesia Timur

Kalimantan Barat	33,869.47	37,715.00	42,478.60
Kalimantan Tengah	20,983.17	24,480.04	27,920.07
Kalimantan Selatan	31,623.00	34,670.49	39,438.77
Kalimantan Timur	180,289.09	199,588.13	212,096.64
Sulawesi Utara	18,763.48	21,202.69	24,274.03
Sulawesi Tengah	17,116.58	19,310.25	21,743.61
Sulawesi Selatan	51,780.44	60,902.82	69,271.92
Sulawesi Tenggara	12,981.05	15,270.35	17,953.07
Gorontalo	3,480.57	4,082.28	4,760.70
Sulawesi Barat	4,422.95	5,124.81	6,192.79
Maluku	4,570.66	5,079.84	5,698.80
Maluku Utara	3,583.10	2,818.42	3,160.04
Papua Barat	7,913.78	8,945.54	10,369.84
Papua	43,615.32	46,892.06	55,365.78
TOTAL	434,992.66	486,082.72	540,724.66

Sources: *Gross Regional Product of Provinces in Indonesia*, BPS¹⁴⁸

Note: *) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

Dalam kasus kesejahteraan masyarakatnya, kawasan timur Indonesia memiliki tingkat populasi masyarakat di bawah garis kemiskinan yang cukup memprihatinkan bila dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia. Hal tersebut berlangsung ketika kerjasama BIMP-EAGA belum dan telah terbentuk. Selain itu terdapat beberapa indikator yang mengakibatkan kawasan timur Indonesia belum dapat mengimbangi dan menyusul peningkatan yang terjadi di kawasan barat Indonesia.¹⁴⁹

¹⁴⁸http://www.bps.go.id/leaflet/booklet_ok108.pdf (diunduh 08 Mei 2009), hlm. 130.

¹⁴⁹Indikator penyebabnya ialah keterbelakangan kawasan timur Indonesia dalam memanfaatkan kawasan dan menyerap perubahan yang telah terjadi di kawasan Indonesia barat. Keterbelakangan tersebut disebabkan hampir 90 % masyarakatnya masih tergantung pada sektor pertanian dengan tingkat produktivitas amat rendah. Transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri yang berlangsung pesat di kawasan barat Indonesia hampir tidak terlihat di kawasan timur Indonesia. Bahkan prasarana dasar dan standar yang diperlukan untuk membangun industri seperti jalan, telepon, listrik, pelabuhan dan tenaga kerja relatif sulit di dapatkan di kawasan timur. Akibat dari kekurangan tersebut investor tidak tertarik dan selama periode 1967-1990 sekitar 93,7% investasi PMDN dan 94,7 % PMA mengalir ke kawasan barat Indonesia. Adriana Elisabeth, dkk, *Segitiga Pertumbuhan di Kawasan Timur ASEAN*, PPW-LIPI, Jakarta, 2005, hlm. 53.

Tabel 9
Persentase Populasi Masyarakat yang Berada di bawah Garis Kemiskinan
Berdasarkan Provinsi (2005-2007)

<i>Provinsi</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>
1	2	3	4
Kawasan Indonesia Barat			
NAD	28.69	28.28	26.65
Sumatera Utara	14.68	15.01	13.90
Sumatera Barat	10.89	12.51	11.90
Riau	12.51	11.85	11.20
Jambi	11.88	11.37	10.27
Sumatera Selatan	21.01	20.99	19.15
Bengkulu	22.18	23.00	22.13
Lampung	21.42	22.77	22.19
Kepulauan Bangka			
Belitung	9.74	20.91	9.54
Kepulauan Riau	10.97	12.16	10.30
TOTAL	163.97	178.85	157.23
Kawasan Indonesia Timur			
Kalimantan Barat	14.24	15.24	12.91
Kalimantan Tengah	10.73	11.00	9.38
Kalimantan Selatan	7.23	8.32	7.01
Kalimantan Timur	10.57	11.41	11.04
Sulawesi Utara	9.34	11.54	11.42
Sulawesi Tengah	21.80	23.63	22.42
Sulawesi Selatan	14.98	14, 57	14.11
Sulawesi Tenggara	21.45	23.37	21.33
Gorontalo	29.05	29.13	27.35
Sulawesi Barat	-	20.74	19.03
Maluku	32.28	33.03	31.14
Maluku Utara	13.23	12.73	11.97
Papua Barat	-	41.34	39.31
Papua	40.83	41.52	40.78
TOTAL	225.73	297.57	279.2

Source: Welfare Indicators, BPS¹⁵⁰

¹⁵⁰http://www.bps.go.id/leaflet/booklet_0kt08.pdf (diunduh 08 Mei 2009), hlm. 130.

Secara umum, manfaat dari adanya kerjasama dalam pengembangan sektor pariwisata di kawasan EAGA bagi Indonesia ialah terbukanya akses atau pintu dalam menjalin kerjasama di berbagai sektor, seperti perdagangan, investasi, pertanian, hasil laut, pariwisata, dan sebagainya. Pada awalnya, kebijakan negara anggota lainnya (pada awal kerjasama BIMP-EAGA terbentuk) sudah menjalankan peraturannya masing-masing (tidak mengacu pada kesepakatan kerjasama). Dengan adanya ketidakseimbangan tersebut, maka sebagai salah satu negara anggota dan pernah merasakan kesulitan dalam bekerjasama, Indonesia merasa penting untuk menyuarakan kesulitan yang dialaminya. Setelah itu, kerjasama mulai diperbaiki dan mengacu pada kebersamaan untuk mencapai tujuan, dengan akses lintas manusia sebagai *setter* dan kemudian muncullah pengembangan ekowisata.

Diharapkan melalui sektor pariwisata dan ekowisata, kerjasama EAGA dapat lebih maju dan Indonesia dapat lebih termotivasi untuk berkreasi dan berkompetisi dalam pengembangan sektor pariwisatanya. Kemudian berlanjut ke arah kerjasama yang bersifat peningkatan perdagangan dan investasi secara besar.

Melalui *community based ecotourism*, selain meningkatkan perekonomian negara yang berasal dari pemasukan devisa, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal merupakan salah satu hal penting dalam mengukur keberhasilan kerjasama EAGA. Dalam implementasinya, realisasi HoB dan SSME merupakan wujud dari konsep wisata yang bertanggungjawab dengan alam dan melakukan kegiatan wisata ramah lingkungan serta dekat dengan masyarakat lokal. Meskipun dengan adanya HoB dan SSME, hingga saat ini masyarakat lokal masih belum memiliki wadah ataupun kelembagaan khusus baik dari pemerintah ataupun pihak swasta yang mengenalkan, memberi pengarahan mengenai ekowisata. Tetapi dalam hal usaha kecil dan menengah, mereka sudah terwadahi oleh lembaga donor internasional (di beberapa daerah kawasan ekowisata, tidak seluruhnya). Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, negara lain sudah mengetahui keterbatasan atau kebutuhan masyarakat lokal tetapi pemerintah negara sendiri belum bertindak. Pada awalnya pemerintah sudah berkomitmen dengan inisiatif tersebut, maka sudah seharusnya pemerintah juga

yang harus membangun kelembagaan melalui pemerintah daerah dan dengan bantuan (fisik dan non-fisik) dari pemerintah pusat.

4.2 Kepentingan Politik

Pada dasarnya, pengembangan sektor pariwisata ditujukan untuk memenuhi kepentingan perekonomian dalam hal pemasukan devisa negara. Tetapi ketika suatu negara berada dalam situasi dan kondisi yang tidak seimbang dalam hal pembangunan, maka pendorong lahirnya pengembangan dalam sektor kerjasama tertentu diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketimpangan ekonomi yang sedang terjadi. Indonesia yang *notabene*-nya berada sebagai anggota dalam kerjasama sub-regional IMS-GT, IMT-GT dan BIMP-EAGA, memiliki dua kawasan besar pengembangan kerjasama yakni, kawasan barat (IMS-GT dan IMT-GT) dan kawasan timur (BIMP-EAGA). Motivasi pengembangan kawasan timur Indonesia melalui kerjasama BIMP-EAGA merupakan jalan keluar untuk menyeimbangi kemajuan yang telah dicapai oleh kawasan barat Indonesia. Dan melalui pengembangan pariwisata menuju ekowisata, Indonesia berusaha untuk menciptakan keseimbangan perekonomian dalam negeri dan keseimbangan dalam menjalin kerjasama yang ada dengan negara lain.

Khamouna and Zeiger (1995), menyatakan bahwa sektor pariwisata akan menghasilkan perdamaian dan keseimbangan dalam bekerjasama dengan negara lainnya, *"peace through tourism with the statement that worldwide tourism has been recognized as a social force that can promote international understanding, cooperation and global fraternity"*.¹⁵¹ Melalui kebijakan bersama yang telah ditempuh oleh negara anggota kerjasama BIMP-EAGA dalam pengembangan sektor pariwisata menuju ekowisata, diharapkan akan membawa kemudahan dan kelonggaran dalam hal kebijakan negara terhadap sektor kerjasama lainnya. Dengan demikian kesepakatan awal pembentukan akan dapat terwujud¹⁵² dan menjadikan ekowisata sebagai media pariwisata yang ramah terhadap alam,

¹⁵¹Joop Ave dalam artikel *Tourism and Peace: Is Tourism a Generator of Peace or Simply the Beneficiary of Peace?*, Jurnal DUTA-Indonesia and the world, edisi Januari 2006, hlm. 31.

¹⁵²Menjadikan kawasan Timur ASEAN sebagai kawasan yang maju sehingga dapat menyeimbangi perkembangan kawasan Barat Indonesia, memanfaatkan potensi wilayah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat dan memberdayakan sumberdaya-sumberdaya yang ada guna menghadapi perdagangan bebas ASEAN (AEC-ASEAN Economic Community 2015).

pembelajaran dalam melestarikan alam, sumber ilmu pengetahuan serta sebagai kawasan penelitian.

Sebagai contoh: Dengan melihat perkembangan stabilitas politik dan keamanan Indonesia yang semakin membaik, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat, memberikan rasa optimis dalam pengembangan potensi industri pariwisata di tanah air. Dalam kebijakannya, pemerintah Indonesia melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan empat strategi yang meliputi:

1. Peningkatan kepercayaan pasar utama pariwisata terhadap citra Indonesia, melalui upaya-upaya bersama dalam mengatasi isu-isu yang mempengaruhi *country image* seperti keamanan, flu burung, lingkungan dan bencana alam;
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor melalui pelaksanaan Inpres No. 16 Tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata;
3. Peningkatan partisipasi dan dukungan Pemda melalui regulasi, produk dan promosi pariwisata di daerah;
4. Peningkatan koordinasi dengan asosiasi dan industri pariwisata dalam pengembangan dan promosi pariwisata.¹⁵³

4.3 Manfaat Lain dalam Implementasi Ekowisata di Indonesia

4.3.1 Konservasi Alam

Jika dilihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap pemasukan devisa negara, maka melalui potensi yang dimiliki seperti keanekaragaman flora dan fauna serta kawasan kepulauan yang indah, implementasi ekowisata di Indonesia akan memberikan kontribusi yang efektif dalam menarik minat wisatawan. Hal ini akan memberikan dampak peningkatan terhadap pemasukan devisa negara dan perhatian masyarakat internasional terhadap Indonesia. Selain itu, melalui konsep yang telah diusung bersama dalam kerjasama BIMP-EAGA yakni, *ecotourism based-community*, peran serta

¹⁵³R. Winantyo, Rahmat Dwi Saputra, dkk., *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 138.

masyarakat yang diberikan dalam proporsional yang lebih tinggi akan memberikan dampak peningkatan terhadap hasil pendapatan masyarakat lokal.

Implementasi konsep ekowisata selain merupakan cara yang ramah dalam melakukan perjalanan ataupun kegiatan berwisata, tetapi juga memberikan manfaat di bidang perekonomian dan konservasi alam. Dengan adanya asosiasi GFTN (*Global Forest and Trade Network*) yang diprakarsai oleh WWF, Indonesia telah menyumbang sekitar 467.700 hektar hutan bersertifikat. Melalui GFTN Indonesia, seluruh *trade participant*, *forest participant*, HPH dan pihak-pihak lainnya yang terkait harus memiliki komitmen dalam pengelolaan hutan secara bertanggungjawab serta menjembatani jaringan perdagangan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan.¹⁵⁴

Jika dikaitkan dengan manfaat ekonomi dan konservasi alam terhadap implementasi ekowisata di Indonesia, salah satu peran serta pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan ialah dengan mengadakan kerjasama dengan GFTN dan BIMP-EAGA. Kawasan *Heart of Borneo* (HoB) yang merupakan salah satu dari konsepsi ekowisata, diharapkan dapat dikelola secara bertanggung jawab. Melalui *workshop* yang bertajuk "Sosialisasi Program Pengelolaan Hutan Lestari di Wilayah Heart of Borneo", fokus kegiatan tertuju pada bisnis "hijau" HPH dan revitalisasi kinerja pengelolaan demi menjaga hutan Kalimantan. Melalui program tersebut Indonesia mulai menuju pengolahan hutan yang bersertifikasi dan legal.

4.3.2 Pendidikan dan Penelitian

Berdasarkan potensi kekayaan laut yang dimiliki oleh kawasan timur Indonesia, selain sebagai daya tarik di bidang pariwisata, faktor pemberdayaan lainnya muncul dari kalangan peneliti ataupun pengakajian kelautan. Sebagai contoh kasus ialah dengan diadakannya *World Ocean*

¹⁵⁴Bulletin Kaleidoskop 2008 of Global Forest and Trade Network, WWF Indonesia, periode Januari-Desember 2008.

Conference (WOC) atau Konferensi Kelautan Dunia dan Pertemuan Tingkat Tinggi Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle Initiative* atau CTI Summit) di Manado pada 11-15 Mei 2009. Melalui peristiwa tersebut, Indonesia yang berperan sebagai anggota sekaligus tuan rumah, memiliki keinginan dan ambisi untuk mewujudkan kepentingannya guna menjadikan kawasan timur Indonesia sebagai wilayah yang memiliki prospek bagus kedepannya, baik secara ekonomi, politik, pariwisata dan keilmuan.

Salah satu wilayah Indonesia bagian timur dalam kerjasama BIMP-EAGA ialah Sulawesi Utara. Wilayah ini memiliki potensi keindahan dan kekayaan laut yang besar. Dengan kawasan wisata bawah laut seperti Bunaken dan Wakatobi yang memiliki keindahan terumbu karangnya (hingga terkenal ke seluruh dunia) maka konsep ekowisata harus dikembangkan guna melestarikan sumber daya alam bawah laut yang ada. Dalam pengembangan dan pelestarian alam bawah lautnya, Provinsi Sulawesi Utara melalui WOC dan CTI Summit berambisi untuk menjadi tuan rumah Sekretariat Inisiatif Segitiga Terumbu Karang. Hal ini dilakukan untuk menjalankan visi kelautan Sulawesi Utara yang dapat diwujudkan jika Sekretariat CTI berada di Manado, yaitu Sulawesi Utara akan dikembangkan sebagai pusat pengkajian dan penelitian kelautan di Indonesia dan menjadi pusat belajar ilmu kelautan di kawasan Pasifik.¹⁵⁵ Sikap optimisme dan dominasi Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki wilayah terumbu karang terbesar diantara keenam negara anggota WOC lainnya yakni: Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Timor Leste.¹⁵⁶

Melalui kekayaan *biodiversity* Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara, potensi yang dimiliki selain sebagai tempat pariwisata dan pengembangan ekowisata, kepentingan sebagai pusat keunggulan dunia untuk penelitian bawah laut dalam pengembangan ilmu pengetahuan

¹⁵⁵Kompas, 18 April 2009, menurut Gubernur Sulut, Sinyo H Serundajang, dalam Sulut Incar Sekretariat: Untuk Dorong Penelitian dan Ilmu Kelautan. Beliau juga menegaskan untuk menjajaki peluang dalam pembuatan akuarium laut besar seperti di Jepang.

¹⁵⁶Ibid, menurut Sekretaris Panitia Nasional WOC, Indroyono Soesilo.

dan penelitian merupakan potensi selanjutnya di Taman Nasional tersebut. Keunggulan yang dimiliki ialah, Taman Nasional Wakatobi memiliki 750 jenis terumbu karang dari 850 jenis terumbu karang di dunia. Berbeda dengan Karibia yang hanya memiliki 50 jenis terumbu karang dan Laut Merah (Mesir) 300 jenis terumbu karang. Dalam pemaparannya, Veda Santiaji, *Project Leader Joint Program The Nature Conservancy-WWF* untuk Taman Nasional Wakatobi, mengatakan sumber daya alam di Wakatobi sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai laboratorium alam yang luar biasa. Terdapat delapan sumber daya alam yang penting di Taman Nasional Wakatobi, yakni terumbu karang, mangrove, lamun atau padang rumput laut (*sea grass*), daerah pemijahan ikan, mamalia laut, burung-burung migrasi, peneluran penyu, dan ikan-ikan pesisir.¹⁵⁷

4.4 Peluang Investasi

Perkembangan pariwisata Indonesia menuju *community-based ecotourism* merupakan suatu upaya dalam pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air yang memiliki potensi sebagai daerah ekowisata. Pemerintah melalui kebijakannya telah mengalokasikan anggaran untuk mengupayakan peningkatan daya tarik investasi swasta ke wilayah Indonesia timur. Sejalan dengan itu dukungan pelayanan sistem transportasi (laut dan udara) yang efisien merupakan prasyarat untuk mengundang investasi swasta ke KTI (Kerjasama Timur Indonesia).¹⁵⁸

Selanjutnya sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh tim studi kelayakan ADB, bahwa perlu diperhatikan adanya masalah keterbatasan dan ketidakmerataan prasarana dan sarana pendukung investasi sebagai salah satu kendala utama dalam penanaman modal di kawasan kerjasama ekonomi sub-regional, khususnya yang ada di wilayah KTI dalam konteks kerjasama BIMP-

¹⁵⁷Kompas, 04 Desember 2008, dalam artikel: Konservasi, Wakatobi Pusat Penelitian Bawah Laut Dunia. Pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi telah menyiapkan beberapa program pembangunan laboratorium lahan basah (*wetland laboratorium*) di Pula Hoga. Untuk mendukung konsep ekowisata Pemkab berencana untuk mengembangkan tenaga air, angin dan matahari sebagai sumber energi.

¹⁵⁸<http://www.bappenas.go.id/index.php?module=FileManager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=171/PengembanganKESRdiKTI.pdf> hlm 6, (diunduh 09 Februari 2009).

EAGA. Sebagai pendukung utama dari investasi dunia usaha, sektor transportasi menjadi salah satu primadona dalam kerjasama ekonomi sub-regional BIMP-EAGA. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan telah ditandatanganinya beberapa MoU yang terkait dengan kerjasama dalam sektor transportasi. Seperti halnya ditunjukkan dalam sektor perhubungan udara dalam lingkup BIMP-EAGA yang telah menandatangani untuk mewujudkan "BIMP-EAGA *Air Linkages*" yang menerapkan kebijaksanaan 'open sky policy' yang progresif untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan investasi di kawasan kerjasama ini.

Sebagai fasilitator dalam kerjasama, pemerintah Indonesia dalam Departemen Kebudayaan dan Pariwisata beberapa potensi wilayah investasi di Indonesia dalam pengembangan pariwisata menuju *community based ecotourism* di antaranya:

1) Investasi pariwisata di kota Tomohon, Sulawesi Utara.

- Wisata Danau Linow, lokasi di Lahendong dan Tondangow dengan luas area 35 Ha. Investasi yang diharapkan ialah sarana dan prasarana, promosi pemasaran, dan pengembangan SDM.
- Hutan Pinus dan pemandian air panas, lokasi di Lahendong dengan luas area 10 Ha. Investasi yang diharapkan ialah sarana dan prasarana, promosi pemasaran, dan pengembangan SDM.
- Air Terjun, lokasi di Kinilow, Pinaras dan Tara-Tara dengan luas area 15 Ha. Investasi yang diharapkan ialah sarana dan prasarana, promosi pemasaran, dan pengembangan SDM.
- Agrotourism, lokasi di Rurukan dan Kumelembuai, luas area belum diketahui. Investasi yang diharapkan ialah sarana dan prasarana, promosi pemasaran, dan pengembangan SDM.
- Wisata Musik dan Tari-tarian kebesaran seperti Maengket, Katrili, Musik Bambu, Kolintang, Cakalele, dan wisata budaya Waruga, lokasi tersebar, dengan luas area 125 Ha. Investasi yang diharapkan ialah sarana dan prasarana, promosi pemasaran, dan pengembangan SDM.
- Wisata Alam, seperti *tracking, hiking*, lokasi di Gunung Lokon, Mahawu, Bukit Wawo, Bukit Empung dan Lupa Lelah. Investasi yang diharapkan ialah sarana dan prasarana, promosi pemasaran, dan pengembangan SDM.¹⁵⁹

¹⁵⁹<http://www.budpar.go.id/page.php?ic=568&id=3757> dalam Peluang Investasi di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Website Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, (diunduh 04 Mei 2009).

2) Investasi pariwisata di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

- Pelestarian Kebudayaan Kutai
 - Membangun kembali Keraton Lama
 - Mengembalikan fungsi Sultan Kutai secara simbolis seperti di Keraton Yogyakarta
- Pembangunan Kota Tenggarong
 - Taman Jembatan Mahakam II atau Jam Bentong
 - Taman sejuta bunga
- Pengembangan Pulau Tenggarong
 - Membuat jalan lingkar seputar Pulau Tenggarong
 - Membuat rumah adat Lamin, Kutai, Bugis, Banjar, dan lain-lain
 - Membuat kolam pemancingan ikan
 - Sky Loft dari Pulau Tenggarong ke Tenggarong
 - Perahu naga dari Pelabuhan Musium ke Pulau Tenggarong
 - Area Jet Sky seputar Pulau Tenggarong
- Pengembangan Tenggarong Seberang
 - Pengembangan kota tepi sungai (*water front city*)
 - Diaroma jembatan Mahakam II
 - Lokasi taman Erau
 - Convention hall
- Pengembangan Taman Rekreasi Lembu Suana
 - Aquarium pesut
 - Taman Anggrek
 - Museum (kayu, geologi, zoologi, flora, dan lain-lain)
 - Hutan rekreasi
 - Perkampungan rumah adat
 - *Station transit Sky Lift*
 - Lingkungan industri yang menunjang pariwisata
- Pengembangan Agro Wisata Loa Duri
 - Penanaman buah-buahan langka (laboratorium alam buah-buahan)
 - Tempat pemancingan ikan
 - Pemanfaatan air terjun
 - Penyediaan sarana rekreasi air
 - Penanaman pohon jati emas
 - Untas jalan dengan jalan kaki
- Taman budaya Pondok Labu
 - Rehabilitasi rumah adat Lamin Suku Dayak Benuaq
 - Pembuatan lapangan untuk atraksi seni budaya
 - Permukiman dan pembinaan perkampungan suku Dayak Benuaq
 - Pembinaan dan pengembangan tenun uiap doyo
- Pengembangan obyek wisata Sungai dan Danau
 - Peningkatan sarana dan prasarana wisata sungai
 - Perkembangan obyek wisata Danau Semayang
 - Perkembangan obyek wisata Danau Jempang
 - Perkembangan obyek wisata Danau Melintang
- Peluang Investasi Sektor Pariwisata tertuju pada:

- Usaha perhotelan
- Usaha restoran
- Jasa biro perjalanan wisata
- Penanaman investasi pada obyek andalan
- Sky lift, Pulau Tenggara, Aquarium Pesut, Kolam pemancingan ikan.¹⁶⁰

3) Investasi wisata alam dan budaya di Kendari, Sulawesi Tenggara

- Wisata pantai dan bahari
 - Pengembangan Pulau Bungkutoko sebagai ekowisata (pusat wisata kemasyarakatan dan budaya)
 - Pantai Mayarä
 - Pengembangan Teluk Kendari (untuk kegiatan arena dayung, pemancingan, ski air, lomba motor boat, lomba perahu tradisional, lomba selam, dan lain-lain)
 - Pengembangan Tambak Wisata
 - Pengembangan Pantai Nambo
- Wisata alam
 - Pengembangan kawasan gunung nipa-nipa untuk lintas alam, perburuan, panorama alam, serta untuk kepentingan penelitian
 - Arena lomba sepeda gunung, penangkaran hewan langka, seperti: babi, rusa, anoa, serta berbagai jenis unggas, dan lain-lain
- Wisata budaya
 - P2ID (Pusat Promosi dan Informasi Daerah)
 - Museum dan Taman Budaya¹⁶¹

4) Investasi wisata bahari dan wisata alam di kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan

- Pulau Pulau Sembilan

- Pulau Burungloe	- Pulau Katingdoang
- Pulau Liang liang	- Pulau Kanalo 1
- Pulau Kambuno	- Pulau Kanalo 2
- Pulau Kodingare	- Pulau Larearea
- Pulau Batanglampe	

Di Pulau Pulau Sembilan terdapat keindahan pemandangan laut disertai dengan pasir putih dan keanekaragaman karang serta ikan masih sangat alami.
- Pantai Lasia dan Pantai Patongko

Keindahan bawah laut di daerah ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, meskipun letaknya berada di pesisir, namun sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih belum memadai.¹⁶²

¹⁶⁰<http://www.budpar.go.id/page.php?ic=568&id=3755> dalam Kesempatan Investasi Pariwisata di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, (diunduh 04 Mei 2009).

¹⁶¹<http://www.budpar.go.id/page.php?ic=568&id=2362> dalam Potensi Wisata Alam dan Budaya di Kendari, Sulawesi Tenggara, (diunduh 04 Mei 2009).

¹⁶²<http://www.budpar.go.id/page.php?ic=568&id=2365> dalam Peluang Investasi di Kabupaten

5) Investasi di Sulawesi Utara

- Peluang investasi di bidang wisata bahari untuk pelatihan pemandu wisata
- Penyewaan bus atau angkutan wisata yang representatif
- Peluang investasi di bidang souvenir, seperti: makanan kaleng kemasan khas daerah dan hiasan dengan motif khas daerah,¹⁶³

Terlihat bahwa Indonesia banyak mengharapkan masuknya investasi dalam menunjang pengadaan dan peningkatan infrastruktur ekowisata. Pengembangan sektor pariwisata Indonesia menuju ekowisata merupakan sasaran awal kebijakan pemerintah dalam menerapkan kepedulian terhadap alam dan lingkungan sekitar objek wisata. Kepedulian yang terwujud dalam konsep ekowisata seperti, melalui wisata konservasi, penerapan konsep *one man one tree* atau *one passenger one tree*, tidak mengganggu kehidupan flora dan fauna ketika berwisata, ramah terhadap lingkungan dan menjaga kelestariannya serta konsep lainnya yang berhubungan dengan penerapan konsep ekowisata.

Dalam implementasinya, ekowisata di Indonesia membutuhkan dorongan yang kuat dalam hal penanaman investasi guna meningkatkan sarana dan prasarana kawasan ekowisata. Kerjasama antara unsur yang terkait secara terpadu sangat diharapkan agar semua sasaran dapat terwujud. Pembangunan di tiap wilayah Indonesia (yang memiliki objek wisata atau objek ekowisata) selain berasal dari dana pemerintah yang terkait, juga melibatkan dana luar negeri atau penanaman modal asing. Terlepas dana bantuan berasal dari negara mana dan berapa jumlahnya, pemerintah Indonesia memiliki peraturan yang telah disepakati bersama dalam melakukan investasi pariwisata di Indonesia. Melalui IIPU (Informasi Peluang Usaha) diharapkan dapat memberikan gambaran tentang langkah yang harus ditempuh dalam memilih kegiatan usahanya. Sebagai berikut: Di Indonesia, terdapat tiga jenis penanaman modal, yaitu:

1. Penanaman Modal Asing (PMA). Didasarkan pada UU no. 1 tahun 1967 yang diubah dengan UU no. 1970. Dikategorikan sebagai PMA apabila

Sinjai, Sulawesi Selatan, (diunduh 04 Mei 2009).

¹⁶³<http://www.budpar.go.id/page.php?ic=568&id=2338> dalam Investasi di Sulawesi Utara, (diunduh 04 Mei 2009).

- seluruh/sebagian kepemilikan saham dikuasai/dimiliki oleh orang/warga negara asing pendatang;
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu penanaman modal sesuai dengan UU no. 6 tahun 1970. Dikategorikan sebagai PMDN apabila sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI/Badan Hukum Pemerintah Indonesia;
 3. Penanaman Modal Non PMA/PMDN (Non Fasilitas), penanaman modal yang didasarkan pada Keputusan/Instruksi Presiden no. 7 tahun 1987 tentang penyerhanaan perizinan usaha pariwisata digolongkan sebagai penanaman modal non fasilitas karena pelaksanaan ini tidak memperoleh fasilitas seperti PMA-PMDN.

Adapun fasilitas yang diberikan adalah:

1. Fasilitas pembebasan bea masuk dan perpajakan lainnya atas pengimporan barang modal;
2. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan produksi 2 (dua) tahun pertama berdasarkan kapasitas terpasang;
3. Pemberian fasilitas pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah untuk usaha industri tertentu;
4. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
5. Keputusan tentang rencana penggunaan tenaga kerja WNA / pendatang (RPTKA);
6. Keputusan tentang izin kerja tenaga kerja WNA atau pendatang (IKTA);
7. Izin Lokasi;
8. Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Izin Usaha Tetap (IUT)/ITUP, Izin Usaha Perluasan dan Pembaruan IUT.

164

¹⁶⁴<http://www.my-indonesia.info/page.php?ic=831&id=123> Peluang dalam bidang Investasi, Website Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, (diunduh 08 Mei 2009)

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kerjasama sub-regional BIMP-EAGA belum dikembangkan secara optimal. Dengan demikian, keinginan Indonesia untuk mempercepat pembangunan di wilayah bagian timur melalui kerjasama ini juga belum terpenuhi. Namun setelah krisis finansial di Asia, pengembangan kerjasama BIMP-EAGA dilakukan dengan mendorong sektor pariwisata, terutama dengan mengadopsi konsep *community based-ecotourism* atau ekowisata. Negara-negara anggota kerjasama BIMP-EAGA bersepakat untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dengan memajukan ekowisata di BIMP-EAGA yang merupakan perpaduan antara sektor pariwisata dengan aspek pengembangan sumber daya alam hayati disertai aspek ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Selain itu, gagasan untuk memajukan sektor pariwisata didasarkan pada fakta bahwa *volume* perdagangan antar negara anggota kerjasama EAGA masih relatif rendah. Fakta ini disebabkan perbedaan kebijakan di masing-masing negara anggota dalam hal perdagangan. Meskipun berada dalam satu wadah kerjasama, ternyata secara nasional, beberapa negara anggota memiliki kebijakan yang sulit diharmonisasikan. Oleh sebab itu, pariwisata yang *notabene* merupakan sektor atau kegiatan yang mampu memacu aktifitas dan pergerakan ekonomi lintas batas, baik manusia/tenaga kerja, barang dan modal, digunakan sebagai penggerak laju perdagangan dan investasi.

Ekowisata Indonesia berpotensi besar untuk dikembangkan. Namun potensi atau kekayaan sumber daya alam hayati dan keanekaragaman fauna Indonesia harus dikelola secara profesional, sehingga dapat memberi kontribusi yang maksimal bagi peningkatan pemasukan atau devisa Indonesia. Untuk itu dibutuhkan waktu yang relatif panjang jika pemerintah Indonesia ingin mengadopsi konsep ekowisata secara baik dan benar. Hal ini disebabkan ekowisata bukan hanya merupakan konsep pariwisata yang mengutamakan perlindungan/konservasi alam, dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui

pelatihan dan kreatifitas lokal, melainkan juga suatu model peningkatan pendapatan daerah bukan semata-mata dari anggaran negara, melainkan dari sektor ekowisata di daerah setempat. Model atau pola sirkulasi pendapatan ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan atau memanfaatkan potensi lokal di bidang ekowisata.

Implementasi ekowisata di Indonesia tercermin dalam realisasi *Heart of Borneo (HoB)* dan *Sulu-Sulawesi Marine Eco-System (SSME)*, dimana dalam HoB, kekayaan hutan beserta isinya harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan kontribusi terhadap negara. Dalam SSME, Indonesia yang memiliki potensi besar dari kekayaan lautnya masih belum dapat meyakinkan atau membuktikan kemampuannya dalam mengembangkan dan memanfaatkan SSME dibandingkan dengan Filipina. Dengan demikian, Indonesia terkesan lemah dibandingkan Filipina, meskipun Indonesia memiliki wilayah laut dan perairan terluas di antara negara-negara EAGA. Selain itu, Indonesia pun belum mampu mengatasi persoalan keamanan laut, misalnya dalam menangani pencurian ikan (*illegal fishing*). Keterbatasan pengetahuan mengenai persoalan pelestarian laut tampak masih terbatas, hal ini dibuktikan dengan terjadinya kerusakan terumbu karang di laut Indonesia, yang justru sudah diketahui terlebih dahulu oleh negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia. Fakta ini memperkuat citra Indonesia di mata internasional mengenai ketidakmampuan dalam pelestarian lingkungan laut yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata.

Kepentingan ekonomi Indonesia dalam kerjasama ekowisata di BIMP-EAGA masih belum terpenuhi karena persoalan atau keterbatasan dalam pengembangan sarana prasarana guna mendukung ekowisata. Keterbatasan sarana dan prasarana ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan promosi pariwisata Indonesia, baik secara nasional maupun regional/internasional. Masalah ini dikarenakan belum adanya pedoman pengembangan ekowisata Indonesia dan terdapat perbedaan mengenai konsep serta prinsip ekowisata. Di kalangan pemerintah Indonesia, koordinasi dan kerjasama belum terpadu, misalnya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang seharusnya melakukan kerjasama dengan Departemen Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum tidak dapat seiring sejalan dalam mengembangkan ekowisata di Indonesia. Hal ini dikarenakan

Universitas Indonesia

perbedaan konseptual mengenai ekowisata dan masih banyaknya faktor kepentingan tiap instansi (ego sektoral) yang memperlambat koordinasi, bahkan cenderung tidak berdampak pada kemajuan atau pengembangan ekowisata di Indonesia.

Keterbatasan yang dialami Indonesia dalam sarana dan prasarana darat ialah kondisi jalan yang telah diperbaiki menuju kawasan ekowisata tidak dapat bertahan lama karena konstruksi jalan dan material yang digunakan tidak sesuai standar proporsional serta tenaga ahli yang kurang berkualitas. Hal ini masih ditambah dengan beban angkutan yang berlebih serta cuaca yang mengakibatkan kondisi jalan tidak dapat bertahan lama atau cepat rusak. Sedangkan di jalur udara dan laut juga terdapat beberapa kendala dan masih minimnya lapangan terbang internasional di kawasan timur Indonesia dan pelabuhan yang dapat menjamin kenyamanan para wisatawan.

Bagi para pelaku atau pemangku kepentingan di sektor pariwisata di Indonesia, khususnya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, masih mempertimbangkan atau mempersoalkan apakah ekowisata itu suatu konsep atau produk. Ketidajelasan dalam memahami ekowisata mengakibatkan kebingungan dalam melakukan koordinasi dan sinergi, baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah dengan pihak swasta. Karena berbagai persoalan di tingkat nasional, maka di tingkat regional atau dalam kerjasama BIMP-EAGA, Indonesia tidak dapat menjadi penggerak ataupun *leader*, baik untuk mengembangkan ekowisata dalam kerjasama BIMP-EAGA apalagi untuk mendapatkan keuntungan dari pengembangan ekowisata di tingkat sub-regional ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum siap mengembangkan dan memanfaatkan (konsep) ekowisata. Selain itu motivasi Indonesia untuk terlibat dalam kerjasama BIMP-EAGA belum mampu mewujudkan kepentingan nasional Indonesia memajukan ataupun mempercepat pembangunan wilayah Indonesia bagian timur, sehingga mampu mengimbangi kemajuan di wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan di tingkat regional ASEAN, negara-negara anggota kerjasama BIMP-EAGA belum dapat mendukung tujuan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN*

Economic Community (AEC 2015), khususnya melalui kerjasama ekowisata. Meskipun sebenarnya kerjasama sub-regional di Asia Tenggara merupakan cara atau alternatif untuk mendorong integritas ekonomi regional ASEAN.

5.2 Saran

Pengembangan ekowisata sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat lokal yang merupakan salah satu pelaku/aktor ekowisata, hal ini disebabkan masyarakat lokal berperan langsung dalam pengelolaan sumber daya alam atau objek ekowisata. Tetapi pada realitasnya, masih banyak masyarakat lokal yang belum mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan ekowisata. Peran pemerintah daerah dan pusat dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat lokal melalui berbagai media masih minim. Hal ini merupakan sumber dari ketidaktahuan masyarakat lokal. Untuk mengatasinya, pemberdayaan masyarakat lokal khususnya perlu segera dilakukan secara aktif melalui penyuluhan berkala disertai simulasi ekowisata yang baik dan benar sesuai dengan SOP (*Standard Operation Procedure*) ekowisata di BIMP-EAGA.

Berkaitan dengan hambatan di bidang infrastruktur, transportasi, kebijakan pemerintah, promosi pariwisata dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, Indonesia sebagai anggota kerjasama BIMP-EAGA perlu menerapkan konsep ekowisata dalam sektor pariwisatanya, yaitu dengan menyusun SOP untuk mendukung realisasi ekowisata, diantaranya:

- a. Meningkatkan koordinasi yang baik antar pemerintah dengan seluruh instansi yang terkait dalam pengembangan ekowisata di Indonesia. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seharusnya memiliki jadwal dan target optimalisasi dalam bidang infrastruktur dan transportasi. Ketidaksinambungan kerjasama antara Debudpar dengan Dephub dan PU (Pekerja Umum) merupakan ketidaksuksesan pengembangan infrastruktur dan peningkatan transportasi di kawasan ekowisata yang jauh dari pusat kota.
- b. Melihat kembali apakah sudah terarah pengembangan ekowisata di Indonesia sesuai dengan konsep yang diusung oleh EAGA. Dalam hal ini pihak Debudpar sendiri belum menentukan konsep ekowisata di Indonesia

- yang cocok dengan keberadaan sumber daya alam dan manusianya, maka realisasi ekowisata Indonesia masih belum dapat menyaingi negara anggota lainnya di kawasan kerjasama BIMP-EAGA.
- c. Menetapkan zona-zona ekowisata yang berpotensi internasional untuk di promosikan secara luas. Indonesia secara khusus belum menentukan kawasan ekowisata yang berpotensi untuk diikuti sertakan dalam promosi pariwisata internasional. Untuk di kawasan timur Indonesia, hanya kawasan wisata Pulau Komodo (Indonesia) dan *Coral Triangle* (Kawasan BIMP-EAGA) yang telah masuk dalam kategori keajaiban dunia. Hal tersebut juga sekaligus menjadi ajang promosi pariwisata internasional bagi kedua kawasan pariwisata EAGA dan Indonesia.
 - d. Seharusnya pemerintah pusat menerapkan pengawasan terhadap seluruh pelaku ekowisata lainnya. Hal ini untuk meminimalisasikan hal-hal yang dapat merugikan pengembangan ekowisata, seperti inefisiensi berkaitan dengan prosedur birokrasi dan lain-lain. Pemerintah pusat melakukan pengawasan ke seluruh wilayah ekowisata disertai dengan instansi yang terkait lainnya. Pengawasan tidak dilakukan instansi masing-masing, tetapi harus dilakukan bersama-sama. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat dan memperbanyak informasi terhadap kebutuhan apa saja yang harus ditingkatkan dan diperbaiki di wilayah ekowisata, agar tidak terjadi kesalahpahaman (*miss communication*) ketika melakukan rapat koordinasi antar instansi, dan agar tidak terjadi manipulasi antar instansi terkait yang sedang melakukan observasi.
 - e. Merumuskan standarisasi ekowisata yang selanjutnya dapat dijadikan acuan/pedoman dalam mengelola kawasan ekowisata.
 - f. Memperbanyak sosialisasi tentang ekowisata melalui seminar, *talk show*, iklan layanan masyarakat, pameran dan sebagainya.
 - g. Memberikan penghargaan bagi wilayah/daerah yang memiliki peran serta tinggi terhadap pengembangan ekowisata beserta sumber daya alam dan manusianya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Balaam, David N. and Vesseth, Michael. 1996. *Introduction to International Political Economy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Damanik, Jamianton dan Weber, Helmut F. 2006. *Perencanaan Ekowisata: dari teori ke aplikasi*. C.V Andi Offset.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 2007. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Elisabeth, Adriana, dkk. 2005. *Segitiga Pertumbuhan di Kawasan Timur ASEAN*. Jakarta: PPW-LIPI.
- East Asia Analytical Unit, Department of Foreign Affairs and Trade Parkes Act 2600, 1995, *Growth Triangle of South East Asia*, Commonwealth of Australia.
- Holsti, K. J. 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisa*, terjemahan Wawan Juanda. Bandung: Binacipta.
- Inayati, Ratna Shofi, dkk. 2007. *Memuju Komunitas ASEAN 2015: dari State Oriented ke People Oriented*. Jakarta: LIPI Press.
- Keohane, Robert. O. 1989. *International Relations and State Power*. Westview Press.
- Linberg, Kerg and Hawking, Donald E. 1995. *Ekoturisme: Petunjuk Untuk Pengelolaannya*. Jakarta: Yayasan Alami.
- Luhulima, C.P.F. 1997. *ASEAN Memuju Postur Baru*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Sa-Myung, Park and Yavaprabhas, Supachai. 2003. *Regional Cooperation and Identity Building in East Asia*. Korean Association of Southeast Asian Studies (KASEAS) and ASEAN University Network (AUN).
- Supriatna, Jatna. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri. 1995-1996. *Sub-Wilayah Ekonomi ASEAN dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Tang, Min and Thant, Myo. 1994. *Growing Triangles: Conceptual and Operational Considerations dalam Growth Triangle in Asia: A New Approach to Regional Economic Cooperation*. Hongkong: Oxford University Press.

Tim Peneliti FISIP-Pusat Kajian Pasifik Universitas Hasanuddin. 1995/1996. *Pemantapan Pertumbuhan BIMP East ASEAN Growth Area dalam Rangka Pembangunan Indonesia Bagian Timur*. Mappa Nasrun.

Winantyo, R, Dwi Saputra, Rahmat, dkk. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Kompas Gramedia.

JURNAL

Ave, Joop. Januari 2006. *Tourism and Peace: Is Tourism a Generator of Peace or Simply the Beneficiary of Peace?*. Jurnal DUTA-Indonesia and the world.

FISIPOL UMY. Edisi 1 Th. X/Februari 2001. *Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.

Swasono, Meutia Hatta, dalam Karya Ilmiah *Strategi Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Menjelang AFTA 2003*.

WWF-Indonesia Articles. October 2008. *Natural Treasures for Better Futures, Community-based Ecotourism in the BIMP-EAGA*.

WEBSITE

Antara Laut Sulu dan Laut Sulawesi, Sahabat Alam Online vol. II /2008.
http://rafflesia.wwf.or.id/enews/page.php?cat=1&id_menu=8

Based on WWF International article, July 2001, *Guidelines for Community-Based Ecotourism Development*.
<http://assets.panda.org/downloads/guidelinesen.pdf>

Brunei-Indonesia-Malaysia-Philiphine East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dalam Kerjasama Ekonomi Sub-Regional Kawasan Pertumbuhan Asia Timur.
http://www.deplu.go.id/?category_id=14&org_id=99

Gima Sugiana dalam *Konservasi Alam Melalui Elaborasi Ekowisata*.
<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0203/15/080>

Frans Teguh, dalam *Pariwisata RI, dari Pemulihan Menuju ke Kebangkitan*,
<http://cybertravel.cbn.net.id/cbprtl/common/ptofriend.aspx?x=Travel+New&y=cybertravel%7C0%7C0%7C4%7C935>

Investasi di Sulawesi Utara, <http://www.budpar.go.id/page.php?ic=568&id=2338>

Kesempatan Investasi Pariwisata di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
<http://www.budpar.go.id/page.php?ic=568&id=3755>

Laporan Pendahuluan Pengembangan Bisnis Inti KAPET (Program Pengembangan Bisnis Inti dan Rencana Tindak).
<http://penataanruang.pu.go.id/ta/Lapdul04/P5/BisnisIntiKAPET/Bab2.pdf>

Mary Lou Drieiger, dalam artikelnya *Golfing in Borneo-A Sensory Experience*.
<http://www.thingsasian.com/storiesphotos/35239/15129907/5/brt0art>

Media Indonesia, dalam artikel: *Ekowisata Pulihkan Citra Pengekspor Asap*.
<http://www.indonesiatourisminfo.com/page.php?ic=511&id=2030>

Mukhlison Chafid Fandeli, dalam artikel *Ekowisata*.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Ekowisata>

News Online ANTARA, *Negara BIMP-EAGA Sepakat Kembangkan Ekowisata*.
<http://www.antara.co.id/arc/2008/11/1/negara-bimp-eaga-sepakat-kembangkan-ekowisata/>

Peluang Investasi di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Website Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia.
<http://www.budpar.go.id/page.php?ic=568&id=3757>

Peluang dalam bidang Investasi, Website Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia.
<http://www.myindonesia.info/page.php?ic=831&id=123>

Peluang Investasi di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
<http://www.budpar.go.id/page.php?ic=568&id=2365>

Pengembangan Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA.
<http://penataanruang.pu.go.id/ta/Lapdul04/P5/PetaTematik/Bab2.pdf>

Potensi Wisata Alam dan Budaya di Kendari, Sulawesi Tenggara.
<http://www.budpar.go.id/page.php?ic=568&id=2362>

Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan, Pasal 5 bulir d, e dan h, BAB III.
<http://www.budpar.go.id/filedata/46361364UUTentangKepariwisataannet1.pdf>

Suprayoga Hadi, Bappenas dalam Pengembangan Kerjasama Ekonomi Regional dan Peningkatan Kinerja Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
<http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress&view=171PengembanganKESRdiKTI.pdf>

TEMPO Interaktif Bisnis, 25 Agustus 2003, dalam artikel: Ekowisata Indonesia Terkendala Infrastruktur.
<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/08/25/brk.20030825-19.id.html>

Tiga Negara Bangun Kawasan Konservasi Laut.
<http://www.thechampa.com/news/newsdetail.php?id=64&cat=22&lang=in>

<http://mdopost.com/news/index.php?option=comcontent&task=view&id=7939&Itemid=52>

<http://www.rtb.gov.bn/NewsUpdate/2003/July03/020703/main6.htm>

<http://www.bimp-caga.org/projects.php?p=0>

<http://mdopost.com/news/index.php?option=comcontent&task=view&id=7939&Itemid=52>

<http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/051207-borneo.pdf>

<http://www.bimphc.org/indo.asp>

http://www.budpar.go.id/filedata/4636_1364UUTentangKepariwisataannet1.pdf

<http://www.my-indonesia.info/page.php?ic=1122&prov=23>

<http://www.my-indonesia.info/page.php?ic=1122&prov=20>

http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=755 dalam artikel 10 April Penerbangan Gorontalo-Manado Dibuka

<http://www.indonesiatourisminfo.com/page.php?ic=511&id=2030>

http://www.bps.go.id/leaflet/booklet_0kt08.pdf

http://www.bps.go.id/leaflet/booklet_0kt08.pdf

<http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=171/PengembanganKESRdiKTI.pdf>

<http://www.rtb.gov.bn/NewsUpdate/2003/July03/020703/main6.htm>

MEDIA CETAK

Kompas, 04 Desember 2008, dalam artikel: Konservasi, Wakatobi Pusat Penelitian Bawah Laut Dunia.

Kompas, 16 Desember 2008, dalam artikel Pikat Taman Laut Bunaken.

Kompas, 23 Desember 2008, dalam artikel Sepenggal Pesona di Sulawesi Utara.

Kompas, 08 Februari 2009, dalam artikel Nusantara: Jelajah Kalimantan, Derawan-Oase di Perjalanan.

Kompas, 01 Maret 2009, dalam artikel Swasta Diajak Majukan Kawasan Pertumbuhan.

Kompas, 14 April 2009, dalam artikel Lingkungan, Potensi yang Belum Dilirik, oleh Yayat Supriatna

Kompas, 15 April 2009, dalam artikel Infrastruktur, Hari Ini Terminal 3 Soekarno-Hatta Beroperasi.

Kompas, 18 April 2009, dalam Sulut Incar Sekretariat: Untuk Dorong Penelitian dan Ilmu Kelautan.

Kompas, 20 April 2009, melalui Iklan Layanan Masyarakat.

The Straits Times, 26 Mei 2009, life travel: Survivor shot here three times, Park and ride.

DOKUMEN

BIMP-EAGA Working Draft 3-*working draft of the comprehensive midterm review report for Roadmap to Development.*

BIMP-EAGA Roadmap to Development 2006-2010.

BIMP-EAGA Action Plan Paper 2006-2010.

Declaration on the Heart of Borneo Initiative Paper.

Dr. Susilo Bambang Yudhoyono statement, President of Indonesia, Paper of APEC Summit in Australia, September 2007.

Message from the World Tourism Organization in the framework of the BIMP-EAGA Community-based Ecotourism Conference, Manado, North Sulawesi, 30 October-1 November 2008.

Report of the 3rd BIMP-EAGA Transport Ministers Meeting.

Universitas Indonesia

Paper Sekretariat Nasional Presented on 11 July 2007 in Manila, by Tiur Rumondang.

The Center of Data Management and Network System, Ministry of Culture and Tourism, The Republic of Indonesia.

Workshop *ecotourism* dan rapat koordinasi persiapan 5th BIMP-EAGA JTD Cluster Meeting.

WAWANCARA

Hasil wawancara Devy Putri Kussanti dengan Tiur Rumondang, Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub Regional, Gedung BKPM Lt 5, 10 Maret 2009, pukul 13.00.

Hasil wawancara Devy Putri Kussanti dengan Drs. Agus Priyono MM, Kasubdit Keterpaduan Antar Wilayah, Direktorat Produk Pariwisata, Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Depbudpar, wawancara by email, 30 April 2009, pukul 14.00.

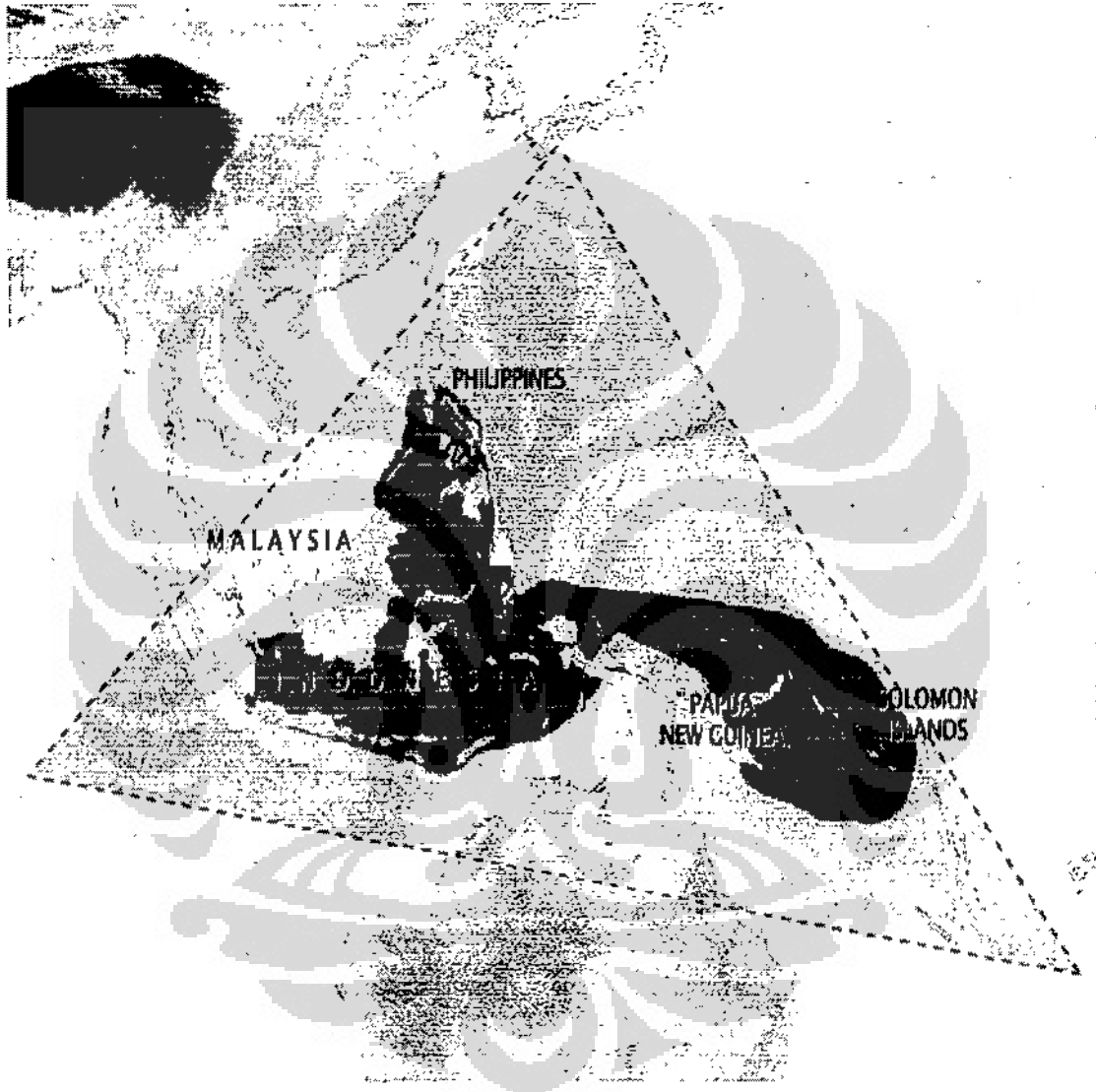
Hasil wawancara Devy Putri Kussanti dengan Tiur Rumondang, Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub Regional, by email, 27 Mei 2009, pukul 17.15.

REFERENSI LAIN

Savitri Puspitaayu dalam tesisnya yang berjudul "Pelaksanaan Ecotourism dalam Industri Pariwisata Internasional di Thailand" pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Hubungan Internasional-Desember 2004.

Lampiran 1

PETA "THE CORAL TRIANGLE"



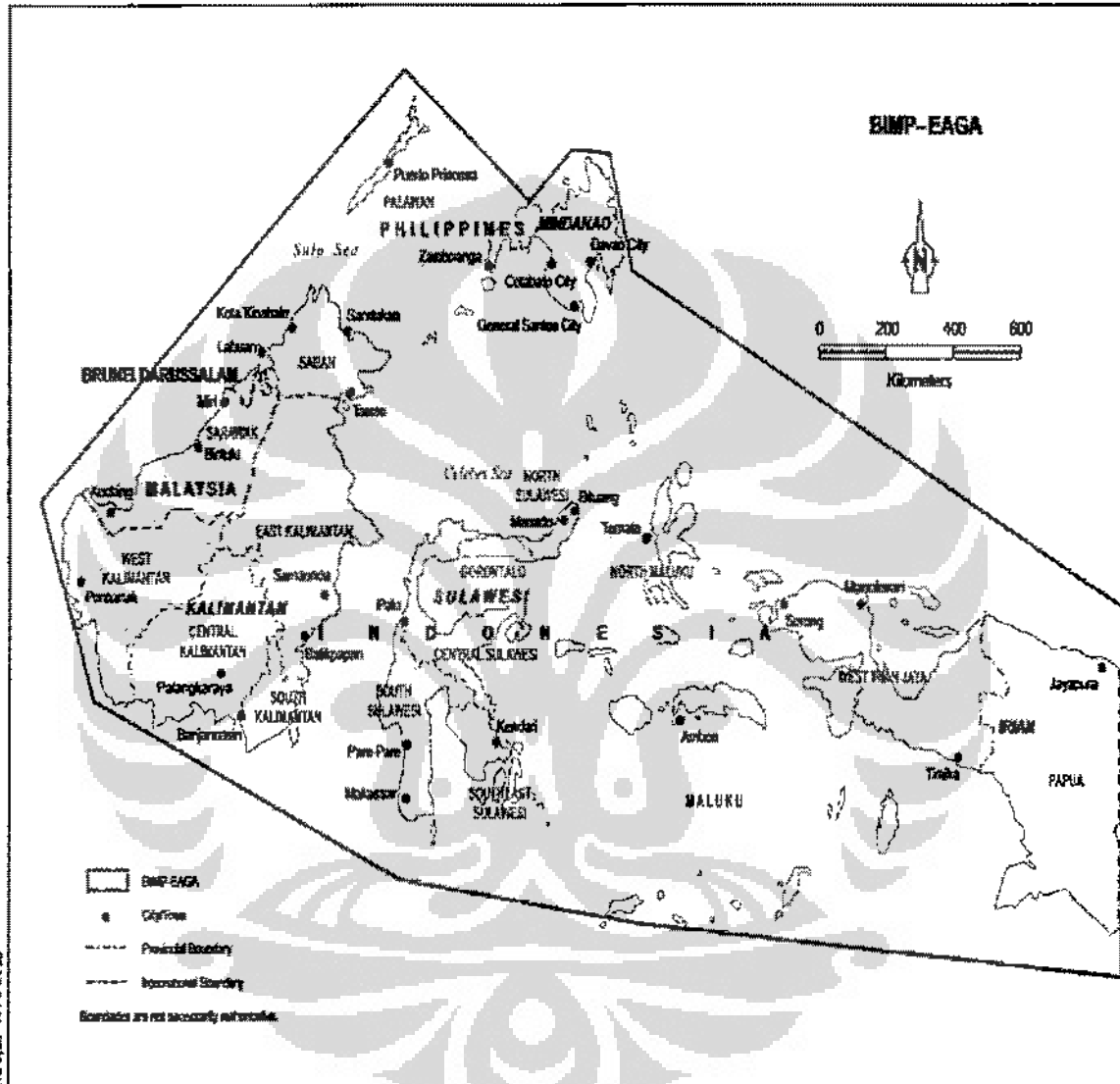
Lampiran 2

Perbandingan Sektor Unggulan yang ditetapkan dan Sektor Unggulan yang dikembangkan KAPET

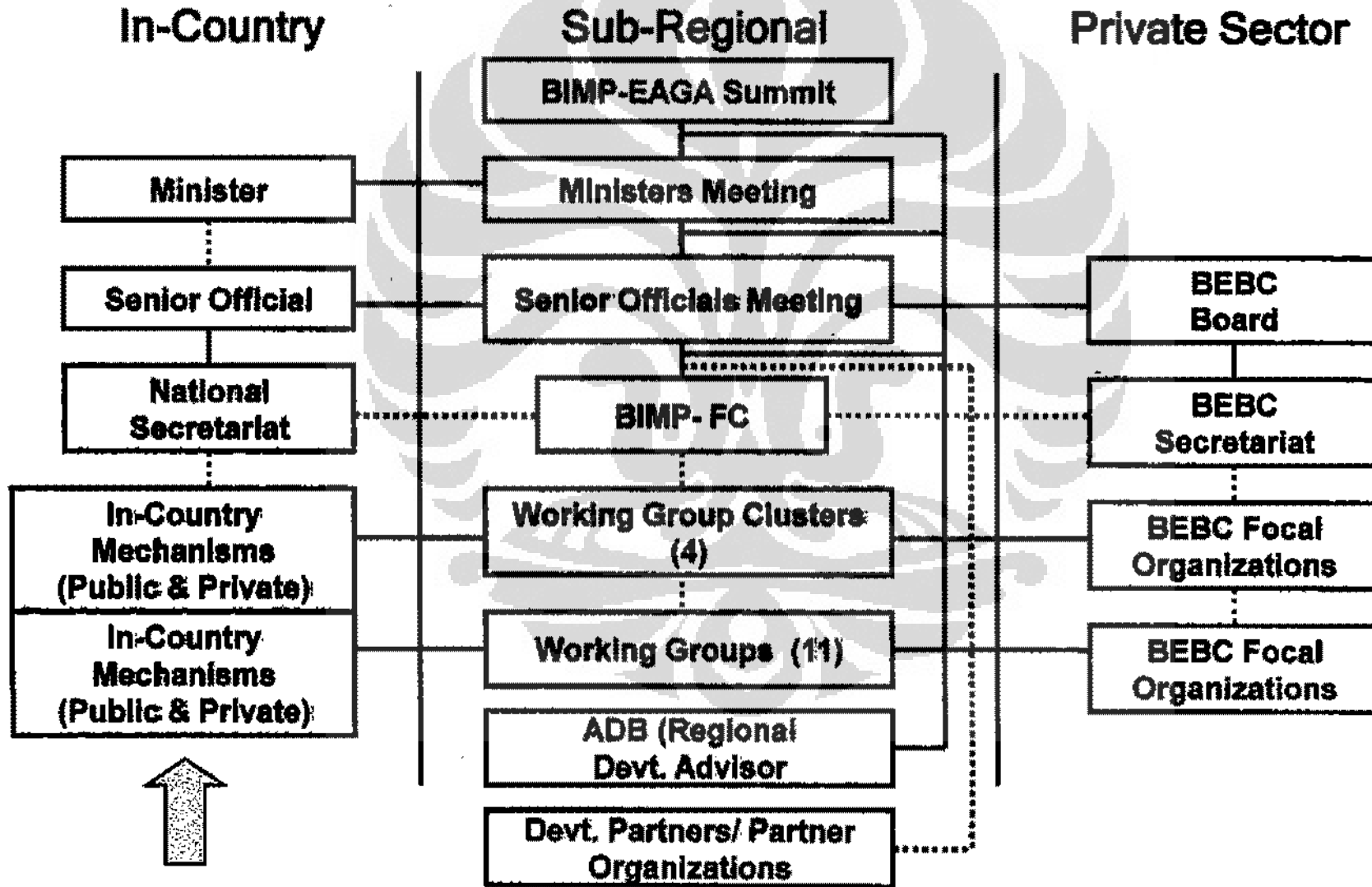
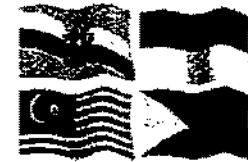
No	Nama KAPET	Sektor Unggulan Yang Ditetapkan	Sektor Unggulan Yang Dikembangkan
1	KAPET Bandar Aceh Darussalam – NAD	Pertanian, Perikanan, Industri	Pertanian, Perikanan, Industri, Pariwisata, Industri
2	KAPET Khatulistiwa – KALBAR	Industri, kehutanan, Pertambangan, Perkebunan	Perikanan, Agro Industri, Kehutanan, Pertambangan, Industri
3	KAPET DAS Kakab – KALSEL	Pertanian, Perkebunan, Industri, Peternakan, Perikanan, Pariwisata, Pertambangan	Perikanan, Infrastruktur, Industri
4	KAPET Batulicin – KALSEL	Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan	Pertambangan, Industri
5	KAPET SASAMBA – KALTIM	Pertanian, Perikanan, Industri, Peternakan, Pertambangan	Infrastruktur
6	KAPET Manado – Bitung	Pariwisata, Perikanan, Pertambangan, Agro Industri	Perikanan, Agro Industri, Pariwisata, Industri
7	KAPET Batu – SULTENG	Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata	
8	KAPET Bukari – SULTRA	Pertambangan, Pariwisata, Perkebunan, Perikanan, Industri	
9	KAPET Pare-pare – SULSEL	Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Pertambangan, Pariwisata	Agro Industri, Peternakan, Infrastruktur, Industri
10	KAPET Bima – NTB	Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Pertambangan, Peternakan	Perikanan, Kehutanan, Pertambangan, Peternakan
11	KAPET Mbay – NTT	Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Peternakan	Perikanan, Agro Industri, Kehutanan, Pariwisata, Pertambangan, Peternakan, Infrastruktur, Industri.
12	KAPET Seram – Maluku	Perkebunan, Pertambangan, Perikanan	
13	KAPET Biak – Papua	Pariwisata, Perikanan, Pertambangan	

Lampiran 3

PETA WILAYAH KERJASAMA BIMP-EAGA



Lampiran 4



Lampiran 5

DECLARATION ON THE HEART OF BORNEO INITIATIVE Three Countries, One Conservation Vision

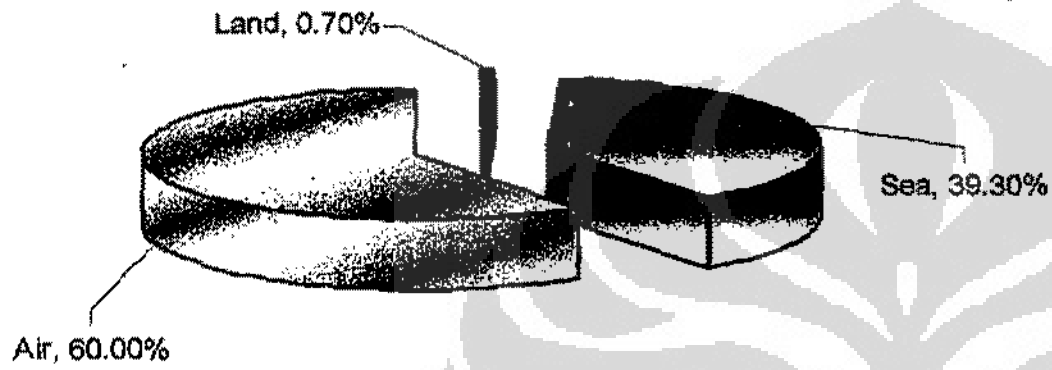
We, the Governments of Brunei Darussalam, Indonesia and Malaysia, recognizing the importance of the Island of Borneo as a life support system, hereby declare that:

- With one conservation vision and with a view to promote people's welfare, we will cooperate in ensuring the effective management of forest resources and conservation of a network of protected areas, productive forests and other sustainable land-uses within an area which the three respective countries will designate as the "Heart of Borneo (HoB)", thereby maintaining Bornean natural heritage for the benefit of present and future generations, with full respect to each country's sovereignty and territorial boundaries, and also without prejudice to the ongoing negotiations on land boundary demarcation.
- The HoB Initiative is a voluntary trans-boundary cooperation of the three countries combining the stakeholders' interests, based on local wisdom, acknowledgement of and respect for laws, regulations and policies in the respective countries and taking into consideration relevant multilateral environmental agreements, as well as existing regional and bilateral agreements / arrangements.
- We are willing to cooperate based on sustainable development principles through research and development, sustainable use, protection, education and training, fundraising, as well as other activities that are relevant to trans-boundary management, conservation and development within the areas of the HoB.

To support this Declaration, we, the three countries will prepare our respective project documents incorporating the strategic and operational plans, which will form the basis for the development of our roadmap towards realizing the vision of the HoB initiative.

.....

VISITOR ARRIVALS BY MODE TRANSPORT 2007



VISITOR ARRIVALS BY MODE TRANSPORT 2006

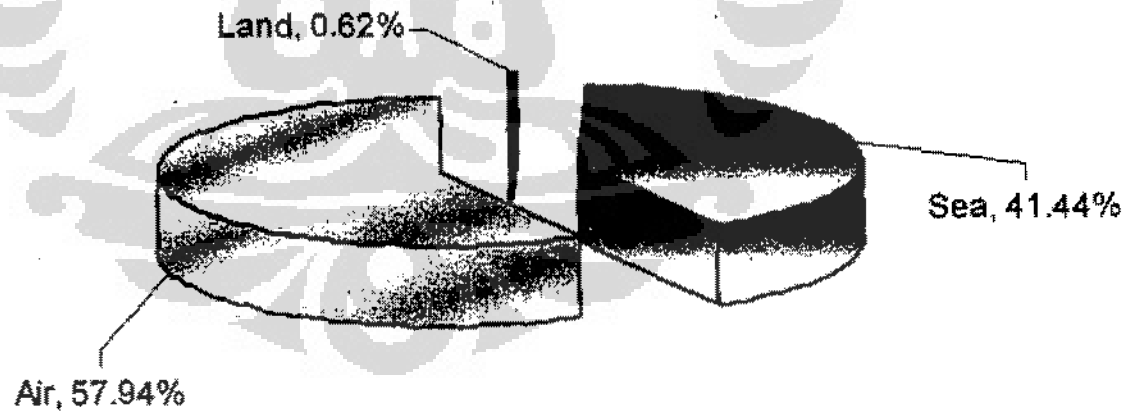


CHART- 10

BIMP-EAGA ROADMAP TO DEVELOPMENT MATRIX OF SUBREGIONAL COOPERATION MEASURES (2006-2010)

Introduction

A BIMP-EAGA Roadmap to Development has been formulated by the stakeholders of the Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) subregional cooperation initiative. The roadmap aims to guide the direction of BIMP-EAGA in 2006 to 2010 in pursuing its development goal and strategic objectives. It establishes the subregional cooperation measures that will contribute to the achievement of this goal and objectives.

Development Goal

The ultimate goal of BIMP-EAGA is to narrow the development gap across and within the EAGA member countries as well as across the ASEAN-6 countries. Its immediate goal is to increase trade, investments and tourism within EAGA. Towards this end, the following targets shall be achieved within the five-year planning period of the EAGA roadmap:

- Increase intra- and extra-trade among EAGA focus areas by 10% by 2010;
- Increase investments in the EAGA subregion by 10% by 2010; and
- Increase tourism movement in the EAGA subregion by 20% by 2010.

Strategic Objectives

To achieve the development goal and targets set forth in its roadmap, BIMP-EAGA will pursue the following strategic objectives:

1. Promote intra- and extra-EAGA trade, investments and tourism in selected priority sectors, namely: agro-industry and natural resources, tourism, transport, infrastructure and ICT, with particular emphasis on SME development in these sectors;
2. Coordinate the management of natural resources for sustainable development of the subregion;
3. Coordinate the planning and implementation of infrastructure support to economic integration, with active participation of the private sector; and
4. Strengthen the BIMP-EAGA institutional structures and mechanisms for effective implementation of the EAGA Roadmap and Action Plan.

To achieve these strategic objectives, BIMP-EAGA will be guided by this Matrix of Subregional Cooperation Measures (2006-2010):

PROMOTION OF INTRA- AND EXTRA-EAGA TRADE, INVESTMENTS AND TOURISM IN PRIORITY SECTORS				
1.1 Promote and facilitate intra- and extra-EAGA trade and investments in priority sectors, especially those with high impact on SME development.				
1.1.1 Establish a more favorable image and perception of EAGA as an investment and tourism destination among stakeholders.	More favorable image of EAGA	Image building programs implemented; Results of periodic perception	Lead: BEBC, BIMP-FC AR-Clusters, NS, SEMCA, BETC	2008 onwards (survey conducted annually)

Format: Bullets and Numbering
Format: Numbered + Level: 1 +
Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at:
1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63
cm + Tab after: 1,27 cm + Indent at:
1,27 cm

SUBREGIONAL COOPERATION MEASURES ¹	OUTPUT TARGET	PROGRESS INDICATORS	RESPONSIBLE PARTIES	TIMEFRAME
clients, visitors, and the general public through effective information dissemination, public relations, promotions, and security programs.		survey indicate a more favorable image of EAGA		
1.1.2 Advocate for policies favorable to business development, especially of SMEs, in the subregion.	Increased no. of policy reforms favorable to SME development	New Policy reforms formulated and implemented by 2008	Lead: SMED Cluster All Clusters, BEBC, NS	2006 onwards
1.1.3 Provide incentives for investors in EAGA within the framework of existing national and local investment regulations.	Increased no. and value investments in EAGA	Incentives code implemented by 2008	Lead: SMED Cluster NS, BIMP-FC, BEBC	2006 onwards
1.1.4 Undertake more effective joint EAGA facilitation and promotion measures to promote foreign direct investments in the subregion.	Increased value of FDIs in EAGA	10% Increase in FDIs by 2010	Lead: SME Cluster NS, BEBC, BIMP-FC, Partner Organizations	2006 onwards
1.1.5 Strengthen networking and business linkages among EAGA business and tourism organizations and with external business partners.	Increased no. of major agreements/ linkages among EAGA business organizations	At least one major EAGA business agreement/ linkage implemented per year	Lead: BEBC SMED/JTD/NRD Clusters, NS, BIMP-FC, Partner Organizations	2006 onwards
1.1.6 Improve the competitiveness of EAGA SMEs in the global supply chain and encourage industry clustering and value chain system of developing EAGA-wide priority business projects.	Increased no. and value of EAGA wide joint venture business projects	At least 2 major EAGA business projects implemented per year	Lead: SMED Cluster BEBC, JTD and NRD Clusters, NS, BIMP-FC, Partner Organizations	2006 onwards
1.1.7 Improve the system of delivery of effective business development services (BDS) to business people in EAGA, especially SMEs in priority sectors.	Increased no. of EAGA business projects accessing BDS	EAGA business projects provided access to BDS upon demand	Lead: BEBC and SMED Cluster NS, BIMP-FC, Partner Organizations	2006 onwards
1.1.8 Implement measures to improve the quality of human resources in EAGA industrial, tourism and investment areas, as well as to strengthen the capacity of HRD organizations in the subregion to implement these measures.	Better qualified professionals and workers in EAGA industries; Increased no. of accredited EAGA HRD organizations	HRD programs implemented starting 2006; EAGA accreditation program established by 2010	Lead: All Clusters BEBC, NS, BIMP-FC	2006 onwards
1.2 Facilitate the cross-border flow of goods and people to, from and within EAGA.				

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

SUBREGIONAL COOPERATION MEASURES	OUTPUT TARGET	PROGRESS INDICATORS	RESPONSIBLE PARTIES	TIMETABLE
1.2.1 Strengthen the Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) initiative that would mobilize resources among member countries aimed at simplifying cross-border CIQS issues and making RRP's more transparent.	Increased no. of CIQS RRP's simplified and/or made more transparent.	CIQS RRP's simplified and/or made more transparent for all priority sectors in all regional ports by 2010.	Lead: SMED Cluster NS, BIMP-FC, NRD and TIID Cluster	2006 onwards
1.2.2 Establish border arrangements that will facilitate flow of goods and people and reduce transport costs.	Border arrangements established	Border arrangements established starting in 2007	Lead: TIID Cluster All Clusters, NS	2006 onwards
1.2.3 Develop the necessary transport infrastructure facilities and logistical services.	Infrastructure facilities and services developed	Infrastructure and services installed	Lead: TIID Cluster All Clusters, BETC, BEBC, NS	2006 onwards
1.2.4 Formulate and implement an integrated EAGA tourism promotion program packaging circuit tours of EAGA destinations and targeting both traditional and non-traditional EAGA tourist markets.	Increased Intra- and extra-EAGA tourist traffic and tourism receipts	4% annual increase in EAGA tourist traffic volume; and, 4% annual increase in tourism receipts	Lead: JTD Cluster TIID Cluster, BETC, BEBC, NS, BIMP-FC, Partner Organizations	2006 onwards
1.3 Improve the flow of trade, investment and tourism information within and outside EAGA.				
1.3.1 Improve the system of collection, consolidation, updating, dissemination and exchange of business information among EAGA stakeholders and with EAGA trading partners.	Effective business information system established.	Information system operational in 2006	Lead: BIMP-FC BEBC, NS, All Clusters, Partner Organizations	2006 onwards
1.3.2 Prepare and disseminate business information materials that highlight the commercial and investment opportunities in EAGA and encourage private sector participation in trade, investments and tourism.	Industry profiles, project profiles, business plans, and other information materials made available in hard copies and in the website	Information materials made available in 2006	Lead: BEBC BEBC, NS, All Clusters, Partner Organizations	2006 onwards
1.3.3 Strengthen the system of monitoring and disseminating information on EAGA cross-border trade, investment and tourism.	Regular monitoring reports prepared	Quarterly reports prepared starting 2007	Lead: BIMP-FC BEBC, NS, Partner Organizations	2006 onwards
2. MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT				
2.1 Improve subregional coordination for the sustainable development of natural resources and biodiversity in EAGA.				

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Bullets and Numbering

SUBREGIONAL COOPERATION MEASURES ¹	OUTPUT TARGET ²	PROGRESS INDICATORS ³	RESPONSIBLE PARTNER ⁴	TIMELINE
2.1.1 Develop and implement a framework for strengthening subregional cooperation in and coordinating the integrated protection and management of natural resources and biodiversity in the subregion.	Implementation of an EAGA natural resources management program within the framework of joint cooperation	EAGA Natural Resources Management Program implemented by mid-2007	Lead: NRD Cluster JTD Cluster, NS, BEBC, BIMP-FC	2007 onwards
2.2 Promote sustainable development practices in the management of economic development projects.				
2.2.1 Enhance public-private sector partnerships in developing sustainable agri-based, forestry, fishery, minerals and energy joint cooperation projects.	Joint cooperation projects identified and implemented	Private sector projects implemented within the target timeframes	Lead: NRD Cluster JTD Cluster, NS, BEBC, BIMP-FC, Partner Organizations	2008-2010
2.2.2 Support initiatives to promote the development and use of environment-friendly technologies in the productive sectors (e.g., agro-industry, fisheries, forestry and environment, energy and mineral resources, industry and tourism).	Implementation of projects promoting the use of environmental friendly technology and practices in EAGA	Environment-friendly technology promotion projects implemented starting in 2006	Lead: NRD Cluster JTD and SME Clusters, NS, BEBC, BIMP-FC, Partner Organizations	2006-2010, ongoing
3. PLANNING AND IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE SUPPORT TO ECONOMIC INTEGRATION				
3.1 Improve EAGA air, sea and land connectivity.				
3.1.1 Facilitate and support public, private and public-private sector partnership initiatives to establish air, sea and land transport facilities and services linking priority routes across the focus areas in the subregion.	Increased public and private sector investments in EAGA transport services; Increased no. of EAGA routes linked by transport services	Enhancement of at least 2 new air, sea or land transport services in EAGA per year	Lead: TIID Cluster JTD Cluster, NS, BIMP-FC, BEBC, Partner Organizations	January 2006 onwards
3.1.2 Provide the policy environment and support initiatives to establish liberalized transport arrangements in EAGA, including 3 rd , 4 th and 5 th freedom traffic rights between EAGA destinations.	Operationalization of liberalized transport arrangements in EAGA	3 rd , 4 th and 5 th freedom traffic rights operational in selected EAGA entry points by end of 2006 and in all entry points by 2008	Lead: TIID Cluster JTD Cluster, NS, BEBC	December 2006 onwards
3.2 Improve basic infrastructure facilities in EAGA.				
3.2.1 Promote and facilitate public and private sector joint cooperation initiatives in providing more cost-effective basic infrastructure facilities.	Establishment of joint cooperation in cost-effective resource mobilization for infrastructure development	Infrastructure projects implemented starting 2006	Lead Agency: TIID Cluster BEBC, NS	2006-2010

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted Table

Formatted: Font color: White

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

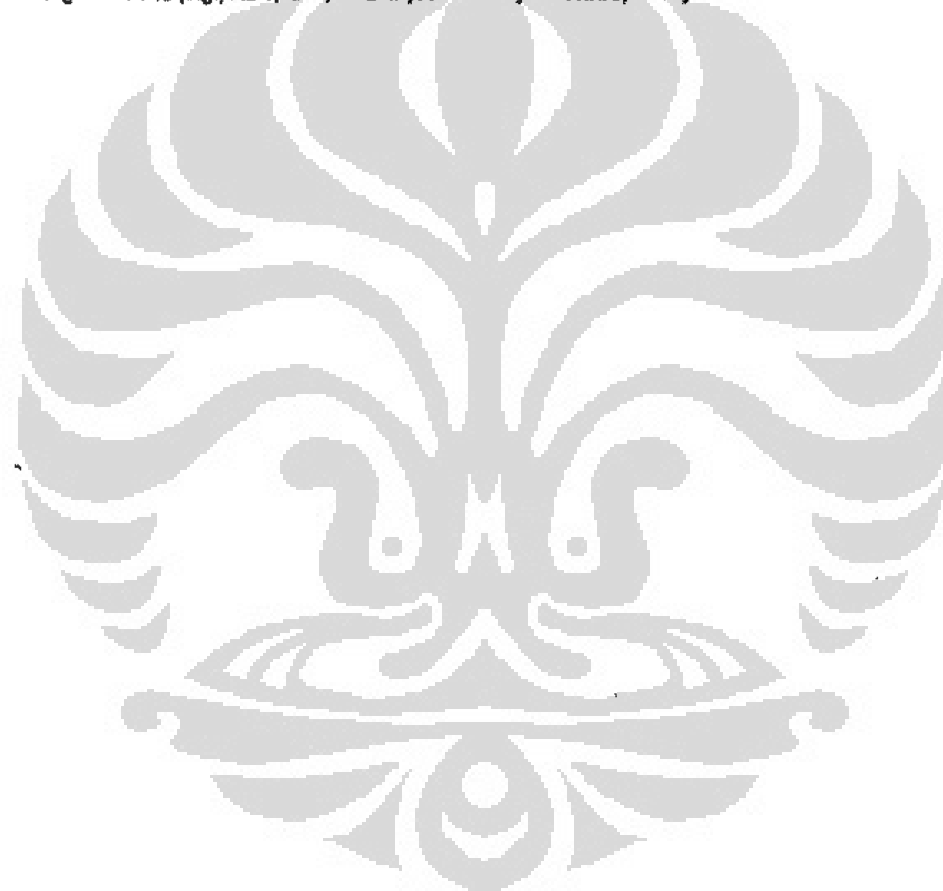
SUBREGIONAL COOPERATION MEASURES	OUTPUT TARGET	PROGRESS INDICATORS	RESPONSIBLE PARTIES	TIMEFRAME
3.3 Improve the information and communication technology (ICT) facilities and services in EAGA.				
3.3.1 Support and fast track the implementation of telecommunications development programs that will increase access to voice, data and internet services in the subregion, including its remote areas.	Increased coverage of ICT services in EAGA	Increase in the no. of ICT service connections in EAGA by end 2007	Lead: TIID Cluster NS, BEBC	2006-2010
4. INSTITUTIONAL STRENGTHENING				
4.1 Strengthen intra-EAGA institutional coordination.				
4.1.1 Strengthen institutional coordination mechanisms, procedures and protocols among EAGA organizations to more effectively implement the priority flagship programs, projects and activities identified in the roadmap and action plan.	Improved coordination mechanisms and protocols established	Improved coordination mechanisms and protocols operational by January 2006	Lead: BIMP-FC BEBC, NS, Clusters, Partner Organizations	January 2006 onwards
4.1.2 Support programs that will enhance the capabilities of EAGA organizations to effectively perform their respective roles and improve their coordination and cooperation.	Improved capacity of EAGA institutions	Regular (semestral and annual) reports on the performance of EAGA institutions	Lead: BIMP-FC BEBC, Clusters, Partner Organizations	January 2006 onwards
4.2 Strengthen extra-EAGA linkages and coordination.				
4.2.1 Strengthen mechanisms to enhance EAGA's linkages and relations with external partner organizations, including ASEAN and other multilateral bodies, development partners, ODA agencies, and other external bodies.	Closer coordination with external partners	Regular coordination activities with external partners established by 2006	Lead: BIMP-FC BEBC, NS, Clusters, Partner Organizations	January 2006 onwards
4.2.2 Secure and manage technical and financial support from EAGA development partners for the effective implementation of priority programs and projects.	Increased technical and financial support to EAGA	At least 3 new EAGA programs, projects or activities implemented with external assistance per year	Lead: BIMP-FC BEBC, NS, Clusters, Partner Organizations	January 2006 onwards

Format: Bullets and Numbering

Notes: 1 This broad-based BIMP-EAGA Roadmap to Development will be supported by a subregion-wide Action Plan and corresponding Cluster Action Plans. The subregional cooperation measures considered in this Roadmap are aligned with relevant ASEAN agreements.

2 The progress indicators will be reviewed and confirmed once more benchmark statistical data are available.

3 The lead agency for each measure is indicated. The other organizations, including the various public and private agencies under them, take on implementing and/or coordinating responsibilities. Responsible Parties include the following: BIMP Facilitation Center (BIMP-FC), BIMP-EAGA Business Council (BIBC), National Secretariats (NS) of the member countries, Small and Medium Enterprise Development (SME) Cluster, Joint Tourism Development (JTD) Cluster, Natural Resources Development (NRD) Cluster, Transport, Infrastructure and ICT Development (TIID) Cluster, BIMP-EAGA Tourism Council (BETC), BIMP-EAGA Media and Communicators Association (BEMCA), and Partner Organizations (e.g., ADB, GTZ, ASEAN, ASEAN Japan Centre, WWF).



BIMP-EAGA ACTION PLAN (2006-2010)
(Terjemahan)

PROGRAM/PROYEK/ AKTIVITAS PRIORITAS	TARGET/ OUTPUT	INDIKATOR KEMAJUAN	BADAN/ BADAN PELAKSANA	WAKTU
1. SME DEVELOPMENT				
1.1 Trade and Investment Services				
1.1.1 Promosi dan Fasilitas Perdagangan dan Investasi				
1.1.1.1 Melakukan langkah kerjasama fasilitas dan promosi BIMP EAGA yang lebih efektif untuk langsung menalakkan penanaman modal asing dalam melanjutkan basis, terutama dari partner perdagangan ASEAN seperti Cina, Jepang, Korea, Australia.	Peningkatan nilai FDI EAGA	Peningkatan 10% FDI pada tahun 2010	Badan yang memimpin : Cluster SMED C Pelaksana : Departemen Perwakilan Industri Perdagangan dan Industri dari negara-negara anggota, BEBC Badan yang memonitor : Seknas dan BIMP-FC	Ongoing, 2006-2010
1.1.1.2 Mengatur sektor swasta EAGA dalam tugas penjualan dan pembelian/pertemuan bisnis yang sesuai.	Peningkatan jumlah misi yang terorganisasi	Sedikitnya 2 misi EAGA utama diorganisasikan per tahun.	Badan yang memimpin : BEBC Pelaksana : Semua cluster, Seknas dan BIMP-FC Badan yang memonitor : BEBC dan BIMP-FC	Ongoing, 2006-2010
1.1.1.3 Meningkatkan dan memperkuat jaringan dan hubungan bisnis diantara organisasi bisnis EAGA dan dengan partner bisnis eksternal: • Organisasi kerjasama kegiatan bisnis EAGA/konferensi; • Pertukaran Informasi bisnis yang lebih efektif.	Peningkatan jumlah perjanjian utama di antara organisasi bisnis EAGA.	Sedikitnya satu perjanjian bisnis EAGA utama terimplementasi per tahun.	Badan yang memimpin : BEBC Pelaksana : Cluster SMED, JTD dan NRD, Departemen Perwakilan Perdagangan dan Industri dari negara anggota, NTOs, BETC dan rekan organisasi Badan yang memonitor : BEBC, BIMP-FC dan Seknas	Ongoing, 2006-2010
1.1.1.4 Meningkatkan persaingan SME EAGA di dalam penyediaan/suplai dan mendorong kelompok industri dan sistem rantai nilai dari proyek bisnis utama pengembangan EAGA dengan memperluas spesialisasi pengembangan proyek dan proses pemasaran dalam mengidentifikasi sektor utama seperti: • Branding produk EAGA; • Pengakuan uji laboratorium.	Peningkatan jumlah dan nilai proyek bisnis gabungan usaha EAGA	Sedikitnya 2 proyek bisnis baru yang besar dilaksanakan per tahun	Badan yang memimpin : Cluster SMED, JTD dan NRD Pelaksana : BEBC, semua cluster, rekan organisasi Badan yang memonitor : Seknas dan BIMP-FC	Ongoing, 2006-2010
1.1.2 Peningkatan CIQS RRPB				
1.1.2.1 Memperkuat inisiatif CIQS untuk	Peningkatan jumlah	Penyederhanaan dan/atau	Badan yang memimpin : Cluster SMED	Ongoing, 2006-2010

Formatted: Left: 2,54 cm

Formatted Table

Formatted: Superscript

Formatted: Font: Not Italic, Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Font: Not Italic, Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Finnish (Finland)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,71 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Tab after: 1,27 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: 0,71 cm, List tab + Not at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Italic

Formatted: Font: Not Italic

Formatted: Swedish (Sweden)

PROGRAM/PROYEK/KELOMPOK PRIORITY	TARGET/OUTPUT	INDIKATOR KEMAJUAN	BADAN/BADAN PELAKSANA	WAKTU
<p>mengerakan sumber daya yang dimiliki diantara negara-negara anggota dengan tujuan menyederhanakan isu lintas batas CIQS dan membuat RRP lebih transparan.</p> <p>1.1.2.2 Mengidentifikasi masalah-masalah spesifik dan practices serta mengajukan area yang disederhanakan baik dalam entry point ke-entry point lainnya dan basis multilateral.</p> <p>1.1.2.3 Mengembangkan sebuah sistem pemrosesan dokumen dalam mengidentifikasi entry points yang lebih sederhana, maju ter... oleh waktu.</p> <p>1.1.2.4 Penyederhanaan produk dan standar karantina, termasuk standar kebersihan (sanitary) dan phytosanitary (SPS).</p>	<p>penyederhanaan dan/atau membuat lebih transparan CIQS RRP.</p>	<p>lebih transparannya CIQS RRP bagi semua sektor di semua wilayah di semua wilayah entry points pada 2010.</p>	<p>Pelaksana: Departemen perwakilan CIQS, rekanan organisasi Badan yang memonitor: Seknas dan BIMP-FC</p> <p>Badan yang memimpin: Cluster SMED Pelaksana: perwakilan CIQS Badan yang memonitor: Seknas dan BIMP-FC</p> <p>Badan yang memimpin: Cluster SMED Pelaksana: departemen perwakilan CIQS Badan yang memonitor: Seknas dan BIMP-FC</p> <p>Badan yang memimpin: Cluster SMED Pelaksana: Departemen perwakilan CIQS Badan yang memonitor: Seknas dan BIMP-FC</p>	<p>Ongoing, 2006-2010</p> <p>Ongoing, 2006-2010</p> <p>Ongoing, 2006-2010</p>
1.1.3 Meningkatkan Perdagangan Lintas Batas				
<p>1.1.3.1 Mendirikan one-stop centers di daerah perbatasan untuk proses syarat perizinan dan pendaftaran volume perdagangan dan nilai dengan asal dan tujuan.</p>	<p>Mendirikan pusat penerimaan perbatasan</p>	<p>Pendirian di dalam semua points lalu lintas perbatasan utama pada 2007</p>	<p>Badan yang memimpin: Cluster SMED Pelaksana: Departemen perwakilan CIQS dan perwakilan perdagangan dan industri negara-negara anggota Badan yang memonitor: Seknas dan BIMP-FC</p>	<p>2006-2007</p>
<p>1.1.3.2 Meningkatkan proses manufaktur dalam EAGA untuk mendapatkan keuntungan dari kekuatan persaingan mereka melalui pendirian jaringan zona perdagangan bebas/ zona ekonomi EAGA untuk memfasilitasi aktivitas outsourcing, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan proyek, pengembangan dan implementasi jaringan zona ekonomi EAGA. 	<p>Pendirian Wilayah Ekonomi EAGA</p>	<p>Pendirian dan pengoperasian zona ekonomi di semua negara anggota pada 2006.</p>	<p>Badan yang memimpin: Cluster SMED Pelaksana: Departemen perwakilan CIQS dan perwakilan perdagangan dan industri negara-negara anggota, BEAC Badan yang memonitor: Seknas dan BIMP-FC</p>	<p>2006-2008</p>
1.1.4 Syarat Insentif Investasi				
<p>1.1.4.1 Menyediakan insentif bagi investor dalam</p>	<p>Peningkatan jumlah dan nilai</p>	<p>Incentives Code terpasang di</p>	<p>Badan yang memimpin: Cluster SMED</p>	<p>Ongoing, 2006-2008</p>

Formatted Table
Formatted: Superscript
Formatted: Font: Italic
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: Italic
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Font: Italic, Swedish (Sweden)
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Font: Not Italic
Formatted: Font: Not Italic
Formatted: Font: Not Italic
Formatted: Font: Not Italic
Formatted: Font: Italic
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: Not Italic
Formatted: Font: Not Italic
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Portuguese (Brazil)

PROGRAM/PROYEK/AKTIVITAS/PRORITAS	TARGET/OUTPUT	INDIKATOR KEMAJUAN	BADAN/BADAN PELAKSANA	WAKTU
Industri dan perdagangan EAGA dalam kerangka peraturan-peraturan investasi nasional dan lokal yang berlaku.	Investasi manufaktur dan industri perdagangan di EAGA.	semua zona ekonomi EAGA pada tahun 2008	Pelaksana : Perwakilan Perdagangan dan Industri negara anggota, Pemerintah Provinsi EAGA dan BEBC Badan yang memonitor : Seknas dan BIMP-FC	
1.1.4.2 Menyediakan insentif dan dukungan bagi investor sektor swasta dalam perkembangan sektor pariwisata EAGA.	Peningkatan jumlah dan nilai investasi pada sektor pariwisata EAGA.	Implementasi incentives code pada 2008	Badan yang memimpin : Cluster JTD Pelaksana : Departemen Perwakilan Pariwisata Tourism Agencies of member countries, EAGA State/ Provincial Governments, BEBC and NTOs Badan yang memonitor : Seknas dan BIMP-FC	Ongoing, 2006-2008
1.2 Diainiasi Informasi Bisnis				
1.2.1 Menyusun dan menggabungkan kebijakan perdagangan dan investasi, peraturan, undang-undang dan prosedur (RPPs), (e.g. BIMP EAGA CIQS Primer), kesempatan, dan dan pengalaman/pelatihan yang terbaik di dalam wilayah pusat EAGA dan penyebaran informasi diantara EAGA stakeholders, terutama SMEs, dan external partners sampai bermacam-macam media, termasuk website EAGA dengan hyperlink untuk website Negara anggota dan partner perdagangan (e.g., NT's BIMP-EAGA business portal).	Informasi mengenai RRP perdagangan dan informasi EAGA terkompiasi dan tersedia dalam hard copies dan melalui website	Informasi dipublikasi pada 2007	Badan yang memimpin : Cluster SMED Pelaksana : Departemen Perwakilan Perdagangan dan Industri negara anggota, BEBC, rekan organisasi Badan yang memonitor : Seknas dan BIMP-FC	2006 - 2007, continuing
1.2.2 Pengembangan dan pemeliharaan sebuah web-dengan dasar perdagangan database investasi bagi EAGA dan mempermudah akses bagi EAGA stakeholders dan rekan eksternal.	Database perdagangan dan investasi EAGA berkembang and mudah diakses	Database berkembang pada 2006	Badan yang memimpin : BEBC dan BIMP-FC Pelaksana : Departemen Perwakilan EAGA dan CIQS, organisasi focal BEBC dan Cluster, rekan organisasi Badan yang memonitor : BIMP-FC dan Seknas	2006, continuing
1.2.3 Menyajikan dan menyebarkan profil industri, profil proyek, laporan singkat proyek dan rencana bisnis dari wilayah prioritas investasi dan proyek dalam EAGA.	Informasi mengenai proyek perdagangan dan investasi disediakan dalam bentuk hard copies dan dalam bentuk website	Mempermudah mengakses Rencana Profil/ Bisnis Profiles/Business Plans pada 2006	Badan yang memimpin : BEBC Pelaksana : organisasi focal BEBC dan Cluster, rekan organisasi Badan yang memonitor : BIMP-FC dan	2006 onwards

Formatted Table

Formatted: Superscript

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Font: Italic

PROGRAM/PROYEK/ AKTIVITAS PRIORITAS	TARGET OUTPUT	INDIKATOR KEMAJUAN	BADAN/BADAN PELAKSANA	WAKTU
1.2.4 Menyiapkan dan menyebarkan petunjuk bisnis EAGA yang akan menyediakan informasi seperti yang menyangkut: <ul style="list-style-type: none"> • Profil manufaktur, pedagang, penyedia jasa; • Penawar produk jasa; • Kapasitas produksi dan perdagangan; • Pusat informasi. 	Penerbitan dan penyebaran profil bisnis EAGA	Penerbitan profil pada tahun 2006	Seknas Badan yang memimpin : BEBC Pelaksana : organisasi focal BEBC dan Cluster Badan Pengawas : BIMP-FC, NS, dan Clusters	2006 onwards
1.2.5 Mendirikan sebuah system yang efektif untuk memonitor BIMP EAGA perdagangan di wilayah perbatasan dan investasi melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Syarat di-update-nya informasi untuk BIMP-FC dalam statistik perdagangan yang terakhir (barang dan jasa); • Persiapan laporan pengawasan dalam perdagangan cross-border dan proyek investasi. 	Menyiapakan laporan rutin pengawasan	Persiapan laporan per kuartal dimulai tahun 2007	Badan yang memimpin : BIMP-FC Pelaksana : BEBC, Departemen Perwakilan Perdagangan dan Industri dan Departemen bea dan cukai Negara anggota Badan Pengawas: BIMP-FC dan Seknas	2006-2007, Continuing
1.3 Fasilitas Proyek SME				
1.3.1 Mempertahankan kebijakan yang menguntungkan pengembangan SME di kawasan sub regional, dengan dipandu oleh strategi pengembangan SME secara keseluruhan untuk EAGA: <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dengan sektor swasta dalam isu-isu kebijakan strategis; • Mengadakan presentasi kepada SOM/MM; • Berhubungan dengan Cluster lainnya, BEBC, BIMP-FC. 	Memperbaiki kebijakan yang lebih baik untuk perkembangan SME	Memperbaiki rumusan kebijakan baru dan pelaksanaannya pada tahun 2006	Badan yang memimpin : Cluster SMED Pelaksana : Clusters dan BEBC Badan Pengawas : BIMP-FC dan Seknas	2006-2008, Continuing
1.3.2 Meningkatkan akses SME untuk pengembangan bisnis jasa BDS dalam subregion termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Kesempalan pemasaran; • Teknologi; • Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan; 	Meningkatkan jumlah proyek EAGA diakses BDS	Sedikitnya satu proyek bisnis EAGA yang baru yang menyediakan akses ke BDS per tahun	Badan yang memimpin : Cluster SMED Pelaksana : Perwakilan Perdagangan dan Industri Negara anggota dan BEBC Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	2006-2010, Continuing

Formatted Table

Formatted: Superscript

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Finnish (Finland)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,71 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Tab after: 1,27 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: 0,71 cm, List tab + Not at 1,27 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,71 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Tab after: 1,27 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: 0,71 cm, List tab + Not at 1,27 cm

Formatted: Swedish (Sweden)

PROGRAM/PROYEK/ AKTIVITAS PRIORITY	TARGET OUTPUT	INDIKATOR KEMAJUAN	BADAN/BENTUK PELAKSANAAN	TAHAP/TAHUN
<ul style="list-style-type: none"> Kesempatan dalam hal keuangan: <ul style="list-style-type: none"> > Hubungan dengan IDB dan ADB; > Membentuk sebuah Task Force untuk membangun pendanaan SME; > Daftar Insitusi pemberi pinjaman dan menyebarkan nya ke para Stakeholder EAGA. 				
1.3.3 Meningkatkan kapasitas penyedia EAGA BDS untuk menyediakan layanan yang lebih efektif untuk bisnis dalam subregion dan memperkuat jaringan diantara mereka dan eksternal partners.	Meningkatkan jumlah penyedia EAGA BDS yang memenuhi kualifikasi	Sedikitnya satu penyedia BDS yang memperkuat setiap Negara anggota pada tahun 2007	Badan yang memimpin : Cluster SMED Pelaksana : Perwakilan Perdagangan dan Industri Negara anggota, BEBC, Clusters Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	2006-2007, Continuing
1.3.4 Pengembangan rencana keuangan untuk proyek EAGA SME projects, seperti: <ul style="list-style-type: none"> Pendanaan yang sewajarnya (BIMP-EAGA Ventura Capital Fund); Islamic banking; Common Letter of Credit (LC). 	Mengoperasionalkan pembiayaan EAGA ; Mengakses proyek utama yang dibiayai oleh bank Islamic	Pembiayaan EAGA (e.g., Islamic, Ventura Fund) beroperasi pada tahun 2010	Badan yang memimpin : Cluster SMED Pelaksana : Perwakilan Departemen Keuangan, Perwakilan Perdagangan dan Industri Negara anggota, BEBC Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	2006-2010
1.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia				
1.4.1 Mendirikan dan menguatkan pengakuan program EAGA untuk mendukung organisasi bisnis (e.g., construction contractors, food manufacturers, shippers, etc.).	Meningkatkan jumlah program EAGA yang diakui oleh BSOs	Pengakuan program BIMP EAGA pada tahun 2010	Badan yang memimpin : Cluster SMED Pelaksana : BEBC, Clusters, Perwakilan Departemen HRD Negara anggota Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	2006-2010
1.4.2 Memudahkan pertukaran program EAGA untuk meningkatkan BSOs dan Staf (e.g., sekretariat Cluster, BEBC, agen-agen SMED).	Meningkatkan jumlah partisipan EAGA dalam pertukaran program	Pembentukan pertukaran program BIMP-EAGA pada tahun 2007	Badan yang memimpin : Cluster SMED Pelaksana : Semua Clusters, Perwakilan Departemen HRD Negara anggota, BEBC Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	2006-2007
1.4.3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keahlian dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan berdasarkan atas standar kompetensi EAGA, e.g. pariwisata dan keahlian	Meningkatkan partisipan yang diakui dalam program training di bidang pariwisata	Pembentukan standar kompetensi BIMP-EAGA pada tahun 2009	Badan yang memimpin : Cluster JTD/Cluster SMED Pelaksana : Cluster JTD, BEBC, BETC, NTOs Badan Pengawas : Sekretariat Nasional	2006-2009

Formatted Table

Formatted: Superscript

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,71 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Tab after: 1,27 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: 0,71 cm, List tab + Not at 1,27 cm

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

PROGRAM/PROYEK/AKTIVITAS PRIORITY	TARGET OUTPUT	INDICATOR KESUJUAN	SADAI/PADAN BERSAMA	WAKTU
lainnya.			dan SIMP-FC	
2. SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT				
2.1. Pengembangan kerangka untuk kerjasama Inter-EAGA dalam menggabungkan perlindungan dan manajemen sumber daya alam dan biodiversity dalam subregion.	Pembentukan kerangka kerjasama	Pembentukan kerangka kerjasama pada akhir 2006	Badan yang memimpin : Cluster NRD dan Cluster JTD Pelaksana : Perwakilan Departemen Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Sumber Daya dan Lingkungan Hidup negara anggota, NTOs, BEBC, BETC, rekanan organisasi Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	2006-2007
2.2 Mengidentifikasi dan mengembangkan sektor kehutanan, perikanan dan proyek investasi energi bersama yang memungkinkan dan berkesinambungan.	Pelaksanaan proyek kerjasama	Proyek kerjasama diresmikan pada tahun 2006	Badan yang memimpin : Cluster NRD dan Cluster SMED Pelaksana : Perwakilan Departemen Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Sumber Daya dan Lingkungan Hidup negara anggota, BEBC, rekanan organisasi Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	2006-2010
2.3 Mendorong dan mendukung swasta sector yang baik untuk berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya alam yang sesuai dengan program perlindungan lingkungan.	Meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam proyek	Pengidentifikasi proyek bersama di tahun 2006 dan pelaksanaannya pada tahun 2007	Badan yang memimpin : Cluster NRD dan Cluster JTD Pelaksana : Perwakilan Departemen Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Sumber Daya dan Lingkungan Hidup negara anggota, NTOs, BEBC, BETC Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	2006-2010
3. TOURISM DEVELOPMENT				
3.1 Joint Tourism Promotion and Marketing				
3.1.1 Merumuskan dan melaksanakan promosi pariwisata dan program pemasaran dibawah konsep/prinsip atau tujuan.	Meningkatkan intra- dan extra-perdagangan di bidang pariwisata dan uang masuk dari bidang pariwisata	Peningkatan volume perdagangan di bidang pariwisata 4% per tahun; Peningkatan uang masuk di bidang pariwisata EAGA 4%	Lead Body : Cluster JTD Pelaksana : BETC, BEBC, Organisasi Pariwisata Nasional, Tourism Boards and Associations, Rekanan Organisasi Badan Pengawas : Sekretariat Nasional	Ongoing, 2006-2010

Formatted Table

Formatted: Superscript

Formatted: Finnish (Finland)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Finnish (Finland)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Finnish (Finland)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Bullets and Numbering

PROGRAM/PROYEK/AKTIVITAS PRIORITAS	TARGET/OUTPUT	INDIKATOR KEMAJUAN	BADAN PELAKSANA/PEMERINTAH	Tahun
		per tahunnya	dan BIMP-FC	
3.1.2 Mendorong pengembangan investasi di sector public dan private dan meningkatkan serta memberikan kemudahan bagi sector pariwisata yang ada dan daerah pariwisata yang baru untuk menarik para pengunjung datang ke kawasan EAGA.	Meningkatkan Investasi di bidang pariwisata	Dikembangkannya tujuan dan fasilitas pariwisata yang sudah ada dan yang baru.	Badan yang memimpin :Cluster JTD Pelaksana : BETC, BEBC, Organisasi Pariwisata Nasional, Tourism Boards and Asosiasi-asosiasinya Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	Ongoing, 2006-2010
3.1.3 Meningkatkan citra dan kesan EAGA diantara pengunjung dalam penyebaran informasi yang efektif, promosi, dan peningkatan mutu pelayanan pariwisata.	Meningkatkan persepsi yang lebih menyenangkan diantara pengunjung	Meningkatkan informasi yang baik tentang EAGA; Meningkatkan jumlah pengunjung yang datang	Badan yang memimpin :Cluster JTD Implementers: BEMCA, BETC, BEBC, Organisasi Pariwisata Nasional, Tourism Boards and Associations Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	Ongoing, 2006-2010
3.2 Support for the Increase and Sustainability of EAGA Air, Sea and Land Linkages				
3.2.1 Meningkatkan inisiatif untuk mengurangi biaya perjalanan dalam EAGA melalui: • Menggunakan jasa transportasi yang paling murah; • Penurunan biaya perjalanan dan biaya lainnya; • Peningkatan kemudahan transportasi.	Mengurangi biaya perjalanan EAGA	Dicapainya biaya perjalanan dan tarif masuk yang rendah.	Badan yang memimpin :Cluster JTD Implementers : Cluster TIID, BETC, BEBC, Organisasi Pariwisata Nasional, Tourism Boards and Associations, Transport dan Perwakilan CIQS Negara anggota Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	January-December 2006, Ongoing until 2010
3.2.2 Mendorong program promosi pariwisata yang agresif dan fokus yang akan membantu kelanjutan pelayanan hubungan udara, laut dan darat.	Melanjutkan operasional di bidang jasa udara, laut dan darat	Mengoperasionalkan hubungan udara, laut dan darat yang sudah ada dan yang baru setelah dibangun.	Badan yang memimpin :Cluster JTD Implementers: TIID Cluster, BETC, BEBC, National Tourism Organizations, Tourism Boards and Associations Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	Ongoing, 2006-2010
4. TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND ICT DEVELOPMENT				
4.1 Improvement of EAGA Air, Sea and Land Connectivity				
4.1.1 Menyalakan studi yang dapat meningkatkan pelayanan transport intermodal di EAGA, mengidentifikasi efektifitas biaya dan alternatif praktiknya untuk mengembangkan	Study completed	Studi diselesaikan pada 2006	Badan yang memimpin :Cluster JTD Implementers: Transport Agencies of member countries, Partner Organizations Badan Pengawas : Sekretariat Nasional	January-June 2006

PROGRAM/PROJEK/KELOMPOK PRIORITY	KATEGORI	INDIKATOR	SASARAN	TANGGUNG JAWAB
<p>pelayanan udara, laut dan darat di wilayah sub regional yang akan mendukung program pengembangan dengan kemungkinan bantuan dari partner pengembangan EAGA (seperti, ADB, GTZ).</p> <p>4.1.2 Mempercepat pembangunan yang pelayanan logistik transportasi multimodal yang diintegrasikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur dan konektivitas transportasi udara, laut dan darat • Meningkatkan pelayanan transportasi udara, laut dan darat, termasuk ketersediaan RPP-nya. <p>4.1.3 Menyediakan insentif dan dukungan untuk meningkatkan private sector termasuk dan/atau partner public-private dalam pengembangan sarana transportasi dan penyediaan jasa rute transportasi yang suksesnya diberikan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program <i>phoenix</i> yang bebas untuk pelayanan udara; • Mengurangi biaya masuk (seperti, landing/takeoff fees, fuel, dockage fees); • <i>Air Alliances</i> untuk mengoperasikan rute rute spesifik dalam 5 tahun (<i>Diyanda untuk diskusi para Member</i>) • Encouraging the Build-Operate-Transfer and Build-Operate-Own type of schemes; • Increased marketing support for the EAGA routes. 	<p>Memperbaiki pelayanan dan sarana transportasi</p>	<p>Meningkatkan fasilitas seluasnya untuk 2 jalur masuk utama EAGA. Disimplifikasikan RPP darat/air laut dibuat lebih transparan untuk seluasnya 2 jalur masuk</p>	<p>Badan yang memimpin : Cluster TID Pelaksana : Perwakilan Departemen Perhubungan Negara anggota, BEBC Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMF-FC</p>	<p>2006-2010</p>
<p>4.1.4 Mempromosikan kemungkinan dibagunnya konsorsium untuk melayani rute EAGA seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsorsium pengapalan (misalnya dengan pengurangan tarif untuk perboda tertentu) • Konsorsium Transportasi darat (misalnya rute Pontianak-Kuching-Miri-Bandar Seri 	<p>Dioperasionalkannya konsorsium transportasi EAGA</p>	<p>Konsorsium transportasi EAGA dioperasionalkan pada tahun 2008</p>	<p>Badan yang memimpin : Cluster TID Pelaksana : Perwakilan Departemen Perhubungan Negara anggota, BEBC Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMF-FC</p>	<p>2006-2008</p>

Formatted Table
Formatted: Superscript
Formatted: Finnish (Finland)
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Finnish (Finland)
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Indents: Left: 0,08 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: -0,13 cm + Tab after: 0,51 cm + Indent at: 0,51 cm, Tab stops: Not at 0,51 cm
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Font: Italic
Formatted: Swedish (Sweden)

PROGRAM/PROYEK/AKTIVITAS/PRIORITAS	TARGET/OUTPUT	INDIKATOR KEMAJILAN	BADAN/BADAN PELAKSANA	TIMELINE
Begawan-Sabah) • Membangun BIMP EAGA Air Alliance.				
4.1.5 Mendukung inisiatif untuk mendukung melalui kesepakatan bilateral, pengaturan dibebaskannya transportasi di BIMPEAGA dengan kerangka kesepakatan ASEAN seperti: <ul style="list-style-type: none"> • 3rd/4th freedom traffic rights sepenuhnya antara BIMP-EAGA dan IMT-GT; • 5th freedom traffic rights sepenuhnya dalam BIMP-EAGA tanpa pembatasan kapasitas, frekuensi dan tipe pesawat untuk pelayanan penumpang dan kargo; • Implementasi kesepakatan penyamaan tarif pelabuhan. 	Operationalization of liberalized transport arrangements in EAGA	<ul style="list-style-type: none"> • Operasional 3rd/4th freedom traffic rights antara BIMP EAGA dan IMT-GT pada akhir 2008; • Operasional 5th freedom traffic rights dalam 2 jalur masuk yang dipilih; • Operasional 5th freedom traffic rights di seluruh jalur masuk EAGA pada tahun 2008 	Badan yang memimpin : Cluster TIID Pelaksana : Perwakilan Departemen Perhubungan Negara anggota, BEBC, JTD Cluster Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	2006-2008
4.1.6 Pembangunan sebuah depot pemeriksaan di darat untuk perdagangan dan trans pengapalan di perbatasan EAGA.	Dioperasionalkannya depot pemeriksaan	Depot transportasi dioperasionalkan pada tahun 2007	Badan yang memimpin : Cluster TIID Pelaksana : Perwakilan Departemen Perhubungan Negara anggota, BEBC Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	2006-2007
4.2 Basic Infrastructure Development				
4.2.1 Meningkatkan dan memudahkan sector public dan private dalam menyediakan biaya yang lebih efektif berdasarkan sarana melalui kerjasama dalam mobilisasi sumber daya (e.g., material inputs, sumber daya manusia, teknologi).	Pembentukan mekanisme usaha bersama dalam pengalokasian biaya untuk pengorangan sumber-sumber.	Pelaksanaan proyek dibawah skema BOT/BOO	Badan yang memimpin : Cluster TIID Pelaksana : Perwakilan Departemen Pengembangan Infrastruktur/Sarana, BEBC Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	2006-2010
4.3 ICT Development				
4.3.1 Meningkatkan sarana telekomunikasi, termasuk suara, data, internet dan sistem Voice over Internet Protocol (VoIP), dalam EAGA terutama pada daerah terpencil dan perbatasan.	Peningkatan pemberitaan dalam bentuk suara, data dan internet.	Peningkatan di bidang telekomunikasi 5 % per tahun	Badan yang memimpin : Cluster TIID Pelaksana: Perwakilan Departemen Telekomunikasi, perusahaan perseroan di bidang telekomunikasi, BEBC Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	2006-2010
5. INSTITUTIONAL STRENGTHENING				
5.1 Strengthening of Intra-EAGA Institutional Coordination				

Formatted Table

Formatted: Superscript

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Finnish (Finland)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted Table

PROGRAM/PROYEK/AKTIVITAS/PRIORITAS	TARGET/OUTPUT	INDIKATOR KEMAJUAN	BADAN/BADAN PELAKSANA	WAKTU
5.1.1 Memperkuat arah BIMP-FC menjadi sekretariat pusat BIMP EAGA untuk mengkoordinasikan: <ul style="list-style-type: none"> Implementasi dari Roadmap dan Action Plan EAGA; Implementasi dari garis pedoman EAGA dalam koordinasi, mekanisme, prosedur, dan protokol; Pangawasan evaluasi proyek prioritas; Koordinasi aktifitas subregional. 	Memperbaiki kapasitas BIMP-FC sebagai sekretariat pusat	Laporan rutin yang disampaikan oleh BIMP-FC kepada SOM	Lead Body : SOM Standing Chair Pelaksana : SOM, BIMP-FC, NS, Rekanan Organisasi Badan Pengawas : Sekretariat Nasional dan BIMP-FC	Ongoing, 2006-2010
5.1.2 Mendorong kemampuan EAGA dalam menunjukkan peran mereka masing-masing, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> BECB dan focal organizations; Working Group Clusters. National Secretariats 	Memperbaiki kapasitas institusi-institusi EAGA	Laporan rutin yang disampaikan pada institusi EAGA	Badan yang memimpin : SOM Pelaksana : Focal organisasi BECB, Clusters, BIMP-FC, NS, Rekanan organisasi Badan Pengawas: BIMP-FC, NS, BECB	Ongoing, 2006-2010
5.1.3 Mengatur sidang dan kegiatan yang akan mendorong hubungan keanggotaan, persahabatan dan kerjasama diantara badan EAGA.	Forum/Pelaksanaan training	Sedikitnya 1 forum/pelaksanaan training setiap tahunnya	Badan yang memimpin : BIMP-FC Pelaksana : BIMP-FC, NS, BECB, Clusters, Rekanan organisasi Badan Pengawas: BIMP-FC and NS	Ongoing, 2006-2010
5.1.4 Pengerahan sumber daya dari Negara-negara anggota dan development partners sebagai wujud perkembangan kegiatan EAGA.	Peningkatan target pembiayaan untuk kegiatan EAGA	Pengerahan pembiayaan untuk sedikitnya 3 kegiatan EAGA per tahun	Badan yang memimpin: SOM/NS Pelaksana : BIMP-FC, BECB, NS, Clusters Badan Pengawas: BIMP-FC, Seknas dan BECB	Ongoing, 2006-2010
5.2 Strengthening of Extra-EAGA Linkages				
5.2.1 Mengidentifikasi dan melaksanakan mekanisme untuk mendorong hubungan dan kerjasama EAGA dengan ASEAN dan lembaga-lembaga ekatamail lainnya.	Koordinasi yang lebih dekat lagi dengan ASEAN dan badan/lembaga lainnya	Partisipasi rutin EAGA dalam kegiatan rutin ASEAN; Partisipasi rutin external partners dalam kegiatan EAGA	Badan yang memimpin : BIMP-FC Pelaksana : BIMP-FC, NS, Rekanan Organisasi Badan Pengawas : BIMP-FC	Ongoing, 2006-2010
5.2.2 Meningkatkan dan mendukung teknis dan sumber keuangan partner development EAGA untuk melaksanakan proyek.	Increased technical and financial support to EAGA	Technical and financial resources granted to at least 3 EAGA projects per year	Badan yang memimpin : All Clusters Pelaksana : BIMP-FC, BECB, NS, Clusters, Rekanan Organisasi Badan Pengawas : BIMP-FC dan Seknas	Ongoing, 2006-2010
6. IMPLEMENTATION OF FLAGSHIP PROGRAMS AND PROJECTS				
6.1 SME Development Cluster (Development of Priority Industry Clusters)				

Formatted Table
Formatted: Superscript
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Finnish (Finland)
Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0 cm + Tab after: 0,53 cm + Indent at: 0,63 cm, Tab stops: 0,71 cm, Left + Not at 0,63 cm + 0,76 cm
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Finnish (Finland)
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Swedish (Sweden)

PROGRAM/ PROYEK/ AKTIVITAS PRIORITAS	TARGET OUTPUT	INDIKATOR KEMAJUAN	BADAN-BADAN PELAKSANA	TIMELINE
<p>6.1.1 Memfasilitasi pelaksanaan identifikasi proyek bisnis utama kerjasama EAGA dengan pengaruh yang besar terhadap pengembangan SME, pada penyediaan akses untuk permintaan BDS untuk proyek ini termasuk informasi, pengembangan pemasaran, teknologi, keuangan, pelatihan dan value chain management. Identifikasi proyek termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halal Poultry Project;* • Oil Palm Project;* • Seaweeds Project;* • Pelayanan pengembangan bisnis untuk SME EAGA ; • Roasted Edible Coconut Oil Project (Virgin Coconut Oil);* • Herbal Project (Ginger Project).* <p>* Untuk dikordinasikan dengan Cluster Natural Resources Development.</p>	Ditingkatkannya jumlah dan nilai proyek bisnis SME diimplementasikan dan dilanjutkan.	Proyek bisnis bersama yang sudah diinisiasikan dilaksanakan pada tahun 2006	Badan yang memimpin: SMED Cluster and NRD Cluster Pelaksana : BEBC and other private sectors, All Clusters Badan Pengawas :INS and BIMP-FC	2006-2010
<p>6.1.2 Mengatur forum dan event bisnis yang luas yang dapat membawa SMEs dan perusahaan-perusahaan besar untuk dapat menjalin usaha kerjasama dan hubungan bisnis di sector utama, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forum Investasi Agro-Industry; • Konferensi EAGA Oil Palm; • Konferensi EAGA Seaweeds Industry; • Konferensi of EAGA BDS Providers; • Konferensi EAGA CIQS. 	Diorganisasikannya event business EAGA	Diorganisasikannya event business EAGA pada tahun 2006	Badan yang memimpin : SMED Cluster Pelaksana : NRD Cluster, BEBC, CIQS Agencies, Partner Organizations Badan Pengawas :NS, BIMP-FC	2006-2010
6.1.3 Establishment of EAGA-wide business support organizations that will facilitate the implementation of priority projects, such as industry councils	Membentuk EAGA BSOs	BSOs established on need basis, starting in 2006	Badan yang memimpin : SMED Cluster and NRD Cluster Pelaksana : BEBC, Trade, Industry, Agriculture, Forestry, Fishery and Natural Resources Agencies of member countries Badan Pengawas : Seknas dan BIMP-FC	2006-2010

Formatted Table

Formatted: Superscript

Formatted: Finnish (Finland)

Formatted: Finnish (Finland)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Tab stops: 1,9 cm, List tab

Formatted: Swedish (Sweden)

PROGRAM/PROYEK/AKTIVITAS PRIORITAS	TARGET/OUTPUT	INDIKTOR KEMULAIAN	BADAN/BALAI PELAKSANA	WAKTU
6.1.4 Mengidentifikasi dan memutuskan CIQS-related issues and bottlenecks in the implementation of flagship projects.	CIQS issues resolved	CIQS issues resolved starting in 2006	Badan yang memimpin : SMED Cluster Pelaksana : NRD and TID Clusters, CIQS Agencies of member countries, BEBC Badan Pengawas : Seknas BIMP-FC	2006-2010
6.2 Natural Resources Development (NRD) Cluster				
6.2.1 Formulate and implement an EAGA Natural Resources Management Program that will guide joint cooperation activities in protecting and managing resources especially in border areas, and implementing natural resources development projects that foster complementary use of these resources within the subregion. This will include support for the following programs: • Heart of Borneo Project (WWF); • Sulu-Sulawesi Marine Eco-Region Project (WWF).	EAGA natural resources management program formulated and implemented	EAGA natural resources management program implemented by mid-2007	Lead: NRD Cluster Implementers: Agriculture, Fishery, Forestry, Natural Resources Development, and Tourism Agencies of member countries, BEBC, WWF and other Partner Organizations Monitoring Bodies: NS and BIMP-FC	June 2007 onwards
6.2.2 Develop projects on plantation wood species for sustainable supply of materials for the wood-based manufacturing sector.	Plantation wood projects identified and implemented	Projects identified by and 2006 and implemented starting in 2007	Lead Body : NRD Cluster Implementers : Agriculture, Forestry, Natural Resources Agencies of member countries, BEBC Monitoring Bodies : NS and BIMP-FC	2006-2010
6.2.3 Jointly develop mineral resources in border areas.	Joint mineral resource development projects implemented	At least one stage of mineral development project initiated by mid-2006	Lead Body : NRD Cluster Implementers : Agriculture, Mining, Natural Resources Agencies of member countries, BEBC Monitoring Bodies : NS and BIMP-FC	2006-2010
6.2.4 Implement energy development projects in the border areas, including: • Hydro-electricity supply from Sarawak to West Kalimantan as part of the Trans Borneo Interconnection Plan (ASEAN Power Grid Interconnection) • Implement cheaper energy uses (Coal bricked)	Cheaper energy development projects implemented	10% of fossil fuel replaced by coal bricked by end-2007	Lead Body : NRD Cluster Implementers : Natural Resources and Energy Agencies of member countries Monitoring Bodies : NS and BIMP-FC	2010

Formatted Table

Formatted: Superscript

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Portuguese (Brazil)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bullets and Numbering

PROGRAM/PROYEK/AKTIVITAS PRIORITAS	TARGET/OUTPUT	INDIKATOR KEMAJUAN	BADAN PELAKSANA/PEMANGKAT	TWENTY
<p>6.2.5 Mendukung dan memudahkan dalam koordinasi dengan cluster lainnya, pelaksanaan proyek investasi dalam agro-industri, perikanan, kehutanan dan lingkungan, sumber daya energi dan mineral kerjasama</p> <p>Support and facilitate, in coordination with the other Clusters, the implementation of Joint EAGA Investment projects in agro-industry, fisheries, forestry and environment, energy and mineral resources development particularly in the production-related aspects. These include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halal Poultry Project; • Virgin Coconut Oil; • Herbal Project (Ginger Project); • Seaweed Project; • Palm Oil Frontier Planting Project. 	Joint Investment projects implemented	Joint investment projects Initiated by 2006	Lead Bodies : NRD Cluster and SMED Cluster Implementers : Agriculture, Fishery and Natural Resources Agencies of member countries, BEBC Monitoring Bodies : NS and BIMP-FC	2006-2010
<p>6.2.6 Mendukung dan memfasilitasi proyek kerjasama teknik yang akan mempromosikan teknologi dan praktik manajemen sumberdaya yang berkelanjutan di EAGA, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HRD Development for Sustainable Development of Fisheries in BIMP-EAGA Region (SEAFDEC); • Capacity Building for Creating an Eco-Circulation Society through Biomass Utilization In the BIMP-EAGA Region (APO/ASEAN Foundation). 	Proyek kerjasama teknik terimplementasi; Peningkatan kapasitas organisasi EAGA dalam manajemen sumber-sumber berkelanjutan	SEAFDEC Project sedang berjalan, untuk diselesaikan pada February 2007; APO/ASEAN Foundation Project untuk diimplementasikan pada Januari 2006.	Badan yang memimpin : Cluster NRD Pelaksana : Agriculture and Natural Resources and Energy Agencies of member countries, Private sector fishing and agricultural organizations, BEBC, SEAFDEC, APO/ASEAN and other Partner Organizations Badan Monitor: Seknas dan BIMP-FC	2006-2007 Continuing for other projects that may be identified, 2007-2010
6.3 Joint Tourism Development (JTD) Cluster				
<p>6.3.1 Mengimplementasikan promosi pariwisata EAGA yang terintegrasi dan program pemasaran yang difokuskan pada pariwisata Culture, Adventure and Nature (CAN) + alam dan golf serta mempromosikan kampanye logo 'Visit EAGA—Your Dream Destination'. Ini akan termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Berpartisipasi sebagai EAGA dalam event- 	Peningkatan lalu lintas turis/ pengunjung dan penerimaan pariwisata untuk intra- dan extra-EAGA	Peningkatan volume lalu lintas turis/ pengunjung sebesar 4% di EAGA per tahun; dan, Peningkatan penerimaan pariwisata sebesar 4% per tahun; Paket tur terimplementasi; Dilaksanakannya Tourism	Badan yang memimpin : Cluster JTD Pelaksana : BETC, BEBC, Organisasi Pariwisata Nasional, Badan dan Asosiasi Pariwisata Badan Monitor: Seknas dan BIMP-FC	Ongoing, 2006-2010 Circuit tours operational starting 2007; Appraisal Mission conducted in November 2005

Formatted Table

Formatted: Superscript

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Font: Bold

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Bullets and Numbering

PROGRAM/PROYEK/ AKTIVITAS PRIORITAS	TARGET/OUTPUT	INDIKATOR KEMAJUAN	BADAN/BADAN PELAKSANA	WAKTU
<p>event/<i>Fair</i> pariwisata internasional seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> > ASEAN events (e.g., ASEAN Tourism Forum and Conference); > World Tourism Organization events; > PATA events; > China-ASEAN Expo; > Japan Investment and Tourism Seminar. <p>• Secara bersama-sama mengatur dan mempromosikan event dengan nama EAGA ("<i>signature events</i>") seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> > EAGA Friendship Games; > EAGA Trexev and Travel Mart; > Borneo Cup (Sailing Competition); > Traditional Regatta. <p>• Menyusun paket dan promosi pariwisata sirkuit seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Diving tours; > Golf tours; > World Heritage Site tours; > Adventure tours (e.g., mountain climbing, trekking, spelunking); > Cultural tours; > Tur "Twin City" (Kota kembar) antar tujuan di EAGA. <p>• Mengorganisir tur familirisasi EAGA atau pertukaran dari pasar-pasar utama seperti China, Japan, Korea, Australia, dan Europe.</p> <p>• Mengadakan misi pambandung untuk pengembangan pariwisata di BMP-EAGA (dengan kerjasama GTZ).</p>		Appraisal Mission		
B.3.2 Mengembangkan produk dan layanan pariwisata yang ada dan baru untuk mendukung satu tujuan EAGA <i>CAN+</i> <i>diver</i> dan program promosi <i>golf tourism</i> yang terintegrasi. Hal ini	Studi kelayakan telah dipereleapkan; Produk dan layanan pariwisata teridentifikasi;	Studi kelayakan telah selesai dilaksanakan pada pertengahan-2006; Produk dan layanan pariwisata	Badan yang memimpin : Cluster JTD Pelaksana : BETC, BEBC, Organisasi Pariwisata Nasional, Badan dan Asosiasi Pariwisata	2006 onwards

Formatted Table

Formatted: Superscript

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: English (United States)

Formatted: Bulleted + Level: 1 +
Aligned at: 0 cm + Tab after: 0,63 cm
+ Indent at: 0,63 cm, Tab stops: 1,03
cm, Left + 1,08 cm, Left + 1,4 cm,
Left + Not at 0,76 cm

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Finnish (Finland)

Formatted: Finnish (Finland)

Formatted: Justified

Formatted: Swedish (Sweden)

PROGRAM/PROYEK/AKTIVITAS PRIORITAS	TARGET/OUTPUT	INDIKATOR KEMULAIAN	BAHAN/BALOK PERALAPAN	WAKTU
<p>termasuk beberapa hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan studi feasibility dalam mengidentifikasi kesempatan/ oportunitas yang spesifik bagi perkembangan dan pemasaran produk dan layanan pariwisata di EAGA; Memajukan kebijakan lingkungan dan intervensi untuk mendukung program sektor pariwisata EAGA. 	Intervensi kebijakan diambil alih untuk mengembangkan dan meningkatkan produk dan layanan pariwisata ini.	berkembang mulai pertengahan 2006.	Badan Monitor: Seknas dan BIMP-FC	
<p>6.3.3 Menciptakan gambaran dan persepsi EAGA yang lebih disukai bagi pengunjung melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Liputan media yang seimbang dari events, program, dan success stories dari EAGA; Meningkatkan diseminasi informasi mengenai EAGA; Pengukuran keamanan yang efektif dalam EAGA; dan Organisasi dari tur familiarization bagi kelompok media EAGA. 	Peningkatan jumlah artikel media yang sifatnya positif/bagus mengenai EAGA; Pelaksanaan actual dari aktivitas ini.	Mempublikasikan item/ fitur berita EAGA yang reguler; Pelaksanaan aktivitas	Badan yang memimpin : Cluster JTD Pelaksana : BEMCA, BETC, BEBC, Organisasi Pariwisata Nasional, Badan dan Asosiasi Pariwisata Badan Monitor: Seknas dan BIMP-FC	Ongoing, 2006-2010
<p>6.3.4 Penguatan linkages dan jaringan organisasi pariwisata EAGA di antara mereka sendiri dan dengan counterparts (rekanan) di ASEAN, Asia dan target pasar pariwisata melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertukaran direktori negara dari organisasi pariwisata; Persiapan dan pertukaran secara reguler dari kalender kegiatan pariwisata di antara anggota EAGA sebagai arahan bagi penggabungan promosi dan partisipasi; dan Tersedianya meja Informasi BIMP-EAGA pada tujuan/destinasi utama wilayah BIMP-EAGA. 	<p>Koordinasi secara reguler dari jaringan pariwisata EAGA di dalam dan diluar EAGA;</p> <p>Diseminasi direktori Negara; Pertukaran secara reguler kalender kegiatan pariwisata di dalam negeri; Tersedianya meja Informasi EAGA</p>	<p>Penguatan linkages dan jaringan;</p> <p>Direktori Organisasi Pariwisata EAGA dipublikasikan pada 4 bulan pertama tahun 2006 dan akan di update setelah itu; Kalender Kegiatan Pariwisata BIMP-EAGA diterapkan dan di diseminasi pada Januari 2006; Meja Informasi tersedia mulai 4 bulan pertama tahun 2006.</p>	Badan yang memimpin : Cluster JTD Pelaksana : BETC, BEBC, Organisasi Pariwisata Nasional, Badan dan Asosiasi Pariwisata Badan Monitor: Seknas dan BIMP-FC	Ongoing, 2006-2010
6.3.5 Mengembangkan bahan-bahan promosi	Kolateral promosi EAGA	Kolateral promosi diproduksi	Badan yang memimpin : Cluster JTD	Ongoing, 2006-2010

Formatted Table
Formatted: Superscript
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,71 cm, Tab stops: 0,71 cm, List tab + Not at 1,27 cm
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Finnish (Finland)
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0 cm + Tab after: 0,63 cm + Indent at: 0,63 cm, Tab stops: 0,76 cm, Left
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0 cm + Tab after: 0,63 cm + Indent at: 0,63 cm, Tab stops: Not at 0,76 cm
Formatted: Superscript
Formatted: Superscript
Formatted: Tab stops: 1,03 cm, Left + 1,09 cm, Left + 1,4 cm, Left + Not at 0,76 cm

PROGRAM/PROYEK/AKTIVITAS PRIORITY	TARGET OUTPUT	INDIKATOR KEMULAIAN	BADAN BERTANGGUNG JAWAB	PERIODE
EAGA yang serupa (contohnya: poster, brosur, video) dengan bantuan teknik dan dana dari rekan pembangunan (seperti: ASEAN Japan Centre, ADB, GTZ).	berkembang	dan diseminasi dimulai 4 bulan kedua tahun 2006.	Pelaksana: BETC, BEBC, Organisasi Pariwisata Nasional, Badan dan Asosiasi Pariwisata, rekan organisasi Badan Monitor: Seknas dan BIMP-FC	
6.3.6 Meningkatkan bagian dari budget/ dana nasional bagi program promosi dan pemasaran pariwisata EAGA.	Budget nasional yang regular bagi program pariwisata BIMP-EAGA yang teralokasi	2% bagian dari budget perwakilan pariwisata tahunan teralokasi pada 4 bulan ketiga tahun 2006.	Badan yang memimpin: Cluster JTD Pelaksana: Organisasi Pariwisata Nasional, Badan dan Asosiasi Pariwisata, BETC, BEBC Badan Monitor: Seknas dan BIMP-FC	2006-2010
6.3.7 Membantu pengurangan biaya perjalanan di dalam EAGA melalui: • Fasilitas biaya masuk carriers yang rendah di EAGA; • Perluasan "ASEAN Hip-Hop" promotion untuk cover kota-kota EAGA; • Waiving and/or reduction of travel tax; and • Visa exemption for extra-EAGA travel of selected countries.	Pengurangan biaya perjalanan di wilayah EAGA	Dukungan kebijakan dari pemerintah EAGA dalam arti pengurangan charges bandara are obtained; Tercapainya pelayanan penerbangan dengan biaya murah; Promosi tiket availed dan coverage hip-hop diperpanjang; Travel tax waived; Perjalanan bebas visa di wilayah EAGA	Badan yang memimpin: Cluster JTD Pelaksana: Cluster TUD, BETC, BEBC, Organisasi Pariwisata Nasional, Badan dan Asosiasi Pariwisata, Perwakilan Transportasi dan CIGS negara anggota Badan Monitor: Seknas dan BIMP-FC	January-December 2006, Ongoing until 2010
6.3.8 Mengejar program promosi pariwisata yang agresif dan terfokus bagi destinasi dan kegiatan-kegiatan, utilizing rute udara, laut dan darat EAGA yang ada dan berpotensi, untuk membantu sustain rute-rute ini.	Existing and new EAGA air, sea and land links sustained	Existing and new air, sea and land links sustained once they become operational	Badan yang memimpin: Cluster JTD Implementers: ITO Cluster, BETC, BEBC, Organisasi Pariwisata Nasional, Badan dan Asosiasi Pariwisata Badan Monitor: Seknas dan BIMP-FC	Ongoing, 2006-2010
6.3.9 Mengejar establishment of a passenger cruise line servicing EAGA points, including: • Celebes Cruise Line; • Borneo Cruise Line; and • STAR Cruises (pelayanan potensial yang melayani rute EAGA ketika found feasible).	Pendirian layanan pelayaran di wilayah tujuan EAGA yang terpilih	Layanan pelayaran beroperasi pada Juni 2006	Badan yang memimpin: Cluster JTD Pelaksana: Cluster TUD, BETC, BEBC, National Tourism Organizations, Tourism Boards and Associations, Transport Agencies of member countries Badan Monitor: Seknas dan BIMP-FC	2006-2010
6.3.10 Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata EAGA melalui: • Pencapaian standar kompetensi minimum	Peningkatan kualitas layanan pariwisata di wilayah EAGA	Kualitas layanan pariwisata ditingkatkan; Standar kompetensi minimum	Badan yang memimpin: Cluster JTD Pelaksana: Departmen Kebudayaan dan Pariwisata (Head of HRD Tourism Task	Ongoing, 2006-2010

Formatted Table

Formatted: Superscript

Formatted: Superscript

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Tab stops: 1,03 cm, Left + 1,08 cm, Left + 1,4 cm, Left + Not at 0,76 cm

Formatted: Finnish (Finland)

Formatted: Finnish (Finland), Superscript

Formatted: Finnish (Finland)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Bulleted + Level 1 + Aligned at: 0 cm + Tab after: 0,63 cm + Indent at: 0,63 cm, Tab stops: Not at 0,76 cm

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Tab stops: 0,76 cm, Left

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0 cm + Tab after: 0,63 cm + Indent at: 0,63 cm, Tab stops: Not at 0,63 cm + 0,76 cm

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Finnish (Finland)

Formatted: Bullets and Numbering

PROGRAM/PROYEK/AKTIVITAS PRIORITAS	TARGET OUTPUT	INDIKATOR KEMAJUAN	BADAN BANTUAN PELAKSANA	TALAS
<p>sumber daya manusia dalam sector pariwisata di wilayah EAGA;</p> <ul style="list-style-type: none"> Pencapaian program akreditasi bagi Establishment yang terkait pariwisata melalui implementasi standar ASEAN <i>Common Competency</i> di wilayah EAGA; Melakukan program edukasi dan pelatihan bagi personel pariwisata; Pembentukan program pertukaran tourism profesional. 		<p>dan program akreditasi diimplementasikan pada 2006; implementasi program pelatihan pada 2006</p>	<p>Force), BETC, BEBC, Organisasi Pariwisata Nasional, Badan dan Asosiasi Pariwisata Badan Monitor: Seknas dan BIMP-FC</p>	
<p>6.3.11 Menyediakan insentif dan kebijakan yang mendukung investor di sektor pariwisata BIMP-EAGA. Hal ini termasuk hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan <i>EAGA Tourism Investment Guide or Handbook</i>; Melobi insentif tertentu bagi investasi pariwisata di BIMP-EAGA. 	<p>Penyusunan dan diseminasi EAGA Tourism Investment Guide; Penyediaan insentif yang special bagi investasi pariwisata.</p>	<p>Penyusunan EAGA Tourism Investment Guide pada pertengahan 2006; Pemberian insentif diberikan kepada investor mulai tahun 2006</p>	<p>Badan yang memimpin: Cluster JTD Pelaksana: BETC, BEBC, Organisasi Pariwisata Nasional, Badan dan Asosiasi Pariwisata, Badan Perwakilan Investasi dan Perdagangan serta perwakilan industri dari negara anggota Badan Monitor: Seknas dan BIMP-FC</p>	2006-2010
6.4 Transport, Infrastructure and ICT Development (TID) Cluster				
<p>6.4.1 Menyelesaikan proyek infrastruktur jalan EAGA, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pan-Borneo Highway Network Malinau-Sabah Border Section; Pan-Borneo Highway Network Pontanak-Palangkaraya-Banjarnasin-Balikpapan Section; Tarakan – Tawau (jalan menuju pelabuhan utama Kalimantan di sebelah Tarakan dan dari pelabuhan utama menuju Tarakan dengan Ferry). 	<p>Penyelesaian proyek</p>	<p>Proyek dilaksanakan tidak lebih dari tahun 2008</p>	<p>Badan yang memimpin: Cluster TID Pelaksana: Departemen Perwakilan Transportasi dan Infrastruktur negara anggota Badan monitor: BIMP-FC dan Seknas</p>	2006-2010
<p>6.4.2 Mengembangkan pelabuhan/ wharves yang baru dan lebih maju di EAGA, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Facilities container handling di Karanggau Port (Balikpapan); Wharf and extension wharf di Jayapura Port; Pelabuhan Sepanggar; 	<p>Penyelesaian proyek pelabuhan</p>	<p>Proyek diselesaikan pada 2010</p>	<p>Badan yang memimpin: Cluster TID Pelaksana: Departemen Perwakilan Transportasi dan Infrastruktur negara anggota, BEBC Badan Monitor: Seknas dan BIMP-FC</p>	2006-2010

PROGRAM/PROYEK/AKTIVITAS PRIORITY	TARGET/OUTPUT	INDIKATOR KEMAJUAN	BADAN/BADAN PELAKSANA	TAHAP/TAHAP
<p>• Pelabuhan Labuan.</p> <p>6.4.3 Mempromosikan layanan shipping line di Greater Sulu-Sulawesi Sea Ring (GSSR) dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan GSSR <i>Intermodal Development Study</i>; • Mengejar perkembangan sistem transportasi multi-modal EAGA; • Mengembangkan RO-RO shipping dan pelabuhan di pelabuhan EAGA terpilih (seperti, Sulawesi, Maluku Utara, Papua, Mindanao, Sabah); • Mengajukan pioneer vessels untuk membantu rute domestic di GSSR. 	Operasionalisasi layanan pengiriman yang baru	Operasionalisasi layanan pengiriman yang baru dimulai tahun 2006	Badan yang memimpin : Cluster TIID Pelaksana : Departemen Perwakilan Transportasi negara anggota, BEBC, rekan organisasi Badan Monitor : BIMP-FC dan Seknas	2006-2008
<p>6.4.4 Meningkatkan pendirian dan sustainability dari rute udara, laut dan darat EAGA yang utama untuk membuka koneksi perdagangan, perjalanan dan pariwisata, termasuk pembentukan <i>code share multipoint air links</i> di EAGA:</p> <p><u>RUTE YANG ADA (SEJAK SEPT. 2005):</u></p> <p><u>Rule Udara:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Davao-Manado (Merpati) • Kuching-Pontianak (MAS/Batavia) • KK-Brunel (RBA/MAS) • Tarakan - Tawau (MAS) <p><u>Rule Laut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zamboanga-Sandakan • Nunukan-Tawau <p><u>Rule Darat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sabah-Brunel-Sarawak • West Kalimantan-Sarawak-Bandar Seri Begawan <p><u>RUTE DIMANA LAYANAN TRANSPORTASI</u></p>	Peningkatan jumlah rute udara, laut dan darat EAGA; Peningkatan jumlah penumpang pada layanan transportasi udara, laut dan darat EAGA	Tercapainya 2 rute udara, laut, dan darat EAGA per tahun	Badan yang memimpin : Cluster TIID Pelaksana : Cluster JTD, Departemen Perwakilan Transportasi dan Infrastruktur negara anggota, Operator Lokal Pelayanan Udara/Laut/Darat, Organisasi Pariwisata, BEBC Badan monitor: Seknas dan BIMP-FC	2006-2008

Formatted Table

Formatted: Superscript

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,71 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Tab after: 1,27 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: Not at 1,27 cm

Formatted: Finnish (Finland)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Swedish (Sweden)

PROGRAM/PROYEK/AKTIVITAS PRIORITAS	TARGET OUTPUT	INDIKATOR KEMAJUAN	BADAN/BADAN PELAKSANA	WAKTU
<p>SEBELUMNYA PERNAH DITANGGUHKAN:</p> <p>RUTE UDARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zamboanga-Sandakan (South Phoenix) • Zamboanga-KK (South Phoenix) • Puerto Princesa-KK (Layang-Layang) • Davao-Manado (Bouraq) • Kuching-Bandar Seri Begawan • Kota Kinabalu-Balikpapan (MAS) • Bandar Seri Begawan -Balikpapan • Kota Kinabalu – Manado (MAS) • Kuching – Balikpapan (MAS) <p>RUTE LAUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • General Santos-Bitung <p>RUTE BARU YANG DIAJUKAN:</p> <p>Rule Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Davao-Melanguane (Sulawesi Utara) • Davao-Kota Kinabalu-Bandar Seri Begawan • Davao City-Bandar Seri Begawan • Zamboanga-Labuan • Tawau-Balikpapan-Manado • Tawau-Zamboanga-Makassar • Pontianak-Kuching-Bandar Seri Begawan • Makassar-Balikpapan-Bandar Seri Begawan <p>Rule Laut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarakan-Tawau (RORO) • Labuan-Muara, Brunel Darussalam (RORO Passenger Ferry) • Labuan-Menumbok, Sabah (RORO Passenger Ferry) • Muara, Brunel DS -Menumbok, 				

Formatted Table

Formatted: Superscript

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Swedish (Sweden)

PROGRAM/PROYEK/ AKTIVITAS PRIORITY	TARGET OUTPUT	INDIKATOR KEMAJUAN	BADAN/BADAN PELAKSANA	TIMEFRAME
<ul style="list-style-type: none"> Sabah (RORO Passenger Ferry) Bandar Seri Begawan – Labuan – Kota Kinabalu Mindanao-Labuan-Brunei DS-Sabah Pontianak-Kuching-Bandar Seri Begawan-Labuan-KK Bongas, Tawi Tawi-Lahad Datu, Sabah, Malaysia (SRN Fast Saacrafts) Zamboanga-Tarakan Brookes Point, Palawan-Kudat, Sabah Bitung (Sulawesi)-KK-Bitung Makassar (Sulawesi)-KK-Makassar <p>Rute Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> Simangaris (Kalimantan Timur) - Serudong (Sabah) Tawau-Tarakan (pelabuhan terletak di sebelah Tarakan) <p>*Roll-On/Roll-Off (RORO)</p>				
6.4.5 Mendirikan layanan Inter-city bus express di EAGA.	Operasionalisasi layanan Inter-city bus express	Operasionalisasi layanan Inter-city bus express pada 2006	Lead Body : Cluster TIID Implementers : Cluster JTD, Departmen Perwakilan Transportasi dan Infrastruktur dari negara anggota, Operator Pelayanan Transportasi Darat Lokal, Organisasi Perwisata, BEBC Badan Monitor: Seknas dan BIMP-FC	2006-2010
6.4.6 Implementasi perjanjian pergerakan lintas batas barang dan manusia, seperti ASEAN Framework Agreement on Goods in Transit, di focus area EAGA seperti : <ul style="list-style-type: none"> Pontianak, Kuching-Bandar Seri Begawan; Sarawak-Brunei. 	Perjanjian transportasi dilaksanakan secara penuh	Protocols of ASEAN Agreement terimplementasi secara penuh pada 2007	Badan Yang memimpin : TIID Cluster Pelaksana : Departemen Perwakilan Transportasi negara anggota, Operator Pelayanan Transportasi Darat Lokal, BEBC Badan Monitor : Seknas dan BIMP-FC	2007 onwards
6.4.7 Meningkatkan fasilitas dan layanan ICT di wilayah EAGA, terutama di area perbatasan.	Peningkatan layanan ICT di area perbatasan	Peningkatan 5% coverage of wireless telephone dan internet	Lead Body : Cluster TIID Pelaksana : Departemen Perwakilan	December 2006-2010

PROGRAM/PROYEK/AKTIVITAS PRIORITAS	TARGET OUTPUT	INDIKATOR KEMAJUAN	BADAN/BADAN PELAKSANA	TIMELINE
untuk memfasilitasi lintas batas interaksi ekonomi yang lebih besar. Hal ini dapat termasuk beberapa pengukuran sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan tarif IDD/VoIP; • Home Country Direct system; • Common calling cards. 		coverage di area perbatasan pada 2010	telekomunikasi dari negara anggota, Operator Pelayanan Telekomunikasi Lokal, BEBC Badan Monitor : Seknas dan BIMP-FC	
6.5 Monitoring and Evaluation				
6.5.1 Konguitasi dengan sektor swasta dan agensi /perwakilan terkait dalam indikator/pengukuran performan.	Indikator dan pengukuran performan telah diadopsi	Indikator/ pengukuran performan diadopsi pada 2006	Badan yang memimpin : BIMP-FC Pelaksana : BIMP-FC, Seknas, BEBC, Clusters Badan Monitor: BIMP-FC dan Seknas	2006
6.5.2 Memformulasikan, mengadopsi dan mengimplementasikan sistem M & E yang efektif bagi monitoring implementasi program, proyek dan aktifitas flagship EAGA.	Sistem M & E berkembang dan terimplementasi	Sistem M & E terlaksana pada pertengahan 2006	Badan yang memimpin : BIMP-FC Pelaksana : BIMP-FC, Seknas, BEBC, Clusters, rekan organisasi Badan Monitor: BIMP-FC dan Seknas	2006-2010
6.5.3 Menyajikan dan diseminasi laporan kemajuan implementasi aktifitas EAGA secara reguler.	Penerimaan laporan reguler	Penerimaan laporan reguler dan tahunan kepada stakeholders EAGA	Badan yang memimpin : BIMP-FC Pelaksana : BIMP-FC, Seknas, BEBC, Clusters Badan Monitor: BIMP-FC dan Seknas	2006-2010

NOTE: 1 Program dan aktivitas program di consider dalam Action Plan yang terkait dengan perjanjian ASEAN. Action Plan akan didukung oleh Cluster Action Plans yang lebih detail dan akan dikembangkan oleh masing-masing empat cluster EAGA.

2 The lead bodies for the programs, projects and activities are indicated. The other organizations, including the various public and private agencies under them, take on implementing and/or coordinating responsibilities. Implementing Bodies include the following: BIMP Facilitation Center (BIMP-FC), BIMP-EAGA Business Council (BEBC), National Secretariats (NS) of the member countries, Small and Medium Enterprise Development (SME) Cluster, Joint Tourism Development (JTD) Cluster, Natural Resources Development (NRD) Cluster, Transport, Infrastructure and ICT Development (TIID) Cluster, BIMP-EAGA Tourism Council (BETC), BIMP-EAGA Media and Communicators Association (BEMCA), various government agencies in the member countries, and Partner Organizations (e.g., ADB, GTZ, ASEAN, ASEAN Japan Centre, WWF).

Formatted Table

Formatted: Superscript

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: Bold

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Portuguese (Brazil)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Lampiran 9

HASIL WAWANCARA DENGAN TIUR RUMONDANG (SELASA, 10 MARET 2009, 13.00)

1. Struktur organisasi BIMP-EAGA ?

Ada beberapa struktur menurut terminologi yang digunakan pada kerjasama sub-regional BIMP-EAGA. Namanya *Growth Triangle Structure Mechanism* (struktur yang dianut secara bersama negara anggota). Semuanya mengikuti mekanisme ini dalam susunan mekanisme pelaporan atau hierarki keputusan. Yang paling tinggi adalah Summit atau pertemuan kepala negara (tingkat tertinggi) dalam bahasa Indonesia kita sebut KTT. Kesempatan pertemuan biasanya dilakukan ketika ada KTT ASEAN, hal ini disebabkan sulit untuk membuat para kepala negara kerjasama EAGA untuk saling bertemu atau duduk bersama untuk kepentingan kerjasama BIMP-EAGA (dalam KTT ASEAN kita memasukkan jadwal Summit BIMP-EAGA). Dibawahnya, Summit mendapatkan laporan dari tingkat menteri, pertemuannya disebut Ministerial Meeting (hasil Ministerial Meeting dilaporkan kepada Summit).

Lihat bagan struktur organisasi BIMP-EAGA.

Bagan yang ada tergantung dari tiap negara, kalau di Indonesia unsur pemerintah dan private digabungkan (jadi pada strukturnya; kadin jadi anggota—tapi kalau di pers-pers yang dikeluarkan kan ada unsur kadinnnya, ada unsur pemerintahnya dan unsur private)—di negara lain kita tidak tahu, itu tergantung dari kebijakan negara masing-masing. Tetapi yang tetap sama adalah dari Minister, Senior Official dan Nasional Secretariat, setiap negara mempunyai ketiga hal tersebut. Dibawahnya ditunjuk *vocal point* yang akan mewakili negara tersebut dalam Working Group. Mekanismenya bebas tapi *private sector* itu punya organisasi sendiri, yang disebut BEBC atau kalau di Indonesia disebut asosiasi (asosiasi rumput laut, dll), BEBC dikoordinasikan oleh BEBC Secretariat yang dibentuk oleh *private sector* keempat negara atau perwakilannya, perwakilannya kalau di Indonesia kita sebut Country Director. Jadi Indonesia menunjuk beberapa Country Director untuk mewakili. Dari sini mereka memiliki BEBC Board Director. Dari garis birokrasi mereka mempunyai level yang sama dengan Senior Official, jadi Board of Director BEBC melapor pada Senior Official Meeting. Senior Official Meeting pada masing-masing negara bertemu di tingkat Senior Official. Indonesia National Secretariat dan National Secretariat negara lain berkoordinasi dengan BIMP FC yang ada di kota Kinabalu (seperti ASEAN Secretariat) – koordinasi dengan negara lain Seknas melalui atau dengan BIMP FC. Dari BIMP FC (yang mendapat laporan dari berbagai Seknas masing-masing negara anggota—BIMP FC merupakan pusat data) maka laporan akan dibawa pada Senior Official Meeting (jadi SOM merujuk pada laporan dari BIMP-FC—isi dari laporan dapat berupa: apa saja kebijakan yang sudah dibuat WGC, apa saja kebijakan diantara seknas, apa aja kebijakan diantara *private sector*) → pada bagan garis hitam menunjukkan garis fungsi koordinasi dan komunikasi.

Perbedaan WG dan WGC ?

Hal tsb ada semenjak tahun 2004, tadinya pada tahun 2003 ada 11 WG. Hanya WG tsb dilihat terlalu banyak maka diputuskan untuk mengelompokkan pada 4 cluster, jadi cluster terdiri beberapa sektor atau lintas sektor. Contohnya: natural resources development—terdiri dari 4 WG—pertanian, kehutanan, perikanan, energi (beberapa sektor yang memiliki kesamaan digabungkan menjadi satu—produknya similiar—mekanisme pengembangannya sama dan WG satu dgn lainnya saling berhubungan), Cluster Transport Infrastructure Development (Infrastructure dan Transport kan memiliki hubungan—kita mau mengembangkan transport tapi jalannya udah ada atau belum, mereka kan harus kerjasama—kita gabung-gabungkan mereka dan dari situlah kita sebut itu cluster). WG tidak dihapus, mereka ada, hanya mekanismenya mereka digabungkan dari 11 menjadi 4. WG tidak dihapus tapi mereka bukan struktur formal, jadi mereka bisa bertemu bisa tidak, tapi kalau Cluster mereka harus bertemu. Mekanisme pertemuannya juga tidak tetap—untuk WG, mereka dapat bertemu sehari sebelum pertemuan para cluster. Kemudian, cluster JTD terdiri dari 1 sektor yakni Tourism—mereka tidak mengkoordinir lebih dari 1 sektor, maka mereka tidak mengadakan pertemuan dan ketika ketemuan Cluster ya itulah pertemuan mereka. Hanya dengan perkembangan yang ada, banyak Cluster yang mengadakan hubungan dengan Cluster lain, misalnya; pariwisata dengan penerbangan—orang ingin mengembangkan ekowisata di titik point tertentu, tapi tidak ada schedule flightnya, mereka harus berhubungan dengan departemen perhubungan—bisa tidak mereka (dephub) menginisiatifkan rute2 tertentu yang dapat mendorong permintaan pariwisata di satu point, mereka harus kerjasama, akhirnya kita punya mekanisme lagi namanya Convergence—penyatuan, pertemuan yang sifatnya occasional/tergantung kebutuhan dan struktur formalnya seperti ini, Cluster melapor kepada SO dengan terlebih dahulu dikoordinasikan ke FC baru melapor pada MM, karena adanya isu cross sectoral seperti itu maka itulah fungsinya FC, kenapa dia harus ada ditengah2 karena dia misalnya; harus mengingatkan satu cluster berbicara tentang jalur penerbangan, cluster yang lain membicarakan tentang pengembangan pariwisata dan fungsi FC untuk mengingatkan kalian itu punya project yang hampir sama dan berhubungan, saling menunjang—dia memberikan advice pada cluster2 bahwa kalian harus bekerjasama—untuk mengkoordinasikan jalur informasi (isu yang pariwisata dilaporkan ke dephub dan sebaliknya).

2. Perubahan EABC dengan BEBC?

EABC sebetulnya lebih luas, tidak beda dengan ASEAN. Akhirnya mereka membentuk yang khusus. Agar lebih jelas mau kemana dan its belong to whom.

3. Lead agencies di Indonesia tidak matang.

4. Dalam agenda pertemuan, khususnya Indonesia dilihat potensi kerjasama yang kita bangun dengan negara lain dengan merujuk pada program pengembangan nasionalnya, makanya mereka harus mengetahui posisi sebelumnya apa, posisi Indonesia untuk sektor ini apa—misalnya: mau kerjasama bibit kelapa sawit,

Indonesia bilang ke Malay, boleh gak kita beli bibit kelapa sawit dari Malay dan Malay bilang kebijakan mereka tidak bisa dijual, harus kerjasama—Malay bisanya mereka berinvestasi di lahan Ind dengan memakai bibit Malay. Tetapi ketika Ind bilang ada keterbatasan terhadap penanaman modal asing, di sektor ini tidak boleh tapi ada kemungkinan bisa dilakukan/harus pakai dibawah 50 persen sharing saham dengan perusahaan Ind lokal. Jadi harus tukar menukar informasi dan ketika ada negosiasi kerjasama atas nama BIMP-EAGA lho—boleh tidak atas nama BIMP-EAGA anda melonggarkan kebijakan ini, kalau bisa ya bisa kalau tidak ya tidak, hal tsb tergantung dari tiap2 negaranya, departemannya-mereka punya full authority.

5. BIMP-EAGA pada saat krisis

Pada saat itu banyak kesepakatan yang tidak jalan dan di drop, karena memang masing2 negara fokus pada perbaikan ekonomi di dalam negerinya. Sehingga pada saat itu mereka punya judul yang namanya revitalisasi BIMP-EAGA, bentuknya vacuum atau jalan tapi gak ada hasilnya—kurang jelas. Tapi yang pasti dampaknya gak ada satupun kegiatan yang jalan karena semua konsentrasi pada negaranya masing2. Selama 3 tahun itu tidak ada pergerakan.

Di Indonesia, vocal pointnya (koordinasi sub-regional) pindah2/sebelum 2001—dulu pertama kali wacana di dept pertambangan, dept kehutanan. Semenjak 2001-sekarang terpusat di kantor menko perekop. Jadi SOM nya (perwakilannya) kadang dari mana-kadang dari mana, tapi semenjak 2001 ada keppres no 13—yang menentukan ka tim koordinasi sub-regional untuk Ind adalah menko perekop, semenjak itu SO nya juga dari menko perekop.

6. Kaitan BIMP-EAGA dengan AEC

Kalau dibilang ada hubungannya pasti ada, karena kesepakatan di BIMP-EAGA merujuk pada kesepakatan ASEAN, tidak lepas dari situ, cuma kesepakatan ASEAN banyak mengikat secara politik dan secara istilah kasarnya masih diawang2, contoh: (entah pada tahun berapa) ada kesepakatan ASEAN Open Sky Policy-operator penerbangan di negara ASEAN bebas untuk terbang antar negara ASEAN. Di sektor penerbangan ada yang namanya hak penerbangan kedua, ketiga,....ketujuh. contoh: operator penerbangan misalnya dari Indonesia kan bisa ke Malay-Kuching, bawa penumpang Ind diturunkan ke Kuching dan kemudian balik lagi ke Ind (hak penerbangan keempat atau ketiga-mbak tiur lupa). Tapi dengan free freedom flight ride-hak penerbangan kelima dari Indonesia mendarat di Kuching mengambil penumpang domestik Malay dan dibawa kenegara ketiga-Brunei, yang di ASEAN kesepakatannya dari 2003 atau 2004 ada tapi mekanisme implementasi baru 2008 kemarin mereka setuju. Karena apa?, masing-masing negara harus menentukan point-point open skynya dimana. Negara di ASEAN yang sudah mengaplikasikan hak penerbangan kelima hanya Singapura. Dalam kasus open sky policy tetap melarang adanya penumpang domestik yang menaiki operator pesawat negara lain dan kemudian dibawa ke tujuan domestik pula (hak seperti itu hanya boleh dilakukan oleh operator domestik)—contoh: dari Malaysia pesawat menurunkan penumpang di Indonesia dan mengangkut penumpang domestik untuk pergi ke Surabaya (tidak

boleh) tapi jika tujuannya ke negara lain itu boleh. kesepakatan implementasi open sky di ASEAN belum jalan tetapi di BIMP-EAGA sepakat dan bisa hanya ditentukan point-point tertentu (wilayah2 tertentu—maka dibukalah penerbangan dari Pontianak ke Kuching, ke Bandar Sri Begawan) walaupun implementasinya tidak secepat itu tapi yang penting kesepakatan negaranya sudah ada.

7. Code share dan on stop over

Code share bersifat profil dan P to P. On stop over lebih pada mendukung pariwisata, schedule tidak tiap hari tapi beberapa hari sekali, stop tapi pakai penerbangan yang sama.

8. Ada dua dokumen; roadmap—masih di awang2, ukurannya kurang jelas, cakupan2 besarnya dulu (peningkatan perdagangan rumput laut) dan action plan—lebih kepada rencana kerja, pengakomodiran, lebih realistis (untuk meningkatkan kerjasama rumput laut dengan cara; kita buat dulu standarisasi Ind dengan negara lain-sama atau tidak, aturan kepabeanannya untuk ini sudah cukup mendukung atau tidak—ada step2nya untuk mencapai yang diinginkan oleh roadmap—capaian2 staging inilah yang dimasukkan ke action plan, dengan cara menyusun dan membuat apa yang lebih dulu). Action Plan menjawab how-how dari roadmap.

Meskipun sudah mempunyai action plan yang 5 tahunan, kita juga punya action plan yang pertahun—semuanya berhubungan. Rujukan dari misi tertuang di roadmap, rujukan dari roadmap tertuang di action plan.

9. Visi misi BIMP-EAGA—meningkatkan perdagangan, investasi dan pariwisata.

10. Summit 1 BIMP-EAGA pada tahun 2003 di Bali. Roadmap 2006-2010 dibuat sesudahnya. Jadi ketika BIMP-EAGA berjalan belum ada pegangan untuk melakukan kerjasama sesuai dengan pengelompokkan yang lebih rinci atau detail.

11. Peran partner, ADB- sebagai regional development adviser, karena ADB mempunyai program pengembangan di Asia maka mereka mempunyai departemen yang namanya South East Asia Departement, mereka punya program2 pengembangan dan mereka memberikan fokus dalam membantu BIMP-EAGA.

Indonesia—Ada juga Development Partner atau partner organization yakni negara-northern territory yaitu Australia dan mekanismenya—kalau mereka memandang punya potensi untuk kerjasama dengan negara2 BIMP-EAGA mereka boleh request. Ada juga Jepang dan kita yang request karena tanpa disadari sudah banyak bantuan mereka terutama untuk pariwisata, akhirnya kita meminta Jepang—mau gak mereka jadi development partner kita. Lalu yang sedang proses juga China. Tergantung bagaimana strategi negara masing, Indonesia secara bilateral sudah punya strategi sendiri.

Halal Poetry-sertifikasi halal internasional-yang ngemas Brunei

12. Untuk satu kegiatan ekowisata terdapat syarat2nya. Jadi tidak hanya melakukan perjalanan wisata dan melihat keindahan alam.
13. Midterm review-perbaikan dari review pada pertengahan berjalannya roadmap.
14. MTR Task Force-susunan baru, dibuat difinal pada tahun 2008. Supaya bentuknya tidak permanen-sifatnya sementara. Bisa dihapus, ada limit tugasnya, bukan menjalankan inisiatif kerjasama, tugasnya untuk mendukung cluster2 dalam menunjang pergerakan orang dan barang.
15. Jangka pendeknya-consolidated action plan.
16. Jangka panjang merujuk pada visi-misi.



Lampiran 10

Hasil Wawancara dengan Drs. Agus Priyono MM, Kasubdit Keterpaduan Antar Wilayah, Direktorat Produk Pariwisata, Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Depbudpar RI

1. Seperti apakah konsep ekowisata yang dikembangkan di Indonesia?

Ekowisata adalah "Penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami yang mendukung upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (*International Ecotourism Society*)". Secara konseptual ekowisata dapat didefinisikan sebagai "Suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah setempat".

2. Apa saja upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung serta menjalankan sektor pariwisata melalui penerapan/pengembangan ekowisata?

Upaya-upaya yang telah dan akan dilaksanakan dalam pengembangan ekowisata Indonesia antara lain adalah :

- a. Melaksanakan berbagai pertemuan dengan pelaku pariwisata baik dalam tatanan lokal, nasional, sub regional (BIMP EAGA, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina Growth Triangle) maupun ASEAN untuk menyepakati pemahaman dan prinsip-prinsip pengembangan ekowisata termasuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang dikembangkan di kawasan Timur Indonesia.
- b. Mendorong pengembangan dan penjualan paket ekowisata oleh pelaku pariwisata khususnya biro perjalanan wisata.
- c. Menyusun standarisasi pemandu ekowisata Indonesia yang mengacu pada standar pemandu ekowisata ASEAN.

- d. Melaksanakan sejumlah kajian dan studi mengenai pengembangan ekowisata di berbagai destinasi Indonesia.
- e. Menyusun pedoman kriteria dan indikator ekowisata (KIEI) dalam rangka mendorong pengembangan ekowisata Indonesia.
- f. Menyusun Permenbudpar mengenai KIEI sebagai acuan sekaligus mendorong pelaku pariwisata mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dan memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya-upaya konservasi alam dan budaya Indonesia, baik yang tangible (nilai budaya) maupun tangible (sejarah dan purbakala).
- g. Sesuai dengan UU 10 tahun 2009 mengenai kepariwisataan, Depbudpar akan memberikan penghargaan pada pelaku ekowisata termasuk masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan budaya, dan pelibatan masyarakat khususnya masyarakat di sekitar kawasan daya tarik wisata.
- h. Menyiapkan panduan pengelolaan ekowisata Indonesia sebagai acuan standar dalam manajemen destinasi ekowisata.

3. Apakah ada faktor penghambat atau beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihak pemerintah Indonesia dalam merealisasikan ekowisata?

Belum adanya pedoman pengembangan ekowisata Indonesia dan masih terdapat perbedaan tajam antara ahli mengenai konsep dan prinsip ekowisata. Perbedaan para ahli tersebut terjadi sebagai akibat kubu ahli yang satu mengatakan bahwa basis ekowisata adalah alam, sedangkan yang satunya lagi basis ekowisata adalah alam dan budaya. Selain itu, perbedaan juga terjadi antara ahli dan pelaku ekowisata yaitu yang satu mengatakan ekowisata adalah konsep dan yang satu laku ekowisata adalah produk.

4. Wilayah atau objek wisata mana yg menurut Departemen Budaya dan Pariwisata lebih berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek ekowisata?

Wilayah yang memiliki potensi ekowisata adalah kawasan taman nasional, kawasan cagar budaya seperti TN Ujung Kulon (Jabar), TN Gunung Rinjani (NTB), TN Tanjung Puting (Kaltim), TN Lorenz (Papua) dan TN Bunaken (NTB), Trowulan (Jatim), Sangiran (Jawa Tengah), Toraja (Sulsel), Muaro Jambi (Jambi) dan Sawah Lunto (Sumbar).

5. Sudah sejauhmana peran pemerintah dalam mendukung realisasi ekowisata?

Peran pemerintah dalam pengembangan ekowisata antara lain berkerjasama dengan Departemen Kehutanan untuk mengembangkan 5 (lima) TN yaitu TN Bitung Kerihun, TN Danau Sentarum (Kalbar), TN Baltimurung (Sulsel), TN Rinjani (NTB) dan TN Bunaken (Sulut) sebagai destinasi Ekowisata. Selain itu, Depbudpar c.q. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (PDP) bekerjasama dengan WWF Indonesia untuk mengembangkan kawasan Heart of Borneo (HOB) sebagai destinasi ekowisata yang berdaya saing global.

Depbudpar bersama pelaku pariwisata Indonesia termasuk Pemprop dan Pemkab yang memiliki potensi ekowisata melaksanakan promosi ke berbagai bursa pariwisata mancanegara seperti WTM London, IB Berlin, JATA (Japan Travel Agent) Travel Fair, ASEAN Tourism Forum. Depbudpar c.q. Direktorat Jenderal PDP dan Direktorat Jenderal Pemasaran dan Ditjen juga memfasilitasi penyiapan dan penjualan paket wisata ekowisata Indonesia

6. Bagaimana hubungan antara pihak swasta dan pemerintah daerah?. Adakah mekanisme khusus dalam menjalankan konsep ekowisata di Indonesia?

Pemerintah dan swasta selalu melaksanakan kemitraan dalam pengembangan pariwisata termasuk pengembangan ekowisata Indonesia yaitu antara lain:

- a. Pemerintah mempromosikan citra produk dan destinasi, sedangkan pihak swasta mempromosikan paket wisata ekowisata.

- b. Pemerintah C.q. Depbudpar bersama instansi terkait di tingkat pusat dan daerah menyiapkan daya tarik yang didukung fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat sebagai destinasi wisata yang atraktif, aman dan nyaman untuk dikunjungi, sedangkan swasta bekerjasama dengan masyarakat khususnya masyarakat di sekitar kawasan daya tarik menyiapkan kunjungan ekowisata di berbagai destinasi ekowisata karena kalau masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan ekowisata tidak akan berkunjung ke destinasi tersebut lagi.
- c. Mekanisme khusus dalam menjalankan ekowisata Indonesia adalah berdasarkan KIEI yang meliputi antara lain:
- Memiliki kepedulian tinggi terhadap konservasi sumber daya alam dan budaya;
 - Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengembangan pariwisata, menempatkan masyarakat khususnya masyarakat di kawasan daya tarik sebagai subyek (bukan obyek) mengingat sesungguhnya adat istiadat (living culture) masyarakat terutama terkait dengan upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan budaya juga merupakan daya tarik wisata.
 - Memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar dan pemerintah daerah;
 - Memberikan pengalaman rekreatif dan sekaligus pengalaman edukatif wisatawan;
 - Mengendalikan 4 (empat) unsur di atas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan terpadu.

7. Bagaimana dengan peran masyarakat?. Apakah terdapat mekanisme khusus dari pemerintah pusat dalam pemberdayaan masyarakat lokal bagi pengembangan ekowisata?

Peran masyarakat dalam pengembangan ekowisata adalah sentral, selain sebagai faktor penentu terlaksananya pengembangan berkelanjutan (preservasi alam dan

budaya) sekaligus masyarakat tersebut (living culture) merupakan daya tarik wisata.

Mekanisme khusus pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari KIEL, hanya saja dapat pemberdayaan masyarakat bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah namun dilaksanakan seluruh pelaku ekowisata khususnya yang terlibat langsung dalam kegiatan ekowisata yaitu antara Biro Perjalanan, Pemandu Wisata dan LSM yang peduli dengan konservasi baik lokal maupun internasional.

8. Adakah kebijakan khusus dalam pengembangan ekowisata di Indonesia?

Belum ada kebijakan khusus secara nasional karena potensi ekowisata yang dimiliki masih belum dimanfaatkan secara optimal namun dalam tataran mikro per destinasi sudah tentu harus memperhatikan carrying capacity atau daya dukung lingkungan yang antara lain diatur melalui pembatasan jumlah dan jam kunjungan termasuk jangkauan kunjungan wisatawan dalam rangka melaksanakan pembatasan-pembatasan yang diperlukan untuk melindungi daya tarik wisata agar tetap lestari dan berkelanjutan.

Lampiran 11

Hasil Wawancara dengan Tiur Rumondang, Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA

1. Latar belakang dari pembentukan HOB dan Sulu-Sulawesi berawal dari negara yang bersangkutan ataukah dari WWF?. Atau dari beberapa kelembagaan yang kemudian bersatu dan terlahirlah HOB dan SSME?

HOB (dan juga Coral Triangle Initiative atau CTI) lebih cenderung saya sebut NGO driven, karena WWF salah satunya yang memulai inisiatif tersebut. Namun karena wilayah yang terkait dengan inisiatif tersebut adalah milik beberapa negara, maka inisiatif ini disosialisasikan ke masing-masing negara terkait dan akhirnya diterima sebagai konsep regional.

2. Dengan adanya HOB dan Sulu-Sulawesi, Apakah masyarakat lokal mempunyai kelembagaan khusus yang mewadahi mereka dalam realisasi ekowisata?

Kalau yang kamu sebut masyarakat lokal adalah masyarakat secara langsung, jelas tidak ada kelembagaan. Tapi karena pemerintah sudah berkomitmen dengan inisiatif tersebut, maka pemerintahlah yang harus membangun kelembagaan melalui Pemda, barulah Pemda yang membangun berbagai program aktifitas yang terkait dan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam komponen implementasinya.

3. Apakah pihak swasta memiliki kebijakan masing-masing dalam mengembangkan ekowisata?

Pihak swasta saat ini sudah mempunyai kesadaran tersendiri untuk ikut serta dalam pelestarian lingkungan, dikarenakan pemerintah juga telah membuat batasan yang membuat swasta mau tidak mau ikut ambil bagian. Namun kontrol nya masih penuh

dimiliki pembuat regulasi yaitu government. Yang saya tahu, swasta sangat minim memiliki edukasi tentang ekowisata, sehingga penerapannya sering salah. Pihak swasta saat ini lebih banyak berperan lewat program CSR (corporate social responsibility) ketimbang langsung berperan dalam pelestarian lingkungan dengan membuat produk ekowisata. disamping pasarnya masing harus dibangun, konsep pemanfaatan masyarakat lokal pada ekowisata sangat membutuhkan peranan pemerintah.

4. Konsep ekowisata di BIMP-EAGA mengadopsi konsep dari Eropa, Amerika atau Asia?

Konsep ekowisata sudah ada sejak tahun 80 an, termasuk di Indonesia. Saya kurang tahu pasti BIMP EAGA mencontoh siapa, tapi yang pasti, masing-masing pemerintah anggota BIMP EAGA sudah punya program ekowisata, yang didorong BIMP EAGA adalah untuk membuat program ini lebih berjalan cepat mengingat wilayah BIMP EAGA adalah menyediakan seluruh komponen kegiatan wisata dengan konsep eko. Jadi harus dimanfaatkan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat lokal, dan bukan hanya peningkatan wisatawan dengan konsep ekowisata semata.

5. Apakah benar bahwa konsep ekowisata BIMP-EAGA lebih mengacu pada olahraga dan hiburan dalam menarik perhatian wisatawan?

Tidak, kalau kamu mengerti apa saja komponen dari kegiatan yang disebut eko wisata, maka olahraga dan hiburan hanyalah bentuk kecilnya. BIMP EAGA menganut konsep ekowisata yang normal, yaitu yang memiliki komponen pelestarian alam dan pemanfaatan masyarakat lokal. tour wisata ke hutan di kalimantan tidak dapat disebut ekowisata, jika mereka tinggal di hotel bintang lima yang dibangun di tengah hutan. Tapi jika tour bisa meminta masyarakat setempat menyewakan penginapan. Jika mereka tinggal dengan masyarakat setempat, selain mendapatkan uang dari menyewakan kamar di rumah mereka, mereka dapat menjual kerajinan tangan buatan desa tsb, dan itu adalah pendapatan tambahan. Yang jadi persoalan, jika wisatawannya bule, apa orang setempat bisa berkomunikasi? jika mereka menyewakan kesederhanaan rumah tinggal tradisional

mereka, apakah masyarakat lokal dapat menjamin kebersihannya? dari sisi inilah ekowisata memerlukan proses edukasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mampu menyediakan kawasan wisata di daerah mereka sendiri, tanpa merusak lingkungan aslinya. Eko wisata tidak sulit dan masih banyak orang salah mengerti esensinya, dan komponen paling mahal adalah peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menjadi penyedia wisata di daerah mereka sendiri.

